# KETUHANAN YANG MAHA ESA

## Perspektif Lintas Iman

*Prolog*
**Prof. Dr. H. Machasin, MA**

*Epilog*
**Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum**

# KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Perspektif Lintas Iman**

# KETUHANAN YANG MAHA ESA
## Perspektif Lintas Iman

Para Penulis

Andreas A. Yewangoe • Adji Samekto • Al Makin • Muhammad Sabri • Machasin • Sahiron Syamsudin • Moh. Tamtowi • Leonard C. Epafras • Baskara T. Wardaya • I Gede Suwinda • I wayan Wastawa • Suhadi Sendjaja • Budi Santoso Tanuwibowo • Kristan • Sasmito Gati • Fahrudin Faiz • Arya Prasetya • G. Budi Subanar

*Cetakan pertama,* Desember 2020
xxii+534 hlm,16 x 24 cm

**Editor**
*Ali Usman*
*Proborini Hastuti*

**Cover & Layout**
*Mashudi*

**Keterangan cover**
*Lukisan karya Al Makin*

ISBN
*978-623-92124-1-4*

# KATA SAMBUTAN KEPALA BPIP RI

Sejak dilahirkan pada 1 Juni 1945, Pancasila telah disepakati para pendiri bangsa menjadi dasar negara (philosofiche groundslag) dan Pandangan hidup (*weltanschauung*) yang berfungsi secara ideologis menjadi seperangkat prinsip, pandangan, dan keyakinan (*a set of beliefs*) bagi Bangsa Indonesia agar dapat selalu berkomitmen menjaga keutuhan (meja statis) dan tujuan (*leitstar dinamis*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ini, eksistensi Pancasila sesungguhnya tidak hanya disepakati sejak awal sebagai '*normative ideology'* yang menaungi tata peraturan perundang-undangan. Melainkan juga dalam perilaku hidup keseharian Bangsa Indonesia sebagai sebuah '*living ideology*' yang terkonstruksi secara menyejarah ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Namun sayangnya pada era kekinian, keberadaan Pancasila sebagai sebuah ideologi terganggu dengan hadirnya arus globalisasi dan '*war by proxy'* yang membawa masuk paham-paham politisasi agama yang bertentangan dengan Pancasila. Akibatnya, Pancasila menjadi makin tenggelam dan terdistorsi dalam ruang publik yang saat ini telah begitu sesak dengan pemahaman-pemahaman ekslusif dan intoleran yang kerap membentur-benturkan agama dengan Pancasila. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan penguatan terhadap diskursus Pancasila. Dengan materi serta cara yang tepat, ruang-ruang publik yang telah dibajak dengan kekeliruan penafsiran agama dan Pancasila, perlu di luruskan dengan menghadirkan pemahaman-pemahaman tentang Pancasila dan agama yang benar: Bahwa Indonesia adalah negara yang didasari atas Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan UUD NRI 1945 Pasal 28 ayat (1) pun menyebutkan bahwa: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Melalui diterbitkannya buku ini, BPIP - sebagai sebuah badan yang memiliki tugas membantu Presiden dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila - berharap akan dapat membuka cakrawala pandang masyarakat mengenai pemahaman tentang "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang utuh. Sehingga, tidak akan ada lagi yang dapat mempertentangkan agama dengan Pancasila; mencampuradukkan kepentingan politik praktis dan agama yang menimbulkan perpecahan, kebencian, konflik SARA; serta hal-hal lain yang dapat menciderai eksistensi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk itu, selain mengupas makna pentingnya Ketuhanan Yang Maha Esa dari berbagai perspektif agama dan kepercayaan di Indonesia, buku yang dihasilkan BPIP bersama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para tokoh/pakar lintas agama dan kepercayaan ini juga merumuskan ide-ide Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai perekat serta solusi terhadap beragam tantangan kehidupan umat beragama di Indonesia melalui tema-tema penting seperti: Konsep ketuhanan dalam masing-masing agama/kepercayaan di Indonesia, ideal hidup beragama/berketuhanan dalam konteks berbangsa dan bernegara, moderasi sebagai visi beragama yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila, hubungan antar agama dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Serta yang tak kalah pentingnya yaitu fenomena-fenomena sosial-budaya-politik-ekonomi masyarakat kekinian seperti pandemi, terorisme/radikalisme, *post-truth*, dan lain sebagainya yang dipandang dari perspektif Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semoga buku yang dimaksudkan menjadi referensi utama bagi para pemangku kepentingan umat beragama di Indonesia ini, dapat dijadikan acuan dalam upaya kita bersama untuk melakukan pembinaan dan pewujudan nilai-nilai Pancasila. Demi meningkatkan mutu keadaban hidup umat beragama di Indonesia.

Jakarta, 7 Desember 2020

Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

# KATA SAMBUTAN
## Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagai rektor, saya sangat terhormat untuk mendukung program dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI) dengan mengundang para tokoh agama dari 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Muslim, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Khonghucu dan Penghayat. Program ini merupakan ide yang bagus untuk menafsirkan butir Pancasila yang Pertama, sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan dilakukan oleh para tokoh agama. Program ini saya kira merupakan tafsir pertama terjadi di Indonesia, karena selama ini tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa sepertinya didominasi oleh kelompok tertentu dan untuk kepentingan tertentu.

Pada era orde baru hampir semua tafsir didominasi oleh pemerintah dan dengan cara-cara pemerintah demi stabilitas politik dan juga demi kontrol pemerintah terhadap rakyat. Pancasila di era orde baru berfungsi sebagai alat untuk menenangkan rakyat dan menjaga agar jangan sampai ada suara yang berbeda dengan pemerintah. Di era reformasi ini tidak mungkin dilakukan hal demikian lagi. Tafsir pemerintah yang monoton dan dominan, tidak efektif lagi untuk menawarkan Pancas-

ila. Terlebih di era reformasi ini, Pancasila sedang kehilangan gaungnya. Maka usaha-usaha untuk mempromosikan kembali Pancasila adalah usaha-usaha yang baik untuk menjaga persatuan, integritas, dan juga supaya suara publik dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

UIN Sunan Kalijaga dan BPIP telah berdiskusi di rektorat berkali-kali yang dimana dihadiri oleh Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Ketua BPIP, Romo Benny Susetyo selaku Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum selaku Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan dan juga Ibu Elfrida Herawati Siregar selaku Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP. Kita semua sepakat untuk menyusun buku ini dan UIN Sunan Kalijaga dengan senang hati sebagai pendukung pertama penulisan buku Ketuhanan Yang Maha Esa dilihat dari berbagai agama. Upaya ini diharapkan mampu menerangkan kepada masyarakat dan mampu mempromosikan Pancasila dengan cara yang santai tetapi secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Maka UIN Sunan Kalijaga sebagai pionir -dapat dikatakan begitu- dengan sangat bangga menopang dan juga dengan merasa terhormat mendukung program ini sebagai sumbangsih orang-orang yang ada di lapangan akademik untuk masyarakat yang lebih luas.

Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara (PSPBN) UIN Sunan Kalijaga sebagai pihak yang melakukan peran yang penting dalam mengedit, mengumpulkan dan mengor-

ganisir semua penulis kita ucapkan banyak terimakasih. Harapannya ke depan lembaga ini mampu berperan sebagaimana yang diharapkan, menjembatani antara kepentingan negara (yaitu dalam hal ini BPIP) dan peran kampus untuk bangsa. Sebagaimana slogan UIN Sunan Kalijaga 2020-2024 yaitu UIN Sunan Kalijaga untuk Bangsa, UIN Sunan Kalijaga Mendunia! Dalam hal ini, peran PSPBN yang diketuai oleh saudara Dr. Moh. Tamtowi dan saudara Dr. Fahruddin Faiz sebagai sekretaris, sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan dan mengedit bahan-bahan yang ada serta menselaraskannya. Semoga amal-amalnya dibalas oleh SWT. Sebagai rektor saya mengucapkan terimakasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya. Begitu juga pihak yang membantu seperti saudari Proborini Hastuti dan saudara Ali Usman sebagai penghubung semua penulis.

Ucapan terimakasih ini tentu saja saya ucapkan pula kepada segala pihak dari BPIP yaitu Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.; Romo Benny Susetyo; Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum,; Ibu Elfrida Herawati Siregar dan Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.

UIN Sunan Kalijaga juga mengucapkan terimakasih kepada semua penulis dari berbagai agama dengan ikhlas dan senang hati berpartisipasi menyumbangkan pikiran-pikirannya sekaligus mempromosikan kembali Pancasila dengan caranya; dengan ilmiah tetapi mudah dipahami, dengan santai tetapi bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan tulisan-tulisan yang ada ini semoga dapat men-

jadi jalan baru mengenalkan Pancasila dan semoga program ini bisa ditindaklanjuti. Maka harapan saya sebagai rektor, buku ini akan dipromosikan di seluruh Indonesia dan akan memberikan inspirasi bagi yang lain untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan zamannya. Zaman yang bukan lagi doktrin, ideologi yang dipaksakan atau dengan alat kekuasaan. Zaman saat ini adalah zaman yang harus mengenalkan kembali dialog rasionalitas, saling mengajak demi kepentingan bersama.

Sekali lagi saya bersyukur kepada Allah SWT atas terbitnya buku ini dan selamat kepada para penulis. Kepada para pembaca, semoga menikmati karya ini. Terimakasih.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Rektor UIN Sunan Kalijaga

**Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.**

# DAFTAR ISI

# PROLOG

Sejak ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila terus diperbincangkan orang terutama dalam hubungannya dengan agama yang bagi pemeluknya merupakan dasar dan tuntunan baginya dalam menjalani kehidupan. Ini merupakan salah satu bukti bahwa keberadaannya penting bagi kehidupan bangsa ini. Sesuatu yang tidak penting dan tidak bermakna tidak akan diperbincangkan dalam waktu yang sedemikian panjang. Memang ada kalanya muncul keinginan dari sementara orang atau kelompok untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi selalu muncul lagi kesadaran bahwa Pancasila adalah tali kuat yang menyatukan semua unsur bangsa; menggantinya akan berakibat bangsa ini cerai berai.

Bagaimana merukunkan keimanan sebagai dasar kehidupan orang beriman dan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa? Ini merupakan pertanyaan yang terus menggelayuti kesadaran orang beriman yang sekaligus warga negara Indonesia. Ada yang berpikiran bahwa ajaran agamalah yang mesti dipegangi sebagai dasar

kehidupan, tidak boleh mengambil hal lain. Jalankan agama secara total, jangan kau campuri dengan yang lain. memegangi yang satu dan menolak yang lain. Tidak sedikit orang yang merasa kesetiaan mereka terbelah antara agama dan negara.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang semestinya mendasari sila-sila yang lain sebenarnya dapat menghilangkan perasaan terbelah atau penolakan itu jika dijelaskan dari sudut pandang agama-agama dan kepercayaan di Indonesia. Setiap anak bangsa memang bebas untuk memeluk agama apa pun dan beribadat menurut agama dan keyakinannya itu. Kebebasan ini dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi kebebasan itu mesti dibatasi semata-mata agar setiap orang dapat menghayati keyakinannya dan menjalankan peribadatannya. Batas yang paling dasar adalah bingkai kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Artinya kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan itu tidak boleh sampai merusak kebersamaan hidup sebagai bangsa.

Dengan berpegang pada pikiran seperti itu tulisan yang terhimpun dalam buku itu berusaha untuk membicarakan sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dari perspektif agama-agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa penulis dari enam agama: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu serta penghayat kepercayaan mencoba membeberkan pemahaman terhadap sila pertama ini dari sudut pandang keimanan. Mengapa dan makna kehidupan bernegara yang didasarkan pada

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dasar keimanan itu mesti diwujudkan dalam kenyataan kehidupan? Itulah pertanyaan utama yang dicoba dijawab dalam tulisan-tulisan yang tersusun dalam bagian pertama dari buku ini.

Bagian kedua meninjau sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini dalam perspektif filsafat, tidak dari pandangan keagamaan tertentu, melainkan dari pandangan yang lebih dalam mengenai agama dan kehidupan bersama. Di situ diperbincangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif kesetaraan seluruh agama. Juga bagaimana menjalani negara moderen yang berketuhanan dan bagaimana asas ketuhanan dilihat dalam tilikan filsafat perenial.

Bagian ketiga berusaha untuk menghadirkan pandangan keagamaan yang sesuai dengan konteks kekinian. Konsep Islam moderat dibicarakan di sini dalam kaitannya dengan sila pertama ini. Lalu bagaimana konsep ketuhanan agama Buddha hadir sebagai pendukung ketahanan nasional di tengah pandemi. Terakhir dicoba dilacak nalar rasa untuk menghadirkan Wajah Pancasila dalam kehidupan sehari hari.

Ringkasnya, tulisan-tulisan ini merupakan upaya untuk menghubungkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kehidupan sebagai warga negara sehingga tidak ada kesetiaan ganda atau keterpecahan kepribadian. Dengan sila ini kesetiaan kepada agama dan keyakinan berkelindan dengan kesetiaan kepada keindonesiaan. Ketika menjalani kehidupan bersama sebagai bangsa seorang pribadi beriman tidak mengkh-

ianati keimanannya karena hal itu didasari keimanan dan nilainilai yang diambil dari agama dan keyakinannya; nilai-nilai yang menghadirkan kasih Tuhan kepada semua makhluk-Nya, tidak terbatas pada umat tertentu atau kelompok apa pun.

Jika tidak bentangkan payung

Kuyup badanmu di tengah hujan

Jika inginkan hidup beruntung

Ingat Tuhanmu dalam semua tindakan.

Selamat membaca, semoga ada ditemukan cahaya!

Yogyakarta, 6 Desember 2020

**Machasin**

# Bagian Pertama

## Sila Pertama Pancasila
## (Kajian Perspektif Keimanan)

1. *Sila Pertama Pancasila Perspektif Islam*
   Machasin
2. *Nilai-Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Islam*
   Sahiron Syamsuddin
3. *Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Keislaman dan Kenegaraan*
   Moh. Tamtowi
4. *Ketuhanan Yang Maha Esa di Zaman Bergegas dan Gampang "Nge-Gas": Sebuah Pandangan Protestan*
   Leonard Chrysostomor Epafras
5. *Menjadi Berkat Bagi Masyarakat dan Bangsa*
   Baskara T. Wardaya
6. *Ajaran Ketuhanan dalam Perspektif Agama Hindu: Refleksi dan Jati Diri Umat Hindu dalam Bingkai Pancasila*
   I Gede Suwinda
7. *Nilai-Nilai Moral, Ketuhanan, dan Pancasila pada Keberagamaan Umat Hindu*
   I Wayan Wastawa
8. *Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Agama Buddha Niciren Syosyu*
   Suhadi Sendjaja
9. *Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Agama Khonghucu*
   Budi Santoso Tanuwibowo
10. *Nilai-Nilai Nasionalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasila dalam Perspektif Khonghucu*
    Kristan
11. *Nilai-Nilai Ajaran Ketuhanan dalam Bingkai Pancasila di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat*
    Sasmito Gati

# SILA PERTAMA PANCASILA PERSPEKTIF ISLAM

*Machasin*[*]

## I. Pendahuluan

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan erat dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada adanya Tuhan. Penggambaran kepercayaan kepada Tuhan itu memang berbeda di dalam agama-agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, dari perbedaan itu dapat ditarik hal-hal yang bernilai universal dan berguna untuk kehidupan seluruh warga bangsa.

Tulisan berikut merupakan upaya untuk mengemukakan hal-hal yang dapat dipergunakan untuk memahami sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari sudut pandang ajaran Islam dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Bahasannya mencakup alasan perlunya mendasarkan kehidupan bernegara dan berbangsa pada Ketuhanan Yang Maha Esa, makna keberadaan manusia di atas bumi, poin-poin yang mesti diperhatikan dalam menjalani kehidupan bersama sebagai anak bangsa Indonesia dan bagaimana manusia beriman dapat menjalankan kewajiban keagamaan

* Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

sekaligus meneguhkan kebersamaan di antara seluruh warga negara.

## II. Pembahasan

### Mengapa Ketuhanan yang Maha Esa

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Ini dengan jelas terlihat dalam kenyataan bahwa semua penduduknya memeluk agama dan/atau menghayati kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan salah satu hal yang mendasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kepercayaan itu diwujudkan dalam kegiatan pemujaan atau ibadah, pengucapan doa, pembacaan kalimat-kalimat suci, penyebutan nama Allah ketika orang mendapati hal yang mengagumkan, suasana yang menyedihkan atau pun yang menggembirakan dan sebagainya. Itu semua dilakukan secara individual dan kolektif.

Dengan demikian sangatlah wajar bahwa ketika menyatakan kemerdekaan, bangsa Indonesia menyebut nama Allah Yang Maha Kuasa sebagai landasan pernyataan itu sebelum keinginan untuk hidup secara bebas. "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". (Mukadimah UUD 1945, alinea ketiga).

Karena itu sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan bahwa manusia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Di samping mesti

berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai apa yang dicita-citakannya, manusia semestinya menyadari bahwa hasilnya tidak sepenuhnya berasal dari usahanya. Ada banyak hal terlibat dan menentukan dalam keberhasilan usaha manusia. Demikian pula, kalau gagal, itu tidak semata-mata karena kekurangannya atau kelalaiannya dalam berusaha, melainkan karena ada banyak hal terkait dengan kegagalan itu yang tidak dapat dikuasainya. Menyandarkan diri kepada Tuhan, setelah dengan sekuat tenaga berusaha, akan membuat diri manusia tahan dalam menghadapi kegagalan dan, sebaliknya, akan menahannya dari sifat lupa diri dan kesombongan ketika keberhasilan diperolehnya.

Dengan doa dan bersandar diri kepada Allah setelah segala daya dikerahkan agar kerja keras berujung keberhasilan, orang beriman menjadi tenang. Kalau akhirnya keberhasilan itu diperoleh, maka ia tidak menjadi merasa kuat dan besar. Sebaliknya, kalau gagal, ia tidak akan kehilangan harapan.

Di dalam Alquran dinyatakan:

> Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (*Lauḥ Maḥfūẓ*) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri (QS 57: 22-23).

Keimanan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, membuat manusia bersikap rendah hati karena ada

kuasa di atas kuasanya. Allah hadir dalam setiap keadaan yang di dalamnya manusia berpikir, berbuat, berinteraksi dengan sesamanya dan sebagainya. Kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya ini akan membuatnya tidak hanya berhati-hati dalam bertindak, tetapi juga selalu hidup harapannya. Allah yang menghendaki kebaikan hamba-hamba-Nya akan memberikan pertolongan, akan membantunya menemukan solusi bagi setiap kesulitan yang dihadapinya.

Tuhan adalah gaib, tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Seorang Nabi Musa a.s. pun tidak dapat melihatnya. Demikian disebutkan di dalam Alquran:

> Musa berkata, “Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat Engkau.” Allah berfirman, “Engkau tidak akan melihat-Ku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya niscaya engkau dapat melihat-Ku.” Maka ketika Tuhannya menampakkan (keagungan-Nya) kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan (QS 7: 143).

Disebutkan juga:

> Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya. (QS 35: 18).

Tuhan yang gaib itu mengetahui apa pun yang dilakukan manusia, sebagaimana disebutkan di dalam Alquran:

> Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu

> dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS 9: 16).
>
> Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun (QS 2: 235).
>
> Dia adalah Tuhan yang ada bersama manusia di manapun ia ada. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS 57: 4).

Keyakinan bahwa Tuhan yang gaib itu mengetahui apa pun yang dikerjakan dan dipikirkannya membuat manusia berhati-hati dan bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupannya. Apakah ini akan membuatnya merasa tertekan? Ya, kalau itu Tuhan mengawasinya untuk mencari-cari kesalahannya. Akan tetapi Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kasih-sayang-Nya meliputi segala sesuatu. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu” (QS 7: 156).

Tidak hanya itu, Allah juga akan menjawab seruan atau mengabulkan doa orang yang menyeru-Nya: Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (QS 40: 60).

Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya sesama manusia, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad saw. (HR Muslim, Abū Dāwūd, Ibn Mājah,

Aḥmad dll.):

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Kepercayaan kepada Allah juga menghindarkan manusia dari sikap sombong, merasa diri besar atau kuat atau bisa mencukupi dirinya tanpa pertolongan siapa pun. Dalam Alquran dipakai istilah *istakbara* (merasa besar) dan *istagnā* (merasa diri kaya, tidak memerlukan pertolongan). Terhadap sikap merasa besar ini diingatkan terus menerus kepada manusia bahwa ada Allah yang lebih besar dari siapa pun dan apa pun, *Allāhu akbar*. Seberapa pun besarmu, wahai manusia, kebesaranmu tidak akan pernah menyamai kebesaran Allah, apalagi melampauinya. Kepada sikap merasa tak butuh bantuan, yang melahirkan tindakan sewenang-wenang tanpa mempedulikan aturan, disodorkan kenyataan bahwa tempat kembali terakhir adalah Tuhan. Artinya, kesombongan dan perasaan diri tak memerlukan bantuan itu mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

> Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali. (QS 96: 6-8)

Allah dalam ajaran Islam adalah *Rabb*, Tuhan yang mencipta, membesarkan, merawat dan melindungi semua makhluk. Selain itu, orang beriman juga diajari untuk berperilaku dengan perilaku Tuhan. Karena itu, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, semestinya membuat orang beriman selalu menjaga setiap tindakannya agar masuk dalam kategori melindungi, mem-

beri kehidupan, meneguhkan rasa aman dan sebagainya. Ia mesti mempertimbangkan untuk setiap keputusan yang diambil dan perbuatan yang akan dilakukannya agar tidak menimbulkan kerusakan, ketidakadilan, kesusahan pada diri dan orang lain, kekacauan dan sebagainya.

## Manusia sebagai Wakil Allah di Bumi

Manusia hidup di dunia untuk menjalankan misi ketuhanan, yakni menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kehadiran manusia di atas bumi bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menjalankan tugas mulia yang hanya dapat dipikul oleh manusia. Hanya manusialah, dari seluruh makhluk Allah, yang dipercaya untuk menjalani kehidupan dengan menentukan sendiri tujuan, bentuk dan caranya, walaupun dalam batas-batas kesamaptaan fisiknya dan relasinya dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah.

Di dalam Alquran dinyatakan bahwa Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, tetapi mereka semua tidak mau menerimanya dan bahkan takut kepadanya. Lalu manusialah yang mau menerimanya.

> Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh (QS 33: 72).

Keengganan dan ketakutan langit, bumi dan gunung-gunung itu menunjukkan bahwa amanah itu berat dan penuh resiko. Mengapa? Karena untuk menjalankan kepercayaan atau misi itu manusia dibekali kekuatan yang sangat besar: manusia mempunyai potensi untuk menundukkan segala hal yang ada di dunia, dengan kemampuannya belajar dan menyimpulkan serta menciptakan hal-hal baru. Kalau dilihat perjalanan keberadaan manusia di muka bumi, akan dapat dilihat bahwa manusia dulunya hidup dengan bergantung kepada alam. Kemudian mulai dikenal perburuan, penggembalaan ternak dan peternakan. Lalu ditemukan pertanian dan setelah itu ditemukan industri. Dari segi peralatan, mula-mula manusia menggunakan alat dari hal-hal yang ditemui di atas bumi, lalu diolahnya kayu dan batu. Kemudian ditemukannya perunggu, besi dan baja, sebelum diciptakannya alat-alat kerja dengan menggunakan mesin uap sampai mesin dengan bahan bakar gas dan seterusnya. Dari itu kelihatan betapa besar kemampuan manusia.

Akan tetapi dengan kekuatan yang besar dan dapat berkembang menjadi lebih besar lagi itu manusia dapat berbuat kesalahan dan aniaya yang juga dapat menjadi lebih besar. Dengan kemampuan yang besar orang cenderung untuk lupa diri, tidak ingat lagi akan misinya sebagai wakil tuhan di muka bumi atau khalifah. Karena melihat potensi penyimpangan inilah para malaikat mempertanyakan pengangkatan manusia sebagai khalifah ketika Allah mewartakan rencananya untuk itu.

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman ke-

> pada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS 2: 30).

Apa hal yang dinyatakan bahwa Allah mengetahuinya, sedangkan malaikat tidak mengetahuinya itu? Bahwa manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan kekuatannya. Hal itu tidak ada pada malaikat yang hanya patuh dan memahasucikan Allah serta hanya mengetahui apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Memang manusia dapat tergelincir dalam kesalahan karena adanya tarikan nafsu untuk menikmati kesenangan badaniah, kecenderungan untuk merasa diri berkuasa sehingga berbuat sewenang-wenang dan seterusnya. Akan tetapi, manusia juga dapat mengatasi persoalan kehidupan dengan menggunakan kemampuan nalar pikirnya dan pertimbangan nuraninya.

Kemungkinan manusia untuk berbuat salah itu besar juga dan godaan untuk bertindak aniaya juga besar, bahkan bertambah besar sejalan dengan bertambah besarnya kemampuannya. Manusia memang mempunyai pembawaan lalai dan sewenang-wenang. Karena itu, manusia mesti terus menjaga kesadaran akan misinya dengan mengingat adanya Tuhan yang mengetahui apa pun yang dilakukannya dan akan meminta tanggung jawab kepadanya atas misinya itu. Namun kemampuan untuk mengarahkan kekuatan besar itu ke arah terang dan bermartabat juga tidak kalah besarnya, asalkan ia

selalu ingat kepada Tuhannya yang mengutusnya untuk menjadi wakilnya di dunia.

Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah tugas mulia dengan kekuasaan yang besar. Para penyelenggara negara ini memegang amanah atau misi untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Kekuasaannya sangat besar, tetapi godaan untuk menyalahgunakannya sangat besar. Peraturan dapat dibuat secermat mungkin untuk menghindari penyalahgunaan, tetapi kemampuan untuk menemukan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau pihak lain yang tidak semestinya selalu berkembang.

Keyakinan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, akan membuat manusia menyadari akan misinya dan dengan itu menjauhi tindakan yang menodai keterpercayaannya. Dengan keyakinan bahwa manusia diutus oleh Allah untuk menjalani kehidupan di muka bumi dan bahwa Ia selalu hadir dalam kehidupan itu maka ia memegang alat ukur atau *master* yang dengannya setiap tindakan yang dilakukan kelihatan dan sejatinya bernilai baik atau tidak. Perbuatan yang kelihatan baik bisa jadi sejatinya jahat ketika maksud yang di belakangnya jahat. Sebaliknya, tindakan yang secara lahiriah dinilai buruk, ketika maksud yang terkandung dalam hati pelakunya baik, bisa merupakan kebaikan. Ibarat-

nya seperti tutur kata manis yang dimaksudkan untuk menipu menjadi buruk, sedangkan obat yang pahit adalah baik karena dimaksudkan untuk menyembuhkan.

## Makna Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Kehidupan Bernegara

Setelah menyadari akan misinya sebagai wakil Allah yang harus mempertanggungjawabkan mandatnya kepada-Nya, lalu sekarang apa yang mesti dilakukannya? Bagaimana pun manusia adalah hamba Allah dan hamba yang baik akan menjalankan perintah tuannya dan menjauhi larangannya. Di dalam semua itu ia akan meniru tingkah laku tuannya.

Tuhan Maha Pengasih dan kasih sayangnya meratai seluruh makhluk-Nya tanpa pilih-pilih. Orang yang beriman dikasihinya, orang yang kufur dikasihinya pula. Semua orang mendapatkan penghidupannya dan ruangnya untuk beraktivitas, tidak peduli apakah ia taat atau durhaka kepada Tuannya. Yang membedakan orang yang taat dan yang durhaka hanya pada tanggung jawab masing-masing terhadap misinya dan balasan yang akan diterimanya di hadapan Allah. Ini memberikan pengertian bahwa di dalam menyelenggarakan negara tidak boleh ada yang dibedakan. Semua warga mesti mendapat perlindungan, tidak boleh ada yang teraniaya karena ras, suku atau keyakinannya. Tidak semestinya ada yang terhalangi karena warna kulitnya atau karena afiliasinya kepada kelompok tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga berarti bahwa semua

aturan negara dan kebijakan pemerintahan mesti memberikan ruang yang sama kepada setiap warga, tidak boleh ada warga yang teraniaya. Setiap penyelenggara negara mesti peka terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya, apakah itu menyebabkan kerugian kepada warga bangsa, apakah ada orang yang terhalang haknya karenanya tanpa kompensasi yang wajar, apakah ada ketidakseimbangan perolehan hak dan seterusnya. Harus selalu diingat, sebagaimana Tuhan tidak berbuat aniaya kepada hambanya, tidak boleh ada yang teraniaya karena negara.

Negara juga mesti menjaga ruang yang cukup bagi seluruh warganya untuk mengembangkan diri dan memberi kesempatan untuk berkiprah, sebagaimana Allah memberikan potensi kepada setiap manusia untuk berkembang dan memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya.

Keadilan juga mesti mendasari setiap tindakan atas nama negara. Negara mesti memberikan penghargaan dan imbalan kepada warga sesuai dengan perbuatannya: yang berbuat jasa mendapat balasan penghargaan dan keuntungan, sementara yang berbuat kesalahan mendapat hukuman sewajarnya. Keadilan yang dinyatakan di dalam Alquran sebagai lebih dekat kepada ketakwaan berarti memberikan titipan kepada pemiliknya. Kehidupan bernegara adalah kehidupan bersama dengan setiap warga mempunyai saham yang dititipkan kepada para pengelolanya.

> Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan

> apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (QS 4: 58).

Negara yang dibangun di atas Ketuhanan Yang Maha Esa semestinya memberikan pemberdayaan, dukungan kepada yang lemah dan berkekurangan agar dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, dan yang tidak dapat berdiri sendiri mesti menjadi tanggungan negara. Tuhan memberikan rejeki kepada semua hamba, bahkan semua makhluk.

> Dan tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (*Lauḥ Maḥfūẓ*) (QS 11: 6).

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga berarti bahwa orang menghargai proses menjadi baik. Manusia hidup dalam proses: dari bentuk yang semula hina, lemah dan tiada kemudian terbentuk menjadi janin, bayi, anak, remaja, lalu orang dewasa-kepada manusia yang sombong Alquran mengingatkan bahwa asal kejadiannya adalah tanah dan air mani yang menunjukkan kelemahan dan kehinaan (Lihat QS 18: 37, 22: 5, 76: 2, 75: 37-37, 36: 77, 16: 4 dan sebagainya). Daya pikirnya pun berkembang dari tidak tahu apa-apa sampai dapat berpikir secara mencongak dan menemukan hal-hal baru dengan mengaitkan berbagai data. Perilakunya pun berkembang dari egois, liar dan menang sendiri ke kemampuan mengendalikan diri dan berbagi

dengan orang lain. Semua itu melalui proses. Di dalam proses itu bisa saja terjadi gangguan alamiah atau yang berasal dari perbuatan manusia. Karena itu diperlukan penjagaan agar semua dapat menjalani proses menjadi lebih baik dan lebih berguna bagi kehidupan bersama, dan negara memikul tanggung terbesar di dalam penjagaan itu.

Penghargaan kepada proses mengandung pengertian pertobatan dalam pengertian bahwa orang memperbaiki apa yang salah dengan segera mengubahnya menjadi benar atau menggantinya dengan yang benar. Karena itu, setiap warga yang terlanjur melakukan kesalahan tidak hanya didorong untuk memperbaikinya, melainkan juga diberi kesempatan untuk menyusuli kesalahannya dengan kebaikan perbaikan.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan bernegara semestinya mewujud dalam kenyataan bahwa setiap keputusan, aturan, kebijakan dan tindakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara formal di hadapan seluruh rakyat dan pada hakekatnya benar secara moral. Tidak boleh ada tindakan yang mengandung penipuan atau didasari kepentingan orang perorang dari pengelola urusan negara atau masyarakat. Demikian pula tidak boleh ada perbuatan yang bersifat pemborosan atau mubazir. Resiko memang selalu ada pada setiap keputusan, namun tidak semestinya urusan bersama dilaksanakan dengan tanpa kecermatan dan pertimbangan mendalam.

Dalam kaitan dengan tanggung jawab, semestinya dipegangi betul kehati-hatian dalam pengertian

melakukan penimbangan dengan seksama sebelum sebuah keputusan dibuat atas nama negara dan atas nama kehidupan bersama. Kecerobohan dan ketergesa-gesaan merupakan perbuatan syetan, kata seorang bijak bestari (Ḥātim al-Ṭāʾī, seorang bijak bangsa Arab mengatakan, "Ketergesaan itu dari syetan, kecuali dalam lima perkara, yakni: (1) menyuguh makan tamu [yang kelaparan], (2) menyelenggarakan mayit, (3) menikahkan anak gadis yang sudah mencapai waktu nikah, (4) membayar hutang jika temponya sudah tiba, dan (5) tobat ketika melakukan kesalahan"), sedangkan syetan dinyatakan sebagai musuh nyata bagi manusia. (Aṣbihānī, 1974, VIII: 78). Karena itu keputusan apa pun atas nama dan menyangkut banyak orang tidak boleh diambil secara sembrono. Tanpa mempertimbangkan dengan teliti akibatnya dalam waktu dekat dan dalam jangka panjang.

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga berarti bahwa orang tidak hanya memikirkan kemakmuran dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat; tidak hanya mengusahakan keuntungan jangka pendek, melainkan juga keuntungan jangka panjang. Negara dengan demikian mesti mengusahakan terwujudnya kesejahteraan lahir batin bagi seluruh warganya dan menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik dan kebahagiaan batinnya serta mencapai apa yang diyakininya akan menyelamatkannya dalam kehidupan di dunia dan sesudahnya.

Salah satu perbuatan yang diwanti-wantikan oleh Allah di dalam Alquran untuk dihindari adalah menim-

bulkan kerusakan. Karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan, tidak jarang pohon-pohon ditebangi, tanah digali, batu dipecahi, dan seterusnya. Memang alam dikuasakan kepada manusia untuk diolah dan diambil manfaatnya. Akan tetapi, pengolahan dan pengambilan manfaat itu tidak selalu harus dengan merusaknya. Kalaupun harus merusak, mestilah dilakukan pemulihan atau setidak-tidaknya perbaikan.

> Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS 2: 195).

Juga:

> Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (QS 47: 22).

Walhasil Ketuhanan sebagai dasar negara mengharuskan penyelenggara negara untuk selalu mengingat kedudukannya sebagai pemegang amanah Tuhan untuk menyelenggarakan kehidupan di atas bumi dengan sebaik-baiknya bagi semua ciptaan-Nya, terutama hamba-hamba-Nya, yakni manusia.

### Bertakwa Kapan Pun dan Di Mana Pun

Ketakwaan merupakan satu-satunya cara untuk menjaga diri dari kemungkinan berbuat salah dan kalaupun suatu kali berbuat kesalahan, dengan ketakwaan orang akan segera bertobat dan menyusuli kesalahan itu dengan perbuatan baik. Nabi Muhammad saw. diriwayatkan menasehati sahabatnya dengan uca-

pan beliau yang artinya:

> Takutlah kepada Allah di mana pun kau ada dan susulilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang pasti akan menghapusnya dan bergaullah dengan pergaulan yang baik. (Hadis Riwayat Aḥmad dan al-Ṭabrānī).

Ketika ditanya mengenai *iḥsān* atau kebajikan atau perbuatan baik beliau menjawab, "bahwa kau mengabdi atau takut kepada Allah seakan-akan kau melihat-Nya; jika kau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Ia melihatmu." Ini berarti bahwa memberikan pelajaran penting, yakni terus menyadari dan mengontrol setiap kata yang akan diucapkan dan hal langkah yang akan diambil agar tidak terjerumus dalam kesalahan.

Akan tetapi, karena manusia tidak bisa kalis sama sekali dari lalai dan alpa, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap keputusan-keputusan dan aturan-aturan yang telah dibuat. Jika terdapat hal-hal tidak semestinya, maka segera harus dilakukan perbaikan dan kepada pihak yang dirugikan karenanya mesti diberikan ganti rugi.

Selain itu, untuk menghindari kesalahan setiap keputusan yang berkenaan dengan orang banyak tidak boleh diambil oleh orang perorang secara sendirian saja. Keputusan seperti itu mesti diambil dengan melibatkan pihak-pihak yang terkena akibatnya, selain orang-orang yang paham mengenai masalah.

### Menjadi Saksi atas Manusia

Keberadaan manusia sebagai hamba Allah, Tuhan Yang Maha Esa semestinya merupakan wujud dari kasih

sayang Allah. Orang yang benar-benar beriman adalah orang yang dapat dipercaya orang lain untuk menjaga darah dan hartanya (HR Aḥmad, al-Turmudzī dll.). Artinya, orang yang betul-betul percaya kepada Allah bukan hanya tidak akan mengganggu orang lain, melainkan juga menjaga hak-haknya. Ia tidak akan mengambil hak orang lain. Termasuk di dalam hak orang lain ini hak-hak publik yang mesti dipelihara agar setiap orang dapat mengaksesnya dan tidak dikangkangi oleh siapa pun.

Orang beriman mesti merupakan penegak keadilan dan menjadi saksi-saksi Allah dengan mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, meskipun itu berkenaan dengan diri sendiri, orang tua dan kerabat (QS 4: 135). Tidak boleh bersikap jatuh di mata dipicingkan dan jatuh di perut dikembangkan. Bagi penyelenggara negara ini, berarti bahwa kewenangan yang ada padanya mesti dipakai untuk kepentingan seluruh rakyat, tidak untuk dirinya, keluarganya, maupun kelompoknya saja.

Orang-orang beriman juga menjalankan misi untuk menjadi saksi bagi manusia (QS 2: 143) dalam arti aktif dalam ikut serta meningkatkan kualitas kehidupan, tidak melihat adanya hal yang dapat mengganggu kehidupan bersama tanpa berusaha untuk memperbaikinya atau menghalanginya menjadi betul-betul membahayakan siapapun.

## III. Penutup

Walhasil, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kehidupan berbangsa dan bernegara mesti berada dalam kerangka misi manusia sebagai hamba Allah dan wakil-Nya di atas bumi untuk menyelenggarakan kehidupan yang sebaik-baiknya. Negara mesti diselenggarakan demi menjamin setiap warganya agar dapat hidup secara aman, damai dan bermartabat. Dengan demikian, mendasarkan kehidupan bersama pada Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dengan kata lain, dengan sila pertama ini, menjalankan misi keindonesiaan sama sekali tidak mengkhianati misi keimanan.

Pemerian Tuhan dan ajaran agama yang berbeda-beda di dalam agama tidak semestinya menghalangi orang untuk mengambil nilai-nilai yang mendukung kebersamaan dan penyelenggaraan kehidupan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara.

## Referensi

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2011. Jakarta: Kementerian Agama RI, Ditjen Biman Islam, Dit. Urusan Agama Islam.

Abū Dāwūd. Tth. *Sunan Abī Dāwūd*. Ed. Muḥammad Muḥy al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣrīyah.

Aḥmad bin Ḥanbal. 1421 H/2001 M. *Munad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Ed. Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk. Ttp.:

Mu'assasah al-Risālah.

al-Aṣbihānī, Abū Na'īm. 1394 H/1974 M. *Ḥilyat al-Auliyā' wa-Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*. Mesir: al-Sa'ādah.

Ibn Mājah. Tth. *Suna Ibn Mājah*. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah.

Muslim. Tth. *Al-Musnad al-Ṣaḥīh* (*Ṣaḥīḥ Muslim*). Beirut: Dār al-Turāts al-'Arabī.

Rahman, Fazlur. 1980. *Major Themes of The Qur'ān*. Minneapolis & Chicago: Bibliotheca Islamica.

Al-Turmudzī. 1395 H/1975 M. *Sunan al-Turmudzī*. Ed. Aḥmad Syākir. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# NILAI-NILAI SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

*Sahiron Syamsuddin**

## I. Pendahuluan

Paling tidak, ada dua tantangan besar yang dihadapi Pancasila saat ini. Pertama adalah adanya sekelompok kecil orang yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, baik yang berbasis agama maupun sekuler. Kedua, bagaimana agar nilai-nilai Pancasila itu dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Memang, dua tantangan tersebut harus kita hadapi dengan sebaik mungkin.

Pada kesempatan ini saya hanya memberikan sekelumit kontribusi terkait dengan hal ini, khususnya tentang relasi Islam dan Pancasila dan bagaimana memahami nilai-nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari perspektif Islam. Pertanyaan yang akan dijawab di sini adalah: 'Mengapa umat Islam Indonesia harus berusaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan bagaimana kesesusaian Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan

* Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ajaran-ajaran Islam?’

## II. Pembahasan

### Relasi antara Islam dan Pancasila

### 1. Pandangan Islam terhadap Kesepakatan yang dibuat oleh Manusia

Di dalam banyak ayat Al-Qur’an terdapat kata *‘urf* atau *ma‘rūf*. Salah satu contohnya adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

> Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh (Q.S. al-A‘rāf (7): 199).

Baik di dalam ayat ini maupun di ayat-ayat lain yang menyebut kata *ma‘rūf* konteks tekstual kata tersebut adalah relasi antarmanusia. Pertnayaannya adalah: ‘Apa makna kedua kata itu?’ Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kedua kata itu. Dari sekian pendapat, pandangan al-Zamakhsyarī, seorang ahli bahasa dan salah satu tokoh Mu’tazilah, dalam kitabnya *al-Kasysyāf* mengatakan, “Kata *‘urf* itu berarti: *al-ma‘rūf wa al-jamīl min al-af‘āl* (prilaku-prilaku yang ‘dikenal’ dan baik/indah) (al-Zamakhsyarī: 1998:545).

Penafsiran yang senada bisa didapati juga pada penafsiran Abū Ḥayyān, seorang mufassir sunni: *al-ma‘rūf wa al-jamīl min al-af‘āl wa al-aqwāl* (perbuatan dan perkataan yang ‘dikenal’ dan baik/indah) (Ḥayyān: 1993:444). Di tempat lain, dia mengatakan, *“Al-ma‘rūf al-wajh allażī yaḥsunu fī al-syar‘ wa al-murū’ah”* (*Ma‘rūf* adalah bentuk prilaku yang baik menurut syara‘ dan

*murū'ah* [kewibawaan]) (al-Zamakhsyarī: 463). Dari penafsiran semacam ini kata *ma'rūf* mencakup segala sesuatu yang dipandangan baik, baik menurut wahyu maupun menurut akal budi manusia.

Al-Qur'an dengan demikian tidak menafikan kesepakatan (aturan) bersama manusia itu dijadikan pegangan juga dalam menjalani kehidupan bersama. Hasil pemikiran manusia yang kemudian diikuti oleh generasi berikutnya secara terus menerus disebut dengan tradisi atau adat-istiadat, dalam Bahasa Inggris *'tradition'*, dan dalam Bahasa Arab *'urf* atau *'ādat.*

Istilah *'urf* dan *'ādat* ini kemudian dipakai sebagai salah satu sumber hukum Islam oleh para ulama ahli Ushulul Fiqh dengan syarat tradisi atau adat istiadat tersebut secara substantif tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Ungkapan *al-'ādat muḥakkamah* (tradisi itu bisa dijadikan ketetapan hukum).

Wael B. Hallaq—ketika mengelaborasi pandangan 'Abd al-Khallaf tentang *'urf*—mengatakakan, " *... he seems certain that those practices ('urf) that conform to the law are to be accpted as valid, whereas those that contradict the law must be deemed null and void"* (Hallaq: 221). Para ahli sejarah hukum fikih Islam mencatat bahwa banyak ketetapan hukum Islam, khususnya terkait dengan mu'amalah (tansaksi bisnis), didasarkan pada kebijakan lokal (*local wisdom*).

Dari keterangan di atas dapatlah kita katakan bahwa peraturan/ketetapan atau kesepakatan manusia bisa dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam hal-

hal yang terkait dengan kehiduapan bersama, termasuk berbangsa dan bernegara.

### 2. Piagam Madinah sebagai Kesepakatan Bersama

Ketika Nabi Muhammad Saw hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau melihat bahwa komunitas Madinah itu plural, baik dari segi suku, bahasa maupun agama. Saat itu, terdapat dua suku besar, yakni Aus dan Kharzraj. Agama mereka pun bervariasi: Yahudi, Kristen, Islam, dan Majusi.

Karena itu, beliau membentuk kesepakatan bersama antarkomunitas, yang dikenal dengan "Piagam Madinah" (*Mīs̈*āq al-Madīnah; the Medinan Charter), dengan tujuan mempersatukan umat/masyarakat yang plural tersebut. Hal ini merupakan contoh langsung dari Rasulullah Saw bahwa kesepakatan bersama itu bisa menjadi acuan untuk hidup bersama dalam sebuah negara atau apapun namanya. Apa yang dilakukan oleh beliau merupakan pengejawentahan atas konsep '*urf* atau *ma'rūf* tersebut di atas.

Melihat hal ini, bisa kita katakan pula bahwa beliau adalah seorang 'republikan' yang tertarik untuk mengayomi semua komponen yang ada di Madinah di bawah kesepakatan bersama. Dengan kata lain, Negara Kota Madinah (masa Nabi) adalah contoh dari *nation states* (negara-negara bangsa) dengan Piagam Madinah sebagai semacam undang-undang dasarnya.

### 3. Pancasila sebagai Kesepakatan Bersama Bangsa Indonesia

Piagam Madinah inilah yang menjadi inspirasi bagi

kyai-kyai, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, yang bersama *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk dasar negara kita, Pancasila, yang merupakan kesepakatan bersama dan bisa mempersatukan bangsa yang sangat plural, baik dari segi suku, bangsa, bahasa dan ras. Berdasarkan hal ini, memproklamirkan NKRI dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa itu berarti *ittibā' li sunnati Rasulillāh Saw* (mengikuti sunnah Rasulullah Saw), yakni meniru Piagam Madinah.

Selain itu, Q.S. al-Mā'idah: 1 memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan perjanjian bersama: "Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah perjanjian-perjanjian (*'uqūd*)! ..." Al-Ṭabarī menginformasikan bahwa kata *uqūd* di sini, menurut sebagian sahabat dan tabi'in, berarti *al-'uqūd allatī yata'āqaduhā al-nāsu baynahum* (al-Ṭabarī : 2001:10) (perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama oleh manusia).

Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pernah mengatakan, "Kita, umat Islam, berkewajiban mempertahankan Pancasila dan menjalankan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena memenuhi perintah Q.S. al-Mā'idah: 1 itu.

Perjanjian di situ adalah semua perjanjian yang dibuat manusia atau bangsa, termasuk perjanjian politik." Karena itu, seluruh umat Islam Indonesia, dan bahkan semua komponen bangsa, harus mempertahankan NKRI dan Pancasila ini dan membangunnya secara terus menerus sesuai dengan perkembangan dan

situasi zaman. Mempertahankan NKRI dan Pancasila, bagi umat Islam, hukumnya wajib, karena bila tidak, maka yang akan terjadi adalah perpecahan dan perang saudara.

Di dalam Ushul Fiqh kita kenal konsep *sadd al-żarī'ah* (menutup/menghindari terjadinya sesuatu yang dilarang). Karena menghindari perpecahan dan perang saudara itu hukumnya wajib, maka hukum menjaga NKRI dan Pancasila wajib pula. Seandainya sekelompok orang memproklamirkan bentuk negara lain, seperti Khilafah Islamiyah, di suatu wilayah di Indonesia, maka wilayah-wilayah lain yang mayoritas penduduknya bukan muslim jelas tidak bersedia berada di bawah kekuasaannya. Mereka akan juga mendirikan negara-negara kecil lain, seperti Negara Hindu Bali, Negara Kristen Manado, Negara Kristen Papua dll.

Andai hal itu terjadi, maka hampir dapat dipastikan perang saudara akan terjadi dan pertumpahan darah tidak bisa terelakkan. Karena itulah, NKRI dan Pancasila wajib dipertahankan untuk menghindari konflik internal bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara substantif, lima sila dari Pancasila tak satupun yang bertentangan ajaran Islam. Bagian beriku ini penulis membuktikan bahwa nilai-nilai Sila kesatu itu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

**Nilai-nilai Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa"**

Berdasarkan TAP MPR No. 1 Tahun 2003, nilai-nilai yang terkandung pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah: (1) menyatakan kepercayaan dan ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, (3) mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati dan kerjasama antarpemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, (4) membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, (5) meyakini bahwa hubungan seseorang dan Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat pribadi, (6) sikap tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, dan (7) menghormati kebebasan menjalan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketujuh nilai tersebut dapat diringkas menjadi tiga nilai besar, yakni (1) percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) sikap terbuka atas keberagaman agama dan kepercayaan, dan (3) hidup rukun dan bekerjasama di antara pemeluk agama dan kepercayaan. Ketiga nilai ini akan dielaborasi dalam artikel ini berdasarkan perspektif ajaran Islam berikut ini.

## 4. Percaya dan Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa

Nilai yang pertama dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah percaya atau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepada-Nya. Bagi umat Islam keimanan kepada Allah Swt merupakan rukun iman yang pertama dan utama. Tanpa keimanan kepada-Nya semua amal perbuatan umat manusia tidak bisa diterima oleh-Nya. Keimanan ini diekspresikan secara tegas dengan ucapan syahadat, yakni Lā ilāha illā Allāh (Ti-

dak ada Tuhan selain Allah). Apa yang terdapat di dalam syahadat tersebut adalah tauhid, yakni keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Selain itu, ketauhidan juga berarti mengimani sifat-sifat Allah.

Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus memiliki pengaruh positif pada perilaku orang-orang yang beriman, yang disebut dengan takwa. Kata ini berasal dari bahasa Arab: *taqwā.* Secara terminologis, kata tersebut didefinisikan dengan *irtikāb awāmir Allāh wa ijtināb nawāhīhi* (melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya), atau dengan istilah lain, *al-'amal al-ṣāliḥ* (amal baik). Takwa ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*) dan hubungan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*).

### 5. Sikap Terbuka atas Keberagaman: Sikap Toleran, Saling Menghormati dan Tidak Memaksakan Kehendak kepada Orang Lain

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu juga mengandung nilai sikap terbuka atas keberagaman dalam hal memilih agama dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sikap menerima atau terbuka atas keberagaman ini diajarkan oleh Islam, karena keberagaman itu merupakan Sunnat Allah yang diciptakan oleh Allah dan tidak akan berubah sepanjang zaman. Mengingkari keberagaman berarti mengingkari Sunnat Allah.

Pada Q.S. al-Ḥujurāt: 13, misalnya, Allah mengajarkan kepada kita adanya keberagaman/kebinekaan

pada umat manusia, baik dari suku, bangsa maupun tradisi dan agama. Dalam menyikapi keberagaman ini, Allah mengajarkan kepada umat manusia untuk "sal-ing mengenal" (*ta'āruf*). Terhadap kata *ta'āruf* ini Fakhr al-Dīn al-Rāzī menjelaskan bahwa kata itu mengindi-kasikan, salah satunya, pada *'adam al-tanākur* (tidak saling mengingkari) (al-Rāzī:1981:28:138), atau dengan kata lain, "saling mengenal" berarti juga "saling mengakui eksistensi" keberagaman/kebinekaan tersebut.

Sikap mengakui eksistensi keberagaman dalam hal suku, bangsa, tradisi dan agama ini harus dimiliki oleh umat Islam. Karena itu, dalam Q.S. al-Mā'idah: 48 Al-lah menegaskan bahwa Dia tidak berkehendak untuk menciptakan "satu umat" (*ummah wāḥidah*), tetapi jus-tru membuat keberagaman umat. Hal ini dimaksud-kan, selain untuk "saling mengenal" antara satu umat dengan umat yang lain, tetapi juga agar keberagaman ini dapat mendorong masing-masing umat beragama untuk "berlomba-lomba dalam melakukan hal yang ter-baik" (*musābaqah fī al-khayrāt*).

Keberagaman, dengan kata lain, dapat menyebab-kan munculnya peradaban manusia yang lebih maju dan dinamis. Pengakuan terhadap eksistensi keberag-aman agama dan keyakinan ini mendorong setiap orang untuk (1) bersikap toleran, (2) menghormati, dan (3) ti-dak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu.

**a) Toleransi Beragama**

Di antara nilai yang terkandung dalam sikap ter-

buka terhadap keberagaman agama dan keyakinan adalah sikap toleran dalam beragama. Terkait dengan toleransi beragama (*religious tolerance*), Jürgen Habermas, seorang filosof Jerman, mengatakan bahwa toleransi beragama akan eksis apabila (1) setiap orang memberikan hak kepada siapapun untuk mengekspresikan keagamaannya dan keyakinannya masing-masing, dan (2) masing-masing tidak merasa terganggu oleh praktik-praktik keagamaan orang/umat lain (Habermas, 2014:7).

Sikap toleran terhadap umat yang mempunyai agama dan keyakinan lain itu berarti sikap membuka diri dan menghargai eksistensi agama, keyakinan dan pendapat keagamaan orang lain. Sebagai contoh, Nabi Muhammad Saw mengakui eksistensi agama Yahudi, Nasrani dan Majusi ketika beliau berada di Madinah. Salah satu bentuk toleransinya adalah upaya menjaga tempat-tempat peribadatan mereka dari kejahatan orang-orang musyrik Mekkah saat itu. Hal ini disebutkan secara eksplisit pada Q.S. al-Ḥajj: 39-40 (Syamsuddin: 2017: 163-179).

Sebaiknya, sikap tidak toleran terhadap pemeluk agama lain sangat dikecam oleh Islam. Q.S. al-Baqarah: 111-113 mengisahkan bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw ada sekelompok kaum Yahudi yang tidak menghormati eksistensi Kaum Nasrani di Madinah. Kaum Yahudi lalu mengejek kaum Nasrani dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dasar yang kuat dalam beragama. Karena ejekan itulah Kaum Nasrani membalas ejekan yang serupa, sehingga dua

kelompok beragama tersebut bersitegang dan akhirnya Nabi Muhammad Saw melerai mereka dengan mengharapkan agar mereka tidak melakukan klaim kebenaran yang eksklusif. Beliau pun mengatakan (melalui wahyu), "Siapapun menyerahkan diri kepada Allah (dengan meyakini satu-satunya Tuhan) dan berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan pahala dan tidak ada kekuatiran atas mereka serta tidak akan bersedih."

Islam juga mengajarkan bahwa sikap toleran terhadap pemeluk agama lain itu tidak berarti bahwa kita diperbolehkan mencampuradukkan ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain yang secara prinsip bertentangan, seperti mencampuradukkan antara ketauhidan/monoteisme dan kesyirikan/politeisme. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa konon ketika Nabi Muhammad Saw berdakwah di Mekah, sebagian orang musyrik/politeis menawarkan kepada beliau agar berbagi penyembahan: sesekali beliau menyembah berhala dan mereka meyembah Allah Swt. Tawaran ini ditolak oleh Nabi Muhammad Saw dengan turunnya Surat al-Kāfirūn.

**b) Menghormati Agama dan Keyakinan Orang Lain**

Nilai lain dari Sila Kesatu adalah menghormati agama dan keyakinan orang lain. Nilai ini sangat terpuji dan diperintah oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menjaga kerukunan hidup beragama. Sebaliknya, Islam melarang umatnya dari sikap menghina agama dan keyakinan orang lain, karena hal ini dapat menimbulkan ketida-

kharmonisan umat beragama.

Salah satu sikap yang dilarang oleh Islam adalah menghina/memaki apa yang diyakini sebagai Tuhan. Q.S. al-An'ām: 108: "Dan janganlah kamu (kaum Muslimin) memaki (sembahan-sembahan) yang mereka seru selain Allah, maka (akibatnya) mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas ..." Sikap tidak menghormati agama dan keyakinan lain pun secara eksplisit dilarang oleh Allah pada Q.S. al-Baqarah: 111-113 yang telah disebutkan sebelumnya.

**c) Tidak Memaksakan Kehendak**

Konsekuensi logis lain dari sikap keterbukaan adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama, keyakinan tertentu, atau aliran keagamaan tertentu. Dalam Q.S. al-Baqarah: 256 Allah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam hal beragama. Terkait dengan ayat tersebut Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī menyebutkan sabab al-nuzūl, sebagai berikut (Al-Ṭabarī, 4:548): "Diriwayatkan dari Ibn 'Abbās bahwa al-Ḥuṣayn, seorang dari Kaum Anṣār, memiliki dua orang anak yang beragama Nasrani dan dia ingin memaksa mereka masuk Islam. Kemudian turunlah ayat tersebut."

Para ulama modern dan kontemporer juga mempunyai pemahaman serupa terhadap ayat tersebut, meskipun bervariasi dalam hal penekanannya. Abdolkarim Soroush, pemikir Muslim dari Iran, mengatakan (Saeed, 2018:201), "Memeluk agama yang sesungguhnya mensyaratkan kebebasan hati nurani, yang tidak dapat dicapai melalui paksaan." Al-Maududi juga mengatakan

(Saeed, 2018:201), "Orang-orang sebaiknya menerima Islam dengan kehendak mere sendiri, bukan dengan paksaan." Semua ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama Islam.

Sebagai salah satu agama dakwah (*missionary religion*) (Sharma, 1995:32), Islam memang memerintahkan umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada siapapun, namun Islam melarang memaksa siapapun untuk memeluknya. Islam memerintahkan agar umatnya berdakwah dengan *hikmah,* nasihat yang baik dan berdebat/berdiskusi dengan cara-cara yang baik dan bijak, sebagaimana yang terdapat pada Q.S. al-Naḥl: 125.

> "(Wahai Nabi Muhammad!) Serulah (seluruh manusia) kepada jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemeliharamu dengan hikmah (kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) dan dengan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik …"

## 6. Hidup Rukun dan Bekerjasama

Sikap keterbukaan atas keberagaman agama dan keyakinan itu diharapkan dapat mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis dan rukun antarumat-umat yang berbeda-beda agamanya dan keyakinanannya. Semua agama dan keyakinan mengajarkan kepada pemeluknya untuk hidup secara damai dengan siapapun.

Dalam Islam kita dapati banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung ajaran kerukunan hidup, baik antar umat Islam sendiri maupun dengan umat-umat lain. Ker-

ukunan hidup berarti bahwa setiap orang melakukan hal-hal yang dapat mempersatukan semua komponen dalam masyarakat dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat atau memicu konflik antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, Nabi Muhammad Saw bersabda, "Jangan melakukan hal yang membahayakan diri dan orang lain!"

Selain itu, secara praktis ketika beliau berada di Madinah yang masyarakatnya beragam, baik dari segi agama maupun suku, beliau berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan mereka dan menciptakan kehidupan yang harmonis dan rukun di antara mereka. Hal pertama yang dilakukan olehnya adalah membuat perjanjian bersama untuk rukun dan damai. Perjanjian ini disebut dengan *Mīšāq al-Madīnah* (Perjanjian Madinah).

Islam tidak hanya mengajarkan hidup berdampingan secara rukun dan damai, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dan bekerjasama antara umat beragama dan keyakinan dalam hal-hal kemanusiaan. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah: 2, "… Bertolong-tolonglah dalam kebajikan (*birr*) dan ketakwaan! …" Al-Ṭabarī menjelaskan (8:53) bahwa makna kata *birr* (kebajikan) adalah "*mā umirta bihi*" (segala sesuai yang kamu diperintahkan untuk menjalankannya). Di antara yang diperintahkan oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi manusia. Dalam hal ini, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (2011:136) mengatakan, "Perbedaan keyakinan ti-

dak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia." Dalam rangka mengatasi problem-problem kemanusiaan, seperti bencana alam, wabah Covid-19, banjir dan aspek-aspek kemanusiaan lainnya, seluruh umat beragama dan semua penganut kepercayaan tertentu diharapkan bisa saling bekerjasama.

## III. Penutup

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) Pancasila tidaklah bertentangan dengan Islam dan umat Islam, bahkan semua komponen bangsa Indonesia, harus terus mempertahankannya sebagai dasar dan ideologi negara dan mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (2) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai inti: (a) percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) sikap keterbukaan atas keberagaman dan kebinekaan agama dan keyakinan, yang memuat nilai-nilai (i) sikap toleran, (ii) menghormati agama dan keyakinan orang lain, dan (iii) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; (c) hidup rukun dan bekerjasama antara satu umat dengan yang lainnya. Semua nilai yang terkandung pada Sila Kesatu ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

**Referensi**

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb.* Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Ṭabarī. *Jāmi‘ al-Bayān*, 4.

_________. *Jāmi‘ al-Bayān*, 8.

Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta'wīl Āy al-Qur'ān.* Kairo: Hajar, 2001.

Al-Zamakhsyarī. *al-Kasysyāf,* 1.

Al-Zamakhsyarī, Maḥmūd ibn ‘Umar. *al-Kasysyāf.* Riyad: Maktabat al-‘Abīkān, 1998.

Habermas, Jürgen. "Religious Tolerance: The Peacemaker for Cultural Rights," *Philosophy* Vol. 79, No. 307, 2014.

Hallaq. *A History of Islamic Legal Theories.*

Ḥayyān, Abū. *al-Baḥr al-Muḥīṭ.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Saeed, Abdullah. *Human Rights and Islam.* Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2018.

Sharma, Arvind. "Religious Tolerance in Three Contexts," *India International Centre Quarterly*, Vol. 22, No. 1, 1995.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Edisi Revisi dan Perluasan).* Yogyakarta: Nawesea Press dan Baitul Hikmah Press, 2017.

Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita*

(Jakarta: Democracy Projct, 2011.

Wahyudi, Yudian. Wawancara. Yogyakarta, 6 Desember 2020.

# KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DAN KENEGARAAN

*Moh. Tamtowi*[*]

## I. Pendahuluan

Pancasila adalah sebuah ideologi modern. Hal ini tidak saja karena ia diwujudkan di zaman modern, tetapi karena ia ditampilkan oleh para bapak pendiri Republik Indonesia yang berwawasan modern. Ia dimaksudkan untuk memberikan landasan filosofis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu Indonesia. Sebagai produk pikiran modern, pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis dan tidak statis. Watak dinamis ini menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Dalam hal perumusan formalnya, Pancasila tidak perlu dipersoalkan. Kedudukan konstitusionalnya sebagai sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam pluralitas Indonesia juga sudah final. Namun, dari segi pengembangan prinsip-prinsipnya agar aktual dan relevan bagi masyarakat yang selalu tumbuh dan berkembang, Pancasila tidak bisa lain kecuali

---

* Ketua Pusat Studi dan Bela Negara (PSPBN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dipahami dan dipandang sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis. Oleh karena itu tidak mungkin dibiarkan mendapat penafsiran sekali jadi untuk selama-lamanya (*once for all*). (Rahman, 2006:2298).

Pancasila merupakan konsensus Kebangsaan yang mulai didikusikan pada 1 juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Tanggal 22 juni 1945 rumusan dasar Negara tersebut disepakati dalam lima sila yang dikenal dengan Piagam Jakarta dengan sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya". Pada 18 agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar Negara dengan merevisi sila pertama sehingga berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan Perpres No. 24 tahun 2016, tanggal 1 juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.

"Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sila pertama Pancasila. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti Indonesia merupakan negara agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama, tetapi agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat adanya rahmat Allah Yang Maha Kuasa sehingga negara ini ada. Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum.

Dalam konteks Ketahanan Nasional, kebebasan beragama memang dilakukan berdasarkan sikap keberagaman sehingga peran pemerintah hanya memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah para

pemeluknya dapat terjamin dengan baik, aman dan tenteram tanpa mencampuri masalah-masalah intern keagamaan meliputi keyakinan, pemahaman maupun ajaran-ajaran agama (Rudini, 1994: 66). Atas dasar jaminan pemerintah terhadap kebebasan beragama ini pula pemerintah menerbitkan UU No. 1/ PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Tauhid, sebagai istilah teknis, bernakna konsep me-Maha Esa-kan Allah. Konsep ini didasarkan pada QS. Al-Ikhlas: 1. Dalam Islam, mengetahui Allah harus berdasarkan informasi Allah tentang Dirinya sendiri. Umat Islam Indonesia memaknai sila pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai tauhid. Syahadat Islam menyatakan "*la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah*" (tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah).

Bangsa Indonesia bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Aspek keagamaan tidak harus dibenturkan dengan kebangsaan. Justru pemahaman dan pengamalan agama yang benar harus secara fungsional mendukung tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman konsep ketuhanan yang fungsional bagi ke-

hidupan berbangsa dan bernegara menjadi fondasi bagi tata kehidupan yang harmoni dan damai. Di sinilah perlunya dikembangkan pemahaman keagamaan yang inklusif dan berwawasan kebangsaan.

## II. Pembahasan

### Allah menjelaskan Dirinya Sendiri melalui Kitab Suci

Menjelaskan tentang Tuhan bukan pekerjaan yang mudah. Al-Qur'an memberikan informasi bahwa Allah tidak mungkin ditangkap oleh indera. Dalam QS. Al-An`am: ١٠٣ Allah berfirman: "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha mengetahui".

Dalam QS. Al-Baqarah: 55-56, Allah juga berfirman:

> "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum Kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur".

Nabi Musa pernah memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk melihatnya, tetapi dengan nada halus tidak diizinkan oleh Allah. Peristiwa tersebut sebagaimana diceritakan dalam al-Quran Surat al-A`raf: 143:

> "Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkan-

> lah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". tatkala Tuhannya Menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, Dia berkata: "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman".

Tuhan Maha Sempurna sedangkan pandangan dan pikiran manusia serba terbatas, Tuhan Maha Suci, sedangkan pemahaman manusia serba nisbi. Tuhan berada di luar ruang dan waktu, sedangkan pemikiran manusia tidak bisa terlepas dari pengaruh ruang dan waktu. Namun demikian, karena kasih sayang Tuhan kepada manusia, Dia memberitahukan diri-Nya agar diketahui oleh manusia sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci.

Secara teoretik, mengenal Allah memiliki tahapan-tahapan. Pertama, mengenal nama-Nya (*ma'rifah al-asma`*). Kedua, mengetahui sifat-sifat-Nya (*ma'rifah as*-sifat) dan ketiga, memahami perbuatan-perbuatan-Nya (*ma'rifah al-af'al*). Teori ini disusun untuk memberikan kerangka pemahaman yang mudah dicerna. Artinya, mengenal Allah dimulai dari pemahaman yang paling sederhana menuju kepada pemahaman yang semakin ideal. Proses menuju pengetahuan tentang Tuhan tidak akan pernah mencapai tahap sempurna. Manusia dianugerahi pengetahuan oleh Allah, sedangkan Allah adalah Yang Maha Tahu. Artinya, pengetahuan

manusia adalah proses dinamis tanpa akhir menuju Yang Maha Tahu. Berhenti berproses berarti berhenti meningkatkan kedudukannya di hadapan Tuhan.

Pengetahuan tentang nama Tuhan menuntun kepada pengetahuan tentang sifat-sifat karena nama hanya bisa dimengerti dan dipahami dari karakter khusus, yaitu sifat. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah akan mengantar kepada pemahaman tentang perbuatan Allah. Karena perbuatan itu lahir dari sifat-sifat. Misalnya, Allah itu bersifat Maha Pengasih (*ar-Rahman*), maka apa yang diperbuat Allah kepada seluruh makhluk tentu merupakan bentuk kasih sayang-Nya. Demikian juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Perbuatan merupakan implikasi logis dari sifat.

Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad saw., sebagaimana difirmankan dalam wahyu yang pertama kali turun, sebagai Tuhan Sang Pencipta (QS. Al-'alaq: 1). Berikutnya, secara berturut-turut, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan untuk manusia (QS. An-Nas:1), Raja bagi munusia (QS. An-Nas:2), Sesembahan bagi manusia (QS. An-Nas:3), Tuhan yang menguasai fajar (QS. Al-Falaq:1), baru pada fase berikutnya memperkenalkan nama-Nya, yaitu Allah Yang Esa (QS. Al-Ikhlas:1) dan Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya (al-Ikhlas:2).

Dalam al-Qur'an, Allah juga menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup kekal, Maha Berdiri Sendiri dalam mengurus makhluknya, tidak pernah tertimpa rasa kantuk apalagi tidur, bagi-Nya

seluruh yang ada di langit dan bumi, ilmu-Nya meliputi permulaan (dunia) hingga penghabisan (akhirat) dan kekuasaan-Nya tak terbatas (QS. Al-Baqarah: 255).

Allah memiliki nama-nama yang indah (*asma' al-husna*) (QS. Al-A'raf: 180, QS. Al-Kahfi: 110, QS. Thaha: 8, QS. Al-Hasyr: 24). Nama-nama tersebut menggambarkan sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada sembilan puluh sembilan. Sifat-sifat Allah dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu sifat *jamal* (kemaha-indahan) dan sifat *jalaj* (kemaha-agungan). Sifat-sifat *jamal* Allah itu misalnya *ar-Rahman* (Maha Pengasih) dan *ar-Rahim* (Maha Penyayang).

Seluruh nama-nama Allah yang indah ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, memahami maknanya dan menghayati hakikatnya akan mengantarkan kepada pengetahuan, pemahaman dan kedekatan kepada Allah. Semakin mengenal Allah, maka akan semakin bertambah kuat keimanan. Kuatnya keimanan akan berimplikasi pada bertambahnya ketaatan. Semakin taat, maka semakin besar juga menebar manfaat.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bertentangan tauhid dalam Islam. "Ketuhanan Yang Maha Esa" dipandang sebagai terjemahan dari firman Allah surat al-Ikhlas:1, *qul huwa Allah ahad* yang artinya "katakanlah (Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa". Jadi, baik secara redaksional maupun substansial, bunyi sila pertama pacasila tidak bertentangan dengan tauhid dalam Islam, bahkan sangat ser-

asi. Tidak ada pertentangan antara tauhid Islam dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, secara fungsional, keyakinan tentang ke-Maha Esa-an Allah merupakan spirit untuk membingkai keragaman dalam hubungan yang harmoni dan bersatu. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin kuat pula cintanya kepada bangsa dan Negara.

**Manusia: Hamba Allah dan Khalifah-Nya**

Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tugas ini sebagaimana difirmankan Allah dalam al-Qur`an Surat at-Thur: 56, yaitu: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”. Maka setiap makhluk, baik jin atau manusia wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, merendahkan diri terhadap kehendak-Nya. Menerima apa yang Dia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendak-Nya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Dia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah. Ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah swt dan memerintahkan manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah swt.

Dalam ayat lain, Al-Qur`an juga menyatakan bahwa manusia diciptakan agar menjadi khalifah di muka bumi, Allah berfirman:

> “Dan (ingatlah) tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak mennjadikan di bumi seorang khalifah’. Berkata mereka, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menump-

> ahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau?’. Dia berkata, ‘Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah:30)

Manusia memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran kehambaan dan peran kekhalifahan. Peran kehambaan merupakan hubungan khusus dan bersifat spiritual terhadap Allah. Peran kehambaan ini disimbolkan dengan peristiwa mi’raj ke sidratul muntaha oleh Nabi Muhammad. Mi`raj adalah peristiwa spiritual perjalanan hamba menuju Tuhan. Semakin hamba mendekat menuju Tuhan, semakin besar pengetahuan (ma`rifat) yang dilimpahkan. Maka, sidrah al-muntaha sering dipahami sebagai puncak pengetahuan.

Tetapi, perjalanan spiritual mi’raj bukanlah terminal akhir. Manusia harus turun kembali ke bumi (dunia nyata) untuk memerankan fungsi kekhalifahan berbekal pengetahuan ilahiyah tersebut. Perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya adalah perjalanan menuju kepada Yang Maha Tunggal, Esa. Jadi, tugas utama peran kehambaan adalah mengesakan Allah dan memurnikan keimanan hanya kepada-Nya. Keberhasilan peran kehambaan dinilai dari kesuksesan memurnikan imannya.

Realitas mutlak, *The Absolut Reality* (Tuhan) itu tunggal, sedangkan realitas nisbi (dunia) adalah plural. Peran kekhalifahan adalah peran duniawi yang ditakdirkan Tuhan dalam rupa yang beragam.  Maka, memahami secara positif dan menerima keragaman ciptaan Allah dan menggali hikmah di baliknya merupakan ke-

arifan dan kebijaksanaan. Sikap seperti itu yang perlu ditumbuh suburkan dalam diri kaum beriman. Iman tidak cukup hanya percaya kepada keesaan Allah, tetapi menuntut perwujudan tindakan-tindakan dalam mensikapi keragaman.

Manusia diciptakan Tuhan dalam ragam suku, bangsa, bahasa, agama dan kepercayaan. Allah berfirman:

> "Wahai manusia, sesungguhnya Aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S. Al-Hujurat:13).

Dalam ayat lain Al-Qur`an menjelaskan bahwa manusia bertindak sesuai karakter dasarnya yang berbeda-beda, yaitu: "Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan bakat pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya".(QS. Al-Isra': 84)

Secara lebih tegas, Allah berfirman dalam surat al-Maidah:48 yang terjemahnya adalah:

> "Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang sudah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan".

Dalam keragaman inilah tugas kekhalifahan diuji. Kekhalifahan di sini bukan dalam pengertian kepemimpinan formal, tetapi amanat individual setiap manusia dari Allah. Muhammad Iqbal dari India menerjemahkan khalifa sebagai *the partner of God*, patner Tuhan di muka bumi. Tuhan menciptakan hutan belantara, manusia mengelola dan mengubahnya menjadi taman-taman kota, Tuhan menciptakan gulita, manusia berkreasi membuat pelita, Tuhan menciptakan lautan, manusia membuat bahtera untuk mengarunginya. Prinsipnya bahwa peran kehlaifahan adalah kerja kreatif manusia untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan di bumi.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, peran kekhalifahan adalah mengelola segala potensi yang berbeda-beda secara kreatif dan fungsional demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Perbedaan harus dikelola dalam bingkai kesatuan tujuan hidup bersama sebagai sebuah bangsa. Dalam perbedaan terkandung potensi sekaligus persoalan. Seorang khalifah harus secara kreatif memanfaatkan keragaman sebagai pilar-pilar persatuan. Keragaman adalah keindahan, keragaman adalah petunjuk perkembangan dan keragaman adalah arena perlombaan dalam kebaikan, bukan pemicu permusuhan. Ibarat sebuah kendaraan yang digerakkan oleh komponen-komponen yang beraneka ragam. Masing-masing komponen saling bekerja sama dan tidak saling bergesekan karena ada oli pelumas yang menghaluskan. Oli pelumas itu ibarat etika kebangsaan yang menghaluskan hubungan

seluruh komponen anak bangsa untuk bekerja sama menggerakkan kemujuan Indonesia.

## Hidup Bersama dalam Keragaman

Dalam kenyataannya, tidak ada suatu komunitas, masyarakat dan bangsa yang benar-benar tungal tanpa unsur-unsur perbedaan di dalamnya. Masyarakat yang bersatu bukan berarti satu atau seragam, tetapi mampu mengelola perbedaan dan kesediaan untuk menerima keragaman sebagai kenyataan (bhinneka tunggal ika). Kemajemukan adalah takdir Tuhan. Oleh karena itu kemajemukan harus diterima sebagaimana apa adanya.

Beberapa prinsip dasar yang diajarkan al-Qur'an dalam mensikapi keragaman kehidupan beragama adalah: pertama, tidak ada paksaan dalam agama (QS. Al-Baqarah:256). Prinsip kebebasan beragama ini menyangkut hal-hal yang cukup rumit, karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan yang mendalam. Prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing kita mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat. Dalam al-Qur'an, prinsip kebebasan beragama ini dengan tegas dihubungkan dengan sikap tanpa emosi, pertimbangan akal sehat dan kemantapan kepada diri sendiri karena percaya adanya kejelasan kriteria mana yang benar dan mana yang salah.

Kedua, larangan menista keyakinan agama dan kepercayaan orang lain. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan, "Janganlah kamu memaki sembahan-sembah-

an yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan" (QS al-An'am:108). Menista agama orang lain sama artinya dengan menista agama sendiri secara tidak langsung. Ketika penganut suatu agama merendahkan kepercayaan agama lain, maka secara otomatis akan dibalas dengan pencelaan yang serupa. Artinya, akibat dari mencela agama lain berakibat pada penistaan terhadap agama kita sendiri. Secara tegas al-Qur'an melarang tindakan yang demikian.

Negara juga melarang tindakan penistaan terhadap agama dengan aturan Penetapan Presiden No. 1 pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang terdiri dari 4 pasal, yaitu:

> Pasal 1
>
> Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, panafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajatan agama itu.
>
> Pasal 2 ayat (1)
>
> Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2 ayat (2)

Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri atau oleh apresiden Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 2 terhadap organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4, Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 156a, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a) yang pada pokonya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Apa yang dilakukan Negara dengan menerbitkan Penetapan Presiden No. 1 pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Justru aturan tersebut dipandang selaras dengan pesan al-Qu'an. Kesucian agama harus dilindungi oleh Negara. Hal ini bukan berarti Negara turut campur urusan agama, tetapi Negara hadir untuk mendungi umat beragama.

Ketiga, Islam tidak berharap seluruh umat manusia untuk menerima ajarannya (QS. 10:99), Islam justru memperingatkan bahwa seluruh umat manusia adalah bersaudara (QS. 49:13) dan bahkan mengajarkan bahwa setiap manusia telah dibuatkan jalan (*syir'atan wa minhaja*) oleh Tuhan agar dengan sesama manusia berlomba dalam kebaikan (QS. 4:144), menjadi penengah (*ummatan wasathan*) dan saksi antara mereka (QS. 2: 143). Oleh karena itu, penerimaan terhadap pluralitas positif merupakan semangat yang menjadi salah satu hakikat Islam.

## Teladan Nabi Muhammad saw. dalam Membingkai Keragaman: Piagam Madinah

Realitas keragaman suku, kepercayaan dan agama di Yatsrib merupakan kenyataan yang di hadapi Nabi Muhammad saw setelah hijrah. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk merancang strategi dalam membingkai tatanan kehidupan masyarakat. Tatanan masyarakat baru di Yatsrib yang akan dibangun Nabi adalah masyarakat yang berperadaban (*madaniyah*). Madinah dalam Bahasa Arab sama dengan *polis* dalam Bahasa Yunani. Maka ada Konstantinopolis, Miniapo-

lis, Indianapolis, Parsiapolis dan lain-lain. Seandainya Rasulullah dulu berbahasa Yunani, maka Madinah itu akan dinamai *Prophetopolis*, kota Nabi. Oleh karena itu, langkah strategis paling awal yang dilakukan oleh Nabi adalah mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah. Hal ini patut direnungkan, karena *madinah* berarti kota. Bahkan secara etimologis, *madinah* berarti tempat peradaban. Jadi, hijrah juga merupakan suatu lambang bahwa akhirnya tujuan beragama adalah menciptakan kehidupan yang beradab.

Sebelum Nabi hijrah, kota Madinah bernama Yatsrib. Madinah terletak di bagian utara Hijaz, 300 mil (kurang lebih 485 km) sebelah utara Mekah. Seajak masa 'Amaliqah, kota ini dikunjungi para peziarah dan pedagang. Bani 'Amaliqah inilah yang diduga kuat memulai membangun kota Yatsrib. Pada tahun 1225 SM, orang-orang Yahudi nomaden, dalam perjalannya dari Mesir ke Palestina, singgah dan tinggal di Sinai selama 40 tahun (Phillip K. Hitti, 1974: 40). Saat itu Nabi Musa menikah dengan perempuan Arab. Kemudian setelah Palestina dikuasai oleh Romawi, Raja Titus menghancurkan Palestina pada tahun 70 M, banyak orang-orang Yahudi hijrah dan menetap di Madinah.

Kelompok asli bangsa Yahudi yang ada di Madinah dan terkenal ada tiga kabilah, yaitu Bani Qainuqa', Bani Quraidzah dan Bani Nadzir. Setelah itu, orang-orang `Aus dan Khazraj dari Bani Azad dan Qahthaniyah di Yaman tiba di kota ini. Pada perkembangan berikutnya, dua golongan terakhir ini, `Auz dan Khazraj, menjadi orang-orang terkemuka dan saling berebut pengaruh.

Hal seperti itu berlangsung terus hingga Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah.

Jika merujuk pada naskah Piagam Madinah, ada beberapa suku yang secara tegas disebut dalam naskah perjanjian tersebut. Di antaranya adalah Bani `Auf, Bani Sa`idah, Bani al-Hars, Banu Jusyam, Bani Najjar, Banu `Amr bin `Auf, Banu an-Nabit, dan Bani Aus, di samping kelompok kaum muslimin dari Qurausy yang disebut dengan al-Muhajirin dan kaum muslimin Yatsrib yang disebut al-Anshar.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Madinah merupakan wilayah yang plural dari segi suku-suku yang tinggal di daerah tersebut. Di samping itu, agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Madinah pada saat itu juga beragam yang terdiri dari orang-orang Islam (kaum Muhajirin dan Anshar), orang Yahudi dan suku-suku yang masing menganut kepercayaan lokal. Keragaman suku dan agama di Madinah ini menjadi pertimbangan Nabi untuk membangun kesepakatan bersama untuk membangun Yatsrib menjadi wilayah yang kuat, aman dan damai dalam keragaman.

Setelah mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah, strategi berikutnya adalah mempersaudarakan kelompok Muhajirin dan Anshar. Persaudaraan ini memiliki arti yang sangat penting dan fundamental bagi terbentuknya tatanan masyarakat baru yang berperadaban, yaitu menghilangkan fanatisme jahiliyah dan menghapuskan perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit da asal usul kedaerahan (Shafiturraman al-Mubarakfuri, 2003:249). Persaudaraan yang ditawarkan Rasulul-

lah adalah persaudaraan universal menggantikan persaudaraan sempit yang didasarkan kepada kesamaan suku, keturunan dan kedaerahan. Konsep persaudaraan seperti ini merupakan ide cerdas yang sangat maju pada zamannya. Persaudaraan semacam inilah yang bisa dijadikan sebagai landasan hidup bersama sebagai sebuah bangsa.

Persaudaraan ini diawali antara sesama umat Islam. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersaudarakan ada Sembilan puluh orang, separoh dari kaum Muhajirin dan separohnya dari kaum Anshar. Rasulullah mempersaudarakan mereka agar saling tolong menolong bahkan saling mewarisi. Waris mewarisi ini berlaku hingga hingga perang Badar dengan turunnya surat al-Anfal: 75. Dengan turunnya ayat ini maka hak saling mewarisi menjadi gugur, tetapi ikatan persaudaraan berlaku semakin kuat.

Al-Bukhari meriwayatkan betapa kuat dan tulusnya persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah. Abdurrahman bin Auf dari golongan Muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'd bin ar-Rabi`. Sa'd berkata kepada Abdurrahman, "sesungguhnya aku adalah orang yang paling kaya di kalangan Anshar. Ambillah separoh dari hartaku. Aku juga memiliki dua orang istri, maka lihatlah dan pilihlah yang engkau suka agar aku bisa menceraikannya. Jika masa iddahnya sudah habis, maka kawinikah dia". Abdurrahman bin Auf menanggapi ucapan Sa'd dan berkata, "semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan harta. Jangan ngkau beri

aku harta, tapi tujukkan saja kepadaku di mana pasar kalian?". Maka, ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa'. Maka, Jika pagi dia pergi ke pasar untuk berdagang. Suatu hari dia dating kepada rasulullah dengan muka agak pucat. "Bagaimana keadaanmu?" Tanya Rasulullah. "Aku sudah menikah. Jawabnya". "berapa mas kawin yang engkau serahkan kepada istrimu?". Dia menjawab, "beberapa keeping emas" (al-Bukhari*, Shahih Bukhari*, juz I:535).

Gambaran persaudaraan antara Abdurrahman bin `Auf dan Sa`d bin ar-Rabi` sungguh menunjukkan ikatan yang kuat dan tulus. Bukan harta atau jabatan yang mempertautkan hati mereka, tetapi kemurnian dalam menjalankan ajaran agamanya. Kemurnian dalam menjalankan agama melahirkan ketulusan persaudaraan, karena hanya kataatan yang tulus dan murni dalam menjalankan agama mengantarkannya mulia di sisi Tuhannya. Persaudaraan tulus seperti ini merupakan pilar yang kuat dan kokoh dalam membangun sebuah bangsa yang beradab.

Strategi Rasulullah selanjutnya adalah menjalin kesepakatan dengan suku-suku dan agama lain yang ada di Madinah. Untuk memancangkan sendi-sendi kehidupan bersama dan menciptakan kesatuan politik, persatuan, keamanan dan kebaikan maka diperlukan aturan dan konsensus bersama. Naskah politik yang dibuat oleh Rasulullah tersebut menjadi konstitusi Negara Madinah yang berdaulat. W. Montgomery Watt menyebut naskah tersebut sebagai *The Constitution of Medina* (W.M. Watt, 1964:93). Berbeda dengan Watt,

Phillp K. Hitti menamainya dengan *Agreement* (Phillip K. Hitti, 1973:35). Tetapi naskah tersebut lebih terkenal dengan nama Piagam Madinah.

Dalam piagam tersebut diatur antara lain mengenai persoalan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok dan kewajiban mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang butir-butirnya antara lain:

1. Ini adalah piagam dari Nabi Muhammad saw., di kalangan muslimin dan mukminin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan orang-orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka adalah satu ummat, lain dari komunitas yang lain (Pasal 1).

2. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang umat Islam tidak dizalimi dan ditentang oleh mereka (Pasal 16)

3. Orang-orang Yahudi Bani `Auf adalah satu ummat (bangsa) dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani `Auf (Piagam Madinah Pasal 25).

4. Bagi kaum Yahudi ada keajiban biaya dan bagi kaum muslimin juga ada kewajiban biaya. Yahudi dan kaum muslimin bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka harus saling nasihat menasihati, memenuhi janji dan tidak

boleh khianat (Pasal 37).

5. Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukmininselama dalam peperangan (Pasal 38).
6. Yatsrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini (Pasal 39).
7. Jika terjadi perselisihan di antara orang-orang yang mengikuti perjanjian ini dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan maka tempat kembalinya adalah kepada Rasulullah (Pasal 42).
8. Mereka harus saling tolong menolong dalam menghadapi musuh yang akan menyerang Yatsrib (Pasal 44).
9. Kaum Yahudi al-`Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hah dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini (Pasal 46).
10. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, orang yang berada di Madinah aman kecuali orang-orang yang zalim dan khianat (Pasal 47). (Ibnu Hisyam, 1375 H, I:503-504).

Butir-butir pasal dalam Piagam Madinah ini sangat maju dan inklusif. Apalagi jika dilihat dari masa pembentukannya dan perkembangan peradaban pada zamannya. Robert N Bellah menyebutnya sebagai se-

buah ide yang terlalu modern dan mendahului eranya. Pokok-pokok isi dan ide dasar piagam tersebut selaras dengan konstitusi Negara modern yang masyarakatnya heterogen.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi Indonesia yang baru saja merdeka selaras dengan butir-butir dalam Piagam Madinah. Indonesia sebagai negara besar dan berpenduduk padat dengan ragam suku, agama dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya memerlukan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan menganut kepercayaan sesuai kayakinan masing-masing. Jaminan kebebasan beragama oleh Undang-undang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan konsep “ketuhanan” pada sila pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan titik temu (*kalimatun sawa*) dan ideologi bersama lintas agama.

Mewujudkan persatuan dalam kebhinekaan memang membutuhkan perjuangan. Dalam kebhinekaan toleransi menjadi pilihan dan sikap bermusuhan adalah ancaman utama terhadap persatuan. Maka, kesadaran ketuhanan harus menjadi landasan etis kaum beriman untuk menerima keragaman sebagai kehendak Tuhan. Menolak keragaman dan mensikapinya dengan permusuhan berarti mengingkari takdir Tuhan. Justru perbedaan harus dijadikan sebagai sarana saling mengenal dan berlomba dalam kebaikan.

## III. Penutup

Pancasila merupakan ideologi Nasional yang baik rumusan maupun kedudukan konstitusionalnya sudah final. Ia menjadi *common platform* yang merupakan titik temu dari kebhinekaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, semua kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian positif dalam pelaksanaannya. Pemahaman yang fungsional terhadap ideologi nasional ini oleh seluruh komponen anak bangsa akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketuhanan Yang Maha Esa yang memayungi semua agama dan kepercayaan harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan saling menghargai. Prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing kita mampu mengedepankan pertimbangan akal sehat dari pada sikap emosi. Kebersamaan dalam bingkai Negara bangsa yang berbhineka memerlukan cara berpikir yang positif dan rasional untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni, adil dan makmur.

## Referensi

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Ditjen Bimas Islam, Dit. Urusan Agama Islam, 2011).

Hitti, Phillip K., *History of The Arab* (London: The Macmillan press Ltd., 1974).

Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah* (Beirut: Dar Ihya' at-Tur-

ras al-`Arabi, t.t.).

Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (India: al-Maktabah ar-Rahimiyyah, 1387 H).

Perpres no. 24 tahun 2016.

Rahman, Budhy Munawar, *Ensiklopedi Murcholis Madjid* (Bandung: Mizan, cet. 1, 2006).

Rudini, *Atas Nama Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1/ PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Watt, W. Montgomery, *Muhammad: Prophet and Statesmen* (New York: Oxford University Press. 1964).

# KETUHANAN YANG MAHA ESA DI ZAMAN BERGEGAS DAN GAMPANG "NGE-GAS": SEBUAH PANDANGAN PROTESTAN

*Leonard Chrysostomos Epafras*[*]

## I. Pendahuluan

### Meniti Keragaman Tradisi Protestan

Menurut Aritonang, 25 juta penganut Kristen terbagi dalam lima belas denominasi atau aliran utama yang tumbuh di negeri ini (Aritonang, 1999, 2018: 257). Jika dikurangi Gereja Katolik Roma, ada empat belas aliran yang berada dalam bingkai agama Kristen sebagai salah satu dari enam agama yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Keseluruhannya meliputi kurang lebih 7% dari jumlah penduduk Indonesia. Acap kali kategori ini merujuk atau diwakili oleh Protestantisme.

Meskipun sub-kategori Protestantisme memang menonjol dalam banyak segi kehidupan, namun menurut tipologi Aritonang hanya sembilan aliran yang bisa

* Dosen dan Peneliti di Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), dan di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.

disebut Protestan. Dari sembilan aliran ini ada banyak turunan dengan keragamannya yang luar biasa, baik dari sisi ajaran maupun organisasi massanya. Tahun 2016 tercatat 330 pimpinan pusat, atau sinode gereja kategori ini, sebagian besar terbentuk akibat perpecahan internal gerejawi. Karena terlalu banyak maka di tahun itu dikeluarkan moratorium oleh Kementerian Dalam Negeri bagi pendirian organisasi massa Kristen (Putro, 2016: 59).

Terlepas dari posisi teologis, ekspresi Kristen Indonesia pun majemuk, mengadopsi identitas berlapis (*multiple belonging*) termasuk dalam penghayatan Ketuhanannya. Ada Kekristenan yang kontekstual dan melakukan proses berteologi dengan merangkul budaya lokal, khususnya di kalangan gereja-gereja etnik. Ada pula yang amat kosmopolitan dan merangkai relasi dengan Kekristenan global (Ong, 2008: 111; band. Simatupang 1984: 6; Mojau, 2004: 108). Yang paling lazim adalah Kekristenan Trinitarian, yang mengadopsi gagasan Tritunggal dalam memahami Keesaan Tuhan, namun ada pula yang non-Trinitarian, dan Kekristenan Timur yang berbeda dengan Kekristenan produk misionaris Barat (mis. Epafras 2014).

Di masa kini, muncul pula Kekristenan yang menghayati Tuhannya secara portabel, diakses lewat tarian jari di gawai. Khususnya mereka dari generasi Y (milenial) dan Z yang lahir antara tahun 1989 dan 2002. Sebagian besar dari mereka secara resmi masih terikat dengan institusi gereja tradisional namun mengembangkan ekspresi iman dan Ketuhanan yang lentur,

non-hirarkis, kosmopolitan, dan memanfaatkan media sosial (medsos) sebagai ruang ekspresi keagamaan. Kosmopolitan menekankan kesadaran identitas seseorang bukan saja terikat pada bangsa dan negeri asal, tetapi juga sebagai warga dunia.

Jadi siapapun yang berbicara atas nama Kekristenan menghadapi tantangan kemajemukan suara ini, dan niscaya menepis peluang suara tunggal. Apa yang saya tawarkan dalam tulisan ini beranjak dari salah satu posisi Protestantisme, khususnya dalam bingkai tradisi Kalvinis-Ekumenikal. Dalam paparan berikut saya berupaya sebisanya menjangkau asumsi teologis kolektif yang mendasari kebanyakan tradisi Kristen, tanpa pretensi sebagai satu-satunya posisi.

## II. Pembahasan

### Hati Asia, Jiwa Bumiputera

Bersyukur negeri permai kita ini sejak purbakala berada dalam ruang interaksi dinamis di Asia Tenggara yang perairannya menghubungkan India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Ruang itu tumbuh sedikit demi sedikit menjadi globalisasi perdana yang berasaskan semangat kosmopolitan. Di ruang itulah perlahan perjumpaan terjadi melalui perdagangan, penyebaran pemikiran, interaksi budaya, pertukaran teknologi dan penyebaran agama-agama.

Kekristenan telah menjadi bagian sejarah masa lampau ini, setidaknya sejak abad 14, bahkan mungkin lebih awal ia sudah hadir di perairan Nusantara (Drakard, 1989: 67–68; Guillot, 2008: 34–35, 57; Steenbrink

and Aritonang, 2008: 4–6; Gilman and Klimkeit 2013: 313). Kehadiran itu ditandai aktifnya saudagar Kristen Persia, Armenia dan Siria yang ulang alik melalui Thailand dan selat Malaka menuju Hainan dan Guangzhou, sehingga senantiasa harus mampir, bahkan menetap di bagian Barat Nusantara (England, 2002: 92–99). Di antara mereka terdapat para rahib Kristen Nestorian yang aktif dalam pekabaran Injil hingga ke sudut-sudut bumi. Mereka menjejak dan berproses mulai dari Lambri (Banda Aceh), Palembang, hingga wilayah kekuasaan Majapahit.

Kekristenan "Timur" ini meredup tanpa banyak warisan, dilanjutkan Katolisisme dan Protestantisme yang dibawa kolonial dan misionaris Portugis dan Belanda pada awal abad 16, pertama-tama di Maluku, lalu Sulawesi Utara, Nusa Tenggara dan ke seluruh kepulauan Nusantara.

Bersama pahit, getir, suka citanya sejarah Indonesia, Kekristenan cair merembes di antara sekian puluh suku-suku di Indonesia, menjadi bagian dari demografi setempat. Di akhir abad 19 dan awal abad 20, orang Kristen banyak mendapatkan manfaat dari misionaris Eropa dan Amerika Serikat, khususnya dalam mentransformasi diri melalui pendidikan, kesehatan dan tradisi agama. Namun merekapun turut menderita karena kolonialisme.

Tak terhitung pengikut Kristus, dari berbagai etnik, termasuk Tionghoa yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam merèka dan merakit bersama kebangsaan Indonesia (Mojau, 2004: 108–9). Nama-nama sep-

erti Pattimura, Christina Martha Tiahahu, Johannes Leimena, Alexander Patty, Johannes Latuharhary, A. A. Maramis, Wanda Maramis, Sam Ratulangi, Thomas Najoan, Todung Sutan Gunung Mulia, T. B. Simatupang, John Lie, Wolter Monginsidi, aktif meletakkan dasar berbangsa di bumi Pancasila ini. Sumpah Pemuda 1928 adalah salah satu tonggak kesadaran nasionalisme kaum Kristen terhadap persatuan Indonesia (Ngelow, 1994; Klinken, 2003: 207–35).

Tak hanya itu. Karena dalam setiap proses perjumpaan selalu ada konflik tapi juga akomodasi, Kekristenanpun terus menerus menggumuli dirinya dalam perjumpaannya dengan beragam kekayaan konteks lokal. Proses konflik-akomodasi ini senantiasa menantang karena bagi sebagian orang Kristen, Kekristenan sering dipandang setarik senafas dengan kemajuan dan modernitas yang dibawa bangsa Barat.

Demikian juga dengan makna Injil sebagai inti Kekristenan. Membumikannya jauh dari perkara mudah karena orang Kristen Indonesia senantiasa memperdebatkan batas-batas Injil yang harus disesuaikan dan yang asasi. Akibatnya tipe Kekristenan yang dihasilkan oleh proses sejarah ini majemuk, semajemuk kekayaan budaya Indonesia (band. Simatupang, 1984: 6, 18–21; Mojau, 2004: 108–9).

Komunitas Kristen tak mesti menjadi Barat, seperti yang dinyatakan tegas oleh komunitas Kyai Sadrach dan Kyai Tunggul Wulung, yang sejak semula dengan kreatif mengembangkan jiwa Kekristenan yang bercorak lokal (Guillot, 1985; Partonadi, 1988). Semangat ini

senantiasa dihidupi khususnya di kalangan gereja-gereja berbasis etnik dan dikembangkan hingga saat ini melalui wacana teologi kontekstual. Bentang ini semakin kaya dengan hadirnya kembali aliran-aliran gereja "Timur," semacam gereja Ortodoks di bumi Nusantara ini setelah senyap sekian abad.

Dengan tepat John Prior menyimpulkan Kekristenan Indonesia, "mungkin saja pemikiran formal dan cara menyelenggarakan aktivitas gerejawi mereka seperti Kekristenan Barat, namun" lanjutnya, "hati mereka Asia, jiwa mereka bumiputra" (2011: 62). Tambatan hati mereka tetaplah Indonesia. Mereka berakar dalam "jiwa, kalbu, dan semangat kebangsaan Indonesia yang melampaui batas-batas etnis" (Mojau, 2004: 108–9). Sebab, sebagaimana judul buku Yewangoe, *Tak Ada Penumpang Gelap* (2009). Kekristenan dan orang Kristen Indonesia bukanlah penumpang gelap.

Maka tak sedikitpun ganjil jika sejak persiapan kemerdekaan Indonesia wakil-wakil Kristen menunjukkan keluwesan dan pada akhirnya bersedia menyambut kompromi dan konsensus dalam perdebatan dasar negara Pancasila, khususnya sila Ketuhanan (Boland. 1982, 37; Utomo, 1993: 24; Picard, 2011: 483n3; Fogg, 2020: 134n14). Simatupang, pemikir Kristen yang bergumul tentang hubungan iman Kristen dan Pancasila menegaskan, "tidak ada dalam Pancasila yang bertentangan dengan iman Kristen … asalkan pemahaman lima sila dibiarkan terbuka dan Pancasila tidak menjadi doktrin tertutup" (1984, 206; Intan 2008: 150).

**Pancasila "Rumah Bersama"**

Sekalipun secara formal Pancasila dapat diterima dengan mudah oleh umat Kristen, posisinya perlu ditegaskan dalam kaitan pemahaman Ketuhanan versi Kristen. Bagi Darmaputera, Pancasila bukanlah konsensus nilai-nilai itu sendiri:

> Pancasila adalah kerangka di dalam mana semua kelompok dalam masyarakat Indonesia melalui suatu proses dialog karya yang berkesinambungan dimungkinkan untuk mencapai konsensus demi konsensus di dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah bersama yang secara historis dihadapi. Melalui proses inilah, proses transformasi itu terjadi (1987, 159).

Jadi sila pertama, yang merupakan jiwa Pancasila, memberikan "kerangka fungsional" bagi semua pihak merumuskan apa yang benar dan baik menurut keyakinannya. Darmaputera meyakini bahwa pada titik ini semua pihak berpeluang memberikan sumbangan pada nilai bersama. Pancasila "mengandung kebenaran universal yang dapat diterima oleh semua pihak," tegasnya (Darmaputera, 1987: 159).

Sementara menurut amatan Ngelow, Pancasila adalah "rumusan politis" bukan "rumusan teologis." Pancasila berfungsi sebagai "rumah bersama" bagi kebangsaan kita di mana semua pihak, termasuk Kekristenan memberi sumbangannya bagi kemajuan bangsa (Ngelow, 2014: 221).

Dalam tafsir yang sedikit berbeda, Pancasila bisa disebut semacam perwujudan kemajemukan berbasis kesepakatan (*covenantal pluralism*). Gagasan ini

bersumber dari tradisi Yudaisme dan Kristen tentang perjanjian (*covenant*), mirip gagasan *akad* (*'aqd*) dalam tradisi Islam. Yaitu, kontrak yang disepakati syarat-syaratnya oleh semua pihak, Tuhan dan umatNya untuk mencapai tujuan keagamaan bersama.

*Covenantal pluralism* meletakkan kontrak tersebut dalam konteks kemajemukan dan beragam akses kepada Tuhan oleh beragam umat, namun mempunyai tujuan kolektif dan publik yang sama. Kemajemukan dalam wacana ini bukan sekedar hidup damai di antara beragam penganut agama tetapi adanya kesediaan dan upaya aktif untuk berjumpa, saling menghormati dan saling melindungi, tanpa membuat klaim keseragaman moral dan keyakinan (Seiple, 2018: Hefner 2020; band. Korn, 2005). Meskipun demikan kesadaran ini perlu dikembangkan terus menerus agar tidak disalah gunakan oleh mereka yang berjuang bagi versi tunggal tafsir keagamaan publik (band. Hefner, 2020: 17).

Pancasila menjadi "rumah bersama" bagi Kekristenan bukan tanpa dinamika. Sejak surat edaran Kementerian Agama tahun 1985 kepada seluruh agama di Indonesia untuk menerima Pancasila sebagai "azas tunggal" dan dipersepsikan sebagai dasar yang melampaui Alkitab Kristen, perdebatan internal pun terjadi, bukan semata soal substansi Ketuhanan dan kebangsaannya, tetapi juga "kecurigaan" akan munculnya agama tunggal resmi negara, yang mematikan kebebasan beragama (Aragon, 2000: 309).

Demikian pula banyak sekali kasus-kasus diskriminasi dan ketegangan sosial yang membuat "rumah ber-

sama" ini perlu diperjuangkan senantiasa. Tentu saja mereka bukan selalu menjadi korban, karena di daerah mayoritas Kristen, pihak lain yang menjadi lawan tarung umat Kristen (Husein, 2005; Mujiburrahman, 2006; Hefner, 2020).

Sejak runtuhnya Orde Baru dan Indonesia memasuki era transisi Reformasi, bangsa kita mendapat tawaran luar biasa untuk belajar menjadi bangsa yang lebih demokratis dan menghayati keberagaman. Namun proses pembelajaran ini sangat mahal harganya karena ia seperti membuka kotak Pandora: seluruh beban yang ditahan-tahan selama tiga puluh tahun seketika meletup dan merebak ke mana-mana.

Keberagaman budaya, suku, agama, dan aliran berubah menjadi politik identitas yang parokial dan konfrontatif. Perjumpaan itu semakin apologetis, pembelaan iman kelompok sambil menyerang dan mendiskreditkan iman orang lain. Seakan-akan iman kita sangat bergantung pada pandangan orang terhadap apa yang kita percayai. Beragama semakin lama semakin, meminjam istilah Psikologi, *obsessive compulsive*, semakin garang, gahar, siap tarung, siap berantem, mudah *nge-gas* kepada mereka yang berbeda keyakinan.

Tantangan lain bagi "rumah bersama" ini adalah integrasi teknologi komunikasi dan informasi digital yang memudahkan relasi lintas batas kelompok bahkan negara. Teknologi tersebut menciptakan masyarakat jejaring dan efek tak terduganya adalah mengentalnya identitas sosial keagamaan yang membuka jalan pada model-model keagamaan yang puritanistik dan tertutup

(Castells, 2004, 2015). Teknologi mengantarkan pada pemampatan proses beragama, yang hanya mau mendengar apa yang disuka dan berkalang dengan mereka yang sepaham saja, akibatnya polemik lintasagama menjadi lazim. Kita pun hidup di zaman bergegas yang membuat pemahaman keagamaan serba instan, belajar agama hanya dengan *klik* sini dan *klik* sana.

Pada konteks ini terjadi pergeseran otoritas agama, dari yang tradisional kepada yang selebritas, hirarkis ke heterarkis (beragam rujukan otoritas), intelektual ke naratif, personal, dan menekankan pengalaman, dan akhirnya refleksi diganti dengan yang refleksif, serba mudah bereaksi tanpa pikir panjang (Epafras, Djalong, and Kaunang 2018; Epafras, Kaunang, and Asri 2019).

Gejala ini dalam amatan lain adalah bagian dari proses deprivatisasi agama, yaitu sebentuk "pemberontakan" dunia pasca-kolonialisme dari hegemoni Barat dan wacana modernism yang salah satu capaiannya adalah mengurung agama dalam ruang privat atau pada ranah non-politis (Casanova, 1994; lih. juga Bayat, 2007).

Tantangan ini menguat melalui hadirnya wacana transnasional baik melalui relasi langsung maupun dimediasi oleh teknologi internet dan medsos. Wacana agama transnasional ini sering memicu polarisasi di Indonesia, sektarianisme dan meningkatnya intoleransi antar agama.

Karena itu sangat penting untuk menemukan pemahaman Ketuhanan yang ramah, inklusif tanpa ke-

hilangan relevansi dengan zaman bergegas ini. Memahami ulang Ketuhanan yang berpotensi menginspirasi relasi-relasi sosial yang memoderasi ketegangan sosial, maupun sebagai *information arbiter* (penengah informasi) dalam konteks medsos. Penengah informasi ini berfungsi menjadi penengah yang menenangkan pihak-pihak yang bertikai, tanpa mengabaikan keberadaan perbedaan tersebut (Epafras, 2019: 73, 78).

## Ketuhanan Yang Maha Esa: Perspektif Seorang Kristen

> Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
>
> (1 Korintus 12:4-6)

Di tengah keberagaman ekspresi Kristen, Kristen adalah agama monoteis yang menjunjung satu pribadi ilahi. Kutipan ayat di atas hanyalah satu dari sekian banyak rujukan Alkitab Kristen tentang keesaan Tuhan. Ini adalah titik hubung dasariah dengan sila pertama. Pemahaman Kristen terhadap Ketuhanan berdasarkan pada keyakinan akan Tuhan yang melampaui sejarah, sekaligus yang bekerja dalam sejarah, “yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.”

Hubungan sila Pertama dan gereja diejawantahkan dalam Lima Dokumen Keesaan Gereja yang ditelurkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 1994 (1996: 55–56):

Allah menjadikan gereja itu sebagai suatu perse-

> kutuan yang mengaku satu tubuh, satu Roh dalam ikatan damai sejahtera, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua … dan bahwa gereja telah beroleh mandat dari Yesus Kristus bagi dunia ini … Persekutuan itu dikuduskan dalam kebenaran (Yohanes 17:17-19). Dengan demikian gereja itu kudus. Pengudusan itu dilakukan oleh Kristus yang telah menguduskan diri-Nya bagi gereja (Yohanes 17:19) dan menguduskan gereja itu sebagai umat kepunyaan-Nya (Titus 2:14; 1 Petrus 2:9). Persekutuan yang dikuduskan itu diutus-Nya ke dalam dunia. Maka gereja itu ada di dunia tetapi bukan dari dunia (Yohanes 17:14-18).

Melalui pernyataan di atas teologi Kristen bergerak lebih jauh, sebab keesaan Tuhan dipahami dengan cara unik melalui manifestasi Trinitas/Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristus menjadi pribadi sentral sebab orang Kristen percaya melaluiNya penebusan diselenggarakan. Melalui Dia orang Kristen memahami hubungannya dengan Tuhan. Tanpa Kristus tidak ada Kekristenan. Keesaan ini juga diperkuat melalui kuasa Tuhan yang bekerjasama menghubungkan umatNya dengan Tuhan dan Yesus Kristus. Kuasa ini disebut Roh Kudus. Roh Kudus yang memungkinkan akses kepada keesaan Tuhan, mengerti kehendak Kristus, menghidupi nilai-nilai Kristiani, mewujudkan Kerajaan Allah, dan bergerak bersama menyongsong penebusan dunia yang purna.

"Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki kekayaan makna sebab kata sifat "Esa" bagi komunitas Kristen dipahami cukup luas. Bagi kaum Kristen tauhid atau

mereka yang non-Trinitarian, sila ini seketika selaras dengan penghayatan mereka. Bagi Kristen arus utama, "Esa" berarti diwujudkan dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya punya hubungan yang erat, dinamis, dan bagi teolog Kristen Timur menjadi model persekutuan sejati, bersifat mutualistik di antara Tuhan dan manusia, manusia dan sesama manusia. Jalinan erat dan dinamis ini berada dalam wacana *perikhoresis*.

Konsep *perikhoresis* dalam teologi Trinitarian, yaitu tiga manifestasi Ketuhanan di dalam dirinya saling berbagi kuasa dan hidup satu dengan yang lain. Konstruksi teologis ini memberi ruang dan teladan yang amat kaya bagi kerjasama intra-agama maupun antar-agama sebab yang Ilahi sendiri sudah memberi teladan. Wawasan ini sangat penting khususnya dalam konteks Kekristenan di Asia Tenggara yang masyarakatnya majemuk dan non-Kristen (Oo, 2011: 81). Tidak relevan membangun konsep Trinitarian yang eksklusif dan menarik orang lain ke dalam dirinya alias di Kristenkan. Wawasan Trinitarian ini justru menebar kuasa kebaikan dan pemulihan ke dunia ciptaan Tuhan.

Sebagaimana dikembangkan Adiprasetya, di dalam kerangka *perikhoresis* ini nilai-nilai fundamental semacam kasih, kesetaraan, kebersamaan, dan kebebasan, nilai-nilai yang disebutnya "*the grammar of faith*" (bahasa iman) dapat dipercakapkan kepada mereka yang bukan Kristen dari perspektif yang sepenuhnya Kristen (Adiprasetya, 2016: 41). Tentu tanpa niatan mengkristenkan pihak lain, melainkan sebagai jalan untuk

bekerja sama mencapai kebaikan bagi semua.

Selanjutnya ia menawarkan bahwa Trinitarian harus dipandang sebagai dinamika yang hidup dan manifestasi kemajemukan Tuhan yang Esa, sekaligus sebagai model ruang publik di mana semua pihak, termasuk mereka yang non-Kristen berpartisipasi dalam persekutuan dengan yang Ilahi. Suatu relasi yang kreatif, imajinatif sekaligus penuh ketegangan sebab tidak ada kepastian relasi yang mapan dan tanpa konflik. Semua kondisi ini diterima sebagai "politik hidup" (*politics of life*) yang mengajak semua pihak berjuang bagi kebaikan bersama. Inilah sumbangan Kristen bagi moderasi di tengah polarisasi agama di Indonesia.

Dimensi lain dari gambaran Trinitarian ini adalah keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus dalam Kekristenan merupakan perwujudan aspek ilahi yang sepenuh hati memberi perhatian bagi dunia ini. Dalam bahasa Injil Yohanes, Kristus adalah tanda kasih Tuhan kepada ciptaanNya. Ini yang disebut sebagai Tuhan yang *pathos* kepada dunia. Kata *pathos* berarti "mengalami, merasakan, emosi, hasrat, gairah." Kata ini menjadi pembentuk kata yang lazim dalam bahasa Indonesia khususnya, *simpati* (*syn*+*pathos*) dan *empati* (*en*+*pathos*) yang sering bertukar makna.

Watak Tuhan semacam ini mencintai, jengkel, marah, gemas tapi sekaligus sayang dan ikut sedih dengan penderitaan dunia ini (Epafras, 2020: 14–15). Inilah jalan masuk bagi Ketuhanan Kristen yang mendorong orang Kristen terlibat aktif dalam persoalan dunia ini. Sama seperti Tuhan *pathos* kepada dunia, maka orang

Kristen pun *pathos* terhadap sesama.

Jika Ketuhanan Kristen adalah ketuhanan yang semacam itu, maka dalam konteks zaman bergegas, Tuhan pun ikut berderap gegas bersama umat manusia. Ia bukan saja Tuhan yang transenden tapi juga imanen, bahkan imanen dalam jejaring komunikasi digital, dihadirkan oleh orang Kristen melalui sikap santun, mengayomi, penuh tenggang rasa dan senantiasa mencari jalan kesepakatan. Semangat inilah yang menjadi kunci bagi posisi sebagai *information arbiter* yang menengahi dan menenangkan ketegangan dalam polarisasi.

## Panggilan Rangkap

Wacana *pathos* merangkum relasi vertikal melalui sila Ketuhanan tentu berdampak pada relasi horizontal, baik secara efektif maupun potensial. Relasi horizontal akan lebih jelas pada penggalian keempat sila lainnya. Maka pada bagian ini akan dibahas mengenai lokasi penghayatan Ketuhanan melalui komunitas dan situs sosial lainnya, yang senantiasa bergeser dan berubah. Perubahan pada aras ini berdampak pada model Ketuhanannya juga.

Untuk dapat menghayati Ketuhanan dalam situs sosial dan berjuang bersama dengan pihak lain, berinteraksi yang bermakna dan prospektif dengan sila Ketuhanan, maka agama Kristen dapat dilihat dalam dua segi. Yang pertama, sebagai agama publik, agama yang dihayati oleh publik dan berkenaan dengan kepentingan publik (Intan, 2008). Yang kedua, eksplorasi teologisnya menjadi teologi publik sehingga potensi sila

pertama dapat digali, dikembangkan dan dieksplorasi melalui kaca mata Kristen, dan ditransformasi menjadi nilai-nilai praksis Kristen yang selaras dengan sila Ketuhanan tersebut. Dalam bahasa Kristen praksis ini mewujudkan Kerajaan Allah di dunia melalui pertobatan individual dan sosial.

Bersama dengan Yudaisme dan Islam, Kristen adalah agama profetis. Bukan semata karena sederet nabi yang ada dalam tradisi mereka, tetapi juga panggilan untuk memperbaiki dunia ini.

> "Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu" (Ulangan 16:20).
>
> Lagi pesan Nabi Yeremia bagi umat Tuhan,
>
> "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu" (Yeremia 29:7).

Pesan kepada umat Israel di Perjanjian Lama juga menjadi panggilan umat Kristen. Yaitu mengusahakan keadilan dan kesejahteraan di manapun orang Kristen hadir. Sekalipun memang pengejawantahannya selalu berada dalam ketegangan.

Sejak dini komunitas Kristen bergumul pada tujuan-tujuan panggilan Kekristenan apakah mewujudkan masyarakat Kristiani ataukah Kerajaan Allah? Jika masyarakat Kristiani, maka bagaimana itu bisa terwujud dalam konteks masyarakat yang mayoritasnya Muslim dan majemuk dalam tradisi keagamaan? Apa-

kah ia harus berupa *Kristonormativitas*, sejenis wacana *khilafah* versi Kristen, yang mengejar penguasaan politik yang diwarnai bukan saja ajaran-ajaran dan nilai-nilai Kristiani, tetapi juga kehadiran narasi dan simbol Kristianitas, semacam yang diperjuangkan oleh *the Christian Right* di Amerika Serikat?

Memang membutuhkan pemaknaan ulang wacana Kerajaan Allah sebagaimana dipahami secara tradisional, yaitu oleh sebagian orang Kristen dimengerti semata sebagai Kristenisasi dan/atau *Kristonormativitas*. Kerajaan Allah dalam konteks Ketuhanan yang *pathos* mewujud dengan menyediakan ruang bagi perbedaan dan kesiapan bekerja sama dengan pihak lain. Semua itu dilandasi kesadaran bahwa perwujudan Kerajaan Allah pada akhirnya adalah pemerintahan Allah atas hidup manusia, bukan pemerintahan manusia dengan ciri dan watak agamis tertentu. Dalam bahasa Kristen, orang Kristen harus menjadi "terang" dan "garam" bagi dunia (Matius 5:13-16).

Ada beragam ekspresi tentang umat Tuhan dan pengikut Yesus yang tercermin dalam Alkitab. Namun yang paling kuat adalah *ekklesia*. *Ekklesia* dalam bahasa Yunani berarti "dipanggil keluar." Dalam konteks Kristen kata ini berarti orang yang dipanggil keluar untuk menyambut keselamatan melalui Kristus. Tetapi kata ini berakar dari budaya Yunani yang spektrum maknanya luas. Salah satu yang relevan adalah di abad enam Sebelum Masehi, *ekklesia* di Athena merupakan perkumpulan warga untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib kotanya atau negerinya (lih. Korner,

2017). Makna ini tetap membayangi *ekklesia* sebagai panggilan Kristiani yang terus meminta tanggung jawab orang Kristen untuk juga "dipanggil keluar" terlibat dalam proses perbaikan masyarakat.

Sebagai lokasi pengamalan sila Ketuhanan, maka ada panggilan rangkap Kekristenan Indonesia, yaitu menjadi *ekklesia* sebagai persekutuan kaum Kristen dalam mewujudkan idealisme komunitas, dan *ekklesia* sebagai panggilan sebagai warga negara yang terlibat dalam penciptaan kesejahteraan bersama.

*Ekklesia* di zaman bergegas juga berupa *e-kklesia*, *electronic ekklesia*, yaitu memanfaatkan teknologi digital membangun komunitas anggitan lintas ruang dan waktu. Yaitu komunitas Kristen tidak lagi sebatas pada lembaga, tetapi juga mengandalkan individu-individu yang membawa nilai-nilai Kristiani ini. Salah satunya melalui perwujudan keramahan terhadap sesama, menjadi *information arbiter* di tengah ruang medsos yang bising dan terpolarisasi.

## III. Penutup

Pada akhirnya kombinasi Keesaan Tuhan dan *ekklesia* merupakan perwujudan Ketuhanan yang *pathos*, yang perlu mewujud dan efektif dalam diri individu dan komunitas Kristen. Tuhan ini adalah Tuhan yang punya rasa dan *greget* terhadap dunia ciptaanNya. Bukan semacam Tuhan yang jauh dari persoalan sosial. Di zaman bergegas, era pandemi, dalam konteks polarisasi lintasagama, dan keadilan sosial yang masih jauh, pengikut Kristus tergerak hatinya mewujudkan *pathos*

bagi sesama.

Karya berbagai jaringan lintasiman di mana individu dan komunitas Kristen ikut terlibat aktif selama pandemi adalah wujud nyata dari pengejawantahan Ketuhanan yang *pathos* ini. Jaringan kaum muda Kristen Hijau adalah teladan lain memanfaatkan medsos untuk mendorong pertobatan ekologis terhadap bumi yang semakin terluka ini. Ini hanyalah contoh kecil potensi penghayatan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bingkai Ketuhanan yang *pathos*.

Semua itu dihidupi sebab orang Kristen percaya pada kebaikan Tuhan bagi semua orang.

> TUHAN itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya.
>
> TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya.
>
> (Mazmur 145:8-9)

## Referensi

Adiprasetya, Joas. 2016. “The Trinitarian and the Public Space.” Dalam *Interactive Pluralism in Asia: Religious Life and Public Space*, peny. Simone Sinn dan Wing Tze Tong, 33–42. Geneva: Lutheran World Federation.

Aragon, Lorraine V. 2000. *Fields of the Lord: Animism, Christian Minorities, and State Development in Indonesia*. Honolulu: University of Hawai’i Press.

Aritonang, Jan Sihar. 1999. *Berbagai Aliran di dalam*

*dan di sekitar Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

———. 2018. "Christians in Indonesia." Dalam *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, peny. Robert W. Hefner, 257–66. London dan New York: Routledge.

Bayat, Asef. 2007. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Boland, Bernard Johan. 1982. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Casanova, José. 1994. *Public Religions in the Modern World*. Amazon Kindle. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Castells, Manuel. 2004. *The Power of Identity*. Malden, MA: Blackwell Publishing.

———. 2015. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. 2nd ed. Cambridge dan Malden: Polity Press.

Darmaputera, Eka. 1987. *Pancasila: identitas dan modernitas: tinjauan etis dan budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Drakard, Jane. 1989. "An Indian Ocean Port: Sources for the Earlier History of Barus." *Archipel* 37: 53–82.

England, John C. 2002. *The Hidden History of Christianity in Asia: The Churches of the East before 1500*. Delhi dan Hong Kong: ISPCK dan CCA.

Epafras, Leonard Chrysostomos. 2014. "The Trepidation of the Name: 'Allah' as the Polemical Space among

Indonesian Christians." Dalam *Science, Spirituality and Local Wisdom: Interdisciplinary Approaches to Current Global Issues*, 871–98. Yogyakarta, Indonesia: Sekolah Pascasarjana UGM. doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.4283315.

———. 2019. "Agama Dan Mayantara (Internet)." Dalam *Modul Pengayaan Wacana Keagamaan Bagi Penyuluh Agama*, peny. Edi Junaedi, 61–79. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. https://doi.org/10.5281/zenodo.4285740.

———. 2020. "Pandemi Tak Kunjung Padam: Corona, Kon Ora Dan Keramahan Organik." Dalam *Corona vs Kon Ora: Refleksi Teologi Keramahan Dalam Konteks Pandemi*, peny. Leonard Chrysostomos Epafras, 1–27. Yogyakarta: Alaf Media. https://doi.org/10.5281/zenodo.4270495.

Epafras, Leonard Chrysostomos, Fransiskus Agustinus Djalong, dan Hendrikus Paulus Kaunang. 2018. "Beyond Signal and Noise: Academics Goes Hoax and Hoaxtivism." *Kawistara* 8 (3): 347–261. https://doi.org/10.22146/kawistara.34646.

Epafras, Leonard Chrysostomos, Hendrikus Paulus Kaunang, dan Syamsul Asri. 2019. "Religious Blasphemy and Monitory Society in Indonesian Digital Age." *Kawistara* 9 (2): 220–30. https://doi.org/10.22146/kawistara.41169.

Fogg, Kevin W. 2020. *Indonesia's Islamic Revolution*. Cambridge dan New York: Cambridge University

Press.

Gilman, Ian, dan Hans-Joachim Klimkeit. 2013. *Christians in Asia before 1500*. London dan New York: Routledge.

Guillot, Claude. 1985. *Kiai Sadrach: Riwayat Kekristenan Di Jawa*. Terj. Asvi Warman Adam. Jakarta: Grafiti Pers.

———. 2008. *Barus seribu tahun yang lalu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Hefner, Robert W. 2020. "Islam and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Critical Juncture Analysis." *The Review of Faith & International Affairs* 18 (2): 1–17.

Husein, Fatimah. 2005. *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims' Perspectives*. Bandung: Mizan.

Intan, Benyamin Fleming. 2008. *"Public Religion" and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York: Peter Lang.

Klinken, Geert Arend van. 2003. *Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christians in Indonesia, a Biographical Approach*. Leiden: KITLV Press.

Korn, Eugene B. 2005. "One God, Many Faiths: A Jewish Theology of Covenantal Pluralism." Dalam *Two Faiths, One Covenant? Jewish and Christian Identity in the Presence of the Other*, peny. Eugene B. Korn dan John T. Pawlikowski, 147–54. Lanham, Md., Toronto, dan Oxford: Rowman & Littlefield.

Korner, Ralph J. 2017. *The Origin and Meaning of Ekklē-*

*sia in the Early Jesus Movement*. Leiden dan Boston: Brill.

Mojau, Julianus. 2004. "Teologi Politis T.B. Simatupang: Sebuah Telaah Kritis." *Gema Duta Wacana* 59: 107–26.

Mujiburrahman. 2006. "Feeling Threatened: Muslim-Christians in Indonesia's New Order." Disertasi PhD, Utrecht: ISIM.

Ngelow, Zakaria J. 1994. *Kekristenan dan nasionalisme: perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan pergerakan nasional Indonesia, 1900-1950*. Jakarta: Gunung Mulia.

———. 2014. "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama: Peran Gereja dalam Politik di Indonesia." *Jurnal Jaffray* 12 (2): 213–34.

Ong, Susy. 2008. "Ethnic Chinese Religions: Some Recent Developments." In *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia*, peny. Leo Suryadinata, 97–116. Singapore: ISEAS.

Oo, Stephen Than Myint. 2011. "The Life and Witness of the Church in Myanmar: Past, Present and Future." Dalam *Church Partnerships in Asia: A Singapore Conversation*, peny. Michael Nai-Chiu Poon, 79–90. Singapore: Genesis Books dan Trinity Theological College.

Partonadi, Sutarman. 1988. *Sadrach's Community and Its Contextual Roots*. Amsterdam: Rodopi.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. 1996. *Lima*

*dokumen keesaan gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (LDKG-PGI): keputusan Sidang Raya XII PGI, Jayapura, 21-30 Oktober 1994*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Picard, Michel. 2011. "Balinese Religion in Search of Recognition: From Agama Hindu Bali to Agama Hindu (1945-1965)." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 167 (4): 482–510.

Prior, John. 2011. "Indonesia." In *Christianities in Asia*, peny. Peter C. Phan, 61–75. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Putro, Zaenal Abidin Eko. 2016. "Potret Ketegangan Internal Sinode Non Mainstream Studi Kasus Gereja Am GPR Manado Ditinjau Dari Sosiologi Organisasi." *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 15 (1): 54–67.

Seiple, Chris. 2018. "Faith Can Overcome Religious Nationalism. Here's How." *World Economic Forum*. 18 April. https://www.weforum.org/agenda/2018/04/faith-can-overcome-religious-nationalism-heres-how/.

Simatupang, Tahi Bonar. 1984. *Iman Kristen dan Pancasila*. Jakarta: Gunung Mulia.

Steenbrink, Karel A., dan Jan Sihar Aritonang. 2008. *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden dan Boston: Brill.

Utomo, Bambang Ruseno. 1993. *Hidup Bersama Di Bumi Pancasila*. Malang: Pusat Studi Agama dan Kebudayaan.

Yewangoe, Andreas Anangguru. 2009. *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa*. Jakarta: Biro Litkom PGI dan BPK Gunung Mulia.

# MENJADI BERKAT BAGI MASYARAKAT DAN BANGSA

*Baskara T. Wardaya**

## I. Pendahuluan

Sebagai sila pertama dalam urutan sila-sila Pancasila, dalam sejarahnya urutan penyebutan dan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak langsung disepakati oleh para perumus Pancasila. Sebagaimana kita ingat, pada hari pertama sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 29 Mei 1945, ketika menyampaikan usulan dasar negara, Muhammad Yamin mengusulkan lima dasar negara, dan salah satunya adalah "peri ketuhanan". Namun demikian dasar "peri ketuhanan" itu ia letakkan pada urutan ketiga.

Sementara itu ketika Bung Karno menyampaikan pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dan mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, ia juga mengusukan lima dasar, dan salah satunya adalah dasar Ketuhanan. Tetapi ia meletakkan dasar tersebut pada urutan kelima. Itupun dengan bunyi rumusan "Ketuhanan yang berkebudayaan". Selanjutnya ketika Panitia Sembilan mengadakan pertemuan dan mengusulkan dasar bagi

* Dosen Sejarah dan Kajian Budaya di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

negara Indonesia merdeka, para anggotanya menempatkan Ketuhanan pada urutan pertama, namun dengan rumusan yang berbeda dengan sila pertama yang nantinya dimuat dalam pembukaan UUD 1945 (Laboratorium Pancasila, 1978: 26-30).

Meskipun letak urutan dan rumusannya berbeda-beda, kita bisa memastikan bahwa dasar dan semangat Ketuhanan selalu hadir dan memiliki tempat tersendiri dalam pemikiran para perumus Pancasila. Semangat Ketuhanan tersebut selalu dipandang sebagai dasar yang menjiwai seluruh hidup dan sepak terjang bangsa Indonesia yang waktu itu kemerdekaannya sedang disiapkan dan diperjuangkan. Dalam sidang BPUPKI itu sendiri memang terjadi banyak silang pendapat dan pandangan terkait hubungan negara dan agama. Namun demikian segenap peserta sidang sepakat bahwa prinsip Ketuhanan hendaknya menjadi dasar utama dari berdirinya Indonesia merdeka (Latif, 2017: 9).

Bung Karno sendiri, sebagai salah seorang peserta dalam sidang BPUPKI tersebut, dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 itu dengan lantang menyampaikan: "Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan". Ia lantas berseru: "Marilah kita semuanya ber-Tuhan" (Latif, 2017: 2-3). Seruan yang sama ia sampaikan ketika dengan jelas berkata: "Hatiku akan berpesta raya jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'" (Soekarno, 1984: 24-25; Latif, 2017: 66). Oleh karena itu tepat kiranya jika dikatakan bahwa semangat

Ketuhanan sebagai pandangan hidup memiliki tempat tersendiri yang amat tinggi dalam proses penyusunan dasar negara Indonesia merdeka (Latif, 2017:2). Para pendiri Republik ini bahkan yakin bahwa kesempatan untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan merupakan hasil memanfaatkan kesempatan dari vakum kekuasaan yang disebabkan oleh bom atom yang dijatuhkan di Jepang oleh pihak Sekutu, melainkan berkat Rahmat dan campur tangan Tuhan sendiri (Latif, 2017: 11).

## II. Pembahasan

### Ber-Tuhan Secara Berkebudayaan

Adanya semangat dan jiwa Ketuhanan dengan demikian menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya masalah relasi sosial dan politik antar-manusia. Ia adalah juga merupakan bagian dari *perwujudan keyakinan religius* setiap orang sebagai warganegara. Bagi bangsa Indonesia kehidupan sosial-politik memiliki dimensi horisontal, namun sekaligus memiliki dimensi vertikal. Dimensi horisontal mengacu pada relasi satu sama lain sebagai sesama warganegara, sedangkan dimensi vertikal mengacu pada relasi antara manusia dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber dan penyelenggara kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dimensi horisontal dan vertikal itu tidak hanya terkandung dalam sila-sila Pancasila pada umumnya, melainkan juga secara khusus dalam sila Ketuhanan itu

sendiri. Melalui sila Ketuhanan para pendiri Republik berharap bahwa keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya berhenti pada keyakinan invididual yang sifatnya vertikal tetapi tanpa penduli pada keyakinan religius orang-orang lain, melainkan yang juga bersifat horisontal dalam arti mewujud dalam relasi dengan sesama warganegara yang lain, bahkan dengan yang keyakinannya akan Tuhan yang Maha Esa itu diekspresikan dengan cara yang berbeda. Dalam sila pertama ini terkandung harapan bahwa dalam praktik hidup sehari-hari, baik dimensi vertikal maupun horisonal itu menyatu, mewujud nyata, dan saling melengkapi.

Itulah sebabnya dalam pidato di hadapan sidang BPUPKI yang sama Bung Karno menegaskan: "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa." Lalu ia tambahkan: "Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!" (Latif, 2017: 2-3). Di sini dengan jelas Bung Karno ingin menegaskan bahwa hendaknya negara Indonesia itu berdasarkan ketuhanan, dan bahwa hendaknya setiap warganegara Indonesia itu juga mendasarkan hidupnya pada Tuhan. Pada saat yang sama ia menolak apa yang ia sebut sebagai "egoisme agama," di mana orang hanya menekankan dimensi vertikal dari keberagamaannya dan hanya mementingkan agamanya sendiri. Bung Karno mendorong supaya dalam beragama orang sekaligus "berkebudayaan" dalam arti menempatkan keyakinan agamanya itu dalam

konteks sosial yang lebih luas seraya menghormati warganegara lain yang juga berketuhanan, meskipun wujud agamanya berbeda.

**Mewujud**

Dalam kaitan dengan hal ini pemahaman akan sila Ketuhanan tidak cukup hanya mengejawantah dalam berbagai bentuk ritual-simbolik atau etika personal, melainkan harus juga terekspresi dalam upaya-upaya bersama untuk membentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin mendekati cita-cita para pendiri bangsa. Seseorang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu mewujudkan iman itu dalam hidup sehari-hari sebagai warganegara. Dalam ungkapan Bung Hatta, "Penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan adalah inti [dari] sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa" (Latif, 2017: 35). Dengan kata lain, apa pun agama yang dianut oleh orang lain, sejauh kita menjunjung tinggi sila Ketuhanan dan sejauh kita yakin bahwa orang lain itu adalah juga makhluk ciptaan Tuhan seperti kita, maka kita harus menghargai orang lain itu.

Bung Hatta pernah pula menyampaikan sebuah ibarat yang menarik untuk menerangkan bagaimana sila Ketuhanan itu dijalankan dalam hidup nyata. Menurut Bung Hatta, cara beragama itu tidak boleh ibarat orang yang memakai gincu *(lipstick)*. Orang-orang lain bisa melihat tetapi mereka tidak bisa merasakan manfaatnya. Sebaliknya, masih menurut Bung Hatta, cara beragama yang baik itu ibarat garam yang ada dalam sebuah larutan: tidak bisa dilihat dengan mata,

namun kehadirannya bisa dirasakan oleh setiap orang yang menikmatinya (Latif, 2017: 24). Dalam bahasa Bung Karno: "Orang tidak dapat mengabdi pada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia" (Latif, 2017: 29).

Bahkan jauh-jauh hari sebelum Ketuhanan itu dirumuskan sebagai salah satu dasar bagi berdirinya Republik Indonesia, Raden Ajeng Kartini (1879-1904) sudah mengingatkan: "Saling menolong dan membantu serta saling mencintai itulah dasar segala agama" (Latif, 2017: 44). Dalam nada yang sama mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur, 1940-2009) juga pernah mengingatkan kita semua tentang betapa pentingnya keyakinan akan Tuhan itu mewujud dalam sikap kasih kepada sesama manusia: "Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu" (Latif, 2017: 4). Menjadi jelas kiranya bahwa dalam upaya memahami sila Ketuhanan itu yang lebih mendesak bagi kita bukanlah memperdebatkan hakekat Tuhan (yang notabene tak akan pernah terselami oleh kemampuan akal budi manusia), melainkan bagaimana pemahaman akan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kasih itu mewujud dalam tindakan-tindakan konkrit kita sebagai warga masyarakat dan warganegara.

## Contoh Paripurna

Sadar akan pentingnya sila Ketuhanan yang berdimensi vertikal maupun horisontal, berikut sadar pula akan konteks sejarah yang telah melahirkan sila Ketu-

hanan, warganegara Indonesia yang beragama Katolik di segenap penjuru tanah air berusaha untuk selalu memiliki semangat dan sikap iman yang mendalam kepada Tuhan, tetapi sekaligus berusaha mewujudkan iman itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Pertama-tama terkait dengan ke-Esa-an Tuhan, umat Katolik di Indonesia senantiasa ingat akan apa yang dipesankan dalam Alkitab: "Ada rupa-rupa karunia, tetapi *satu Roh*. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi *satu Tuhan*. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi *Allah adalah satu* yang mengerjakan semuanya dalam semua orang (1 Korintus 12: 4-6).

Selanjutnya dalam kaitan dengan bagaimana iman akan Allah yang Satu atau Esa itu mewujud dalam kehidupan bernegara, umat Katolik selalu berpegang pada pesan Kristus untuk memberikan kepada Tuhan apa yang wajib diberikan kepada Tuhan dan kepada pemerintah apa yang wajib diberikan kepada pemerintah (Matius 22: 21). Berdasarkan perintah Kristus itu—yakni Kristus yang diimani sebagai wujud tertinggi pewahyuan Tuhan kepada manusia—umat Katolik percaya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban untuk bersikap hormat kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga bersikap hormat terhadap hak dan kewajibannya untuk terlibat dalam tata-kelola kehidupan bersama sebagai warganegara. Di dalam keseluruhan hidup, kematian serta kebangkitan Kristus, umat Katolik melihat dan mensyukuri contoh paripurna dari relasi yang berdimensi vertikal dan horisontal itu. Sebagaimana dipahami oleh umat Katolik, Kristus memiliki relasi person-

al yang mendalam dengan Bapa-Nya, namun sekaligus juga memiliki cinta total yang sehabis-habisnya kepada segenap umat manusia (Yohanes 17: 23; Matius 26: 39). Bagi umat Katolik, inilah contoh nyata yang harus mereka teladani sepanjang hidup sebagai pengikut Kristus.

Lebih jauh, dalam Alkitab ditunjukkan bagaimana relasi yang berdimensi vertikal dan horisontal itu mewujud dalam praksis hidup sehari-hari: "...hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan *tidak mencari kepentingan sendiri* atau puji-pujian yang sia-sia." Dikatakan juga: "... hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri; dan *janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri*, tetapi kepentingan orang lain juga (Filipi 2: 2-4). Artinya, Alkitab menuntut supaya setiap pengikut Kristus itu selalu sadar bahwa dimensi vertikal keyakinan kepada Tuhan harus mewujud dalam relasi horisontal antar-manusia, khususnya antar sesama warganegara. Bentuknya adalah relasi saling mencintai dan saling melayani di antara sesama manusia yang ditemui dalam hidup nyata, di mana setiap pengikut Kristus lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.

**Mimpi Bersama**

Berikutnya umat Katolik juga menyadari bahwa ajaran-ajaran dalam Alkitab yang bersifat abadi dan universal itu perlu "dijembatani" oleh ajaran-ajaran lain yang lebih kontekstual agar bisa terhubung dengan situasi dan tantangan yang ada pada setiap zaman.

Dari situ lahirlah apa yang disebut sebagai ajaran sosial Gereja (Katolik). Ajaran Sosial Gereja (ASG) dimaksudkan sebagai semacam "jembatan" yang menghubungkan nasehat dan ajaran Alkitab yang siftnya abadi dan universal dengan realitas kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, relasi antar-iman, dan sebagainya yang sifatnya lebih kontekstual dari segi ruang dan waktu. Untuk itu biasanya dalam ASG  diingatkan bahwa setiap orang Kristiani dipanggil tidak hanya untuk menjadikan diri suci di hadapan Tuhan, melainkan juga untuk ikut aktif terlibat bersama orang lain dalam upaya "membangun dunia" dan menjadikan kehidupan bersama semakin baik (Mika 6: 8).

Dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan II (1965), misalnya, dikatakan bahwa setiap warga Gereja Katolik hendaknya bersedia untuk "….menyapa semua orang, untuk menyinari misteri manusia, dan untuk *bekerja sama* dalam menemukan pemecahan soal-soal yang paling penting pada zaman sekarang." Hal ini penting, mengingat bahwa, sebagaimana ditegaskan pada bagian awal dari dokumen tersebut, "kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga."

Lebih dekat dengan zaman kita, melalui dokumen yang berisi ajaran sosial Gereja yang lain, yakni dokumen *Laudato Si* (2015) umat Katolik diingatkan kembali bahwa bumi ini adalah bagaikan seorang "Ibu" yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia se-

bagai “rumah bersama.” Oleh karena itu “Ibu” ini harus selalu kita rawat dan kita jaga sebaik mungkin. Dalam dokumen tersebut umat Katolik dipanggil untuk bersama dengan segenap anggota keluarga besar umat manusia agar tidak hanya melawan perusakan lingkungan hidup *(the environment)* tetapi juga untuk memelihara planet bumi ini sebaik-baiknya demi generasi-generasi yang akan datang. Dalam dokumen yang sama umat Katolik sedunia bersama semua orang yang berkehendak baik dipanggil untuk “menyadari kembali bahwa kita ini saling membutuhkan, bahwa kita ini memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan dunia, [dan] bahwa upaya untuk menjadi baik dan jujur itu sungguh-sungguh bernilai.”

Menurut dokumen *Laudato Si* “pola berpikir yang tidak memberi ruang kepada perhatian yang tulus untuk lingkungan hidup adalah pola sama yang juga tidak memberi ruang untuk menyertakan mereka yang paling rentan”, khususnya mereka yang lemah, yang terpinggirkan dan yang bakatnya tidak sehebat orang-orang lain (Fransiskus, 2015: 146). Itulah sebabnya dokumen tersebut memanggil umat Katolik sedunia untuk turut menjaga, melindungi dan memelihara lingkungan hidup, sekaligus untuk “membuat zaman kita nantinya akan terus diingat dalam sejarah karena bangkitnya penghormatan baru untuk kehidupan, karena tekad kuat untuk mencapai keberlanjutan, karena peningkatan perjuangan demi keadilan dan perdamaian, dan karena perayaan kehidupan yang penuh sukacita” (Fransiskus, 2015: 155).

Panggilan serupa juga disampaikan dalam dokumen lain yang juga berisi ajaran sosial Gereja dan berjudul *Fratelli Tutti*. Isinya tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Dokumen yang terbit pada tahun 2020 itu diawali dengan sebuah kisah menarik yang tejadi pada tahun 1219. Kisah itu adalah kisah nyata tentang Santo Fransiskus Asisi dari Italia yang dengan berjalan kaki berusaha menemui Sultan Malik-el-Kamil di Mesir. Santo Fransiskus berhasil menemui dan diterima dengan baik oleh Sang Sultan. Dan untuk selanjutnya kedua tokoh itu membina persaudaraan yang gemanya masih dirasakan sampai sekarang, lebih dari 800 tahun kemudian. Terkait dengan kisah itu, dokumen *Fratelli Tutti* ingin menunjukkan contoh nyata tentang seorang Kristiani (yakni Santo Fransiskus Asisi) yang begitu "lebar serta besar kasihnya" dan yang selalu "mencoba merangkul semua orang", tanpa membedakan bahwa orang-orang itu se-iman dengannya atau tidak. Ditegaskan dalam dokumen tersebut "kesetiaan Fransiskus [Asisi] akan Tuhannya sepadan dengan kasihnya kepada saudara-saudarinya" (Fransiskus, 2020: 2).

Berdasarkan pengalaman seperti itu *Fratelli Tutti* mengajak umat Katolik dan umat manusia seluruh dunia untuk "memimpikan" masa depan bersama yang lebih baik. Diserukan dalam dokumen tersebut: "Marilah kita bermimpi bersama-sama, sebagai sesama anggota dari satu keluarga umat manusia, sebagai rekan seperjalanan dari tubuh kemanusiaan yang sama, sebagai anak-anak dari bumi yang adalah rumah kita bersama, bermimpi tentang kesediaan kita untuk menyum-

bangkan kekayaan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, dengan menggunakan suara kita masing-masing, seraya menyadari diri bahwa kita semua ini bersaudara" (Fransiskus, 2020: 2).

"Mimpi" yang dianjurkan untuk diakukan bersama itu tentu saja bukan sekedar mimpi siang bolong yang kosong. Mimpi yang dimaksudkan adalah suatu cita-cita global yang perlu bersama-sama diwujudkan demi kehidupan bersama yang semakin menjanjikan. Dan tentu saja panggilan untuk memiliki dan mewujudkan cita-cita bersama seperti itu berlaku bukan hanya untuk umat Katolik, melainkan juga untuk segenap anggota keluarga besar umat manusia di manapun mereka berada.

**Menjadi Berkat**

Dalam konteks negeri kita, panggilan demikian ditujukan kepada umat Katolik di Indonesia untuk bersama-sama saudara-saudarinya yang lain sebagai sesama warganegara membangun dan menyelenggarakan kehidupan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta bahwa jumlah orang Katolik di Indonesia itu secara kuantitatif tidak besar tidak boleh menjadi hambatan untuk ikut berkontribusi dalam memajukan bangsanya. Kelompok yang secara kuantitas kecil bisa saja memberikan kontribusi yang secara kualitas bisa dirasakan oleh banyak orang ibarat garam dalam larutan yang disampaikan oleh Bung Hatta tadi. Oleh karena itu berdasarkan keyakinan yang mendalam akan Tuhan Yang Maha Esa, umat Katolik di Indonesia merasa terpanggil untuk ikut terlibat da-

lam memperjuangkan negerinya dengan dibimbing oleh terang Alkitab dan ajaran-ajaran sosial Gereja. Dan sejak sebelum kemerdekaan, memang itulah yang dilakukan oleh banyak orang beragama Katolik di Indonesia.

Guna sekedar memberi gambaran kongkrit tentang bagaimana seorang warganegara Katolik berdasarkan imannya ikut terlibat berjuang membangun bangsanya, mari kita tengok sejenak kisah hidup dan perjuangan I.J. Kasimo (1900- 1986). Apa yang dilakukan oleh tokoh ini mugkin bisa memberikan sedikit bayangan mengenai bagaimana ketika dilandasi oleh sila Ketuhanan, seorang warganegara Katolik berkiprah untuk kepentingan bangsanya. Tokoh ini bernama lengkap Ignasius Joseph Kasimo Hendrowahyono, tetapi ia biasa dipanggil I.J. Kasimo atau bahkan Kasimo saja.

Lahir pada tahun 1900, Kasimo adalah putra seorang prajurit Kraton Yogyakarta. Setelah menamatkan sekolahnya di sekolah keguruan yang didirikan oleh Pastor van Lith di Muntilan, Jawa Tengah, dan di *Middelbare Landbouw School* (MLS) atau Sekolah Pertanian Menengah di Bogor, ia sempat bekerja sebagai pegawai perkebunan Belanda di Kendal yang terletak di daerah Semarang. Namun demikian, karena keberaniannya untuk membela salah seorang buruh dan menentang sikap kolonial atasan Belandanya, Kasimo dipecat. Ia pun beralih profesi menjadi seorang guru pertanian.

Dalam perjalan hidup selanjutnya, di telinga Kasimo selalu terngiang ajaran-ajaran Kristiani yang ia terima dari Pastor van Lith selama ia belajar di Sekolah Guru di Muntilan, dan akan pesan yang berbunyi “setiap bang-

sa mempunyai hak untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan" yang ia temukan dalam buku *Katholieke Maatschappijleer* (ajaran sosial Katolik) karya Dr. Llovera. Ajaran-ajaran itu menginspirasinya untuk berkiprah di bidang politik. Pada tahun 1923 (artinya ketika berusia 23 tahun) Kasimo mendirikan PPKD (Perkumpulan Politik Katolik di Djawa) yang kemudian berkembang menjadi PPKI (Perkoempoelan Politik Katolik Indonesia). Mulai tahun 1931 ia menjadi anggota Volksraad (Parlemen Hindia Belanda) di mana ia sempat menjadi anggota Komisi Sentral Petisi Soetarjo. Pada tahun 1936 komisi ini mengajukan petisi, menuntut supaya Hindia Belanda segera dimerdekakan.

Sebagai seseorang yang bergerak di bidang politik, sepanjang hidupnya Kasimo selalu berusaha untuk mampu menghayati dan menerapkan sila Ketuhanan secara sungguh-sungguh. Sebagai orang Jawa, misalnya, ia selalu bersikap *sumarah* kepada Gusti Allah, dan sebagai seorang Katolik yang taat, hampir setiap hari ia pergi ke gereja untuk berdoa kepada Tuhan sebelum memulai kiprahnya bagi negeri yang amat ia cintai. Ketika pada tahun 1945 Wakil Presiden Hatta mengumumkan Maklumat nomor "x" yang menganjurkan supaya masyarakat membentuk partai-partai politik, Kasimo memprakarsai berdirinya Partai Katolik. Melalui partai ini ia dan teman-temannya bermaksud menunjukkan bahwa umat Katolik di Indonesia itu bukan merupakan perpanjangan tangan Belanda. Sebaliknya, umat Katolik di Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, termasuk dalam perjuangan

melawan kolonialisme dan dalam mengupayakan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di bawah pimpinan Kasimo, Partai Katolik berjuang bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan segenap rakyat. George Kahin menyebut Partai Katolik sebagai partai politik yang *"small but articulate"* (Kahin, 1959: 158).

Dalam kiprahnya sebagai seorang Katolik di tengah perjuangan bangsa, Kasimo giat membela kepentingan Republik Indonesia melalui perundingan-perundingan dengan Belanda, termasuk sebagai anggota delegasi RI dalam Perundingan Linggajati tahun 1946. Ketika akhirnya kesepakatan Perjanjian Linggajati dilanggar Belanda dengan melakukan Agresi Pertama pada tahun 1947, Kasimo menemani Presiden Sukarno untuk menyelamatkan diri. Sementara itu ketika Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara yang lain ditangkap oleh Belanda menyusul Agresi Kedua pada bulan Desember 1948, Kasimo sebagai salah seorang menteri ikut menjalankan roda pemerintahan di Pulau Jawa melalui KPPD (Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa). Untuk itu selama berbulan-bulan ia harus ikut bergerilya melawan Belanda, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain antara Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perjuangan merebut Irian Barat di awal tahun 1960-an, melalui kerjasama dengan Jenderal A.H. Nasution, Kasimo melobi partai politik yang berkuasa di Belanda waktu itu (yakni *KVP, Katholieke Volkspartij* atau Partai Katolik Belanda) supaya mau menyetujui "Bunker Plan"

yang menuntut Belanda bersedia menyerahkan administrasi atas Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB. Setelah melalui perundingan yang alot dan panjang, akhirnya pemerintah Belanda menyetujui Bungker Plan. Lobi Kasimo berhasil.

*Salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi) merupakan motto utama Kasimo dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat. Oleh karena itu ia sangat suka membina hubungan dekat dengan rakyat. Kasimo selalu berusaha memperjuangkian kepentingan mereka, terutama terkait masalah pangan, yang waktu itu merupakan salah satu masalah mendasar. Tak mengherankan bahwa Kasimo beberapa kali ditunjuk menjadi menteri, dan biasanya ia ditunjuk sebagai menteri yang tugas pokoknya adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ia pernah menjabat menteri dalam Kabinet Amir Syarifudin, Kabinet Hatta I dan Kabinet Hatta II, maupun dalam Kabinet peralihan Soesanto Tirtoprodjo. Ketika dalam Kabinet Burhanudin Harahap ia kembali ditunjuk sebagai menteri, yakni sebagai Menteri Perekonomian (Feith, 1968: 419, 421), lagi-lagi Kasimo mengedepankan kepentingan ekonomi rakyat dengan mengajukan "Kasimo Plan" yang terkenal itu (Adisubrata dkk, 1980: 58). Tujuan Kasimo adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, apapun etnis, agama atau keyakinan mereka.

Sebagai orang yang kiprah politiknya didasari oleh keyakinan iman yang mendalam dalam *terang* sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kasimo erat bersahabat dengan

rekan-rekan seperjuangan tanpa membedakan agama dan aliran politik mereka. Hal ini bisa kita simak misalnya dari keterangan yang diberikan oleh Mohammad Roem tentang bagaimana selama bergerilya sejak bulan Desember 1948 hingga awal 1949, Kasimo berkerjasama dan bersahabat dengan orang-orang yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Saat itu ada T.B. Simatupang yang adalah seorang penganut Protestan, ada Mr. Kasman Singodimejo seorang tokoh Muhammadiyah, ada Zainul Arifin tokoh terkemuka dari Nahdlatul Ulama, dan ada pula Prawoto Mangkusasmito yang adalah pemimpin Masyumi sekaligus petinggi Muhammadiyah, dan lain-lain. "Waktu mereka bahu-membahu membela tanah air," tutur Roem tentang Kasimo dan teman-temannya itu, "saya rasa sudah hadir semangat yang sebaik-baiknya, apa yang menjadi landasan dari 'hidup rukun beragama'" (Adisubrata dkk, 1980: 125).

Dalam nada serupa, Jenderal A.H. Nasution yang adalah juga teman bergerilyanya Kasimo, mengatakan: "Pak Kasimo adalah teladan dalam mempraktekkan kerukunan beragama dan 'kerukunan berpolitik', sebagaimana yang diharapkan dalam masyarakat ber-Pancasila." Sang Jenderal lalu menambahkan: "Pak Kasimo selama ini tak pernah absen dalam *perjalanan sejarah bangsa*" (Adisubrata dkk, 1980: 141-142).

Dalam sepak-terjang politiknya, Kasimo adalah tipe politikus yang kuat berpegang pada prinsip *(politiek begiensel)* dan bukan jenis politikus yang mengedepankan sikap oportunis *(politiek opportuniteit)*. Oleh karena

itu ia tak segan-segan untuk berbeda pendapat dengan siapapun, sejauh perbedaan pendapat itu merupakan bagian dari upaya perjuangan bersama demi kepentingan rakyat. Kasimo bahkan tidak canggung-canggung untuk berbeda pendapat dengan pimpinan tertinggi Republik. Hal ini bisa kita lihat misalnya ketika pada awal tahun 1957 Presiden Sukarno menyampaikan apa yang ia sebut sebagai Konsepsi Presiden tentang Demokrasi Terpimpin. Berdasarkan konsepsi itu Presiden Sukarno bermaksud membentuk "Kabinet Gotong Royong", di mana Partai Komunis Indonesia (PKI) akan memiliki wakil-wakil di dalamnya. Kasimo tidak setuju. Ia menolak gagasan itu, bahkan di hadapan Presiden. Kasimo khawatir bahwa dengan memasukkan wakil PKI dalam kabinet, secara bertahap Indonesia akan dikuasai oleh kaum komunis. Ia juga khawatir bahwa jika Indonesia dikuasi oleh kaum komunis, sila Ketuhanan akan dipinggirkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Dengan gigih dan konsisten Kasimo membela sila Ketuhanan. Ia juga membela Pancasila pada umumnya, di mana sila Ketuhanan ia yakini merupakan dasar dari keempat sila yang lain.

Mendalamnya keyakinan akan sila Ketuhanan Kasimo juga tampak dalam kosa kata yang ia pilih ketika bertemu dengan orang lain. Salah satunya ketika bertemu dengan Jenderal T. B. Simatupang pada masa perang kemerdekaan. Saat itu sebagai sesama gerilyawan, Kasimo dan Jenderal Simatupang bertemu di desa Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka bertemu untuk membicarakan strategi perlawanan menghadapi

Belanda. Ketika pembicaraan selesai dan mereka harus berpisah, Kasimo mengucapkan kata-kata perpisahan yang terus mengiang di telinga Jenderal Simatupang, bahkan jauh setelah peristiwanya berlalu. "*God's beste zegen,"* kata Kasimo kepada Jenderal Simatupang waktu itu. Terjemahan bebasnya: Semoga Anda mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Menurut Jenderal Simatupang, istilah "berkat" di situ sangat penting untuk digarisbawahi. Alasannya karena istilah itu sebenarnya mencerminkan hidup Kasimo itu sendiri. Selama berpuluh tahun kemudian Jenderal Simatupang selalu mendapat kesan bahwa Kasimo itu orang yang selalu berusaha untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi masyarakat dan bangsanya. Kata Jenderal Simatupang: "Menurut kesan saya, apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh Pak Kasimo, baik dalam rangka tugas-tugas pemerintahan maupun dalam rangka kegitan-kegiatan kemasyarakatan, maka tujuannya selalu sama. Yaitu agar apa yang dikatakan atau diperbuat itu dapat kiranya menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ya, menjadi berkat bagi semua orang" (Adisubrata dkk, 1980: 155).

Menyambung kesan Jendral Simatupang itu kita bisa melihat bahwa memang, kiprah Kasimo sebagai seorang Kristiani yang setia menjunjung tinggi sila Ketuhanan dan selalu ingin menjadi berkat bagi bangsanya sering dialami sendiri oleh banyak orang. Mengapa? Karena kedua hal itu mewujud dalam perilaku hidupnya yang kental diwarnai oleh kesederhanaan dan kejujuran.  Banyak orang sejamannya mengakui,

Kasimo adalah seorang warganegara yang jujur dan apa adanya. Tentang hal ini Bung Hatta pernah bersaksi: “Saudara Kasimo adalah seorang yang sederhana dan jujur.” Menurut Bung Hatta pula, Kasimo adalah pribadi yang “dapat bergaul dengan siapa saja,” selain juga “sangat tekun menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya,” khususnya untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam produksi gula dan kopra (Adisubrata dkk, 1980: 117). Bukan hanya Bung Hatta, pihak-pihak di luar tanah air pun terkesan dengan kesederhanaan, kejujuran dan kerja keras Kasimo. Pada tahun 1980 Paus Yohanes Paulus II menganugerahi Kasimo Bintang Ordo Gregorius Agung, selain mengangkatnya sebagai “Kesatria Komandator Golongan Sipil” dari Ordo Gregorius Agung. Sementara itu, berkat jasa-jasa perjuangan dan keteladanannya, pada tahun 2011 I.J. Kasimo secara resmi diangkat sebagai pahlawan nasional. Pengangkatan Kasimo sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

## Memancarkan Sinar Kasih

I.J. Kasimo bukanlah satu-satunya. Ada banyak contoh orang Katolik lain di Indonesia yang bertolak dari penghayatan akan sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga berusaha untuk menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsanya. Dalam terang sila Ketuhanan, mereka berusaha keras untuk mewujudkan iman yang berdimensi vertikal dalam tindakan-tindakan sosial-politik yang berdimensi horisontal. Bahkan jauh hari sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya

pada tahun 1945, ada seorang tokoh Katolik yang sudah gigih memperjuangkan kemerdekaan itu. Ia adalah Pastor van Lith, yang namanya sudah kita singgung di depan. Sebagaimana kita tahu, meskipun sebenarnya Pastor Katolik itu adalah seorang keturunan Belanda, namun sejak kedatangannya di Hindia-Belanda ia tak pernah lelah membela kepentingan rakyat Nusantara di hadapan penjajah Belanda. Di matanya sistem kolonial adalah sebuah sistem yang tidak adil, dan karena itu harus dihapus. Namun bagi dia caranya bukan dengan mengangkat senjata, melainkan dengan menaikkan harkat dan martabat penduduk pribumi, khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan.

Kehendak untuk menyelenggarakan pendidikan itu terwujud ketika ia merintis sebuah sekolah guru di Muntilan. Kolese Xaverius namanya. Di situ ia mendidik anak-anak muda pribumi, baik dari Jawa maupun luar Jawa (Susanto, 1990: 63). Ia berharap bahwa anak-anak ini bisa menjadi orang-orang terdidik supaya nantinya bisa ganti mendidik orang-orang lain dan memampukan mereka untuk membantu membebaskan bangsanya dari penjajahan. Kepada murid-muridnya yang beragama Katolik ia berpesan bahwa menjadi Katolik tidak berarti menjauhkan diri dari tradisi setempat, seperti misalnya *slametan* yang merupakan salah satu tradisi di Jawa. Ia juga berpesan kepada mereka bahwa menjadi Katolik tidak harus "menjadi orang Barat." Sebaliknya kalau perlu malah menjauhkan diri dari budaya Eropa (Latif, 2017: 47-48). Tak aneh bahwa kelak Pastor van Lith akan menghasilkan lulusan yang

pada satu sisi mendalam iman Katoliknya, tetapi yang pada sisi lain sangat besar cintanya kepada bangsa dan negeri tumpah darahnya. Contohnya sudah kita lihat sendiri dalam kiprah politik I.J. Kasimo diatas.

Meskipun dirinya adalah seorang Pastor dan guru, van Lith tak mau membatasi diri hanya pada kegiatan memimpin upacara keagamaan atau mengajar di dalam kelas saja. Selain melaksanakan dua tugas mulia itu, ia juga banyak berkiprah di luar kelas dan di luar tempat ibadat. Ia, misalnya, sering terjun langsung membela rakyat yang tanahnya terlanjur digadaikan kepada rentenir (Latif, 2017: 47). Lebih dari itu, sebagai anggota *Commissie tot Herziening van de Gronslagen der Staatsinrich van Nerderlandch-Indie* (Komisi Peninjauan Kenegaraan Hindia-Belanda) Pastor van Lith mendesak agar rakyat Hindia-Belanda dilepaskan dari penjajahan sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Kepada pemerintah penjajahan dengan berani ia mengatakan: "... jika keadaan tidak dapat dikendalikan lagi dan terpaksa terjadi pertentangan yang memaksa kami memilih pihak, maka kami [van Lith dan para misionaris Belanda yang lain] *harus berdiri di pihak anak-anak negeri*" (Simbolon, 1995: 671). Begitu gigihnya Pastor van Lith ini membela kepentingan "anak-anak negeri", sehingga ketika ada pemilihan anggota Volksraad, ia dicalonkan oleh Sarekat Islam supaya mewakili wilayah Serang, Banten (Latif, 2017: 47).

Pada periode pasca-proklamasi kemerdekaan tahun 1945 kita mengenal tokoh Katolik lain, yang juga gigih membela kemerdekaan. Ia kebetulan adalah juga

salah seorang mantan murid Pastor van Lith di sekolah guru Muntilan. Dialah Uskup Semarang, yakni Monsinyur (Mgr.) Albertus Soegijapranata. Karena pilihannya untuk mendukung revolusi kemerdekaan melawan Belanda, pada tahun 1946 secara sadar dan sukarela Soegijapranata memindahkan pusat administrasi Keuskupannya dari kota Semarang yang telah dikuasai Belanda ke Yogyakarta yang waktu itu adalah Ibukota dari Republik Indonesia. Pemindahan pusat administrasi itu tak pelak lagi menunjukkan keberpihakan Mgr. Soegija kepada perjuangan bangsanya dan perlawanan kepada penjajah Belanda yang ingin menancapkan kembali kuku-kuku kolonialnya. Sekaligus tindakan itu merupakan wujud dari keyakinannya akan sila Ketuhanan yang menuntut dia untuk tidak hanya bertakwa kepada Tuhan di atas sana, melainkan juga untuk ikut berjuang bersama anak-anak bangsa di kanan-kirinya. Pada tahun 1963 Mgr. Albertus Soegijapranata diangkat sebagai pahlawan nasional RI. Ia dikenal dengan semboyannya yang sangat religius sekaligus patriotik, yakni “100% Katolik, 100% Indonesia!”

Memasuki masa pasca-Revolusi Kemerdekaan kita juga mengenal tokoh Katolik lain yang juga tidak sedikit kontribusinya. Ia bernama lengkap Petrus Kanisius Ojong, tetapi lebih dikenal dengan sebutan singkat PK Ojong, dan kelak dikenal sebagai salah seorang pendiri harian nasional *Kompas*. Karena keinginannya untuk bisa menjadi berkat bagi sesamanya, PK Ojong yang beragama Katolik tak segan-segan menjalin persahabatan dengan berbagai kalangan, termasuk dengan

Mohammad Roem, seorang tokoh Islam nasional. Ketika Roem meringkuk di penjara di Madiun, PK Ojong dengan murah hati menawari Roem untuk mengirimkan buku-buku bacaan sesuai minatnya. Roem setuju dan merasa senang sekali. Ketika kiriman itu benar-benar datang, tutur Roem, “dengan hati syukur dan gembira buku-buku itu saya pegang berganti-ganti sebelum membaca betul-betul” (Latif, 2017: 52). Pengiriman dan penerimaan buku-buku itu menjadi awal persahabatan antara keduanya, bahkan hingga mereka lanjut usia. Keduanya disatukan oleh penghayatan yang mendalam atas sila Ketuhanan, dan sila itu membantu mereka mengatasi sekat-sekat ras atau keagamaan. Ketika pada tanggal 31 Mei 1980 PK Ojong meninggal, dengan tertatih-tatih Roem yang sudah sepuh memaksa diri untuk melayat. “Itulah cara orang baik meninggal”, bisik Roem seusai melayat sahabat lamanya tersebut (Latif, 2017: 53). Dalam kisah serupa, meskipun agamanya berbeda, Kadinal Darmoyuwono, seorang tokoh Katolik, bersahabat dengan Buya HAMKA yang tentu saja adalah seorang tokoh Muslim terkemuka. Persahabatan itu menjadi mungkin karena keduanya sama-sama menjunjung tinggi sila Ketuhanan seraya memilih untuk berpihak pada keadilan serta bertekad untuk melawan pemerintahan yang tidak adil (Susetyo, 2009; Latif, 2017: 46).

Sedikit lebih dekat ke periode sekarang, kita juga bisa melihat bagaimana seorang Pastor Katolik yang lain, yang seperti Pastor van Lith juga mencintai dan berjuang untuk rakyat Indonesia. Pastor itu adalah Pas-

tor Y.B. Mangunwijaya, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Romo Mangun. Meskipun sejatinya ia adalah seorang pemimpin agama, Romo Mangun tak mau hanya berhenti pada melayani umatnya dalam bidang ritual keagamaan saja. Selain melaksanakan tugas pokok, ia juga memutuskan untuk bekerjasama dan membina persahabatan dengan orang-orang yang tak seagama dengannya. Ia, misalnya, bersahabat dengan B.J Habibie, mantan Presiden RI, bahkan sejak keduanya sama-sama sedang belajar di Jerman. Sebagai seorang Pastor yang sekaligus arsitek yang diakui secara internasional, Romo Mangun merancang dan membangun banyak rumah, termasuk rumah-rumah sederhana untuk penduduk yang berkekurangan di sepanjang tepian Sungai Code, Yogyakarta, apapun agama mereka.

Selain menerbitkan banyak karya fiksi maupun non-fiksi di seputar tema kemanusiaan dan kebangsaan, Romo Mangun juga giat membela penduduk yang desanya terancam akan direndam untuk pembangunan Waduk Kedung Ombo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Keyakinan akan pentingnya sila Ketuhanan telah mendorong Romo Mangun untuk berusaha keras agar bisa menjadi berkat, bukan hanya bagi umatnya yang seagama, melainkan juga bagi siapa pun yang perlu ia layani dan perjuangkan. Tidak terlalu mengejutkan jika Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI yang juga sahabat Romo Mangun, menyebutnya sebagai sebagai "pribadi yang mampu memancarkan sinar kasih keimanan dalam kehidupan umat manusia" (Latif, 2017: 48). Sementara itu seorang sahabat yang lain, yakni

wartawan terkenal Rosihan Anwar, menyebut Romo Mangun sebagai "*role model*, yakni suri teladan bagi banyak orang" apapun agama dan keyakinannya. Bagi Rosihan Anwar, Romo Mangun adalah suri teladan dalam hal "memperjuangkan kerakyatan (demokrasi), kedaulaltan rakyat, keadilan sosial, dan kemanusiaan" (Latif, 2017: 49).

## III. Penutup

Bagi orang-orang seperti Romo Mangun, I.J. Kasimo, Pastor van Lith, Mgr. Albertus Soegijapranata atau yang lain, penghayatan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak hanya sebatas ucapan di bibir atau hanya kehendak baik saja. Penghayatan itu telah mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan nyata. Tindakan-tindakan nyata itu ialah tindakan untuk bisa menjadi berkat, tetapi bukan berkat bagi diri sendiri atau kelompoknya, melainkan juga berkat bagi masyarakat luas, bagi bangsa dan negaranya. Sejalan dengan itu, kiranya apa yang dipesankan oleh Mohammad Natsir terkait hidup beragama dan bagaimana bersikap terhadap orang yang beragama lain perlu kita simak bersama di sini. Tentang toleransi dalam beragama Natsir pernah berpesan: "Toleransi yang diajarkan oleh Islam itu, dalam kehidupan antar-agama, bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif, ia itu aktif! Aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Aktif dan bersedia senantiasa untuk mencari titik persamaan antara bermacam-macam perbedaan. Bukan itu saja! Kemerdekaan beragama bagi seorang Muslim adalah suatu nilai hidup yang lebih tinggi dari-

pada nilai jiwanya sendiri" (Latif, 2017: 71).

Selanjutnya ia juga berpesan: "Apabila kemerdekaan agama terancam dan tertindas, walau kemerdekaan agama bagi bukan orang yang beragama Islam, maka seorang Muslim diwajibkan untuk melindungi kemerdekaan ahli agama tersebut agar manusia umumnya merdeka untuk menyembah Tuhan menurut agamanya masing-masing, dan di mana perlu dengan mempertahankan jiwanya" (Latif, 2017: 71). Kiranya pesan penting seperti ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi orang-orang yang beragama Katolik dan yang beragama serta berkeyakinan apapun. Sebuah pesan universal yang sangat indah!

Hanya dengan secara aktif bersikap saling menghormati agama dan keyakinan setiap warganegara, bangsa Indonesia akan mampu secara sungguh-sungguh memahami dan menerapkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa berikut dimensi vertikal dan horisontal yang terkandung di dalamnya. Hanya dengan begitu sila pertama Pancasila itu tidak akan berhenti sebagai slogan normatif yang mengagumkan, melainkan juga mewujud dalam kiprah dan perjuangan bersama segenap rakyat Indonesia. Apapun bentuk kiprah dan perjuangan bersama itu.

## Referensi

Adisubarata dkk., 1980. *I.J. Kasimo: Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Gramedia.

Feith, Herbert, 1968. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Ithaca, NY: Cornell University Press.

Fransiskus, Paus, 2015. *Laudato Si.* Rome: Vatican Press.

Fransiskus, Paus, 2020. *Fratelly Tutti.* Rome: Vatican Press.

Kahin, Geroge McT., 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia.* Ithaca, NY: Cornell University Press.

Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1981. *Santiaji Pancasila.* Surabaya: Usaha Nasional.

Latif, Yudi, 2017. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan.* Bandung: Mizan.

Simbolon, Parakitri T., 1995. *Menjadi Indonesia.* Jakarta: Kompas.

Soekarno, 1984. *Pantjasila Sebagai Dasar Negara.* Jakarta: Inti Idayu Press.

Susanto SJ, Budi (ed.), 1990. *Harta dan Surga: Peziarahan Jesuit dalam Gereja dan Bangsa Indonesia Modern.* Yogyakarta: Kanisius.

Susetyo, Benny, 2009. “Buya Hamka: Jejak Pemikiran dan Teladan,” Averoes Community, http//www.averroes.or.id Akses 23/11/2020.

Vatikan II, Konsili, 1965. *Gaudium et Spes.* Rome: Vatican Press.

# AJARAN KETUHANAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA HINDU: REFLEKSI DAN JATI DIRI UMAT HINDU DALAM BINGKAI PANCASILA

*I Gede Suwinda*[*]

## I. Pendahuluan

Weda sebagai kitab suci Agama Hindu beserta susastra-susastra sucinya mengajarkan tentang bagaimana umat manusia diciptakan sebagai mahluk yang paling sempurna. Memiliki akal dan pikiran, memiliki kemampuan lebih dari seluruh ciptaan Tuhan/Sang Hyang Widhi Wasa lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena manusia memiliki akal dan pikiran, tentu dalam menjalani kehidupannya akan berpegang pada *subha* dan *asubha karma. Subha karma* adalah perbuatan yang baik, yang akan mengantarkan hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Sedangan *asubha karma* adalah segala ketidak baikan perilaku yang dalam pandangan Agama Hindu harus dihindari. Berpegang pada konsep tersebut, maka umat Hindu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga peradaban kehidupan umat manusia agar menjadi da-

* Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Bali Periode 2020-2024.

mai, tentram, sejahtera lahir bhatin yang dalam Agama Hindu disebut *Mokshartam Jagadita Ya ca iti Dharma*.

Ajaran Agama Hindu dalam perjalanannya berkembang secara historis pertama kali di India, sebagai pengaruh dari peradaban lembah Sungai Sindhu, lembah yang subur, damai, tenang, terbentang dari India Barat sampai India Utara. Dalam pandangan Klostermaier (1990: 31) dikatakan bahwa ajaran dan kebudayaan Veda yang dibawa oleh suku bangsa Arya yang kemudian menjadi pemukim India, kemudian pengaruhnya menjadi sangat luas di India. Tersebar ke Indonesia dengan beberapa teori yang mendasarinya. Beberapa teori masuknya Agama Hindu ke Idonesia tersebut dipilah menjadi beberapa, ada yang disebut teori Brahmana, teori Waisya, dan Teori Sudra.

Dikatakan teori Brahmana karena diyakini masuknya Agama Hindu tersebut karena dibawa langsung oleh para cerdik cendikia ke Indonesia kemudian berkembang khusus di Indonesia. Banyak juga yang memahaminya bahwa di jaman dahulu cerdik cendikia dari Indonesialah yang belajar ke India, kemudian pulang dengan membawa ajaran Hindu. Teori Waisya pada prinsipnya orang Gujarat itu adalah kaum dagang, sehingga merekalah yang masuk ke Indonesia lewat perdagangan, aktivitas sehari-hari mereka dengan membawa ajaran agama itu dan disebarkan; ketiga teori sudra, karena kaum buruhlah yang secara tidak langsung datang dan bekerja ke Indonesia, dan membawa ajaran agama itu sendiri.

Umat Hindu pada dasarnya memaknai nilai-nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa itu berpegang pada konsep mengalir dalam setiap aspek kehidupannya. Perilaku berketuhanan itu tidak saja tercermin dari praktek kehidupan beragama di tempat suci dalam hal ini Pura. Umat Hindu berpandangan bahwa mengaktualisasikan ajaran agama tidak bisa dipisah-pisahkan dalam keseharian hidup mereka. Sehingga keserasian dan keharmonisan alam, sesama manusia dan Tuhan itu sendiri melebur menjadi satu. Tri Hita Karana atau tiga unsur penyebab terbangunnya keselarasan, keserasian dan yang lainnya adalah pilar yang menjadi pegangan umat Hindu dalam mengaplikasikan ajaran Ketuhanan dalam hidupnya. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam rumusan Pancasila sila pertama terimplementasi dalam konsep dharma agama dan dharma negara secara utuh, yang menjadi dasar peran serta umat Hindu di Indonesia. Dharma negara adalah peran umat Hindu dalam berpartisipasi sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara secara luas (ideoligi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Dharma agama adalah peran dalam aktivitas beragama untuk sebesar-besarnya memperkuat komitmen mereka beragama yang damai, harmoni dengan alam dan manusia, mempermulia kehidupan dengan berpegang pada nilai-nilai dan ajaran Agama Hindu.

Nilai Ketuhanan dalam pandangan Agama Hindu diterjemahkan secara utuh, bahwa orang yang berketuhanan adalah mereka yang mampu menyayangi sesamanya, mampu keluar dari penderitaan dengan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan dasar itu akan dapat

menolong sesamanya keluar dari penderitaan. Berkarma baik adalah pedoman yang selalu diajarkan Agama Hindu. Karma-karma baiklah yang akan mengantarkan umat Hindu pada kedamaian, kesejahteraan dan itulah makna berketuhanan.

Bagaimanakah konsep Ketuhanan dan ke-esaan Tuhan dalam Agama Hindu, konsep adalah monoteisme. Monoteisme dimaksud adalah pemahaman tentang eksistensi Tuhan itu tunggal. Dalam Chandogya Upanisad IV.2.1 serta beberapa sloka disebutkan "ekam evam advityam Brahman", hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Dikatakan demikian, karena konsep ketuhanan dalam Agama Hindu itu dimulai dari konsep Nirguna dan Saguna Brahman. Tuhan yang berpribadi dan Tuhan yang tidak berpribadi.

Nirguna Brahman atau disebut Nirgunam, adalah konsep Tuhan yang sifatnya "nir" tidak berbentuk, tidak terjamah dalam daya pikir/nalar umat manusia, karena keterbatasan sifat dan kemampuan manusia, ataupun karena sedemikian sempurnanya sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa. Alam semesta dengan segala isinya adalah karya Tuhan. Alam semesta tunduk pada hukum Tuhan, Tuhan hanya satu, atau esa. Dalam kitab Atharva Veda III. 4.15-21 dikatakan:

> Kepada Ia yang mengetahui ini Tuhan semata-mata hanya Tunggal, tidak ada yang kedua, ketiga, keempat, ia dipanggil, tidak ada yang kelima, keenam, ketujuh, Ia dipanggil. Tidak yang kedelapan, kesembilan Ia dipanggil, Ia melihat segala apa yang bernafas dan apa yang tidak bernafas. Kepada-Nyalah tenaga penakluk kem-

bali, ia hanya tunggal. Tunggal belaka, pada-Nya semua Dewa hanya satu saja.

Dalam bait Puja Trisandhya dikatakan:

Tvam sivah tvam mahadevah
Isvarah paramesvarah
Bhrama visnusca rudrasca
Purusah parikirtitah

Terjemahannya:

Engkau dipanggil Siwa,
Mahadewa Parameswara,
Brahama, visnu Rudra dan Purusa.

Bagaimana dengan berbagai konsep ketuhanan dengan Dewa, Bhatara dan yang lainnya yang ada dalam konsep ketuhanan dalam Agama Hindu di Indonesia. Jawabannya adalah karena konsep kedua yang disebut Saguna Brahman. Saguna Brahman, adalah konsep ketuhanan, dimana Tuhan itu adalah sempurna, karena keterbatasan daya pikir manusia, dan untuk mempermudah manusia dalam memuja-Nya, maka diwujudkanlah Tuhan itu dalam berbagai manivestasi berupa Para Dewa, Bhatara dan sebutan lainnya di Indonesia.

Sifat-sifat Tuhan yang maha sempurna diberikan batasan-batasan agar terjamah oleh nalar manusia, seperti sifat-sifat Tuhan yang diibaratkan seperti layaknya sifat manusia. Memerlukan makanan, sehingga dibuatkan sarana persembahyangan dalam bentuk sesajen/banten dengan berbagai jenisnya, terikat akan waktu, sehingga pemujaan dilakukan pada hari-hari baik tertentu, padahal Tuhan esensinya tidaklah de-

mikian (neti-neti).

Tuhan diwujudkan pula memerlukan tempat untuk tinggal, sehingga dibuatkanlah Pura, Tuhan juga memerlukan prosesi penyucian, sehingga enam bulan sekali disucikan pada lokasi-lokasi penyucian (laut ataupun sumber air) untuk kemudian diprayascita/ dalam prosesi melasti. Semua gambaran konsep beragama itu adalah dalam konsep saguna brahman, dimana Tuhan yang tak terbatas, karena keterbatasan manusia diberikan sifat-sifat yang sangat terbatas, agar manusia dapat memahaminya.

Pemahaman akan konsep ketuhanan dalam Agama Hindu tersebut, dibagi dalam tiga kerangka dasar, yang disebut Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Dalam mempelajari Agama HIdu memerlukan konsep tiga area pemahaman yang disebut Tattwa, Etika, Acara Agama Hindu. Tri Kerangka Dasar ini memberikan pemaknaan bahwa dalam beragama umat Hindu berpegang pada konsep pemahaman agama dari sisi Tattwa atau Filsafat Agama, kedua dalam konteks Etika atau perilaku dalam beragama serta yang ketiga adalah konteks Acara atau bagaimana umat Hindu menjalankan ajaran agamanya dengan melakukan berbagai ritus dan tradisi yang sangat beragam di Indonesia.

Tiga Kerangka Dasar ajaran Agama Hindu tersebut, tattwa, etika dan acara, secara konsep diibaratkan seperti benih yang utuh, yang tidak boleh dipahami dan dipelajari secara sepotong-sepotong, karena dipastikan akan memiliki keyakinan yang fanatik, tidak fleksibel sebagaimana ajaran Agama Hindu yang sangat uni-

versal. Satu pemahaman keliru tentang tiga kerangka dasar itu akan memungkinkan terjadinya salah paham, bahkan ketaatan buta pada konsep ajaran Agama Hindu.

Benih tersebut dibaratkan seperti sebutir telor ayam, yang hanya akan menetas menjadi kehidupan sempurna apabila tattwanya atau konsep ajaran keyakinan/ filsafat agama dipahami secara baik dikatakan sebagai kuning telur yang paling dalam dalam ajaran Agama Hindu, Etika sering diibaratkan sebagai putih telurnya, rambu-rambu atau akidah dalam beragama yang dijadikan dasar sehingga dalam beragama tidak berwawasan sempit, memiliki wawasan dan cara pandang yang baik dalam beragama. Acara Agama Hindu merupakan konsep paling luar dalam ilustrasi telur dimaksud, sehingga konsep acara beragama dengan kegemerlapannya itu adalah bagian dari ajaran Acara Agama Hindu. Dalam hal ini berbagai upacara agama mulai dari dalam kandungan, lahir, prosesi dalam kehidupan anak-anak, naik menjadi orang dewasa, hingga meninggal semua memiliki rangkaian acara agama dalam keseharian disebut dalam Yajna bagi umat Hindu.

Benih yang utuh akan melahirkan kehidupan/konsep ajaran yang sempurna, sehigga dalam menjalankan ajaran agamaya akan menjadi utuh pula sehingga tidak mudah untuk saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tri Kerangka Dasar Agama tersebut diimpleentasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep Tattwanya adalah dilihat dari konsep keyakinan / sraddha sehingga landasan berkeyakinan dalam Agama

Hindu berpegang pada konsep Panca Sraddha, sedangkan konsep Etika Agama Hindu itu berpegang pada tata pola keseharian yang ajarannya terdapat dalam Tri Kaya Parisuda, serta ajaran yang berkaitan dengan etika agama lainnya. Konsep Acara dalam Agama Hindu diacu konsep tiga hutang yang disebut Tri Rnam, sehingga diimplementasikan bagaimana cara pembayaran htang hidup manusia itu dengan cara melakukan Yajna, yang pedomannya disebut Panca Yajna. Panca berarti lima dan Yajna berasal dari kata "yuj" maknanya ketulusan keiklasan sehingga yajna dimaknai sebagai keiklasan dan pengorbanan secara tulus iklas dalam kehidpan masyarakat Hindu. Yajna jga dimknai sebagai rangkaian upacara atau aktivitas manusia dalam menjalankan keyakinannya itu dalam beragama.

## II. Pembahasan

### Landasan Hukum dalam Agama Hindu

Sumber ajaran dalam Agama Hindu intinya dalah sabda atau wahyu Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang diterima oleh para maha Rsi, orang suci dalam Agama Hindu. Ada lima konsep yang djadikan sebagai sumber ajaran dalam Agama Hindu yaitu *Sruti, Smrti, Sila* dan *Atmanastuti.*

*Sruti* adalah wahyu Tuhan yang diterima langsung oleh para maha Rsi orang suci dalam Agama Hindu, wahyu tersebut tertuang dalam kitab suci Agama Hindu yaitu Veda. *Smrti* merupakan wahyu yang diterima para maha Rsi yang kemudian ditulis kembali kedalam naskah-naskah suci keagamaan. Sila adalah adalah per-

ilaku orang suci yang karena kesuciannya tersebut dijadikan tauladan dan diacu oleh umat Hindu sehingga dijdikan pedoman daam kehidupan mereka sehari-hari. Atmanastuti adalah perenungan dan kata hati yang mendalam dari umat Hindu yang didasari oleh ketengan *yama, nyama, dyana* dan *Samadhi* sebagai bagian dari implementasi ajaran yoga.

Lima sumber hokum Agama Hindu tersebut dalam praktek kehidupan Agama Hindu di Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dalam praktek kehidupan keagamaan dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe samapai Talaud. Hindu Tamil di Medan, memiliki tradisi berbeda dengan Hindu di Samosir, demikian juga Hindu di pedalaman Tengger akan berbeda dengan tradisi Hindu di Bali, Sasak, Siderap, Kaharingan, dan daerah lainnya. Pedoman akan susastra Veda yang terdiri dari lima garis besar itu biasanya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan adat dan tradisi dimana Agama Hindu itu berada.

## Tri Kerangka Dasar dalam Agama Hindu

Tiga kerangka dasar dalam Agama Hindu yaitu Tattwa, Etika dan Susila. Tiga kerangka ini menjadi dasar yang paling fundamental dalam praktek kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memberikan kebebasan beragama bagi setiap umatnya sudah barang tentu wajib untuk mengatur kehidupan umat beragamanya. Beragama dalam konteks pribadi dan beragama dalam ranah sosial. Oleh karena itu pemahaman tiga kerangka dasar dalam Agama Hindu akan menjadi pijakan bagi umat Hindu dalam men-

jalankan ajaran dan keyakinannya.

Tattwa adalah landasan filosofis beragama, tattwa sebagai inti sari ajaran Agama Hindu menjadi konsep beragama secara falsafati. Pengetahuan tentang yang hakiki, kesadaran beragama dari dalam diri yang lekat dengan tataran konsep ideal dan ajaran ketuhanan yang sangat kompleks. Pemahaman ajaran Agama Hindu pada tataran Tattwa akan kurang lengkap apabila tanpa memahami konsep etika dalam tri kerangka dasar dimaksud.

Pemahaman tattwa yang benar serta mendalam, akan mengalir dalam tata pola keseharian umat Hindu sehingga kata, pikir dan lakunya akan sesuai dengan ajaran agama yang dipahaminya. Pikiran, perkataan dan perbuatan adalah bagian dari Tri Kaya Parisuddha atau landasan etika tiga hal yang harus disucikan. Pikiran, perkataan, perbuatan, senantiasa dalam keadaan terkendali, dalam Katha Upanisad I.3.3 dikatakan "inilah yang patut saya ajarkan lagi, indriyalah yang dianggap sorga dan neraka. Bila orang sanggup mengendalikannya, itu semata-mata sorga namanya, tetapi bila tidak sanggup mengendalikannya benar-benar nerakalah ia." Dikatakan secara tegas dari perkataan seseorang bisa mendatangkan sahabat, dari perkataan pula bisa menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, secara arif ajaran agama akan menjadi lengkap aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bila konsep etika dalam hal ini Tri Kaya Parisuddha itu dilakukan dengan baik.

Beriteraksi dengan komunitas sosial dengan kedalaman pemahaman ajaran agama yang tidak sama,

tentu memerlukan interaksi yang tidak mudah. Belum lagi alasan pendidikan yang tidak sama, latar belakang pekerjaan, adat dan tradisi kedaerahan yang tersebar di nusantara memerlukan satu kesadaran bahwa konsep dan ajaran itu perlu untuk dimaknai secara benar dan mendalam, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman satu dengan yang lainnya. Pemahaman ajaran agama dengan baik akan mendorong sifat-sifat bijaksana, dalam Kata Upanisad I.3.4 dikatakan, "Ketahuilah bahwa sang pribadi dalam Tuannya kereta, badan adalah kereta, ketahuilah bahwa kebijaksanaan itu adalah kusir, dan pikiran adalah tali kekangnya." Landasan etika yang baik akan menyempurnakan pemahaman (pengetahuan agama secara teoritis), sehingga apa yang dikatakan upanisad tentang pikiran sebagai tali kekang itu adalah pengendali dari segala tindakan manusia. Dengan berpikir yang bijaksana, berkata dan berbuat yang penuh dengan kesantunan, akan memberikan nuansa damai pada lingkungannya.

Indonesia yang memiliki penduduk dengan berbeda etnis, agama, suku dan bahasa memiliki karakteristik yang berbeda pula. Dengan landasan etik yang baik akan mejadi modal dalam menanamkan fondasi pemahaman bagi umat beragama Hindu agar kehidupan beragamanya benar-benar utuh dan mencerminkan sabda suci Tuhan itu sendiri.

Penjabaran tattwa, etika dalam praktek kehidupan sehari-hari kehidupan umat Hindu akan tampak dalam aktivitas ritual/ *yajna* dengan manifestasinya di masyarakat Hindu Indonesia. Perbedaan tradisi, cara

pelaksanaan ajaran agama dan berbeda-beda tidak bisa lepas dari konsep bahwa Agama Hindu yang hidup dan tumbuh sesuai dengan adat tradisi dimana Agama Hindu itu berkembang.

Tradisi Tengger dengan perayaan pemujaan Kasodo di puncak Bromo sudah barang tentu tidak bisa disamakan dengan tradisi uat Hindu yang ada di Bali. Cara dan bentuk ritualnya akan berbeda-beda, walaupun substansi dan makna persembahan yang dilakukan itu bertujuan sebagai media untuk mengagungkan Tuhan / Sang Hyang Widhi Wasa. Cara dan jalan yang berbeda-beda itu dijelaskan pula dalam konsep Catur Marga atau empat jalan yang diberikan bagi umat Hindu untuk melakukan jalan manapun sesuai dengan profesinya itu. Jalan yang dipilih umat Hindu (Catur Marga) tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lainnya.

Catur Marga yang merupakan empat jalan dalam mengagungkan Tuhan atau Sang Hyang Widhi Wasa terdiri dari Bhakti Marga atau jalan mendekatkan diri dengan Tuhan melalui bhakti, pemujaan dengan berbagai tradisinya. Jalan kedua dengan Karma Marga atau jalan kerja, profesi yang digeluti secara penuh kesadaran dalam upaya mengagungkan kebesaran Tuhan / Sang Hyang Widhi Wasa. Jnana Marga adalah jalan ilmu pengetahuan, mendekatkan diri dengan Tuhan dengan jalan merupakan jalan yang dibenarkan pula, karena jnana yang baik akan mengantarkan seseorang pada pencerahan, kesadaran. Terakhir adalah Raja Marga atau penyatuan diri, mendekatkan diri pada Tu-

han melalui laku spiritual, dengan menjalankan tahapan terakhir dalam hidup sebagaimana para orang suci para maha Resi lakukan dengan meninggalkan hidup keduniawian.

**Pancasradha**

Dalam Rg. Weda X.151.1 dikatakan bahwa api pengorbanan (persembahan) dinyalakan dengan keyakinan yang mantap (sraddha). Persembahan dihaturkan dengan keyakinan yang mantap (sraddha), yang memiliki nilai teringgi dalam kemakmuran". Pandangan ajaran Agama Hindu tersebut memberikan pemahaman bahwa konsep Panca Sraddha adalah payung keyakinan akan lima konsep keyakinan yang terdiri dari: 1. Widhi Sraddha, percaya dengan keberadaan Brahman atau sebutan lain dari Tuhan /Sang Hyang Widhi Wasa dalam ajaran Agama Hindu. 2. Atma Sraddha, percaya dengan keberadaat atma / percikan kecil dari Brahman yang memberikan hidup bagi manusia, hewan dan tumbuhan. 3. Karma Pala Sraddha, keyakinan akan adanya hukum sebab dan akibat, sebagai bagian dari konsep perilaku apapun bagi umat Hindu akan berdampak pada kehidupan umat dalam keseharian. 4. Punarbhawa Sraddha yaitu keyakinanan akan terlahirnya kembali. Agama Hindu memiliki konsep keyakinan bagi atman yang memiliki keterikatan duniawi, dan belum mendapatkan jalan pembebasan atau moksha, maka atmanya akan menjelma kembali ke dunia ini. 5. Moksha Sraddha adalah konsep lepasnya atman dari segala keterikatan duniawi, tidak terikat baik dan buruknya dunia, tidak pula terjebak pada sanjungan, makian di

dunia ini, sehingga situasi atman yang demikian akan mengantarkan kehidupan seseorang mencapai kelepasan atau moksha. Tercapainya tujuan hidup ini disebut sebagai *Mokshartam Jagadhita ya ca iti dharma.*

1. *Brahman Sraddha* / Percaya dengan adanya Sang Hyang Widhi

Keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagaimana diuraikan di awal dalam konsep Nirgunam dan Sagunam Brahman (konsep Tuhan yang tidak tergambarkan oleh daya nalar manusia dan TUhan dalam batasan daya nalar manusia) diperkuat dengan berbagai pandangan dalam susastra suci Weda antara lain.

a) *Ekam sad wiprah bahuda wadantyagnim yaman matarisvanam ahuh* (Rg. Weda. I. 164.46). Terjemahnnya: Satu Tuhan itu (Tuhan) orang bijaksana menyebut dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, Matarisvan.

b) *Ekam eva adwityam Brahman.* Terjemahannya: Hanya ada satu tidak ada duanya Sang Hyang Widhi itu

c) *Eko Narayana nadwityo Sti kascit.* Terjemahannya: Hanya satu Tuhan disebut Narayana, sama sekali tidak ada duanya.

d) *Bhinneka Tunggal Ika, tan hana Dharma Mngruwa.* Terjemahannya: Berbeda-beda tetapi satu tidak ada dharma yang ke dua.

Kemahakuasaan Tuhan/ Sang Hyang Widdhi Wasa dalam pandangan Agama Hindu sungguh tidak diragu-

kan lagi. Dalam pandangan susastra Weda dijelaskan adanya beberapa cara memahami dan menghayati keradaan Tuhan itu antara lain dengan metode Tri Pramana. Tri artinya tiga dan Pramana artinya pengamatan secara mendalam. Ketiga pramana itu antara lain: 1. Agama/ sabda Pramana maknanya adalah pemahaman dan keyakinan yang dimiliki seseorang dengan jalan menyaksikan secara langsung tentang kemahakuasaan Tuhan. Baik yang terungkap dalam kitab suci maupun fenomena-fenomena alam yang ada. Mendengarkan nasihat, arahan melalui darsanam (duduk dekat dibawah kaki seorang guru) akan diyakini dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama secara baik. Pemahaman tentang keberadaan Tuhan/ Sang Hyang Widhi dengan baik; 2. Anumana Permana, keyakinan pada keberadaan Tuhan lewat analisa, secara logis dan sistematis tetang keberadaan Tuhan/ eksistensi Tuhan lewat ciptaan-Nya Matahari, Bulan Bintang, planet dan galaksi sudah barang tentu pencipta semua keagungan itu adalah Tuhan/ Sang Hyang Widi; 3. Pratyaksa Pramana adalah keyakinan yang muncul dari bagaimana keberadaan Tuhan itu sendiri dapat dirasakan, terutama oleh para arif bijaksana para maha Rsi / orang – orang suci yang sudah sempurna dalam Agama Hindu.

Agama Hindu di Indonesia menyebut istilah Tuhan itu atau mempercayai keberadaan Tuhan itu dalam berbagai dimensinya. Di Bali disebut Sang Hyang Widhi, di Jawa disebut Sang yang Dewa Bhatara, di Karingan disebut Ranying Hatala, di tempat lainnya dapat ditemukan sebutan lainnya, semua itu adalah Tuhan

itu sendiri dalam wujudnya sebagai saguna brahman/ Tuhan yang berpribadi.

2. *Atma Sraddha*/ Percaya dengan adanya Atman

Zat pemberi hidup dalam Agama Hindu disebat dengan atman. Keyakinan atman sebagai percikan terkecil dari Brahman adalah konsep keyakinan yang terdiri dari tiga bagian. Atman dalam tubuh manusia, atman dalam tubuh hewan dan atman dalam tumbuh-tumbuhan. Konsep atman dalam diri manusia, sudah barang tentu menjadi bagian dari konsep saguna brahman itu/ Tuhan yang memiliki batasan-batasan sebagai gambaran pikiran manusia yang terbatas. Tuhan yang sejatinya Maha Sempurna tak terbatas tidak mampu digambarkan oleh manusia.

Dalam pandangan Agama Hindu Atman dapat meningkat kualitas dirinya ketika tidak lagi terikat dengan belenggu duniawi, sehingga kelak atman akan menyatu dengan Brahman/ Tuhan. Apabila belenggu kehidupannya sangat mengikat dirinya, karma buruknya terlalu banyak aka bisa saja atman akan terjatuh pada kehidupan neraka. Dalam takdirnya atma akan terus dibelenggu oleh karenanya akan terus terlahir ke dunia.

3. *Karma Sraddha* / Percaya dengan Karmaphala

Karmaphala berasal dari kata karma dan phala, karma adalah perbuatan dan phala adalah buah atau hasil dari perbuatan itu. Phala bisa baik bisa juga buruk, baik buruknya hasil tergantung baik buruknya perbuatan umat manusia. Oleh karena itu dalam Wrhaspati

Tattwa, 3 dikatakan:

> Vasana artinya semua perbuatan yang telah dilakukannya di dunia ini. Orang akan mengecap akibat perbuatannya di alam lain, pada kelahiran nanti, apakah akibat itu akibat yang baik atau buruk. Apa saja perbuatan yang dilakukannya, pada akhirnya semua itu akan menghasilkan buah. Hal ini adalah seperti periuk yang diisikan kemenyan, walaupun kemenyan sudah habis dan periuknya dicuci bersih, namun tetap saja akan berbau kemenyan. Itulah yang disebut sebagai vasana, seperti itu juga yang disebut vasana. Ia ada pada atma, ia melekat padanya, ia mewarnai atman.

4. *Punarbhawa Sraddha*

Kelahiran kembali roh kedunia akan mengalami apa disebut punarbhawa. Ketika kelahiran kembali terjadi atman yang ada dalam diri manusia akan terikat dari karma baik dan buruk badan kasar dimana atman itu menjelma. Semakin tebal belenggu dan ikatan badan kasar pada atman, maka kesadaran akan semakin jauh, sehingga proses punarbhawa/kelahiran kembali akan terjadi lagi.

Dalam kitab Sarasamuccaya 4 dikatakan:

> Pergunakanlah sebdaikbaiknya menjelma menjadi manusia, sungguh kesempatan yang sangat sulit diperoleh, akan menjadi tangga menuju sorga, sesuatu yang menyebabkan agar tidak jauh lagi itulah hendaknya dilkukan.

5. *Moksha*

*Moksha* artinya kelepasan, tujuan akhir Agama Hindu adalah tercapainya *Moksha*. Moksha adalah keadaan

dimana atma tidak dilahirkannya kembali ke dunia, karena atman tidak terikat dengan berbagai keterikatan dunia khususnya materi, dan segala yang berbau duniawi. Atman sudah bersatu dengan Parama Atman/ Brahman atau sumbernya yaitu Sang Hyang Widhi. Dikatakan dalam susastra suci Agama Hindu apabila air sungai yang mengalir ke lautan dan sudah menyatu dengan lautan itu, maka ia akan kehilangan identitasnya sendiri. Pada sisi demikian sering dikatakan sebagai aham brahman asmi atau Aku adalah Brahman.

**Panca Yajna**

Dalam Agama Hindu landasan Tattwa atau konsep Filsafat Agama, landasar Etika atau pengetahuan tentang kesusilaan, kaidah larangan atau anjuran dalam ajaran agama, dilengkapi dengan Acara dalam Agama Hindu. Konsep Acara adalah konsep aktifitas keagamaan yang di dalamnya bisa berupa ritual keagamaan, dapat pula berwujud karma-karma yang lainnya. Munculnya keyakinan akan aktifitas keagamaan didasari pada konsep Rnam. Hutang dalam kehidupan umat manusia. Rnam itu ada tiga jumlahnya yang disebut Tri Rnam. Tiga hutang itu antara lain Dewa Rnam, Pitra Rnam dan Rsi Rnam.

Hutang kepada Dewa adalah berupa kehidupan di dunia ini baik pad aspek yang nyata maupun tidak nyata, termasuk pada alam. Oleh karena itu dalam aktivitas kehidupan beragama Dewa Rnam ini menginisiasi dilakukannya upacara Dewa Yajna dan Bhuta Yajna dalam aktivitas kehidupan umat Hindu. Hutang yang kedua adalah Pitra Rnam, hutang kepada para Leluhur.

Hutang pada leuhur biasanya dimaknai dalam setiap upacara yajna berupa Pitra Yajna atau korban suci pada para leluhur, serta Manusa Yajna upacara korban suci pada kehidupan umat manusia ulai dari sejak dalam kandungan (magedong-gedongan), upacara bayi lahir, (kepus pusar), tiga bulanan, akil balig sampai pada pernikahan.

Hutang yang ketiga adalah Rsi Rnam atau hutang pada para maha Rsi para maha guru yang dalam praktek beragama dilakukan dengan melakukan Rsi Yajna atau upacara korban suci pada orang-orang suci. *1. Dewa Yajna,* adalah upacara korban suci secara tulus ikhlas yang dilakukan umat Hindu kepada Tuhan / Sang Hyang Widhi dengan segala manifestasinya. Upacara Dewa Yajna ini, dalam aspek persembahan bentuknya bisa sangat beragam di Indonesia. Tatanan tradisi dan tata pola berkeyakinan umat Hindu tidak saja seperti tradisi Bali atau Jawa saja, karena Agama Hindu tersebar di seluruh Indonesia. 2. *Bhuta Yajna,* adalah korban suci yang tulus iklas yang diperuntukkan bagi bhuta (aspek alam) yang merupakan unsur penunjang dalam kehidupan umat Hindu. Bhuta dimaknai pada aspek alam sebagaimana konsep tiga sumber keselarasan yang bertujuan untuk mencapai Jagadhita / kebahagiaan dan kedamaian (Tri Hita Karana) . Keselarasan manusia dengan Tuhan (Parhyangan), keselarasan manusia dengan sesame manusia (Pawongan), dan keselarasan musia dengan alam (Palemahan). 3. *Pitra Yajna*, adalah upacara korban suci yang diperuntukkan bagi para leluhur. Upacara pengabenan (salah

satu tahapan dalam upacara kematian) sebagaimana lazim ditemukan di Bali merupakan Pitra Yajna. Umat Hindu memiliki keyakinan bahwa atman yang ada dalam setiap diri manusia dia akan menjadi terbebas dan kembali pada sumbernya apabila diupacarai. Upacara kematian itu prosesnya sangat panjang, sehingga memerlukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Upacara pengabenan, upacara ngrorasin, hingga menstanakan roh suci yang telah diupacarai di tempat suci keluarga. Rangkaian dengan upacara Pitra adalah Manusa Yajna. 4. *Manusa Yajna*, adalah korban suci yang tulus iklas yang dilakukan pada umat manusia, dalam ajaran Agama Hindu proses kehidupan adalah proses kesucian. Oleh karena itu, mulai dari sejak janin dalam kandungan sudah diupacarai. Tradisi di beberapa daerah juga dilakukan. Upacara bayi lahir, tiga bulanan, hingga seorang anak mulai beranjak dewasa juga dilakukan prosesi upacara yajna. Dalam tradisi Hindu di Kalimantan, seorang anak yang berumur tiga bulan, dibuatkan upacara balian palasbidan, di Bali ada upacara tiga bulanan, demikian juga di darah lainnya. Prosesi yajna masih akan terus berjalan ketika anak dewasa, menikah, sampai upacara pengabenan. 5. *Rsi Yajna* adalah upacara korban suci pada para orang suci. Dalam tradisi peningkatan spiritual dalam Agama Hindu, orang suci memiliki prosesi peningkatan spiritual sesuai dengan jenjangnya. Terdapat beberpa kategori orang suci dalam Agama Hindu. Ada yang disebut pemangku atau orang suci dengan proses penyucian eka jati. Tingkatan lebih tinggi ada disebut sebagai tingkatakan dwi jati atau penyucian yang sudah lebih

lanjut diperuntukkan bagi mereka yang akan menjadi Pendeta. Pendeta dalam kehidupan umat Hindu memiliki tanggung jawab dan tugas yang sangat berat, mendoakan alam, manusia dan kehidupan semesta, bukan semata-mata kehidupan dirinya.

**Agama Hindu dalam Kehidupan Bernegara.**

Darma agama dan darma Negara adalah istilah yang sudah diuraikan sekilas di awal tulisan ini. Memaknai kewajiban umat Hindu sebagai warga Negara Indonesia (darma Negara) terimplikasi dari tatanan kehidupan masyarakat yang selalu mentaati hukum, regulasi pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai landasan idiil dalam kehidupan bernegara adalah dasar konstitusi yang sudah final dan mengikat tata nilai dalam hidup di Negara Indonesia. Umat Hindu selalu memerankan dirinya dalam berbagai aktifitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan berpegang pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kejujuran, persaudaraan karena itulah makna terdalam sebagai umat beragama. Menjaga persatuan, ketertiban, dengan tetap terbuka dan adaptif pada perubahan adalah bagian dari dari ajaran Agama Hindu. Perubahan adalah entitas yang kekal dalam pandangan Agama Hindu, oleh karenanya apapun dinamika jaman akan senantiasa diadaptasi oleh masyarakat Hindu di Indonesia.

Memaknai darma agama dalam Agama Hindu tidak terlepas dari konsep empat guru (catur guru) yaitu Guru Swadyaya /Tuhan sebagai guru alam semesta penyebab lahir-hidup-matinya manusia dan ciptaan Tuhan lainn-

ya, Guru Wisesa/ Pemerintah sebagai guru yang harus dipatuhi, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Guru pangajian / para guru di sekolah sebagai wakil Tuhan dalam membentuk karakter dan budhi baik umat Hindu, serta Guru Rupaka / orang tua (bapak dan ibu) sebagai wujud entitas Brahman dalam pribadi manusia Hidu. Keempat Guru dimaksud wajib hukumnya untuk dipatuhi dan dijadikan panutan. Oleh karena itu, hindup beragama dan mengimplementasikan nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana umat Hindu paham dan menjalankan konsep Catur Guru secara baik. Menjalankan perintah Tuhan, taat pada pemerintah, bhakti pada orang tua dan paraguru di sekolah yang mengajarkan moralitas dan ahlak, akan membawa kehidupan umat Hindu yang damai.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah menjadi konsensus bersama. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, keadilan, kedamaian dan kerukunan antar, inter umat beragama serta antara umat beragama dengan pemerintah adalah implementasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri. Sebagai warga negara dan sekaligus umat beragama yang baik tugas dan kewajiban dharma agama dan dharma negara itu akan selalu melekat dalam berbagai aktivitasnya.

## III. Penutup

Eksistensi Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa mengalir dan tercermin dalam kehidupan umat Hindu sehari-hari. Pemahaman akan Ketuhanan

Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila itu tidak semata-mata dilihat dari aspek persembahyangan di tempat suci semata, karena lebih dalam dari itu apek perilaku (tutur kata, pikiran dan perbuatan) menjadi kunci yang utama. Meyakini keberadaan Tuhan dimaknai sebagai mempermulia pikir, kata dan laku yang dimunculkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sudut pandang demikian itu, umat Hindu membangun sikap welas asih, pada dirinya, orang lain dan juga alam dimana mereka berada. Tidak welas asih pada diri akan memunculkan sikap kasih juga pada orang lain dan semesta. Meyakini Tuhan dengan segala ciptaan-Nya tampak tercermin dari ajaran catur guru, karena empat guru itulah yang selalu memberikan bimbingan sehingga jalan yang yang ditempuh umat manusia sampai pada tujuan utamanya "mokshartham jagadhita ya ca iti dharma" yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat / alam moksha. Pilihan jalan atau (catur marga) dengan jalan berbakti, berkarma, jnana marga / ilmu pengetahuan dan raja marga / kasunyatan adalah pilihan. Pilihan yang diukur dari sisi kemampuan, kapasitas spiritual diri, serta kesiapan lahir dan batin. Tidak ada paksaan, karena kesadaran akan menjadi pengendali utama dalam menempuh kehidupan itu, dalam sastra disebutkan kemampuan umat untuk berwiweka (memilih dan memilah mana yang pantas dan tidak untuk dilakukannya).

## Referensi

Kajeng, I Nyoman, 1999, Sarasamuccaya, Surabaya: Paramitha

Maswinara, I Wayan, 2001, Mandukya Upanisad, Surabaya: Paramitha

Maswinara, I Wayan, 1999, RgWeda Samhita, Surabaya: Paramitha

Ngurah, I Gusti Made, 1999. Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi, Surabaya: Paramita.

Pendit, Nyoman S, 1991, Bhagawadgita, Denpasar: Yayasan Dharma Sarathi.

Suwindia, dkk, ed, 2006, Weda dan Filsafat. Surabaya: Paramitha

Surayin, Ida Ayu, 2005., Upakara Yajna, Surabaya: Paramitha

Suparta, I Wayan, 1995, Dharma Agama dan Dharma Negara, Denpasar: Bali Post

Titib, I Made, 2007, Studi Agama Hindu. Denpasar: Pascasarjana.

Titib, I Made, 2005, Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan, Surabaya: Paramitha

# NILAI-NILAI MORAL, KETUHANAN, DAN PANCASILA PADA KEBERAGAMAAN UMAT HINDU

*I Wayan Wastawa**

## I. Pendahuluan

Sejarah dunia menunjukkan suatu pertentangan atau ketidak serasian dan konflik terus-menerus terjadi, ini digambarkan sebagai pertentangan antara ide *Dharma* dan *Adharma* yang ditemukan dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Sejarah adalah suatu ketegangan yang bergerak terus menerus dan perjuangan antara moral, idealistis dan kekuatan spiritual diwakili oleh ide *Dharma*, dan kekuatan penjahat yang tidak mungkin berubah dari kegelapan, napsu birahi, dan kejahatan ini diwakili oleh Ide *Adharma*.

Karenanya menurut filsafat Hindu dan sejarah pemikiran adalah merupakan usaha progresif pada suatu ketetapan, kenyataan dan penyatuan *Dharma* di dalam kebersamaan individu dan kehidupan spiritual serta pengalaman. Sepanjang sejarah dari beribu-ribu tahun kebudayaan Indonesia pernah mengalami perkembangan pasang surut, dan puncaknya mengalami masa

* Dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali.

pertumbuhan pada kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dari suatu yang sangat komplek, percampuran perbedaan dan keanekaragaman bentuk strukturnya. Untuk menyelesaikan kekusutan rahasia kebudayaan ini, maka dibentuklah Negara Republik Indonesia berdasarkan konsep yang mewakili *Dharma* dari berbagai agama yang disebut Pancasila.

Hubungan agama dan politik (negara) adalah karakter daripada kewajiban-kewajiban kebajikan daripada penduduk yang baik. Tetapi kebajikan menjadi manusia yang baik adalah hal yang mutlak dan tidak berhubungan dengan undang-undang yang khusus. Oleh sebab itu kebajikan untuk manusia yang baik dan juga untuk kebaikan penduduk tidaklah serupa pada keadaan tidak sempurna. Hanya pada waktu keadaan yang sempurna penduduk itu akan sejahtera dan manusia itu baik. Perbedaan antara kebajikan manusia yang baik dan penduduk yang baik adalah hal yang sangat penting di dalam pandangan politik Aristoteles (Varma, 1974:155).

Agama Hindu adalah bersifat adaptaif yang dapat menyesuaikan ajarannya dengan perkembangan zaman untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan  Yang Maha Esa, antara manusia dengan manusia lainnya, dan antara manusia dengan lingkungannya yang disebut dengan konsep *Tri Hita Karana,* yaitu tiga penyebab kesejahteraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Tri Hita Karana* adalah nilai religious dan nilai humanis, yang koheren dengan nilai-nilai dalam Pancasila, yakni nilai Ketuhanan se-

bagai unsur percaya kepada Tuhan yang Maha Esa (*Parhyangan*), nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan permusyawaratan sebagai dasar menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya (*Pawongan*), dan nilai keadilan yang memberikan kedudukan dan hak yang sama (*equality*) kepada semua makhluk hidup (*Palemahan*). Nilai Ketuhanan dan nilai humanisme ini dinyatakan sebagai "*Sarwam Khalu Idam Brahman*" (Chandogya Upanisad III.14.3), yang artinya semua ini adalah *Brahman* (Tuhan).

Nilai Ketuhanan dalam agama Hindu tidak saja mengajarkan bagaimana Tuhan itu dipuja dengan sifat monoteisnya, melainkan pula bagaimana Tuhan atau *Brahman* memberikan teladan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat adalah sangat erat berhubungan dengan sistem nilai. Kedudukan dari nilai-nilai adalah akan sangat berbeda pada budaya yang berbeda-beda, bagaimanapun ada nilai universal untuk manusia pada umumnya. Sistem nilai Pancasila akan dihubungkan untuk apakah masyarakat menghormati Pancasila sebagai hal yang berharga. Nilai-nilai Ketuhanan oleh umat Hindu diwujudkan dengan berbagai bentuk simbol-simbol Negara ke dalam praktik keberagamaan umat Hindu, yang tidak sebagai pelanggaran terhadap keyakinan agama Hindu. Agama Hindu dapat memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan bernegara, serta dapat menyerap nilai-nilai positif kebersamaan den-

gan menjunjung tinggi *egaliteriarisme,* prinsip *equality,* dan nilai *multikulturalisme* dalam keberagaman. Untuk itu, bagaimana prinsip-prinsip kesamaan derajat, kesetaraan, dan penerimaan prinsip keragaman budaya yang humanis dari nilai Ketuhanan dalam agama Hindu diimplementasikan dalam kehidupan beragama dan bernegara.

## II. Pembahasan

### Nilai-Nilai Moral dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Kesadaran tentang nilai moral seluruhnya ada ditemukan di dalam kitab suci Veda. Konsep *Rta* sebagai tata tertib alam termasuk kebajikan dan keadilan. *Rta* adalah peringatan keras (ugra), dan ketika seseorang melampaui itu, seseorang ditundukan oleh hukum. Aspek moral daripada *Rta* adalah jelas dari peggunaan kata *anrta* sebagai kebalikan dari pengertian *Rta.* Akan tetapi konsep Dharma sedikit demi sedikit lebih luas dan meliputi kebenaran dan keadilan.

Norma moral mempunyai sifat yang positif dan negatif. Sifat netagif, tidak merusak terhadap yang lainnya, tidak untuk menipu, tidak saling mencurigai, tidak untuk mengingkari janji, dan yang lainya, sebaliknya kemurahan hati, kerukunan, kedamaian dan seterusnya mungkin disebut dengan sifat yang positif. Telah dipercaya bahwa dengan pelanggaran di hari yang lalu, seseorang mendatangkan dosa dan dengan ibadah yang berikutnya, seseorang mendapatkan kebajikan. Pada umumnya pelanggaran terhadap tata tertib alam,

atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan upacara diketahui sebagai suatu dosa. Mengenai berbagai macam persoalan dosa, kebohongan, ketidaktulusan hati, kutukan palsu, mencelakai seseorang dengan fitnah, tidak memenuhi janji orang dan perzinahan adalah termasuk sebagai perbuatan asusila atau *anrta*. Meminum-minuman keras, marah, berjudi dan berpikir kotor, melukai hati teman-teman, tetangga atau saudara-saudara, atau tetap bersikap keras adalah termasuk sebagai sumber daripada dosa.

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tinngginya. Menurut tinggi rendahnya nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut ; (1) Nilai-nilai kenikmatan; (2) Nilai-nilai kehidupan; (3) Nilai-nilai kejiwaan, dan (4) Nilai-nilai kerohanian (Frondizi, 1963; Driyarkara, 1978; Kaelan, 2010). Sedangkan di dalam agama Hindu juga ada dikelompokan sebagai system nilai menurut Veda, antara lain (1) Nilai Material, hak milik dan kesenangan seperti nilai kesenangan dan nilai estetika; (2) Nilai-nilai moral dan relegi, yang terdiri dari, nilai kebenaran, kerukunan, dherma atau *danapunya*, keramah tamahan, kesucian dan kemurnian, kepercayaan atau keyakinan, pengendalian diri, *tapa*, studi dan nilai agama; (3) Nilai Tertinggi yang termasuk, jiwa, *karma*, perpindahan jiwa, *Brahman*, dan pembebasan. Sesuai dengan pembahasan bahwa nilai-nilai yang terkandundg dalam Pancaila merupakan filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia, mengandung

makna bahwa dalam aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan (Kaelan, 2020:25). Sedangkan sebagai suatu ideologi, Pancasila bukan hanya hasil perenungan seseorang atau kelompok orang, melainkan Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religious yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Nilai Ketuhanan adalah merupakan rohk dari keseluruhan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai Ketuhanan meresap dan mengalir pada seluruh nilai yang lainnya. Seperti air yang mengalir diberbagai sungai dari satu sumber mata air danau, karena pembentukan sungai dari berbagai tipe, seperti sungai dengan tipe bebatuan, tipe berlumpur, tipe berpasir, tipe batu padas, maka air sungai yang mengalir sampai juga kelihatan dalam warna yang berbeda, tetapi kesemuanya sampai ke laut itu juga disebut dengan air (Wastawa, 2019:144). Untuk itu, dapat dibicarakan nilai moral yang bersifat positif yang diajarkan dalam kitab suci Veda dan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### 1. Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan pada dasarnya juga dijiwai oleh nilai Ketuhanan. Sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tingggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemanusiaan di dalam ajaran agama Hindu menitik beratkan pada ajaran yang humanis dan meniru dari sifat-sifat Tuhan atau para Dewa sebagai manifestasi

Tuhan. Nilai-nilai kemanusiaan dengan menganggap manusia adalah sama sebagai ciptaan Tuhan. Konsep harmoni dalam ajaran *Tri Hita Karana* memperoleh untuk kesimbangan dan kesejahteraan menjadi falsafah hidup umat Hindu yang disebut *Tat Twam Asi* yang artinya "Aku adalah diKau", Aku adalah wujud dari Tuhan dan diKau adalah wujud daripada *Atman* (rohk), itu artinya di dalam Aku ada diKau, dan Kau adalah Aku. Berdasarkan falsafah ini memiliki makna bahwa di dalam manusia ada Tuhan, dan Rohk adalah percikan kecil dari Tuhan. Dengan demikian manusia tidak ada alasan untuk tidak menghormati manusia yang lainnya, manusia tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa manusia lainnya, membunuh manusia berarti membunuh percikan kecil dari Tuhan.

Mengakui manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama serta sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, maka nilai kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan diperkuat dalam kitab Yajurveda: 40-7, sebagai berikut:

> *Yasmin sarvāṇi bhūtānyātmaiva bhūdvijānatah,*
> *Tatra ko mohaḥ kaḥ śoka 'ekatvamanupaśyataḥ*
>
> Seseorang yang menganggap seluruh umat memiliki ātma yang sama dapat melihat semua manusia sebagai saudaranya, orang tersebut tidak terikat dalam ikatan dan bebas dari kesedihan' (Somvir, 2001:178)

Mantra di atas bermakna bahwa manusia berada dalam keadaan sama secara fisik dan spirit, sehingga mereka wajib untuk saling menghormati antar sesamanya. Bhagavadgita IX.29 menyebutkan, "Aku adalah

sama bagi mahkluk semua, bagi-Ku tiada yang terbenci dan terkasihi, tetapi mereka yang berbakti kepada-Ku dengan dedikasi mereka ada pada-Ku dan Aku ada pada mereka (Pendit, 1976:207).

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati kesetaraan dalam keberagaman, akan menimbulkan sikap *simpathy* dan sikap *empathy* kepada sesama umat beragama. Di samping itu, nilai kemanusiaan juga diimplementasikan oleh umat Hindu di Bali sebagai kearifan lokal dalam bentuk tradisi budaya *manyamabraya* dengan mengakui semua manusia adalah saudara sehingga muncul slogan yang bermakna positif yaitu *Nyama slam* (saudara yang beragama Islam), *Nyama Krsiten* (saudara yang beragama Kristen), *Nyama Jawa* (saudara dari Jawa) dan lain sebagainya. Di samping itu *manyamabraya* diwujudkan pada tindakan: *saling tulungin* (saling menolong), *saling idihin* (saling meminta dan memberi), *majenukan/ saling jenukin* (melayat), *saling silihin* (saling pinjam meminjam) hal ini meningkatkan rasa saling menghormati, saling mengasihi untuk menjaga kerukunan.

Mantram Atharvaveda XII.1.45 menyebutkan penghargaan terhadap perbedaan sebagai wujud nilai kemanusiaan, sebagai berikut

> “Janaṁ bibhratī bahudhā vivācasam
> Nānādharmaṇaṁ pṛthivī yathaikasam
> Sahasraṁ dhārā draviṇasya me duhāṁ
> Dharveva dhedehnuranapasphurantī”

> Berikanlah penghargaan kepada bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa daerah, yang

> menganut kepercayaan/agama yang berbeda,
>
> Hargailah mereka yang tinggal bersama di bumi pertiwi ini,
>
> Bumi yang memberikan keseimbangan bagaikan sapi yang memberi susunya kepada manusia. Demikian ibu pertiwi memberikan kebahagiaan yang melimpah kepada umat-Nya. (Somvir, 2001:231)

Azas kebersamaan yang kuat ditandai pula oleh usaha dan tanggungjawab bersama untuk menjaga agar tetap seimbang dan harmonis yang sesuai dengan ajaran *Vasudhaiva Kutumbakam* (Maha Upanisad 6.72) yang artinya bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga tunggal/bersaudara, tanpa membedakan agama, suku, bahasa, bangsa, budaya, tradisi dan warna kulit. Ajaran ini mengandung makna cinta kasih sebagai implementasi nilai kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan di dalam ajaran agama Hindu.

**2. Persatuan**

Nilai persatuan bermakna Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah sebagai persukutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk Negara yang berupa; suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk Negara. Konsekwensinya Negara beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam satu

seloka "*Bhineka Tunggal Ika*" (Kaelan, 2010:34).

Persatuan diilhami oleh nilai Ketuhanan yang di dalam ajaran agama Hindu disarankan untuk menjunjung nilai persatuan dalam mewujudkan kesejahteraan hendak umat Hindu melakukannya secara bersama-sama, bersatu dalam tujuan sehingga segala permasalahan dapat teratasi. Persatuan dalam keanekaragaman adalah dasar daripada pandangan Veda terhadap keseluruhan bidang kehidupan. Umat Hindu menjaga persatuan dengan menjalankan ajaran *Catur Guru* antara lain: (1) menghormati *guru rupaka* (bhakti kepada orang tua); (2) menghormati *Guru Pengajian* (bhakti kepada guru sebagai pemberi ilmu); menghormati *Guru Wisesa* (bhakti dan taat kepada aturan-aturan pemerintah); dan (4) menghormati *Guru Swadhyaya* (bhakti dan taat kepada ajaran-ajaran Tuhan). *Mantra Yajurveda* 20.25, "Dalam sebuah Negara di tempat para *Brāhmana* dan *kṣatriya* dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam persatuan dan kesatuan, Negara tersebut akan selalu dapat hidup makmur dan sejahtera. Dengan selalu keinginan ber-*yajña, para Brāhmana* dan sarjana melaksanakan *yajña.* Dengan demikian Negara tersebut akan selalu jaya" (Somvir, 2001:154).

Dalam Ṛg Veda X.٩١,٢,3.4 Tuhan bersabda: "Wahai umat manusia, anda seharusnya berjalan bersama-sama, berbicara bersama-sama dan berpikir yang sama, seperti halnya para Dewa zaman dahulu bersama-sama membagi tugas mereka, begitulah anda mestinya memakai hakmu".

"Wahai umat manusia, semoga Anda berpikir ber-

sama-sama. Semoga anda berkumpul bersama-sama. Hendaknyalah pikiran-pikiranmu dan gagasan-gagasanmu sama. Aku memberimu pemikiran yang sama dan kemudahan-kemudahan yang sama”.

“Wahai umat manusia, semoga anda maju dengan niat-niat yang sama. Semoga hatimu (batinmu) dan pikiranmu sama satu sama lainnya sehingga anda bisa diorganisasi (diatur) secara seragam”. (Titib, 1996:348-349).

Makna dari sama di dalam sloka di atas, bahwa setiap pikiran, perkataan, dan tindakan berdasarkan cita-cita bangsa dan Negara, walaupun didasari atas perbedaan pendapat dalam bermusyawarah, tetapi hanya ada satu tindakan yang sama sesuai dengan tujuan Negara itu dibangun. Hal ini untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan umum. Untuk mencapai Negara yang sejahtera dan makmur, maka pertama-tama yang harus dilakukan yaitu para pemimpin berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan. Para *Brāhmana* (para ahli, atau cendikiawan) yang menguasai pengetahuan memberikan sumbangan pemikiran kepada para *kṣatriya* (pemimpin yang menjalankan pemerintahan untuk melindungi rakyat). Supaya tidak terjadinya konflik antara kaum intelektual dengan para pemimpin, maka kerukunan harus dijaga dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan.

### 3. *Satya* atau Kebenaran

Pancasila adalah  idiologi bangsa dan Negara , sebagai ideologi atau cita-cita yang diangkat dari nilai-

nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan dan nilai religious, sudah semestinya cita-cita untuk diwujudkan dan diperjuangkan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Perlu ada kesetiaan yang ada pada setiap hati nurani warga Negara untuk menjaga, memperjuangkan, dan mencapai cita-cita tersebut. *Satya* dalam pengertian moral berarti penuh kesetiaan dan ketulusan hati seperti dipergunakan untuk perbuatan seseorang. Hubungan Ketuhanan dengan *Satya* (seperti hubungannya dengan *Rta*/hukum alam yang diatur oleh Tuhan). Kebenaran adalah mempunyai persesuaian dengan hukum Tuhan. *Rta* di dalam pengertian sebagai moral bersinonim dengan *satya* sebagai konsep moral dari kebenaran pada tingkat individual.

*Satya* 'kebenaran' adalah dinilai sangat tinggi di dalam kitab-kitab Veda, pada pengertian metafisis, adalah *Sat*, kenyataan. "Hindarkanlah kami dari ketidak benaran menuju kepada kebenaran" ditemui di dalam ungkapan yang terkenal "*asato mā sad gamaya*" (Brhad Araniyaka Upanisad, 1.3.28). yang artinya, Dalam keadaan yang sama *satya* mengandung penjelasan tentang kebajikan. Mengenai kemajuan rohani dan religious adalah satu kebenaran; "kebenaran kemenangan itu sendiri, yang bukan kebohongan. Dengan kebenaran adalah jalan ditunjukkan oleh Tuhan" (*Satyam eva jayate nārnrtam satyena panthā vitato devayānah*, Mundaka Upanisad 3.1.6).

*Satya* adalah dasar daripada kepahlawanan yang besar, mahkota dari kebajikan, pemelihara dari keutuhan keluarga, dan pelindung dari Negara. *Satya* adalah

bentuk dari kesetiaan, kejujuran, dan tanggungjawab. Kesetian kepada tanah air adalah tanggungjawab warga Negara yang diajarkan para dewa kepada manusia, kejujuran adalah bentuk tanggungjawab dari kata hati. *Satya* telah diucapkan melalui sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, harus dilaksanakan dengan setia kepada cita-cita berdirinya Negara Republik Indonesia. Sumpah sebagai kesetiaan dan kecintaan kepada tanah air, bangsa dan Negara dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan '45 untuk mencapai kemerdekaan atau kebebasan dari penjajahan. Secara rohani penjajahan dan musuh manusia sekarang tidak jauh dari dirinya yang di dalam kitab Ramayana disebutkan "*ragadi musuh mapara, ri hati ya tonggwania tan madoh ri awak, yeka tan hana ri sira, prawira wihian sireng niti*" yang artinya : kama (nafsu) keinginan adalah musuh yang sangat dekat dihatilah tempatnya tidak jauh dari badan, itu tidak pada Prabu Dasarata, pemberani dan bijaksana sebagai raja. Untuk itu,*satya*/kebenaran membutuhkan kepercayaan, maka Śraddhayā satyam āpyate "dengan menghargai kepercayaan, seseorang mencapai kebenaran yang terakhir (yakni Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Agung).

## 4. Keadilan

Keadilan menurut ajaran agama Hindu berkaitan dengan fungsi hukum *karma* sesuai dengan *guna* (sifat) dan *karmanya* (perbuatan). Keadilan secara teologis adalah keseimbangan antara pengorbanan dengan anugerah yang telah diperoleh oleh manusia semasa hidupnya dan atau antara jerih payah yang diperbuat

dengan hasil yang diberikan oleh Tuhan. Keadilan sosial juga dimaksudkan, bahwa kedudukan manusia adalah sama dihadapan Tuhan yang secara kearifan local disebut dengan *manusapada.* Secara normatif agama manusia dilahirkan sama terhadap hak dan kewajibannya dan unsur-unsur penciptaannya, tetapi secara lahir manusia berbeda dalam hal bentuk fisik, warna, pekerjaan, suku, ras, status sosial, bahasa dan sebagainya. Sebuah pernyataan, bahwa keadilan berdasarkan kesetaraan sampai saat ini dinyatakan sebagai mitos belaka, tidak pernah ada keadilan yang absolut demikian juga kesetaraan. Pertanyaannya bagaimana semua manusia dilihat sederajat? Sehingga prinsip kesetaraan ini adalah isu dan ketidakadilan terbesar atas nama keadilan. Muncul juga pertanyaan lain Tuhan menciptakan manusia sebagai sederajat, spesies lain tidak dianggap sama dengan manusia. Mengapa tidak ada persamaan semua makhluk? Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka hukum sosial Hindu berusaha melunakan keadilan dengan ketidaksetaraan dengan ganjaran dan hukuman. Berdasarkan logika inilah, dalam sistem Hindu, seorang *shudra* (orang biasa) diatur oleh aturan yang berbeda, seorang *Waisya* (pengusaha, pedagang) diatur oleh seperangkat aturan lain. Seorang penguasa (*ksatrya*) memiliki kode etik yang berbeda dan seorang intelektual (*Brahmana*) memiliki hukum tersendiri, misalya seorang *sudhra* dan seorang *Brahmana* bersepakat untuk mencuri sesuatu, menurut hukum Hindu, *Brahmana* tersebut akan kehilangan statusnya sebagai *Brahmana*, sedangkan *Sudhra* akan diberikan hukuman ringan. Dengan demikian, keadilan

menurut Hindu melihat dari status, guna/sifat dan perbuatan seseorang.

Hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya, termasuk hubungan manusia dengan lingkungannya. Untuk itu, keadilan sosial bercermin pada bagaimana Tuhan memperlakukan ciptaannya secara adil, maka sikap *sympathy* dan *empathy,* yaitu dapat merasakan susahnya kehidupan di dunia ini, yang diwujudkan dengan merasakan kesusahan dan penderitaan orang lain dengan memberikan berbagai bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yajurveda: 40.1 menyiratkan mengenai keadilan sosial adalah sebagai cara untuk memberi kesamaan pelayanan, kesejahteraan, kemakmuran, rasa aman dari penderitaan, kemiskinan dan perlunya rasa bersyukur untuk segala anugrah Tuhan.

> *Isā vāsyam idaṁ sarwaṁ yatkiñca jagatyām jagat, Tena tyakena bhunjithā mā gṛdhah kasya sviddhanam.*
>
> Dimana pun di dunia ini Tuhan itu ada. Oleh karena itu wahai manusia, nikmatilah kekayaan dengan kesadaran, jangan rakus, sadarlah siapa yang memiliki itu.

Mantra Veda di atas mengajarkan kepada umat manusia, bahwa hendaknya selalu percaya bahwa Tuhan itu ada, dan ada disegala tempat yang kosong, lubang yang sekecil-kecilnya, bahwa Tuhan itu ada dimana-mana, merasuki segala yang ada, baik yang berwu-

jud maupun yang tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tuhan memberi cahaya secara adil tidak ada yang tertutup dari sinarnya. Demikianlah hendaknya manusia juga memberikan cahaya kebaikan kepada seluruh ciptaan Tuhan sehingga hidup harmonis diantara manusia dengan manusia lainnya dengan meniru keadilan yang diteladani dari Tuhan.

Menikmati kekayaan dengan kesadaran, dimaksudkan bahwa Tuhan memberikan teladan hendaknya manusia dalam memperoleh, mempergunakan dan memberikan kepada yang lainnya dengan *punia* kebaikan ataupun *dharma,* jangan pelit, tidak rakus dan menganggap bahwa kekayaan itu adalah milik sendiri, dan sadarlah bahwa kekayaan itu milik Tuhan, manusia hanya sebagai perantara untuk memberikan kepada yang membutuhkan sebagai suatu kebajikan kepada sesama. Demikianlah hendaknya pula penguasa agar selalu berlaku adil kepada masyarakat yang membutuhkannya.

## Nilai Ketuhanan Perspektif Agama Hindu

### ***1. Brahman (Ida Sang Hyang Widhi Wasa)***

Telah dijelaskan di atas, bahwa Tuhan mengalir dan meresap di segala penjuru dunia, baik pada alam *makrokosmos* maupun *mikrokosmos*. Mengalir dan meresap inilah disimbolkan dengan *Sarasvati.* Kata *Sarasvati* berasal dari urat kata "*sṛ*" yang artinya mengalir di dalam Veda, Saraswati adalah nama devi *Ucap* (pengetahuan atau kebijaksanaan). *Brahman* sebagai individu juga diidentifikasikan dengan seluruh Deva,

beliau melingkupi seluruhnya (RV.1.89.10). Itu jelas disebutkan bahwa Deva-Deva seperti Indra, Mitra, Varuna dan Agni kenyataannya adakah satu Deva, yaitu satu Deva menampakkan dirinya sendiri didalam bentuk yang berbeda. Persatuan daripada Deva-Deva yaitu ada dilambangkan oleh satu dan ada oleh yang lainnya. Satu adalah menjadi seluruh ini (*ekam vedam vi babhūva sarwam.* RV 8.58.2). Para pendeta menjelaskan Brahman (Tuhan) adalah satu dengan banyak kata-kata untuk menyebutkannya serta dengan banyak cara untuk menyampaikannya, satu cahaya berkilauan pada jalan yang berbeda (*ekam jyotir bahudhā vibhāti* (AV. 13.3.17). Sifatnya dipertimbangkan dengan satu pandangan, nama-namanya yang berbeda dihubungkan dengan satu Deva (*yo devānām nāmadhā eka eva tam sampraśnam bhuvanā yanty anyā*, RV 10.82.3).

Seorang bijaksana melihat bahwa sifat yang mistirius ini ada dimana-mana. Seluruhnya ditemukan hanya satu yang tunggal. Disanalah seluruhnya menyatu. Persatuan daripada sifat kedewataan adalah dipandang sebagai satu Tuhan (*eko devah*), seperti pandangan daripada penyembahnya, kadang-kadang sebagai "*ekam sat*" satu kenyataan, sempurna, keadaan yang bersih dan suci (*ekaṁ sad vipra bahudhā vadanti*, RV 1.164.46). Secara tidak langsung tidak dapat dipahami sifat dasar daripada satu. Di dalam *mantra* (nyanyian) *Purusa (RV 10.90)*, bahwa Purusa adalah termasuk sebagai sumber alam semesta. *Purusa* itu adalah seluruh yang ada dan yang akan ada, sekaligus *immanent* dan *transcendent.* Maksud dari pada keberadaan diperlihatkan dari sifat

yang melekat pada Tuhan, kemungkinan direalisasikan pada sifat kedewataan, selanjutnya direalisasikan pada satu Tuhan, dan maksud daripada *transcendent* adalah kebenaran akhir atau mutlak, atau sifat yang mutlak daripada Tuhan. Tuhan kadang-kadang dikatakan sebagai sebab pengatur dan kadang-kadang juga sebagai sebab material daripada dunia.

Salah satu anthropomorphis Tuhan tidak merupakan kata akhir daripada *Regveda,* seperti dapat dilihat: Tuhan adalah satu yang juga disebut "*sat*". Prinsip yang tinggi telah dikatakan tak terlukiskan sebagai *sat* dan *asat***,** untuk itu di dalam kenyataannya tidak dapat dijelaskan atau dipahami dengan pikiran yang terbatas. Juga dijelaskan bahwa sumber yang asli dari segala sesuatu sebagai *no sat nāsat,* tidak ada sifat maupun tidak ada sifat, yaitu secara empiris melebihi segalanya. *Brahman* kadang-kadang mengambil posisi yang paling tinggi. *Brahman* memang yang paling mulia diantara Deva-Deva yang lain. Langkah terakhir untuk menentukan konsep daripada *Brahman* itu telah dikenal dengan Ātman, yang mana, *Brahman* mencapai posisi yang mewakili daripada kesatuan dunia, *Brahman* dan Ātman adalah dikenal hadir dimana-mana, dan pada manusia itu sendiri, seperti itu penampakkannya. Semua ini adalah *Brahman*, bahwa seluruh ciptaan apa saja berasal dari-Nya, dengan darimana mereka hidup dan kemana dia akhirnya kembali. Brahman dikatakan lahir dari dirinya (*svayambhu*), dan yang mendasari korban suci adalah berhubungan dengan tata tertib alam. Bahwasannya, pada permulaan, dunia ini adalah *Brahman*

(netral).

*Brahman* itu dikatakan memiliki pengertian ganda (BAU 2.3.1) sebab adanya dua pandangan: *Brahman* adalah sekaligus *immanent*, *mūrta, apara,* dipandang berkenaan dengan dunia, dan *transcendent*, *amūrta, apara,* yang berkenadaan dengan alam gaib. Brahman dalam aspek *immanent* beliau diketahui sebagai segala sesuatu (*sarvam khalu idam brahman*, CU.3.14), sebaliknya dalam aspek transcendent *Brahman* diketahui di luar seluruh pengalaman yang nyata (*neti-neti*, BAU 4.5.15). *Brahman* diketahui memiliki kelebihan dari yang lain dan juga lebih-lebih tidak diketahui (*anyad eva tad ṣviditād atho aviditād adhi*, Kena Upanisad, 1.3). Brahman dapat dijelaskan sebagai *Sat* (kenyataan), *Cit* (kesadaran), Ānanda (kebahagiaan) "Darimana seluruh makhluk muncul, dengan yang mana seluruh makhluk ini hidup, dan sampai dimana mereka kembali dan bersatu, itu adalah *Brahman*" (Taittiřya Upanisad, 3.1). dalam naskah Jñānasiddhānta dengan sangat jelas menyebutkan mengenai keesaan Tuhan sebagai berikut:

> *Ekatwānekatwa swalakṣana bhaṭṭāra. Ekatwa ngaranya kahidĕp makalakṣana ng śiwattatwa. Ndan tunggal, tan rwatiga kahidĕpanira. Mangekalakṣana śiwakāraṇa juga, tan paprabeda. Aneka ngaranya lahidĕpan bhaṭṭāra makalakṣana caturdhā. Caturdhā ngaranya lakṣananiran stūla sūkṣma para śūnya.*
>
> Sifat Bhaṭṭāra (Tuhan) adalah *eka* dan *aneka*. *Eka* artinya Ia dibayangkan bersifat Śiwattatwa. Ia hanya esa, tidak dibayangkan dua atau tiga. Ia bersifat esa saja sebagai Śiwakāra*ṇa* (Śiwa sebagai

penyebab), tiada perbedaan. Aneka artinya Bhaţţāra (Tuhan) dibayangkan bersifat *Caturdhā* artinya 4 (empat) keadaan beliau: *stūla, sūkṣma, para, śūnya.*

Tuhan yang dinyatakan sebagai tak terpikirkan, tak terlukiskan tak terbatas namun meresap pada segala kehidupan, maka manusia sebagai warga Negara yang beragama dengan cara bagaimanapun mereka memujaNya, maka itulah kebenaran bagi mereka berdasarkan hukum-hukum suci (wahyu) yang telah diturunkannya. Nama atau gelar yang diberikan kepadaNya tidak akan mengubah kebenaran yang hakiki. Dengan demikian Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi, menjiwai, meresap serta mengalir pada keempat sila yang lainnya. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kaelan, 2010:32).

Atas pengertian tersebut maka sikap terbuka terhadap sesama makhluk Tuhan dengan sikap saling menghormati merupakan syarat yang mutlak. Sikap saling menghormati dan saling menghargai diharapkan agar setiap orang tidak fanatic tentang pendapatnya sendiri tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain terutama dalam menghayati dan mengamalkan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan.

## 2. Internalisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Keberagamaan Umat Hindu

Analisa internalisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam keberagamaan Umat Hindu merupakan analisa yang diambil dari hasil penelitian terhadap Religiusisasi Simbol-Simbol Negara dalam Praktik Keberagamaan Umat Hindu di Bali (Wastawa, 2019). Internalisasi nilai Ketuhanan terhadap simbol Negara yang disakralkan oleh umat Hindu di Bali adalah salah satu konsep dan tindakan pemuliaan terhadap nilai-nilai keyakinan kepada Tuhan/*Brahman* yang dapat memberikan perlindungan kepada umatnya. Berdasarkan proses, atas penerimaan berbagai simbol Negara sebagai simbol yang sakral dalam praktik keberagamaan umat Hindu merupakan tampilan riil (psikomotorik) yang bersifat ritual, etis, emosional maupun sosial karena di dalam simbol-simbol Negara Republik Indonesia mengandung nilai-nilai keagamaan, yakni nilai Ketuhanan, bahwa umat Hindu telah menyatakan diri sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila, mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia, untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pakerti yang luhur (Mohamad Natsir, Erwin Kusuma dan Khairul (ed), dalam Munawir Haris, 2019:275). Bagi umat Hindu Ketuhanan dalam kerangka Pancasila tidak sebatas dalam kehidupan publik-politik semata, melainkan dalam hubungan timbal balik berbangsa dan beragama. Inter-

nalisasi yang dilakukan oleh umat Hindu terhadap simbol-simbol Negara seperti melakukan reproduksi simbolik masuk ke ranah agama yang disakralkan.

Umat Hindu di Bali menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol Negara yang bersifat umum sebagai milik bangsa Indonesia dipelajari dan dijadikan bagian nilai-nilai agama, baik secara individu maupun sosial dalam praktik keberagamaannya. Itu artinya, nilai umum secara objektif dikorelasikan dengan nilai agama Hindu, yang dijadikan pedoman bertingkah laku dan berupacara. Simbol Negara bisa dipakai pedoman bertingkah laku dan berupacara, seperti : (1) Nilai-nilai Pancasila dipedomani sebagai perilaku sehari-hari umat Hindu di Bali dalam wadah Negara RI yang dipahatkan sebagai relief pada tempat yang bernilai sakral (Pura/temat suci); (2) penggunaan Bendera merah putih pada upacara keagamaan di tempat suci dengan diiringi lagu-lagu perjuangan setelah memperoleh sakralisasi: (3) tumpeng merah putih; (4) *segehan* (suguhan) merah putih (5) patung polisi; *palinggih* (tempat suci) sedahan Jaksa, Hakim Agung, panitera berasimilasi dengan kebudayaan agama Hindu karena dirasakan tidak ada hakikat yang mendasar berbeda, sehingga muncul ketaatan beragama serta mempertebal kepercayaan kepeda Tuhan Yang Maha Kuasa.

Konsepsi Ketuhanan seperti ini apabila dipakai analisa kehidupan sosial masyarakat beragama Hindu, bahwa Agama Hindu adalah menyembah satu Tuhan dengan berbagai manifestasi dan ribuan nama (*Ekam Eva Adwityam Brahman*). Sebutan-sebutan nama Tuhan

yang berbeda-beda dalam satu wadah yang sama, yang dapat diandaikan dengan kelahiran manusia diberbagai tempat dan ruang yang berbeda, sehingga adanya perbedaan anatomi tubuh, seperti perbedaan warna kulit, warna rambut, bentuk tubuh, berbagai bahasa, berbagai tradisi, namun kesemuanya itu tetap disebut *human* atau manusia. Dengan penjelasan di atas, bahwa umat Hindu melalui proses pembelajaran dari interaksi sosial yang dilakukan secara terus menerus dapat menemukan cara baru guna menghormati nilai-nilai luhur kebangsaan ke dalam nilai-nilai agama. Hal ini juga disebutkan sebagai proses Objektivitas, adalah proses menjadikan tatanan kehidupan yang dibangun oleh manusia sebagai suatu relaitas yang terpisah dengan subjektivitasnya. Dalam hal ini dimana dunia intersubjektifitas yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi dan sebagai proses pembudayaan (Abdullah,Irwan. 2006 : 244). Proses pembudayaan yang dimaksudkan disini, bahwa umat Hindu secara terus menerus melakukan internalisasi dengan bersosialisasi budaya agama. Walaupun sebenarnya nilai-nilai itu telah ada sebelumnya di dalam ajaran agama Hindu, baik melalui kitab-kitab suci maupun melalui mitos-mitos ke-Tuhanan yang terafiliasi pada simbol-simbol agama dengan penambahan makna.

Nilai Ketuhanan yang diinternalisai melalui simbol Negara seperti Pancasila, Bendera Merah Putih, Lagu-lagu Perjuangan, Pura Perjuangan/Veteran, *Palinggih* Jaksa dan Dwarapala, yang dimasukan ke dalam ranah keagamaan umat Hindu di Bali, adalah suatu peniruan

sifat dan karakter Ketuhanan dalam agama Hindu, diantaranya:

1. Secara teologis dan filsafati burung Garuda dimaksudkan sebagai burung tunggangan Dewa Wisnu, yang merupakan lambang kebebasan, kebijaksanaan, dan kepahlawanan dalam mengalahkan para naga dalam membebaskan ibunya dari perbudakan naga, dengan syarat garuda memberikan Pusaka Tirta kepada para naga. Untuk itu, Garuda sebagai simbol penguasa akasa dan naga sebagai penguasa bumi, yang diperantarai dengan memberikan pusaka *tirta amerta* kepada anak-anak sang Kadru (naga). Pertemuan antara garuda dan naga inilah yang memunculkan kehidupan, kesuburan dan kesejahteraan kepada umat manusia.

2. Pancasila, sebagai nilai-nilai moral dalam berbangsa dan bernegara yang tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai agama Hindu. Berketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan dengan mendirikan tempat-tempat suci yang berkaitan dengan perjuangan pada masa penjajahan untuk mencapai kemerdekaan, sehingga semakin tebalnya keyakinan umat Hindu kepada Tuhan. Hal ini terlihat pada gambar di bawah, burung Garuda Pancasila dipahatkan di atas Bhoma, yang mewakili Burung Garuda dalam mythos Agama Hindu.

Gambar 2.1
Lambang Garuda Pancasila di Pura Pejuang Taman Suci Desa Tua Tabanan, Wastawa,2014

3. Upacara keagamaan secara teologis adalah untuk mengagungkan Tuhan/*Brahman* yang sangat suci dan sacral. Terdapat upacara keagamaan dilaksanakan umat Hindu di Bali di dalam sebuah *Pura* mempergunakan Bendera Merah Putih, diiringi lagu-lagu perjuangan serta sarana upacara sebagai simbolisasi membangkitkan semangat perjuangan dan mengenang kembali  para pahlawan; dan sarana upacara sebagai suguhan kepada rokh para pejuang. Prosesi upacara keagamaan seperti ini

dilaksanakan di beberapa tempat suci yang tersebar di seluruh Bali. Upacara ini sebagai pemujaan dan rasa terimakasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan anugerah atas perjuangan para pejuang untuk kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Gambar 2.4
Tumpeng dan Rayunan Merah Putih di Pura Ulun Sari Desa Adat Tegayang
(Dok. Wastawa, 2019)

Selain beberapa simbol Negara yang dipergunakan dalam berupacara oleh umat Hindu, maka interanalisasi nilai Ketuhanan untuk mengaggungkan kemahakuasaan beliau, yang dapat mencapai dan bertempat

disegala penjuru, untuk itulah lagu-lagu perjuangan yang dinyanyikan pada upacara keagamaan di Pura Ulu Sari Desa Adat Tegayang, Desa Sangketan, Penebel Tabanan. Lagu-lagu ini dinyanyikan setelah menaikkan Bendera Merah Putih dan adanya petunjuk dari Tuhan sehingga suasana menjadi hikmat dan sakral. Adapun urutan-urutan lagu yang dinyanyikan adalah sebagai berikut:

**Lagu Indonesia Raya**

Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku,
Disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku,
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
Untuk Indonesia raya.
Indonesia raya, merdeka, merdeka,
Tanahku, negeriku yang kucinta,
Indonesia raya merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. 2x

**Gunung Agung**

Gunung agung dan pulaki,
Sebagai saksi,
Kami pemuda berjanji,
Membela negeri,
Kalau negeri memanggil,
Kami berdiri… siap,
Mengorbankan harta, jiwa dan raga

Nan tanah airku, tumpah darahku,
Rongga dadaku penuh cinta mesra,
Sekira aku jatuh, dalam tangan musuh,
Relalah aku hancur sebagai debu,
Jiwaku dan ragaku tiadalah berguna,
Kalau negeri memanggil, kami berdiri…siap,
Mengorbankan harta, jiwa dan raga.

**Arwah Pahlawan**

Arwah pahlawan kita, yang gugur bagai ratna,
Dalam pembangunan nusa, berkorban untuk Indonesia,
Korban yang sungguh mulia, selalu akan ku puja,
Arwahnya mendapat sorga,
Tetap aku bela, hingga tercapai cita-citanya.

**Ibu Pertiwi**

Oh ibu pertiwi nan suci murni,
Sumpah setia selalu padamu,
Lestari saksikanlah ibu,
Cucu putramu kini berbakti kepadamu,
Harta jiwa raga kuserahhkan,
Aku berjuang untukmu.

**Di Bawah Kibaran**

Di bawah kibaran sang merah putih,
Disanalah kita semadhi,
Berbhakti berdharma laksana,
Untuk ibu pertiwi,
Bersatu dengan susunan tenaga,

Tujukan ke Indonesia baru,
Agar tetap sentosa, jaya berseri sempurna,
Hai para pendekar bangsa,
Padamu aku bersatu,
Bersatu susunan tenaga,
Tujukan ke Indonesia baru.
(Ni Wayan Jigeh, wawancara 8 September 2019).

Berdasarkan uraian dan bukti internalisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktik keberagamaan umat Hindu seperti di atas, bahwa masyarakat Bali khususnya mereka yang menjadi pendukung simbol-simbol Negara sangat meyakini bahwa segala sesuatu niat suci perjuangan adalah diberkahi oleh Tuhan itu sendiri. Maka itu umat Hindu tidak lupa berterimakasih kepada Tuhan, melalui kebesaran jiwa, ketulusan hati untuk mengingatkan diri secara pribadi maupun sosial sepakat untuk mensakralkan lambang atau simbol-simbol negara sebagai suatu cara menjunjung nilai Ketuhanan dan memberikan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa.

Penggunaan simbol Negara ke ranah yang sakral keagamaan adalah suatu ikatan *simbiosis mutalisme* dalam memperkuat identitas nasional dan identitas agama. Identitas agama dan indentitas nasional sudah pasti berbeda, akan tetapi bisa saling memberi ciri-ciri masing-masing. Dalam Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah pasti ada kesamaan Identitas dengan agama, karena sama-sama meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Identitas merupakan suatu ciri-ciri yang dimiliki, baik oleh agama maupun

Negara yang berlandaskan nasionalismme suatu bangsa. Keterkaitan antara identitas nasional juga dapat memperkuat identitas agama, yaitu memperkuat ciri-ciri agama Hindu. *pertama*, yang berdasarkan atas lima kepercayaan yang disebut dengan *Pancasraddha* yang terdiri dari: (1) percaya dengan adanya *Brahman* (Tuhan Yang Esa); (2) percaya dengan adanya *Atman* (rohk); (3) Percaya dengan adanya *Punarbhawa* (reinkarnasi); (5) Percaya dengan adanya *Karna Phala*; dan (5) Percaya dengan adanya *Moksha* (bersatu kembali kepada *Brahman*). *Kedua*, menggunakan simbol-simbol sebagai media pemujaan yang menunjukkan identitas masing-masing sistem sosial keagamaan; *ketiga,* melaksanakan ajaran *Tat Twam asi* sebagai landasan bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan; *keempat*, menjunjung tinggi perbedaan dalam setiap pelaksanaan upacara dan sarana upacara agama; *kelima*, memberikan kebebasan identitas individu, identitas suku dalam kegiatan keagamaan; *keenam*, menjunjung tinggi nilai keikhlasan dalam pengabdian kepada Tuhan maupun antara sesama manusia; dan *ketujuh*, menguatkan solidaritas sosial baik kepada Tuhan maupun masyarakat secara umum.

## III. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa Nilai Ketuhanan merupakan roh atau jiwa daripada nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai kemanusiaan yang mengajarkan kedudukan manusia dalam agama Hindu adalah *equal* sesuai dengan sifat

dan perbuatannya yang dilandasi dengan ajaran *Tattwam Asi* dan ajaran *sarwam khalu idam Brahman*, yang artinya semua ini adalah Brahman; nilai persatuan, mengandung makna untuk mencapai Negara yang makmur dan sejahtera, maka intelektual (*Brahmana*) dan pemimpin Negara (*ksatrya*) maka kerukunan harus dijaga dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan; nilai *satya* mengajarkan setiap warga Negara untuk setia menjaga keutuhan Negara, seperti yang diikarkan oleh para pejuang bangsa dan yang tersirat pada sloka "*Satyam Eva Jayate…*" hanya kebenaran yang jaya atau menang; nilai keadilan, yang berkaitan dengan fungsi hukum *karma* atas keseimbangan antara pengorban dan anugrah, serta kebajikan untuk bersikap adil dengan sikap *sympathy* dan *empathy* kepada semuanya;

Nilai Ketuhanan di dalam agama Hindu, bermakna meresapi dan mengaliri semuanya tidak ada ruang kosong yang tidak dicapai dan dipenuhiNya. Tuhan Yang Esa (*eko Devah*), satu kenyataan bersih dan suci (*ekam sat*). Tuhan mewujudkan dirinya sendiri (*svayambhu*) yang dianggap bersifat *immanent* dan *tranccendent*. Brahman sebagai asal mula dan kembalinya semua ini, dan Beliau diketahui sebagai segala sesuatu dengan sifat mistirius (*neti-neti*) bukan ini bukan itu, tidak laki tidak perempuan, tidak terpikirkan dan tidak terlukiskan. Akan tetapi Brahman ada dimana-mana, meresap pada segala kehidupan, dan kehidupan kembali nantinya menyatu kepada *Brahman* (*Ekatwānekatwa swalakṣana bhaṭṭāra).*

Pada konsep berbangsa dan bernegara, bahwa warga

Negara yang beragama tanpa ada paksaan mereka wajib menghayati, mengamalkan dan melaksanakan nilai sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi sebagai penyatuan ide, sikap dan tingkah laku setiap warga Negara dalam membentuk kepribadian ke Indonesiaannya. Umat Hindu, selain menginternalisasi nilai sila-sila Pancasila juga mewujudkannya dalam tindakan terhadap berbagai simbol Negara untuk disakralisasi, sehingga memperkuat dari empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*, di samping memperkuat keimanan serta menjunjung tinggi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

## Referensi


Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haris, Munawir.2019. *Diskursus Etika Religius Perspektif Nurcholish Madjid & Franz Magnis Suseno*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kaelan, dan Achmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarga Negaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: "Paradigma".

S. Pendit, I Nyoman. 1976. Bhagawadgita.

Somvir, 2001. *108 Mutiara Veda untuk kehidupan sehari-hari*. Surabaya : Paramiha.

Titib.I Made. 1996. *Weda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.

Vishwanat Prasad Verma. 1974. *Studies In Hindu Political Thought and Its Metaphysical Foundations*. Delhi, Varanasi-Patna: Motilal Banarsidass

Wastawa, I Wayan. 2019. Religiusisasi Simbol Negara Dalam Praktik Keberagamaan Umat Hindu di Bali. Laporan hasil Penelitian Hibah Doktor Dosen PT Agama Negeri dan Swasta Se-Indonesia, Dirjen Bimas Hindu: Jakarta.

Wastawa, I Wayan. 2019. Pura Vetaran: Hubungan Makna Simbol Agama dan Negara di Pura Pejuang Taman Suci di Desa Tua, Kabupaten Tabanan, Bali. Jurnal Kajian Bali: Universitas Udayana, Lontar: Jnana Sidhanta

# KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA NICIREN SYOSYU

*Suhadi Sendjaja**

## I. Pendahuluan

Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan sumber energi bagi keempat sila lainnya, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sangat arif dan tepat jika terminologi yang digunakan dalam sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan Tuhan Yang Maha Esa, karena Ketuhanan di sini memiliki makna sifat-sifat Tuhan yang universal, sifat Tuhan yang mutlak/hakiki, yang sejatinya dimiliki oleh setiap agama maupun kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan 'kemanusiaan yang adil dan beradab' yang memiliki makna sifat manusia, bukan satu manusia yang adil dan beradab.

Dalam agama Buddha, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Trikaya Yang Ekakaya, Ekakaya Yang Trikaya

* Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia – NSI.

yang berarti Tiga Badan adalah Satu Badan, Satu Badan adalah Tiga Badan, sedangkan sebutan bagi Tuhan adalah *Dharma* yang berarti kemurnian sifat hakiki alam semesta yang berlaku secara universal dan abadi, hukum sebab-akibat yang senantiasa menjadi sumber dari segala aspek di alam semesta, sifat *maitri karuna* (memberi *suka*/kegembiraan/manfaat dan mencabut *dukkha*/penderitaan) yang menjadi irama alam semesta (seperti matahari yang selalu memberikan manfaat energi kehidupan kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan, pepohonan yang terus mengeluarkan oksigen, akar, kayu, daun, buah dan memberikan berbagai macam manfaatnya kepada seisi alam secara berkesinambungan tanpa meminta balas jasa atas kebajikan yang telah diberikan tersebut), serta keseimbangan yang menjadi nafas penjaga keutuhan dan keberadaan alam semesta (ada siang dan malam, ada jantan dan betina, ada pria dan wanita, ada berbagai macam musim yang silih berganti menjaga harmoni kehidupan, ada kehidupan dan kematian yang terus berlangsung dalam proses lahir, tua, sakit, mati, dan lahir kembali, ada reaksi alamiah yang muncul untuk mengembalikan titik keseimbangan jika segala sesuatu sudah dilakukan secara berlebihan, bisa berupa bencana alam pada alam semesta besar, wabah penyakit/pandemi, atau munculnya penyakit yang diderita oleh alam semesta kecil/ makhluk hidup/ manusia itu sendiri). Itulah kemurnian sifat hakiki alam semesta yang berlaku secara universal dan abadi yang merupakan hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha.

Sulit untuk mewujudkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa terlebih dahulu benar-benar memahami, menghayati, dan menginternalisasikan secara utuh hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa—yang sangat berkaitan erat dengan agama (baik enam agama yang telah mendapatkan pelayanan secara konstitusional dari pemerintah Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, maupun para penghayat kepercayaan yang saat ini masih berproses memperjuangkan hak-haknya sebagai agama yang dapat disejajarkan dengan enam agama tersebut). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ini adalah praktik/ pengamalan dari hasil pemahaman dan penghayatan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Praktik sila kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam kehidupan antara lain mampu memanusiakan manusia, mampu mewujudkan potensi terbaik dalam diri setiap manusia/menjadi manusia-manusia yang unggul dalam kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, maupun adversitas, baik diri sendiri maupun orang lain, mampu berkarya dan mencipta nilai konstruktif untuk lingkungan sekitar, memandang serta memperlakukan setiap manusia setara, melaksanakan kewajiban dan hak dalam rangka mewujudkan kebahagiaan semua makhluk. Jika praktik-praktik ini sudah mampu diwujudkan, maka Persatuan Indonesia pun dapat terwujud, begitupun dengan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (menjadikan hikmat kebijaksanaan sebagai landasan dalam bermusyawarah untuk mencapai mu-

fakat), dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, pengejawantahan Pancasila dalam perikehidupan adalah sebuah keniscayaan.

## II. Pembahasan

Agama adalah sebuah kehadiran yang bertujuan untuk membuat kedamaian, membuat pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan manusia yang tadinya kacau, sembrono, menjadi tidak kacau, karena sesuai dengan asal kata agama (berasal dari Bahasa Sansekerta), "*a*" berarti tidak (Kamus Sanskrit, 2009:3), dan "*gama*" berarti kesembronoan, kedangkalan, kacau (*Sanskritdictionary*, 2018), maka agama berarti tidak sembrono, tidak dangkal, tidak kacau, oleh karena itu agama muncul dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian, menghilangkan kekacauan. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Jadi umat beragama harus betul-betul meyakini, menghayati ajaran-ajaran agama yang diyakini, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendapat manfaat dari ajaran agama yang diyakininya tersebut.

Agama Buddha melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan memiliki sebab, jodoh, dan akibat, oleh karena itu seandainya ada umat Buddha ikut agama lain dan di sana "kelihatannya" lebih bahagia, maka kita ikut mensyukuri. Agama menitikberatkan pada hubungan antarmanusia. Keinginan luhur dari tiap agama adalah memanusiakan manusia, menjadikan manusia yang paling manusiawi, artinya kalau lihat orang lain bahagia, dia juga merasa bahagia. Jika

seluruh umat beragama betul-betul mewujudkan hal ini, menjadi umat beragama yang baik, maka mereka akan bertemu pada satu titik damai dan mampu menjadi warga negara yang baik. Hal ini merupakan hakikat sejati dari Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang berkorelasi erat dengan agama.

Selain itu, yang juga menjadi hal penting dalam pemahaman mengenai agama ini adalah agama sama sekali tidak ada hubungannya dengan terorisme, terorisme tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama, jika ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama lalu membuat keonaran, membuat kekacauan, melakukan tindakan kekerasan, dan melakukan tindakan teror, dapat dipastikan mereka hanyalah para manipulator agama yang sesungguhnya tidak beragama.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat agama menjadi sebuah kehadiran yang dianggap usang oleh anak-anak muda/ generasi milenial (generasi Y, Z, dan Alpha) yang lahir di antara tahun 1981 s.d 2024 (Hadi, 2019) bukan hanya karena para manipulator agama yang merusak citra baik dari agama, tetapi juga karena agama (termasuk literatur dan juga tokoh-tokoh pemukanya) dianggap tidak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan oleh mereka, khususnya mengenai konsep Tuhan yang menjadi fundamen setiap agama. Anak muda saat ini menganggap perkembangan sains lebih mampu menjawab secara rasional segala hal-hal yang dulunya bersifat mistik, salah satunya megenai konsep Tuhan

ini. Selain itu, agama juga dianggap sama seperti partai politik yang mengumpulkan (penganutnya) dalam satu ideologi yang sama, pemikiran yang sama, dan kepercayaan yang sama (Rahman, 2020). Pemikiran kritis generasi milenial ini membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi memedulikan ritual-ritual keagamaan, tidak ingin menyatakan dirinya tergabung ke dalam satu agama tertentu, namun sebagian tetap memercayai bahwa ada sumber energi di alam semesta yang membuat semesta ini dapat berjalan secara teratur, mereka menamai dirinya sebagai agnostik (Adam, 2019).

Dalam Sebuah survey yang dilakukan pada tahun 2014 s.d tahun 2016 terhadap warga berusia 16 s.d 29 tahun (generasi milenial) di dua belas negara Eropa mengungkap fakta mengejutkan. Hasil survey menunjukkan mayoritas responden mengaku tidak menganut agama. Angka anak muda yang mengaku tidak beragama sangat tinggi, terutama di Republik Ceko, yang proporsinya mencapai 91%. Kecenderungan tidak menganut agama tertentu juga tinggi di Estonia, Swedia, dan Belanda, yang angkanya berkisar antara 70% s.d 80%. Kecenderungan anak-anak muda (di Eropa) adalah mereka tak punya afiliasi dengan agama atau mengaku tak menjalankan agama (Hardoko, 2018). Bukan hanya di Eropa, fenomena memudarnya kepercayaan terhadap agama di kalangan generasi muda ini juga terjadi di Amerika Serikat, di sana mereka menamai dirinya yang tidak berafiliasi dengan salah satu agama pun sebagai ‘nones’, sejak tahun 2016 jumlah ‘nones’

di Amerika Serikat ini sudah mencapai hampir seper-empat penduduk di negara tersebut (Bullard, 2016).

Sementara itu di Indonesia fenomena agnostik ini pun juga terjadi, hanya masih sangat sedikit data yang terungkap. Dari infografis kanal media Tirto.id yang mengutip data atheistcensus.com (dikelola oleh Aliansi Ateis Internasional) menungkapkan bahwa ada 1.757 orang Indonesia yang mendaftar di situs tersebut, dari jumlah itu 36,9% menyatakan dirinya Ateis (sama sekali tidak percaya agama dan keberadaan kekuatan alam semesta/Tuhan), 20,3% menyatakan dirinya Agnostik (tidak percaya agama, tidak menjalani ritual-ritual keagamaan, tapi masih mengakui keberadaan kekuatan alam semesta/Tuhan), dari jumlah tersebut 52,1% berusia 25 s.d 34 tahun dan 77,2% adalah laki-laki (Adam, 2019). Fenomena ini mencerminkan bahwa posisi agama di kalangan generasi muda/milenial mulai tergeser (jika tidak ingin disebut ditinggalkan), mereka cenderung lebih percaya kepada ilmu pengetahuan/sains. Oleh karena itu tulisan mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif agama-agama ini menjadi sangat penting sebagai masukan yang sangat berharga untuk generasi milenial dalam memahami hakikat Tuhan-Ketuhanan agama-agama yang ada di Indonesia, dan dalam tulisan ini khususnya akan dijelaskan mengenai konsep Tuhan-Ketuhanan dalam perspektif agama Buddha.

Agama Buddha memiliki tujuan untuk membimbing setiap umat manusia menjadi manusia-manusia yang sadar seutuhnya, sadar sempurna, seperti yang

telah dicapai oleh Buddha Sakyamuni di India, maupun Buddha Niciren di Jepang. Hal ini dapat dipahami dari asal kata Buddha itu sendiri yang terdiri dari dua suku kata dalam bahasa sansekerta, yaitu "*Bud*" yang berarti sadar dan *dha* yang berarti utuh/sempurna (Stokes, 2000:1), sehingga Buddha adalah sebuah kondisi perasaan jiwa sekaligus gelar kehormatan bagi manusia yang telah berhasil memunculkan dan menjadikan kesadaran yang utuh/sempurna tersebut sebagai bagian terpadu dalam pikiran, sekejap perasaan jiwa, ucapan, dan tindakannya yang merupakan sumber energi dalam membahagiakan dan memberi manfaat kepada semua makhluk hidup dan alam semesta raya. Manusia yang sadar seutuhnya adalah manusia yang mampu memanunggalkan dirinya dengan *Dharma*, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu.

Ketuhanan di dalam agama Buddha terwujud dalam konsep tentang adanya hukum yang berlaku secara universal di alam semesta ini dan hukum ini terwujud dalam segala gejala alam semesta serta dalam diri manusia itu sendiri. Hukum tersebut adalah Hukum Sebab-Akibat Sesaat (*In Ga Guji*), yang melandasi segala fenomena yang terjadi pada manusia dan alam semesta, segalanya berjalan sesuai dengan Hukum Sebab-Akibat Sesaat. Sebab yang baik akan menghasilkan akibat yang baik, demikian juga sebaliknya (Dhiputera, 2010:373). Hukum ini disebut sebagai *Dharma*/ Irama alam semesta/ hakikat alam semesta. Oleh karena itu, dalam perspektif agama Buddha kemajuan sains dan teknologi yang saat ini sangat digandrungi, bahkan di-

jadikan acuan utama (menggeser agama, karena dianggap sudah tidak relevan lagi dalam menjawab berbagai fenomena alam semesta) oleh generasi milenial, sejatinya merupakan bagian kecil daripada hakikat alam semesta, yang inheren dengan *Dharma* yang merupakan sumber ajaran agama Buddha. Dengan demikian, agama pada hakikatnya akan tetap relevan sampai kapan pun.

Untuk semakin memahami Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha, kita juga perlu memahami konsep Trikaya yang Ekakaya, Ekakaya yang Trikaya, Tri berarti Tiga, Kaya berarti Badan, Eka berarti Satu, sehingga Trikaya yang Ekakaya, berarti Tiga Badan adalah Satu Badan, Ekakaya yang Trikaya, berarti Satu Badan adalah Tiga Badan. Konsep Trikaya merupakan konsep yang menjelaskan tentang aspek-aspek dari Ketuhanan dalam agama Buddha berdasarkan penjelasan mengenai badan Buddha. Badan di sini tidak dapat diartikan sebagai badan personifikasi, namun harus dilihat sebagai suatu sistem atau kesatuan. Trikaya/ Tiga badan tersebut adalah *Nirmanakaya*, *Sambhogakaya*, dan *Dharmakaya.* Berikut ini adalah penjelasan mengenai Trikaya tersebut.

a. *Nirmanakaya* (*Nirmana* berarti transformasi; *kaya* berarti badan). Nirmanakaya ini terwujud sebagai manusia Sakyamuni yang berjalan di dunia ini dan mengajarkan ajaran pada murid-murid-Nya, dan meninggal dalam usia 80 tahun. Badan ini merupakan badan transformasi yang memiliki kualitas sama dengan manusia biasa yang lahir, tua, sakit,

dan mati. *Nirmanakaya* ini merupakan manifestasi dari *Dharmakaya* dan *Sambhogakaya*. Pengungkapan aspek *Nirmanakaya* ini di dalam Saddharmapundarika Sutra terdapat dalam Bab XVI Panjang Usia Sang Tathagata tertulis:

> Di semua dunia-dunia para dewa, manusia dan Asura semua percaya bahwa kehadiran Buddha Sakyamuni, setelah meninggalkan Istana Bangsa Sakya, duduk di tempat pertapaan tidak jauh dari Kota Gaya dan di sana mencapai anuttara-samyak-sambodhi/Penerangan Agung. Akan tetapi, orang-orang baik, sesungguhnya sudah berlalu ratusan, ribuan, sepuluh ribu, jutaan nayuta kalpa yang tak terukur, tak terbatas sejak Aku sebenarnya mencapai kesadaran Buddha (SPS, 2020:342).

Dari kutipan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa, badan seorang Buddha pun adalah badan manusia biasa yang mengalami proses lahir-tua-sakit-meninggal-lahir kembali secara berkesinambungan sesuai dengan hakikat irama alam semesta /*Dharma*.

b. *Sambhogakaya* (*Sambho* berarti kegembiraan; *bhoga* berarti mengambil bagian; *kaya* berarti badan). *Sambhogakaya* adalah gerakan jiwa yang menyerap pengetahuan, fenomena, menyimpan ingatan, serta menggerakkan perasaan (NSI, 2018:196). *Sambhogakaya* ini terwujud sebagai Buddha yang mengajar, menyampaikan prajnanya kepada para Bodhisattva. *Sambhogakaya* merupakan simbol dari kebijaksanaan dan kesempurnaan transendental. Pengungkapan mengenai *Sambhogakaya* juga diungkapkan dalam Saddharmapundarika Sutra, Bab XVI Pan-

jang Usia Sang Tathagata, sebagai berikut:

> Demikianlah, semenjak Aku mencapai Kebuddhaan, di masa yang telah amat panjang berlalu. Usia-Ku tidak terhitung banyaknya dari asamkeya kalpa, dan selama waktu itu Aku senantiasa berada di sini tanpa pernah moksa. Wahai orang-orang baik, pada dasarnya, Aku telah melaksanakan Jalan Kebodhisattvaan, dan usia yang Kuperoleh ketika itu belum berakhir namun akan berlangsung dua kali lipat dari jumlah tahun yang telah Kulalui. Akan tetapi, sekarang, sekalipun faktanya Aku tidak benar-benar memasuki kemoksaan, Kuumumkan bahwa Aku akan mengambil jalan kemoksaan. Inilah Upaya Kausalya yang sang Tathagata gunakan untuk mengajari dan membimbing umat manusia (SPS, 2020:345).

Dari kutipan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa *Sambhogakaya* adalah gerakan jiwa yang termanifestasi menjadi pikiran, perasaan, serta kebijaksanaan dalam diri seorang manusia, mewujud dalam *Upaya Kausalya/*Cara-cara bijaksana yang digunakan untuk mengajari dan membimbing diri sendiri dan umat manusia.

c. *Dharmakaya* (*Dharma* berarti hukum, substansi/esensi/hakikat; *kaya* berarti badan), Dharmakaya ini adalah badan yang absolut, substansi/esensi/hakikat dari pengetahuan dan maitri karuna. *Dharmakaya* adalah inti hakikat dari jiwa yang permanen, absolut, tidak akan musnah. Sebuah esensi energi yang mengikat serta memadukan *Nirmanakaya* dan *Sambhogakaya. Dharmakaya* merupakan inti hakikat dari *Nirmanakaya* dan *Sambhogakaya*.

Mengenai badan *Dharmakaya* ini, diungkapkan dalam Saddharmapundarika Sutra, Bab II Upaya Kausalya, yang dikatakan oleh Buddha Sakyamuni, sebagai berikut:

Cukuplah, wahai Sariputra! Tiada gunanya Aku membabarkan lebih jauh lagi. Mengapa? Karena Dharma yang telah dicapai Sang Buddha itu Dharma paling langka dan Dharma paling sulit untuk dimengerti dan dipahami. Hakikat sejati kebenaran seluruh fenomena hanyalah dapat dimengerti bersama antara Buddha dengan Buddha. Hakikat sejati kebenaran ini mencakup bentuk perwujudan/wajah sedemikian rupa, sifat sedemikian rupa, hakikat sedemikian rupa, kekuatan/energi sedemikian rupa, pengaruh/perbuatan sedemikian rupa, sebab sedemikian rupa, hubungan/jodoh sedemikian rupa, akibat terpendam sedemikian rupa, akibat nyata/terwujud sedemikian rupa dan konsistensi hakikat sejati kebenaran tersebut dari awal hingga akhir (SPS, 2020:34-35).

Selain itu, di dalam Bab XVI Panjang Usia Sang Tathagata, Saddharmapundarikasutra tertulis:

Namun, waktu semenjak Aku benar-benar mencapai Kebuddhaan amatlah Panjang seperti yang telah Kunyatakan. Kugunakan Upaya Kausalya untuk mengajar dan membina makhluk hidup, membimbing mereka masuk ke dalam Jalan Kebuddhaan. Oleh karena itulah, Aku berbicara seperti ini. Wahai orang-orang baik! Sutra-sutra yang telah dibabarkan oleh sang Tathagata, semua bertujuan menyelamatkan dan membebaskan semua makhluk hidup. Kadang kala Aku berbicara tentang diri-Ku, kadang kala Kuperlihatkan orang lain. Kadang kala Kutunjukkan perbuatan-perbuatan-Ku sendiri, kadang kala

> Kutunjukkan perbuatan-perbuatan orang lain. Semua yang Kusampaikan adalah benar dan tiada satu pun yang palsu. Mengapa kulakukan hal ini? Karena betapa pun juga sang Tathagata mengetahui aspek sesungguhnya dari Triloka (Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu) persis seperti apa adanya. Tiada pasang surut kelahiran maupun kematian, dan tiada kehidupan di dunia ini dan kemoksaan di kemudian hari. Ini bukanlah nyata ataupun sunyata, bukanlah juga tetap ataupun beraneka ragam, juga bukan seperti yang dipahami orang-orang yang tinggal di Triloka. Sang Tathagata melihat jelas semua hal tersebut tanpa kekeliruan" (SPS, 2020:344-345).

Meskipun dikatakan badan tersebut dibagi dalam tiga, namun ketiga badan itu adalah satu. Ketiga badan tersebut merupakan aspek dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak terpisah-pisah (Trikaya Yang Ekakaya, Ekakaya Yang Trikaya). Kesatuan ketiga aspek/ badan jiwa ini merupakan prinsip yang amat utama di dalam pembahasan mengenai Ketuhanan dalam agama Buddha, khususnya mazhab Mahayana Niciren Syosyu. *Dharmakaya* adalah inti hakikat dari jiwa dan *Sambhogakaya* adalah gerakan jiwa yang menyerap pengetahuan, menyimpan ingatan, serta menggerakkan perasaan. Dengan manunggalnya *Dharmakaya* dan *Sambhogakaya*, terwujudlah *maitri karuna* yang nyata dalam *Nirmanakaya* fungsi jiwa yang membentuk dan menggerakkan jasmani (NSI, 2018:196). Inilah Ekakaya dari Trikaya; *Dharmakaya, Sambhogakaya*, dan *Nirmanakaya* yang memiliki hubungan saling berkaitan antara badan pokok masing-masing dengan gerakannya (fungsi). Melalui penjelasan Trikaya Yang Ekakaya,

Ekakaya Yang Trikaya ini ingin menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha sejatinya terkandung secara utuh di dalam diri setiap umat manusia dan juga di dalam setiap unsur alam semesta besar.

Sifat lain dari Ketuhanan dalam agama Buddha adalah mengenai prinsip kekal abadi. Ketuhanan di dalam agama Buddha bersifat kekal abadi. Penegasan akan jiwa kekal abadi ini juga diungkapkan oleh Buddha Sakyamuni dalam Saddharmapundarika Sutra, Bab XVI Panjang Usia Sang Tathagata, sebagai berikut:

> Sang waktu yang telah berlalu sejak Aku mencapai kesadaran Buddha sesungguhnya melampaui ini, hingga seratus, seribu, sepuluh ribu, seratus ribu, sejuta nayuta kalpa asamkeya (SPS, 2020:343).

Artinya, Ketuhanan Yang Maha Esa (Trikaya Yang Ekakaya, Ekakaya Yang Trikaya) serta *Dharma* dalam agama Buddha bersifat kekal dan absolut, sampai kapan pun hakikat *Dharma* akan tetap berlaku, meskipun dunia tempat manusia saat ini telah musnah dan berganti dengan dunia baru di alam semesta raya.

Menjadi manusia yang sadar seutuhnya/sempurna memiliki makna, manusia tersebut benar-benar memahami bahwa hakikat alam semesta adalah kesatuan yang tak terpisahkan antara manusia dengan hakikat alam semesta/Ketuhanan Yang Maha Esa (*Dharma*), menyadari bahwa hakikat kehidupan merupakan irama keselarasan, harmoni, seimbang, menyadari semua

aspek dalam kehidupan dan alam semesta ini tidak terlepas dari hukum sebab-akibat kejiwaan sesaat yang berarti sekejap-sekejap perasaan jiwa umat manusia yang kemudian termanifestasi menjadi pikiran, ucapan dan tindakan, sangat menentukan nasib, kelestarian atau kerusakan kehidupan, baik hidup manusia itu sendiri maupun alam semesta raya. Sekejap-sekejap perasaan jiwa adalah hal yang terus berdenyut di dalam jiwa segenap umat manusia dan sangat cepat berubah. Di dalam terminologi agama Buddha Niciren Syosyu, perasaan jiwa ini memiliki sepuluh tingkatan kualitas, yaitu neraka, kelaparan, kebinatangan, kemurkaan/asura, kemanusiaan, surga, sravaka, pratyekkabuddha, bodhisattva, dan Buddha. Dalam dinamika perasaan jiwa tersebut akan ada satu yang menjadi landasan dominan di dalam perasaan jiwa manusia yang kemudian menjadi sumber energi dari kekuatan fisik maupun non fisik (pikiran, perasaan) manusia itu.

Dari kesepuluh tingkatan perasaan jiwa tersebut, perasaan jiwa Buddha lah yang merupakan kualitas terbaik yang perlu senantiasa dimunculkan untuk menjadi landasan dan sumber energi kehidupan manusia. Memunculkan perasaan jiwa Buddha ini lah yang menjadi tujuan utama agama Buddha, agar manusia dan alam semesta senantiasa seirama dan lestari, agar manusia-manusia menjadi sadar seutuhnya/ sadar sempurna. Perasaan jiwa Buddha ini hanya dapat dimunculkan ketika manusia memanunggalkan sekejap-sekejap perasaan jiwanya dengan sekejap-sekejap perasaan jiwa alam semesta/Ketuhanan Yang Maha Esa/ *Dhar-*

*ma* itu, dalam terminologi agama Buddha Niciren Syosyu hal ini disebut dengan *Nammyohorengekyo*. *Nam* atau Namu atau *Namas* (dalam Bahasa sansekerta) berarti suatu ketekadan hati untuk memanunggalkan diri atau percaya sepenuh jiwa raga (Dhiputera, 2010:362), menyelaraskan diri dengan sesuatu, *Myohorengekyo* adalah *Dharma* – Saddharmapundarika Sutra.

*Myo* berarti gaib/mistik/menakjubkan, di luar jangkauan pikiran manusia biasa, tetapi bukan klenik, *Ho* berarti hukum, sehingga *Myoho* adalah hukum gaib. Gaib, karena hukum ini sulit untuk dipahami, Ia mampu membuat orang-orang biasa yang diliputi oleh delusi dan penderitaan memunculkan kesadaran akan hukum fundamental dalam kehidupan mereka, memunculkan kebijaksanaan dan welas asih dan menyadari bahwa mereka pada dasarnya adalah Buddha yang mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dan orang lain. Hukum mistik ini mampu mengubah kehidupan siapa pun—bahkan orang yang paling tidak bahagia, kapan pun dan dalam keadaan apa pun menjadi kehidupan dengan kebahagiaan tertinggi.

*Renge* berarti bunga teratai, adalah metafora yang menjelaskan lebih jauh tentang Dharma. Bunga teratai itu murni dan harum, tidak ternoda oleh air berlumpur tempat ia tumbuh. Bahkan ia hanya bisa tumbuh dan akan semakin cemerlang berkembang di tengah lumpur yang kotor, demikian pula, keindahan dan martabat kemanusiaan seorang Buddhis yang akan semakin cemerlang ketika berada di tengah kehidupan masyarakat (tidak menyendiri di tempat kosong dan sepi), tetapi langsung

menghadapi serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan segala fenomena kehidupan secara nyata, ini merupakan pelaksanaan pertapaan sesungguhnya yang dibimbing oleh Sang Buddha.

Lebih lanjut, tidak seperti bunga lain, teratai mengeluarkan bunga dan biji pada saat yang bersamaan. Pada kebanyakan bunga, biji berkembang setelah bunga mekar dan kelopak bunga telah rontok. Akan tetapi, biji bunga teratai berkembang bersamaan dengan bunganya, dan ketika bunga itu mekar, biji bunga sudah ada di dalamnya dan dapat berbunga kembali tanpa perlu perantara/bantuan dari serangga,burung ataupun pihak lain. Ini menggambarkan prinsip keserempakan sebab dan akibat sesaat (*in ga guji*); ketika seseorang berbuat suatu sebab (perasaan, pikiran, ucapan, dan tindakan) seketika itu juga sudah langsung terkandung akibatnya (bisa baik atau buruk), yang secara pasti akan berbunga, inilah gerakan hukum karma yang abadi, yang menentukan nasib manusia dan juga alam semesta raya. Sehingga untuk menjadi manusia yang baik, tidak perlu menunggu nanti, tetapi saat ini juga, semua umat manusia dapat mengubah nasibnya, dengan terus membuat sebab-sebab yang baik. Prinsip simultanitas sebab dan akibat sesaat ini menjelaskan bahwa pencapaian Kebuddhaan dimungkinkan oleh semua umat manusia dengan menyadari, membuka, dan memunculkan kondisi ini.

*Kyo* secara harfiah berarti sutra dan di sini menunjukkan Hukum Mistik yang diibaratkan dengan bunga teratai, hukum dasar yang menembus kehidupan dan alam semesta, kebenaran abadi. Maka ketika melan-

tunkan *Nammyohorengekyo* manusia bertekad dengan penuh kesungguhan hati untuk menyelaraskan diri dengan hakikat hukum alam semesta tersebut, memanunggalkan diri dengan irama alam semesta, memanunggalkan diri dengan *Dharma*, sehingga kesadaran Buddha yang ada di dalam dirinya muncul dan betul-betul dapat mewujudkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanunggalan ini lah yang membuat Buddha Sakyamuni maupun Buddha Niciren dan seluruh Buddha berhasil memunculkan kesadaran Buddhanya dan menjadi Buddha. Dalam agama Buddha saat ini, ada berbagai macam *Namu*, seperti *Namu Amitabha/Omituofo* (manunggal dengan Buddha Amitabha), *Namu Sakyamunibuddhaya* (manunggal dengan Buddha Sakyamuni), *Namu Kuan Im Posat / Namu Avalokitesvara* (manunggal dengan Dewa/dewi Kuan Im).

Sepuluh kualitas perasaan jiwa yang terkandung di dalam jiwa setiap umat manusia senantiasa berubah dalam sekejap, cepat dan dinamis, perubahan dalam sekejap tersebut dalam terminologi Buddhis Niciren Syosyu disebut sebagai *Icinen. Ici* berarti satu dan *nen* berarti sekejap perasaan jiwa/hati. *Icinen* dapat dimaknai secara umum menurut pandangan arif bijaksana seperti Mahaguru Tien Tai dan Mahaguru Miao Lo sebagai perasaan hati yang mendalam, kepercayaan hati yang mendalam, hal-hal yang sering teringat, kurun waktu yang amat sangat pendek. Secara garis besar menurut pandangan umum pengertian *Icinen* ini dapat dibagi menjadi dua, pertama *Icinen* adalah waktu yang amat singkat. Dalam Saddharmapundarika Sutra Bab XXI

yang berjudul Kekuatan Gaib Sang Tathagata diuraikan mengenai pengatupan jari (SPS, 2020:417). Pengatupan jari yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan bunyi yang keras dengan menjentikkan ibu jari dan jari tengah. Waktu yang diperlukan untuk mengatupkan jari ini dibagi enam puluh, itulah *Icinen*. Kedua, *Icinen* adalah jiwa sekejap, atau dapat disebut sebagai satu hukum hati, sehingga *Icinen* bukanlah sekadar kurun waktu, akan tetapi satu hukum hati. Yang dimaksud dengan hati di sini bukanlah sesuatu yang semata-mata bersifat spiritual, melainkan hakikat mutlak jiwa itu sendiri.

Pandangan jiwa kekal abadi dalam agama Buddha adalah juga bertolak dari jiwa sekejap, karena rentetan sekejap-sekejap akan menjadi satu hari, satu tahun, sepuluh tahun, dan seterusnya. Dalam kurun waktu sekejap sebenarnya tidak ada lagi pengertian waktu dan ruang. Waktu sekejap adalah sedemikan tegasnya, maka agama Buddha melihat hakikat jiwa manusia dalam waktu sekejap, karena justru jiwa yang sekejap ini adalah hakikat keberadaan dari jiwa manusia. Jiwa manusia merasa bahagia dan tidak bahagia dalam sekejap inilah terlengkapi sebab dan akibat, segala gejala dari masa lampau yang tak terbatas hingga masa depan yang tak terbatas pula. Kelangsungan jiwa sekejap ini secara vertikal akan membentuk aliran jiwa dari masa lampau, masa sekarang, hingga masa mendatang.

Dalam keadaan biasa, kita tidak akan memperhatikan keadaan jiwa sekejap, sehingga kita menganggap bahwa kesempatan dapat berulang dan waktu dapat menunggu. Tetapi sesungguhnya jiwa dan waktu

sekejap-sekejap itu bersifat linier dan bergerak ke depan, sehingga kita takkan dapat mundur. Sekejap yang kita anggap saat ini akan segera menjadi masa lampau, dan sekejap yang kita anggap masa akan datang segera menjadi saat ini dan masa lampau. Buktinya hari ini adalah hari ini, kemarin adalah kemarin. Kita takkan dapat kembali ke kemarin. Maka itu, sikap santai yang meninggalkan pekerjaan untuk hari esok adalah sikap yang meremehkan kehidupan satu hari demi satu hari yang sebenarnya amat bernilai, dan ini berarti tidak menghargai jiwa sekejap, sehingga sebetulnya tidak lagi menjalankan pertapaan agama Buddha dengan baik. Maka pada saat inilah terdapat keseluruhan jiwa dan hidup itu. Pada saat inilah terdapat masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang, saat ini lah yang paling menentukan.

Jiwa sekejap-sekejap ini memang telah diuraikan oleh Buddha Sakyamuni dalam Saddharmapundarika Sutra, dan oleh Mahaguru Tien Tai dalam Makasyikan sebagai *Icinen Sanzen* Teoretis (*Sanzen*:tiga ribu)/ Tiga Ribu Gejolak Perasaan Jiwa Dalam Sekejap, lalu oleh Buddha Niciren diwujudkan sebagai *Icinen Sanzen* yang dapat dipraktikkan secara nyata dengan *Nammyohorengekyo.* Pengertian *Icinen* menurut Buddha Niciren mengandung pokok-pokok sebagai berikut: pertama, *Icinen* adalah Kesatuan Jasmani dan Perasaan Jiwa yang Tak Terpisahkan (*Syiki Syin Funi*). Pengertian Icinen ini bukanlah sesuatu yang hanya bersifat spiritual dan rasional belaka. *Icinen* tidaklah terlepas dari jasmani maupun benda fisik, karena *Icinen* mencakup

jasmani (*Syiki*) dan jiwa (*Syin*). Seseorang yang sedang merasakan penderitaan neraka di dasar jiwanya akan tercermin secara nyata pada wajahnya, begitupun dengan seseorang yang sedang merasakan kegembiraan di dalam jiwanya akan secara nyata terwujud pada wajahnya. Seseorang yang jiwanya sedang melemah, akan sangat berpengaruh pada menurunnya kebugaran fisik orang tersebut, begitupun sebaliknya ketika seseorang yang perasaan jiwanya gembira akan meningkatkan kebugaran fisik orang tersebut.

Kedua, *Icinen* adalah Sumber Karma Baik maupun Buruk. Dalam jiwa sekejap juga tercakup karma baik dan buruk. Jadi, hakikat jiwa kita adalah memperlengkapi kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu ajaran yang hanya mengatakan bahwa umat manusia harus memutuskan atau melenyapkan segala macam hawa nafsu adalah ajaran yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang ada, tidak sesuai dengan *Dharma*. Maka sesungguhnya tidak perlu berusaha untuk menjadi manusia istimewa dengan meninggalkan segala macam hawa nafsu, akan tetapi yang lebih penting adalah harus membentuk pribadi diri sendiri yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu, dan malah menggunakan serta merombaknya untuk mencapai kesadaran-kebahagiaan. Justru filsafat jiwa agung agama Buddha merupakan filsafat untuk Merombak Hawa Nafsu Menjadi Kesadaran (*Bonno Soku Bodai*) dan meningkatkan sifat kemanusiaan secara maksimal.

Ketiga, *Icinen* merupakan Kesatuan Subjek dan Lingkungan yang Tak Terpisahkan (*Esyo Funi*). Berar-

ti seluruh gejala alam semesta tercakup dalam *Icinen*. Jiwa manusia mencakupi seluruh alam semesta, berarti baik diri sendiri, lingkungan, jasmani, perasaan jiwa, makhluk tak berperasaan seperti rumput dan pohon maupun langit dan bumi, kesemuanya itu tanpa terkecuali satu butir debu pun tercakup dalam *Icinen*. *Icinen* ini memenuhi seluruh alam semesta. Bahkan sejatinya pada setiap benda, bahkan sebutir debu pun sudah tercakup kesepuluh arah, dan dalam setetes air laut juga sudah terkandung semua unsur lautan. Setetes air yang dijatuhkan ke dalam laut akan tersebar ke seluruh penjuru lautan. Suara terjatuhnya benda, betapa kecil pun, akan menggetarkan gemanya ke seluruh alam semesta. Jiwa kita tidak akan dapat dipisahkan dari lingkungan, serta dengan *Icinen* kita dapat merombak tanah air menjadi tanah Buddha (kesadaran yang utuh), dan jalan hidup yang ditunjukkan oleh agama Buddha adalah hidup yang sekejap-sekejapnya sesuai dengan irama alam semesta, sesuai dengan *Dharma* / Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keempat, *Icinen* adalah Sebab-Akibat Sesaat (*In-ga Guji*). Pengertian Sebab-Akibat Sesaat ini berbeda dari pengertian Sebab-Akibat Lain Saat (*In-ga Iji*). Namun keduanya ini merupakan sisi yang lain dari Hukum sebab-akibat kejiwaan. Kalau kita melihat pada segi gejala gerakan jiwa, kita akan melihat Sebab-Akibat Lain Saat. Kalau kita melihat pada segi hakikat gerakan jiwa, kita akan melihat Hukum Sebab-Akibat Sesaat. Dalam salah satu surat yang ditulis oleh Buddha Niciren kepada muridnya yang berjudul ‘Sado Gosyo’ dikatakan:

"Kalau kita meremehkan orang lain, kita pun akan diremehkan. Kalau mencerca wajah dan perawakan yang gagah dan berwibawa, kita akan lahir dalam rupa yang buruk. Inilah Hukum Sebab-Akibat yang abadi." Pada bagian ini Buddha Niciren menguraikan Hukum Sebab-Akibat Lain Saat, bahwa akibat karma masa lampau kita terima pada saat ini, dan perbuatan saat ini akibatnya akan diterima pada masa mendatang. Dalam pengertian ini, kita harus menerima semua karma buruk masa lampau selama berulang kali lahir dan mati. Oleh sebab itu, kalau kita hanya berpegangan pada prinsip pengertian seperti ini saja, sikap hidup kita akan menjadi pasif karena kita hanya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan tidak berkeinginan untuk merombak nasib pada saat ini juga. Agama Buddha Niciren Syosyu telah menguraikan jiwa sekejap-sekejap sedemikian utuhnya, sehingga diterangkanlah bahwa pada detik ini juga kita dapat merombak segala nasib dari masa lampau yang tak terbatas, dan juga kita dapat menciptakan rezeki untuk masa depan yang tidak terbatas pula (NSI, 2018:15-25).

Namun demikian, ketika perasaan jiwa Buddha muncul bukan berarti kesembilan perasaan jiwa lainnya musnah, tetapi dengan jiwa Buddha maka kesembilan dunia lainnya dapat dihidupi dan menjadi potensi baik yang konstruktif, sebagai contoh, perasaan jiwa keserakahan yang dilandasi oleh perasaan jiwa Buddha akan menjadi sebuah perasaan jiwa yang ingin selalu memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada semua makhluk hidup, lalu perasaan jiwa kemurkaan yang

dilandasi perasaan jiwa Buddha akan menjadi sebuah perasaan jiwa yang murka jika melihat ketidakadilan, ingin selalu menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, membela kaum yang lemah dan tertindas. Agar lebih memahami kesepuluh tingkatan kualitas perasaan jiwa manusia, berikut ini akan dijelaskan secara ringkas hakikat dari masing-masing kualitas perasaan jiwa tersebut.

Perasaan jiwa neraka adalah keadaan jiwa ketika seseorang tertekan oleh penderitaan dan tidak dapat berkutik sedikit pun sampai-sampai tak bisa mengeluarkan nafsu apa pun, kebebasan sudah tiada sama sekali, keberisian jiwa tidak dirasakan sama sekali. Perasaan jiwa kelaparan adalah keadaan jiwa di mana seseorang dikuasai oleh dorongan hawa nafsu, sehingga ketika nafsu atau keinginannya tidak terpenuhi ia akan merasa kelaparan, tidak puas. Perasaan jiwa kebinatangan adalah suatu kebodohan di mana seseorang hanya digerakkan oleh naluri. Misalnya saja nafsu birahi, nafsu makan, minum, dan sebagainya. Sering kali kita tahu bahwa nafsu naluriah seperti ini sudah melampaui batas, namun kita tak dapat mengatasinya. Oleh karena itu Buddha Niciren mengatakan secara singkat dan tepat, “Bodoh adalah Kebinatangan.” Binatang adalah menikam yang lemah dan menjilat yang kuat. Memang di antara hewan-hewan yang sejenis bisa terjadi hubungan saling menjaga, tetapi kalau terhadap yang lemah, tua, atau sakit, akan diganggu dan bahkan dijadikan mangsa oleh yang kuat. Semuanya ini disebabkan oleh dorongan naluri, dan ketika itu terpuaskan, ia akan

merasakan kenikmatan (bukan kegembiraan). Manusia pun mempunyai kenikmatan-kenikmatan naluri seperti ini, menekan pada orang-orang yang lemah dan menjilat kepada yang kuat karena harta atau kekuasaan yang dimilikinya.

Perasaan jiwa Kemurkaan adalah sebuah keadaan jiwa seseorang yang setiap saat ingin menang dari orang lain dan kalau tidak dapat menahan keinginan ini, ia akan merendahkan dan meremehkan orang lain serta mengagumi diri sendiri, seperti halnya burung elang yang terbang tinggi dan melihat ke bawah. Namun di segi luarnya ia berlagak palsu sebagai orang yang baik dengan pura-pura menjunjung kesetiaan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Demikianlah sifat Kemurkaan/Asura. Kalau dalam Dunia Neraka, kemarahan akan menghancurkan diri sendiri, tidak mempunyai kebebasan dan juga kekuatan untuk merusak jiwa orang lain, maka perasaan jiwa kemurkaan, selain memiliki kekuatan jiwa yang sedikit lebih besar daripada Tiga Dunia Buruk (Neraka, Kelaparan, Kebinatangan) juga mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menghancurkan orang lain, sehingga bersama ketiga dunia sebelumnya ia disebut Empat Kecenderungan Buruk. Dalam perasaan jiwa kemurkaan, seseorang akan merasa ruang lingkup jiwanya sangat besar, tetapi itu sebenarnya hanyalah suatu khayalan kosong yang timbul karena tak tahan pada ruang lingkup jiwanya yang sebenarnya sempit. Ketika seseorang mengamuk, ia mungkin melempar dan memecahkan benda-benda yang ia sayangi, tetapi ketika amarahnya

mereda maka tinggallah penyesalan belaka.

Perasaan jiwa kemanusiaan adalah suatu kondisi perasaan saat kita merasa tenang, tenteram, dan merasakan kembali ketenangan sebagai seorang manusia. Kata manusia berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti makhluk berpikir. Menurut agama Buddha, ciri khas manusia adalah bijaksana, berperasaan halus, sanggup menilai sesuatu secara tepat, mempunyai *prajna* (pikiran yang bijaksana/kebijaksanaan tertinggi), dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena pengendalian emosi jiwa yang berlangsung dengan stabil. Ia juga merupakan satu-satunya makhluk yang dapat menjalankan pertapaan untuk mencapai kesadaran Buddha, serta membawa rezeki besar sejak kehidupan masa lampau. Perasaan jiwa kemanusiaan terletak di tengah-tengah dalam urutan Sepuluh Tingkatan Perasaan Jiwa, karena ia merupakan dasar keadaan jiwa yang dapat berubah menjadi Perasaan Jiwa apa pun.

Perasaan jiwa surga adalah suatu keadaan jiwa gembira dan berseri-seri. Dunia surga terdiri dari enam Surga *Kamadhatu,* delapan belas Surga *Rupadhatu* dan empat Surga *Arupadhatu*. *Kamadhatu* adalah Dunia Nafsu, *Rupadhatu* adalah Dunia Materi dan Jasmani, sedangkan *Arupadhatu* adalah Dunia Perasaan Jiwa. Ketiga macam Dunia Surga ini dimaksudkan untuk membedakan mutu kegembiraan manusia. *Kamadhatu* mencakupi perasaan jiwa neraka sampai perasaan jiwa kemanusiaan ditambah sebagian perasaan jiwa surga. Karena baik perasaan jiwa neraka, kelaparan, kebina-

tangan, maupun kemurkaan selalu didasari hawa nafsu dan dorongan naluri dalam kaitannya dengan nafsu akan materi dan kedudukan sosial di mana hawa nafsu inilah sebagai sumber Gerakan jiwa. Dunia Surga *Kamadhatu* adalah suatu keadaan jiwa gembira yang disebabkan karena terpenuhinya nafsu akan macam-macam kedudukan sosial seperti kekuasaan, kehormatan, hak milik, dan sebagainya. Surga Arupadhatu adalah kegembiraan perasaan jiwa seperti rasa bebas dan mantapnya pribadi diri sendiri. Dalam kegembiraan ini, "getaran perasaan jiwa" lebih kuat dan mantap daripada Empat Perasaan Jiwa Buruk (Neraka, Kelaparan, Kebinatangan, Kemurkaan) maupun Dunia Kemanusiaan. Dalam perasaan jiwa surga, waktu yang berlalu terasa sangat cepat karena meningkatnya aktivitas dan dinamika jiwa. Kehidupan satu hari di perasaan jiwa surga sama dengan kehidupan ratusan tahun di perasaan jiwa kemanusiaan. Usia manusia menjadi amat panjang oleh karena rasa keberisian hidup satu hari dalam perasaan jiwa surga setara dengan ratusan tahun kehidupan perasaan jiwa kemanusiaan. Namun demikian, perasaan jiwa surga ini bukan lah tujuan yang dibimbing oleh Buddha, karena di dalam perasaan jiwa surga ini terdapat "Raja Iblis Surga Keenam / *Para-nirmita-vasavartin* (*Take-jizai-ten*), iblis di sini berarti kesesatan pokok perasaan jiwa sendiri yang muncul ketika sedang berada di kondisi surga, yaitu perasaan sombong, nafsu untuk terus berkuasa, menguasai, memiliki sesuatu, yang kalau dalam hubungan antarmanusia adalah nafsu untuk menonjolkan diri dan ingin selalu dihormati, suatu perasaan jiwa sendiri yang

sanggup menguasai serta mengendalikan makhluk berjiwa lainnya secara leluasa dan merasa gembira karena hal itu. Sehingga ketika seseorang sudah dikuasai oleh perasaan iblis surga keenam tersebut, seketika itu juga perasaan jiwanya akan rentan jatuh ke perasaan jiwa neraka dan ia akan merasakan penderitaan dan kekosongan kembali di dalam perasaan jiwanya.

Selanjutnya adalah perasaan jiwa sravaka dan perasaan jiwa pratyekabuddha, kedua perasaan jiwa ini sering dikelompokkan menjadi satu dengan istilah *Dwiyana* (dua kendaraan), karena kedua perasaan jiwa ini mempunyai banyak persamaan. Pada umumnya, ketika keinginan seorang manusia tercapai, ia akan menikmati kegembiraan perasaan jiwa Surga, lalu terikat pada apa yang diperolehnya seperti kekuasaan, kedudukan, kehormatan, kekayaan, dan sebagainya. Ia menganggap semuanya itu kekal, padahal kenyataannya tidaklah demikian, sehingga ketika semua itu terlepas dari tangannya, ia akan merasa menderita. Ciri khas dari perasaan jiwa Sravaka dan perasaan jiwa Pratyekabuddha adalah menganggap segala sesuatu adalah fana/ tidak kekal. Jiwa Sravaka dan Pratyekabuddha mengarahkan pandangannya kepada hakikat jiwa dan alam semesta dan senantiasa bersikap mawas diri. Seorang manusia yang berada dalam perasaan jiwa Sravaka dan Pratyekabuddha akan memancarkan sinar *prajna*nya ke dasar jiwa sendiri, dan menerangi lingkungan sesuai dengan kekuatan sinar *prajna*nya. Karena kalau kita dapat mengenal jiwa kita secara mendalam, maka baik masa lampau maupun masa depan akan terlihat dengan

jelas. Inilah salah satu prinsip agama Buddha, Sekejap adalah Kekal Abadi. Kata *Sravaka* berarti mendengar dan menyebarkan suara dan ajaran Sang Buddha. Jadi dengan mempelajari filsafat, ilmu pengetahuan ataupun pengalaman hidup yang telah diperoleh para pendahulu dengan segala jerih payahnya, sinar kejiwaannya dapat ditingkatkan baik mutu maupun kekuatannya. Maka setiap orang yang senantiasa mawas diri, berusaha meningkatkan aspek kemanusiaannya dan perasaan jiwanya, adalah seorang *Sravaka*.

Perasaan jiwa Pratyekabuddha adalah suasana jiwa yang mencapai suatu kesadaran dengan jodoh atau perantara segala segi kejiwaan dan alam. Maka itu disebut Pratyekabuddha yang arti harfiahnya adalah sadar sendiri. Gerakan alam yang indah, sekuntum bunga di taman, gugurnya daun, bulan dan bintang di malam hari, ataupun berita di surat kabar, semuanya itu merupakan jodoh penimbul kesadaran bagi seorang Pratyekabuddha. Melalui jodoh-jodoh itu ia berpikir, merasa ragu, dan bersusah payah untuk mencapai suatu kesadarannya yang khas. Keadaan jiwa ini sering kita jumpai pada kaum filsuf, seniman, dan para penemu inspirasi dari gejala alam. Untuk dapat melihat gerakan alam sebagai sesuatu yang mempunyai arti tersendiri, diperlukan usaha-usaha dan jerih payah yang luar biasa. Ia mendekati gerakan jiwa alam semesta dengan kekuatan sendiri, dan kemudian menemukan suatu prinsip pokok untuk diterapkan dalam hidup. Jadi, jelaslah bahwa kesadaran Pratyekabuddha tidak hanya terbatas bagi kaum filsuf dan seniman,

akan tetapi siapa pun dapat meningkatkan daya intuisi melalui usaha peningkatan mutu jiwa sendiri dan mencapai kesadaran Pratyekabuddha.

Keadaan jiwa kaum Sravaka dan Pratyekabuddha adalah suatu kegembiraan yang bersifat perasaan jiwa. Keadaan perasaan jiwa Surga Arupadhatu pun merupakan kegembiraan perasaan jiwa. Tetapi di antara keduanya ini terdapat perbedaan, karena kegembiraan Arupadhatu disebabkan oleh kondisi lingkungan yang baik, sedangkan kegembiraan Sravaka dan Pratyekabuddha disebabkan oleh suatu kreasi yang dilakukan melalui kekuatan sendiri. Pada saat seseorang mencapai kesadaran Sravaka dan Pratyekabuddha, getaran jiwanya amat kuat dan berkilauan, serta memperoleh *prajna* yang tidak terduga olehnya sendiri, menemukan suatu kebenaran yang baru. Sehingga nilai kegembiraan perasaan jiwanya amat tinggi.

Setiap orang mempunyai arena atau ruang lingkup kehidupannya masing-masing. Arena kehidupan seorang sarjana adalah di bidang ilmu pengetahuan; seorang karyawan adalah pekerjaan dari perusahaannya; seorang ibu rumah tangga pada hakikatnya sebagai pengasuh keluarga dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya. Dalam arena kehidupan inilah setiap orang dapat mewujudkan perasaan jiwa Sravaka dan perasaan jiwa Pratyekabuddha masing-masing yang kekuatan dan arahnya ditentukan oleh tingkat perombakan sifat jiwa masing-masing.

Namun demikian, pada umumnya kaum Sravaka dan Pratyekabuddha cenderung menganggap kesada-

rannya ini sebagai sesuatu yang tertinggi atau sebagai suatu kesadaran yang telah mencapai sumber jiwa alam semesta. Maka pada saat itu juga gerakan iblis yang tersembunyi pada dasar jiwa akan tersingkap dan mulai bekerja, menimbulkan hati kesombongan dan sifat egois. Jiwa Sravaka dan Pratyekabuddha memang memiliki akal budi yang tajam serta berusaha untuk memupuk ketulusan hati yang jernih. Tetapi terhadap iblis hawa nafsu dan gejolak egoisme yang berasal dari dasar jiwa, ia tidak berdaya sama sekali. Karena hakikat sifat iblis jiwa yang disebut Kesesatan Pokok Jiwa (*Gampon No Mumyo*) berasal dari lapisan jiwa yang lebih dalam daripada akal budi, hati nurani, cinta kasih atau juga berbagai macam hawa nafsu lain. Sebab itu, jiwa Sravaka dan Pratyekabuddha ini tidak mengenal jalan untuk menumpas iblis dasar jiwa, sehingga kecemerlangan kejiwaannya pudar. Jadi bagaimanapun juga, kesadaran jiwa Sravaka dan Pratyekabuddha terbatas kemampuannya dan masih jauh dari kesadaran yang mencakup seluruh jiwa alam semesta.

Perasaan jiwa *Bodhisattva* berasal dari bahasa sansekerta, *Bodhi* berarti kesadaran, sedangkan *sattva* berarti makhluk berperasaan; yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai manusia. Jadi, *Bodhisattva* berarti manusia yang mewujudkan kesadaran, karena pada dasarnya *prajna* seorang *Bodhisattva* yang diperoleh melalui usaha menyelamatkan orang lain adalah *prajna* Buddha. Suasana jiwa seorang *Bodhisattva* diwarnai dengan adanya kekuatan *maitri karuna*, sinar *prajna*, keberanian dan tekad yang amat kuat, serta pelaksa-

naan nyata untuk menyelamatkan dan membahagiakan seluruh umat manusia. Ciri khas *Bodhisattva* adalah *maitri karuna*. Nagarjuna menjelaskan dalam Maha*prajna* Paramitha Sastra bahwa *maitri* berarti memberi suka kepada orang lain, sedangkan *karuna* berarti mencabut *dukkha* orang lain. Untuk mencabut *dukkha*, pertama-tama kita harus turut merasakan penderitaan orang lain, lalu barulah kita dapat mencabut kesulitan dan memberi kebahagiaan. Sikap *maitri karuna* seperti ini bukan saja merupakan suatu usaha untuk membahagiakan orang lain, tetapi juga sekaligus usaha untuk menyempurnakan diri sendiri (*Jigyo Keta*). Artinya, di samping kita berusaha untuk meningkatkan keadaan jiwa melalui usaha menyelamatkan orang lain, kita perlu memunculkan energi *maitri karuna* dari dalam jiwa kita. Maksudnya kita memerlukan usaha dari dua arah: luar dan dalam. Ke luar kita melakukan usaha penyelamatan orang lain, ke dalam kita memunculkan energi pokok jiwa untuk menunjang usaha penyelamatan tersebut. Dengan bersatu padunya kedua usaha ini tentu kita tak akan terkalahkan oleh kesulitan seperti apa pun, dan pasti dapat membentuk dasar kehidupan yang kokoh untuk melangsungkan hidup yang berisi dengan kepribadian yang mantap.

Berbeda dengan Sravaka dan Pratyekabuddha yang mengutamakan renungan dan pemikiran, *Bodhisattva* senantiasa mengutamakan pelaksanaan, dan terjun ke tengah masyarakat untuk menyelamatkan umat manusia yang menderita dengan turut merasakan segala penderitaan orang lain. Sebenarnya seorang *Bodhisat-*

*tva* pun memiliki pemikiran yang mendalam serta pengamatan yang tajam, tetapi itu semua menyatu dalam pelaksanaan. Manusia dalam perasaan jiwa Sravaka dan perasaan jiwa Pratyekabuddha masih belum dapat mengikis habis sifat egoisme diri sendiri, sehingga pada akhirnya memberi peluang bagi kemunculan sifat iblis dalam jiwanya. Sedangkan perasaan jiwa *Bodhisattva* telah dapat mengatasi semuanya itu; baik sifat egoisme maupun sifat iblis yang bersarang pada jiwa manusia. Suasana jiwa *Bodhisattva* didukung oleh kekuatan maitri karuna yang berlimpah-limpah memenuhi seluruh jiwa. Jelas kekuatan maitri karuna bersumber dari dasar jiwa, sehingga di dalamnya sudah tercakup akal budi, hati nurani, maupun segala macam dorongan perasaan jiwa. Dan ketika semuanya ini bersatu padu dengan energi maitri karuna untuk membahagiakan orang lain, maka pada waktu itu juga "Aku"nya/ hakikat perasaan jiwa kita berada dalam suasana jiwa *Bodhisattva*.

Setiap saat dalam kehidupan seorang *Bodhisattva* tidak ada yang bukan merupakan *maitri karuna*. Sehingga dalam keadaan seperti ini tidak ada peluang sedikit pun bagi munculnya egoisme. Meskipun sifat iblis tetap ada dalam jiwa, kekuatannya selalu dipatahkan. Maka sebagai hasilnya akan bermunculan secara terus-menerus, kekuatan pokok jiwa berupa energi *maitri karuna* dan *prajna*. Melalui proses ini, jiwa manusia yang memang cenderung bersifat egois lambat laun berubah menjadi jiwa yang bercorak *maitri karuna*. Semakin besar *maitri karuna* seorang manusia, semakin be-

sar pula kekuatan perasaan jiwanya seperti: akal budi, hati nurani, dan cinta kasih. Sehingga untuk menjadi manusia seutuhnya, sudah sepatutnya mengembangkan perasaan jiwa-perilaku seorang *Bodhisattva.*

Kualitas perasaan jiwa terbaik yang dimiliki oleh setiap umat manusia adalah perasaan jiwa Buddha. Dalam kehidupan yang nyata kita sulit mewujudkan dan menghayati perasaan jiwa Buddha secara sempurna. Tetapi untuk mengenal perasaan jiwa Buddha ini, kita dapat memahaminya dari Sepuluh Gelar Buddha, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Buddha:

1. Buddha: adalah orang yang telah mencapai tingkat kesadaran sempurna. Artinya, Sang Buddha memiliki *prajna* yang amat agung dan mencakup hakikat kehidupan jiwa dan alam semesta raya.

2. *Tathagata (Nyorai)*: *Tatha (Nyo)* berarti waktu sekejap-sekejap. *Gata (Rai)* berarti datang. Maksudnya ialah gerakan jiwa Buddha itu sekejap-sekejapnya bersatu padu dengan jiwa alam semesta. Dengan kata lain, istilah ini juga berarti seorang Buddha telah menyadari jiwa kekal abadi.

3. *Sammyaksambuddha (Syohenci)*: Artinya *prajna* Sang Buddha menerangi seluruh umat manusia secara adil dan merata. Dalam arti yang lebih luas berarti *prajna* Sang Buddha mencakup seluruh alam semesta.

4. *Purusadamyasaranthi (Jogojobu)*: Artinya Sang Buddha memiliki kekuatan yang amat besar untuk mengendalikan dan membina seluruh umat manusia

maupun makhluk hidup. Pengendalian dan pembinaan yang dimaksud di sini bukan saja ditujukan kepada makhluk lain, tetapi juga untuk mengendalikan sifat iblis yang terdapat dalam jiwa diri sendiri. Maka usaha untuk membahagiakan orang lain adalah juga usaha untuk merombak sifat jiwa diri sendiri.

5. *Sugata (Zensei)*: *Su (Zen)* berarti baik; *gata (Sei)* berarti pergi. Jadi secara harfiah istilah ini berarti pergi ke tempat yang baik. Maksudnya, memutuskan segala hawa nafsu dan mencapai suasana jiwa kesadaran Buddha. Dalam hal ini sebenarnya bukan memutuskan hawa nafsu, melainkan mengubah atau meningkatkan mutunya agar berguna dalam usaha membahagiakan orang lain.

6. *Vidyacaranasampanna (Myogyosoku)*: Artinya Sang Buddha mempunyai *prajna* yang sanggup melihat jelas ketiga masa, yaitu: masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. *Prajna* Sang Buddha ini akan semakin bertambah kecemerlangannya dalam pelaksanaan penyelamatan umat manusia di tengah masyarakat, dan *prajna* ini tidak terbatas pada bidang perasaan jiwa saja, melainkan mencakup segala bidang kehidupan manusia seperti: sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya.

7. *Lokavid (Sekenge)*: Secara harfiah istilah ini berarti mengenal masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Sang Buddha bukan saja mengenal filsafat

yang mendalam tentang hakikat kehidupan alam semesta dan jiwa, tetapi juga mengetahui dan memahami segala persoalan yang ada dalam masyarakat. Beliau sanggup memberi jawaban yang paling tepat atas segala masalah yang ada dalam masyarakat, dan Beliau sendiri sanggup mengamalkan petunjuk-petunjuk yang diberikannya. Itulah sebabnya Sang Buddha adalah orang yang paling mengenal masyarakat.

8. *Sastadevanammanusyanam (Tenninsyi)*: Secara harfiah istilah ini berarti guru dari dewa dan manusia. Yang dimaksud dewa di sini adalah para pemimpin masyarakat, sedangkan manusia adalah kaum rakyat jelata. Jadi maksudnya Sang Buddha adalah seorang manusia yang dapat membimbing segala lapisan masyarakat. Tetapi ini bukan berarti Sang Buddha memaksa orang-orang untuk menjadi pengikutnya, melainkan kepribadian dan kemampuan Sang Buddha dengan sendirinya menimbulkan rasa segan dan simpati pada setiap orang.
9. *Arhat (Ogu)*: Secara harfiah berarti orang yang memenuhi syarat untuk menerima sumbangan dari orang-orang yang berada dalam Dunia Surga dan Dunia Manusia. Yang dimaksud dengan memenuhi syarat di sini adalah perilaku sang Buddha dengan sendirinya mendapat dukungan dan simpati setiap orang.
10. *Lokanathati (Seson)*: Artinya orang yang paling dihormati di dunia ini. Sang Buddha memiliki *mai-*

*tri karuna* yang amat luhur serta kekuatan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, maka dengan sendirinya Beliau dicintai dan disegani oleh seluruh umat manusia.

Dari uraian mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seorang Buddha tersebut jelas bahwa seorang manusia yang telah berhasil memunculkan jiwa Buddhanya tetap tampak sebagai seorang manusia biasa yang berakal sehat. Orang serupa ini selalu bersikap tulus, penuh rasa tanggung jawab, dan mempunyai keyakinan yang amat kuat. Ia juga selalu bersikap akrab, cara berpikirnya luwes, dan kaya akan maitri karuna, *prajna*, serta kreativitas, juga mengasihi seluruh umat manusia secara adil dan merata. Dari sini tampak bahwa sifat seorang Buddha amat mirip dengan sifat Dunia Kemanusiaan, karena memang seorang Buddha, tidak lain dari seorang manusia yang paling manusiawi. Memiliki sikap hidup sebagai seorang manusia yang sederhana tetapi tinggi kemanusiaannya tampaknya mudah, tetapi pelaksanaannya amat sulit. Misalnya saja bersikap adil terhadap setiap orang, sikap ini amat sulit dipertahankan kalau kita tidak mempunyai *prajna*, maitri karuna, serta kepribadian yang cukup kuat, dan pada umumnya kita selalu bersikap pilih kasih.

Kalau kita melihat seseorang yang telah memunculkan jiwa Buddha, tingkah lakunya amat bersahaja, namun seluruh perilakunya merupakan gerakan Bodhisatwa. Selain itu, orang yang telah memunculkan perasaan jiwa Buddhanya akan memiliki kesadaran hakikat alam semesta dan jiwa, termasuk aneka peru-

bahan masyarakat serta gejala kehidupan segala makhluk. Oleh karena itu, Dunia Buddha sanggup memperoleh seluruh energi alam semesta raya ini, dan keadaan jiwa Buddha terasa amat berisi dan bebas, mencakup seluruh alam semesta. Kegembiraan perasaan jiwa Buddha jauh lebih dalam daripada perasaan jiwa Kemanusiaan, perasaan jiwa Surga, perasaan jiwa Sravaka, dan perasaan jiwa Pratyekabuddha. Bagi seseorang yang telah berhasil mewujudkan perasaan jiwa Buddha, hidup itu dirasakan sebagai suatu kegembiraan yang terbesar di antara segala kegembiraan, yang bermunculan dari dasar terdalam jiwa manusia secara amat dahsyat, seakan-akan ia bermunculan dengan mengguncangkan dan membelah bumi. Perasaan jiwanya akan terasa kuat, bebas, suci, dan tenang. Pada segala sesuatu yang dilihatnya, baik alam, bumi, rumput, pohon maupun wajah orang-orang, *I*a akan menemukan sinar kegembiraan. Satu napas dan satu gerakan tangannya pun merupakan perwujudan rasa gembira, terima kasih, serta kemuliaan hidupnya. Baginya, proses lahir, tua, sakit, dan mati itu sendiri telah berubah menjadi suatu kegembiraan yang amat besar (*Syoji Soku Nehan*).

Sinar *prajna* perasaan jiwa Buddha akan menerangi seluruh alam semesta dan menghancurkan Kesesatan Pokok Jiwa (*Gampon No Mumyo*). Sementara ruang lingkup jiwanya sudah meliputi seluruh alam semesta, karena ia telah sadar akan prinsip: “Saya adalah alam semesta; alam semesta adalah saya.” Kekuatan seluruh alam semesta tersimpul pada jiwa Buddha, dan dalam gerakan jiwa sekejap seorang Buddha ter-

kandung kekuatan seluruh alam semesta raya. Selain itu, jiwa Buddha akan merasakan waktu kekal abadi dalam waktu sekejap; dan waktu kekal abadi pun dirasakan sebagai sekejap. Hal ini dimungkinkan karena sebagaimana kita ketahui, waktu yang penuh kegembiraan akan berlalu sangat cepat, sedangkan dalam waktu sekejap jiwa Buddha akan merasakan kegembiraan yang amat besar. Demikianlah kesempurnaan dan keberisian perasaan jiwa Buddha. Maka sebagai kesimpulan adalah bahwa perasaan jiwa Buddha memang ada dalam jiwa seluruh umat manusia, dan sikap hidup seorang manusia seutuhnya adalah tidak lain dari sikap seorang Bodhisatwa yang senantiasa berusaha memunculkan perasaan jiwa Buddhanya (NSI, 2018: 30-64).

## III. Penutup

Suatu hal yang menakjubkan bahwa dalam jiwa tiap manusia sudah tercakup potensi Ketuhanan dan potensi perasaan jiwa yang inheren untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai kesadaran Buddha. Sekejap perasaan jiwa mengandung suatu unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang sulit dirasakan jiwa kita sekejap-sekejap, dan mungkin ada orang yang menganggap hal itu mustahil. Tetapi agama Buddha bagaimanapun juga melihat keadaan dan suasana yang dirasakan dari dalam jiwa itu sendiri, dan dalam hal ini kita tidak akan dapat menipu diri kita sendiri. Suasana dan keadaan jiwa kita ini senantiasa berubah-ubah, kadang kala menderita, kadang kala gembira dan seterusnya, tetapi pasti ia memiliki satu keadaan jiwa ke mana ia akan kembali. Itulah sasaran dari perwujudan *Dhar-*

*ma*/ Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha, untuk bisa meningkatkan kualitas dasar sekejap-sekejap perasaan jiwa manusia agar senantiasa berada dalam kulitas perasaan jiwa Buddha, selaras dengan irama alam semesta/ *Dharma*/ Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga benar-benar menjadi manusia seutuhnya yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Referensi

Adam, Aulia. (2019). *Agnostik di Indonesia Menentang Suara Mayoritas di Negeri Religius*. [Online]. Tersedia: https://tirto.id/agnostik-di-indonesia-menentang-suara-mayoritas-di-negeri-religius-efXk. [Diakses: 26 November 2020].

Bullard, Gabe. (2016). *Atheism, Agnostic, Secular, Nones, Rising Religion.* [Online]. Tersedia: https://www.nationalgeographic.com/news/2016/04/160422-atheism-agnostic-secular-nones-rising-religion/. [Diakses: 26 November 2020].

Diputhera, Oka. (2010). *Agama Buddha Berkembang Di Indonesia*. Tangerang: CV.Okaberseri Aryasuryacandra.

Hadi, Zufri. (2019). *Asal Mula Nama 5 Generasi di Zaman Now*. [Online]. Tersedia: https://kumparan.com/zufri-hadi/asal-mula-nama-5-generasi-di-zaman-now-1554033262838252950/full. [Diakses: 26 November 2020].

Hardoko, Ervan. (2018). *Survei Mayoritas Generasi Milenial Eropa Mengaku Tak Beragama*. [Online]. Tersedia: https://internasional.kompas.com/read/2018/03/22/15061811/survei-mayoritas-generasi-milenial-eropa-mengaku-tak-beragama?page=all. [Diakses: 26 November 2020].

Kamus Sanskrit. (2009). *Arti kata A.* Lembaga Penterjemah Kitab Suci Tipitaka.

NSI. (2018). *Filsafat Jiwa Icinen Sanzen*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Rahman, Vanny El. (2020). *Curhat Seorang Atheis, Tuhan Konsep Usang, Agama Bak Partai Politik*. [Online]. Tersedia: https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/curhat-seorang-atheis-tuhan-konsep-usang-agama-bak-partai-politik/3. [Diakses: 26 November 2020].

Sanskritdictionary. (2018). *Gama Definition*. Sumber: http://sanskritdictionary.com/?iencoding=iast&q=gama&lang=sans&action=Search, diakses 18 Juli 2018.

SPS. (2020). *Saddharmapundarika Sutra*. Jakarta: Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Stokes, Gillian. (2000). *Seri Siapa Dia? Buddha.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

# KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF AGAMA KHONGHUCU

*Budi Santoso Tanuwibowo*[*]

## I. Pendahuluan

### Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia dijajah oleh Jepang sejak 8 Maret 1942 - saat Belanda menyerah pada Jepang, sampai 15 Agustus 1945 - saat Jepang menyerah pada Sekutu. Sehingga jika dihitung maka masa penjajahan tersebut terjadi sekitar 3 tahun 129 hari atau kurang dari 3,5 tahun. Sedangkan masa penjajahan Belanda di Indonesia terdapat berbagai versi. Versi umum yang sering disebutkan adalah 3,5 abad. Dasar perhitungannya sejak Cornelis de Houtman mendarat di Banten 22 Juni 1596. Padahal waktu itu kehadirannya untuk berdagang dan ditolak oleh penguasa Banten. Baru sekitar Mei 1598 kehadiran pedagang Belanda yang dipimpin Jacob van Neck, van Heemskerck, dan van Waerwjick berhasil mengambil simpati dan diterima penguasa Banten dan diperbolehkan berdagang.

---

* Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia—MATAKIN.

Ketika VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*, Perusahaan Hindia Timur Belanda) didirikan 20 Maret 1602 sampai kemudian dibubarkan 31 Desember 1799 karena terjerat korupsi, motifnya pun hanya berdagang dengan para Sultan dan Raja di Nusantara, meski mereka diberi otoritas oleh pemerintah Belanda untuk berperang demi menguasai monopoli perdagangan. Namun saat itu wilayah Nusantara masih dalam kekuasaan para Sultan dan Raja di masing-masing wilayah. Jadi dapat dikatakan sampai 1799 'belum' ada penjajahan.

Setelah VOC dibubarkan dan diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda, praktis sejak 1800 'mulai' ada penjajahan. Meski demikian prosesnya tidak serentak mampu menguasai seluruh wilayah Nusantara. Perang demi perang terjadi dimana-mana di seluruh Nusantara, diantaranya Perang: Padri, Pattimura, Diponegoro, Antasari dan Aceh. Melalui perang yang panjang, berat dan menyeluruh di seluruh Nusantara, barulah pada tahun 1912 Belanda bisa berkuasa penuh menjajah seluruh wilayah Nusantara, di luar Timor Timur yang dikuasai Portugis, Kalimantan Utara, Semenanjung Malaya, dan Singapura yang dikuasai Inggris, serta Papua bagian Timur (Papua Nugini).

Dari uraian di atas apakah dapat dikatakan Indonesia dijajah Belanda sejak tahun 1800 atau 1912? Jawabannya tentu tergantung dari perspektif mana yang digunakan. Soal nama Indonesia sendiri saja baru dikenal dan dipopulerkan oleh James Richarson Logan dan George Samuel Windsor Earl tahun 1850 di *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA),

kemudian dipopulerkan etnolog Jerman, Adolf Bastian pada 1884, dan baru digunakan secara nasional pada Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, yang sekaligus merupakan ikrar pengakuan tentang ke-Indonesiaan.

Berapa lama dan sejak kapan Indonesia dijajah dapat diperdebatkan, namun yang jelas awal abad 19 mulai muncul kesadaran tentang perlu dan pentingnya persatuan agar bisa lepas dari belenggu penjajahan. Tanpa persatuan yang kokoh, nasib perjuangan berikutnya diperkirakan akan berakhir tragis mengalami kegagalan, bernasib sama seperti nasib perjuangan-perjuangan terdahulu.

**Mengapa Pancasila?**

Setelah muncul kesadaran untuk bersatu, seperti yang diikrarkan dalam Soempah Pemoeda, yang isinya mengaku bertanah air satu -tanah air Indonesia, berbangsa satu -bangsa Indonesia, serta sepakat untuk menggunakan bahasa persatuan -bahasa Indonesia, persoalannya tentu belum langsung selesai begitu saja. Ada hal-hal mendasar yang harus dipikirkan untuk mengikat kesadaran tersebut menjadi kebersamaan yang kokoh kuat, yang tidak mudah dipisahkan dan digoyahkan.

Sejak Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh -praktis sampai kedatangan Belanda, wilayah Nusantara terpecah- pecah dalam kekuasaan kesultanan atau kerajaan kecil yang tidak terikat dalam satu kesatuan. Ini sebabnya VOC dan kemudian Belanda mudah berkuasa. Para pejuang

bangsa menyadari hal ini. Namun hanya berikrar tentu tidaklah cukup. Menyatukan bangsa yang besar, tinggal di wilayah yang sangat luas, dengan aneka perbedaan kepentingan, suku, etnis, adat, budaya, bahasa, agama, keyakinan, kepentingan eks kerajaan dan kesultanan, dll tentu tidak mudah. Inilah PR besar dari para pejuang bangsa untuk mencari formula yang tepat, yang bisa digunakan sebagai sebuah pegangan dasar yang bisa diterima secara luas bersama-sama.

Beruntung para pejuang leluhur Indonesia pada waktu itu -terutama Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan Soepomo- mempunyai wawasan dan kearifan luar biasa. Mereka semua saling berdebat, berargumen mendiskusikan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita pendirian negara sampai akhirnya lahir kesepakatan dasar bersama dalam wujud Pancasila, bentuk dan wilayah negara, warga negara, bahasa, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mengapa Pancasila? Karena ada 5 (lima) dasar kesepakatan (sila). Dan mengapa harus ada 5 (lima) sila? Karena kelima sila itu telah ada, hidup dan mengakar dalam perilaku kehidupan masyarakat leluhur bangsa. Sesuatu nilai yang hidup, asli, nyata, dan sekaligus telah lama diterima tentunya lebih mudah disepakati. Apalagi nilai tersebut selaras senafas dengan nilai-nilai agama.

Ketika Pancasila diuraikan oleh Bung Karno, Mohammad Yamin dan Soepomo di hadapan Sidang BPUPK yang terdiri atas cendekia dari berbagai etnis

dan agama - termasuk para tokoh komunitas Arab dan Tionghoa, seperti AR Baswedan, Liem Koen Hian, Oey Tjong Houw, Oey Tiang Tjoei dan Tan Eng Hoa, semuanya sepakat menerima Pancasila secara mufakat sebagai alat perekat perjuangan bersama, titik temu, dasar negara, cita-cita, falsafah, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Meski ada sedikit perdebatan serius soal isi sila pertama, terkait tujuh kata yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," akhirnya berkat kebesaran jiwa para tokoh Islam, ketujuh kata tersebut sepakat untuk dihilangkan.

**Mana Yang Menjadi Poin Paling Krusial?**

Jika dicermati bersama sila-sila dalam Pancasila, dengan cepat dapat diketahui bahwa sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjabarkan tujuan bernegara. Sebagian besar orang -untuk tidak mengatakan semua, seluruhnya, pastilah menyetujui terbentuknya sebuah negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Kalau pun ada yang tidak setuju, pastilah datang dari mereka yang menikmati keuntungan atas adanya ketidakadilan. Dengan demikian sila ini merupakan sila penting yang tak banyak diperdebatkan.

Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, selain menjadi nilai dasar yang didambakan sebagian besar umat manusia - kecuali bagi mereka yang hidupnya memang menari di atas penderitaan manusia lain, bisa juga dikatakan sebagai bagian dari tujuan hidup bernegara yang kita dambakan, yaitu: "ikut serta menjaga ketertiban dunia....". Kata dasar "adil" yang

dua kali disebut dalam sila kedua dan kelima menegaskan pentingnya keadilan atau adil dalam penyelenggaraan negara, yang tentunya menjadi dambaan wajar bagi setiap orang yang sadar pentingnya kebersamaan, kesetaraan, keadilan, meritokrasi, dan transparansi.

Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menggambarkan sistem pemerintahan yang kita inginkan. Bukan sistem kerajaan atau kesultanan seperti yang dibangun dipraktikkan oleh para leluhur kita, melainkan sistem republik yang diharapkan mampu menyerap dan mendengarkan aspirasi rakyat secara musyawarah. Tidak menisbikan yang kecil, tidak mengagungkan yang besar. Semuanya diapresiasi, diberi tempat dan perhatian selayaknya. Pilihan teks sila keempat ini membuktikan kearifan para tokoh pendiri bangsa. Bayangkan bila sila keempat ini menunjuk sistem kerajaan. Jangan-jangan belum apa-apa cita-cita kemerdekaan kita sudah kandas di tengah jalan karena terbentur kerumitan siapa yang nantinya akan dipilih/diangkat menjadi raja atau sultan, bagaimana mekanismenya, sementara pada masa pra kemerdekaan, Indonesia mempunyai banyak raja atau sultan di seluruh wilayah Nusantara.

Untuk mewujudkan sila kelima dan sila kedua, tentunya membutuhkan negara atau pemerintahan. Namun tidak mungkin akan terbentuk negara bila tak ada wilayah dan rakyat. Banyak pilihan yang dibahas mengenai wilayah negara di sidang BPUPK, termasuk kemungkinan memasukkan wilayah Semenanjung Melayu, Singapura, Sabah, Sawarak dan Timor Timur (Timor

Leste sekarang). Namun akhirnya disepakati wilayah Indonesia sama dengan *eks* wilayah penjajahan Belanda. Dengan demikian orang yang mendiami wilayah tersebut mempunyai hak menjadi warganegara, kecuali menyatakan menolaknya.

Faktor apa yang menyatukan? Persamaan nasib sama-sama mengalami penjajahan yang sama, serta pengalaman sejarah dan kesepakatan akan masa depan. Bukan faktor kesamaan suku, etnis, budaya, agama, dan bahasa yang bhinneka atau berbeda-beda. Pengalaman perjuangan kedaerahan atau kesukuan yang berkali-kali mengalami kegagalan juga memberikan kesadaran tentang pentingnya persatuan. Inilah yang menjadi inti pesan sila ketiga Pancasila.

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah sila penting yang menjadi roh dari Pancasila. Jika dilihat dari uraian di atas menjadi jelas bahwa sebagai bangsa terjajah kita ingin merdeka, agar bisa hidup dalam masyarakat yang adil dan sejahtera, saling menghormati atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Untuk mencapai cita-cita mulia itu kita perlu membangun negara dan pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan hasil musyawarah bersama, artinya membutuhkan persatuan yang kokoh. Persatuan bisa terwujud karena ada kesamaan nasib dan kesamaan tujuan. Namun ke depannya bagaimana? Apa bisa terjamin tetap langgeng abadi? Ini tentu membutuhkan kesepakatan dasar yang menjamin kepentingan dasar semua unsur. Dan harus diakui bahwa faktor perbedaan keyakinan, agama, lebih mudah menjadi faktor

pemecah -bila tak terakomodir dengan baik, ketimbang faktor primordial yang lain. Di sini sila pertama Pancasila berperan menjadi roh pemersatu bangsa Indonesia, terbukti ketika rumusannya pernah mengandung tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" sempat akan menimbulkan perpecahan dini, terutama adanya penolakan dari warga Indonesia bagian Timur. Menyimak uraian di atas tak berlebihan bila dikatakan bahwa sila pertama merupakan sila paling krusial yang menjadi roh atau ibu seluruh sila Pancasila.

## II. Pembahasan

### Makna Dasar Sila Pertama Pancasila

Indonesia adalah tanah yang subur bagi tumbuhnya agama-agama dunia. Masyarakat Indonesia hakikatnya sangat adaptif, mudah menerima nilai-nilai yang datang dari luar, termasuk nilai-nilai yang dibawa dan atau menjadi keyakinan dasar agama-agama dunia, meski pada saat yang bersamaan tetap meyakini nilai-nilai yang menjadi dasar keyakinan/kepercayaan lokal sendiri. Jika dikaji secara cermat, agama-agama dan keyakinan mempunyai 3 (tiga) tatanan, yaitu yang terkait hubungan manusia dengan: (1) Sang Maha Pencipta -dengan nama apapun Ia disebut dan dalam pengertian apa pun Ia dipahami, (2) Bumi dan alam semesta, serta (3) Sesama manusia itu sendiri. Jika lebih dicermati, terkait poin (2) dan (3) dapat dikatakan agama-agama memiliki banyak kemiripan pandangan dan bahkan mendekati kesamaan absolut. Namun ter-

kait poin (1) tak bisa dipungkiri bahwa setiap agama dan keyakinan memiliki pemahaman yang berbeda. Itulah sebabnya sila pertama Pancasila tidak menyebut, "Tuhan" tetapi "Ketuhanan". Artinya bukan pada pengertian "wujud" atau "sosok", melainkan lebih kepada "sifat" dan "keyakinan adanya kekuatan penentu utama di dalam kehidupan". Bila disebut "Tuhan", niscaya setiap agama -meski ada yang sama pemahamannya, mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan kerancuan karena faktanya memang ada banyak perbedaan.

Menurut penjelasan Bung Hatta, dengan dicantumkannya sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila -yang merupakan dasar negara, setiap aspek penyelenggaraan negara -meski Indonesia bukan negara yang berbasis agama, harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, seperti : membela kebenaran dan menentang kedustaan, membela keadilan dan menentang kezaliman, hidup baik dan senantiasa berupaya memperbaiki kesalahan, hidup jujur dan menjauhi kecurangan, serta hidup lurus suci, menentang/menjauhi segala hal yang kotor.

Sebagai konsekuensi logis dari penerimaan sila pertama tersebut, maka negara dan atau penyelenggara pemerintahan harus dan wajib : (1) Percaya akan kebenaran nilai-nilai universal yang dibawakan agama-agama, (2) Menjaga agar setiap kebijakan negara senafas selaras nilai-nilai Ketuhanan, (3) Memandang dan menghormati setiap warga negara setara tanpa pembedaan, karena mereka sama-sama insan ciptaan Tu-

han, (4) Menjamin kebebasan beragama dan memberikan layanan yang sama kepada setiap umat beragama, apapun agama yang dianutnya, serta (5) Menjaga kerukunan hidup beragama, melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya.

Konsekuensi penerapan sila pertama bagi pribadi-pribadi warga negara tentunya ada, antara lain : (1) Bertakwa kepada Sang Maha Pencipta menurut agama dan keyakinannya, dengan cara hidup lurus dalam Kebajikan, (2) Meninggikan Cinta Kasih Universal (Kemanusiaan), berlaku adil dan beradab, (3) Saling menghargai dan hormat-menghormati antar sesama warga negara tanpa terjebak oleh sentimen keagamaan yang sempit, (4) Saling tolong-menolong, bantu-membantu membangun kerukunan, kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat, (5) Tidak mencampuri dan atau menghina agama dan keyakinan orang lain, (6) Menghormati pilihan tiap individu untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya, (7) Tidak memaksakan pendapatnya -kebenaran menurut versinya kepada penganut agama lain, (8) Bersikap objektif atas setiap permasalahan yang mungkin terjadi di masyarakat dan tidak serta merta membenarkan atau berposisi membela secara membuta pribadi-pribadi yang berasal dari kelompoknya sendiri, dan (9) Bisa bergaul secara luas, akrab, tanpa tersekat oleh perbedaan agama.

## Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Khonghucu

Bagi umat Khonghucu, rumusan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” ataupun “Tuhan Yang

Maha Esa" tidak menjadi masalah karena senafas selaras dengan ajaran dan keyakinan Khonghucu. Bahkan bukan hanya sila pertama saja yang senafas-selaras, melainkan juga menyangkut keseluruhan sila dari Pancasila. Seluruh silanya sangat relevan dengan pandangan Khonghucu. Itulah sebabnya ketika Pancasila dibahas di BPUPK tidak ada penolakan dari Liem Koen Hian - dan juga Oey Tjong Hauw, yang memahami benar ajaran Khonghucu.

Umat Khonghucu meyakini bahwa Tuhan -atau dalam terminologi agama Khonghucu disebut *Tian* -Tuhan Yang Maha Esa, atau *Shangdi* -Tuhan Yang Maha Kuasa (Tinggi) atau *Gui Shen* 'Tuhan Yang Maha Roh-, yang mempunyai sifat: Yuan (Maha Sempurna), *Heng* (Maha Meliputi, Maha Menjalin-Menembusi), *Li* (Maha Kasih, Maha Murah), dan *Zhen* (Maha Kokoh dan Abadi Hukumnya), adalah Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Dilihat tidak terlihat, didengar tiada terdengar, namun tak ada satu wujud pun yang tanpa kehadiran Dia (Zhongyong, XV, 2). Sifat-Nya yang halus tak dapat disembunyikan dari iman kita (Zhongyong, XV, 5). Tiada suara, tiada bau (Zhongyong, XXXII, 6). Tidak dapat ditetapkan dan tidak boleh diperkirakan (Zhongyong, XV, 4). Namun tiada yang lebih nampak dari Yang Tersembunyi dan tiada yang lebih jelas dari Yang Terlembut itu (Zhongyong, Bab Utama, 3). Inilah yang membuat umat manusia tunduk sujud, berdoa dan bersembahyang serta berpuasa kepada-Nya (Zhongyong, XV, 3). Bagi orang yang berdosa, ditegaskan tiada pintu lain untuk memohon ampunan selain kepadaNya (Lunyu,

III, 13.2). Bersembahyang kepada roh yang tidak seharusnya disembah, itulah menjilat (Lunyu, II, 24).

Apa yang disampaikan Bung Hatta ketika menjelaskan makna yang dimaksud sila pertama selaras dengan tiga ajaran utama agama Khonghucu yang ditekankan Nabi Kongzi, Kongfuzi, Khongcu atau Confucius, yaitu: *Zhi* (Kearifbijaksanaan, berwawasan luas, egaliter), *Ren* (Cintakasih universal), *Yong* (Keberanian di atas landasan Kebenaran, Kejujuran, Keadilan, Etika dan Kesusilaan/Kepatutan) (Zhongyong, XIX,8) - yang bila dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dapat membawa manusia tumbuh menjadi insan yang *Xin* atau Dapat Dipercaya secara spiritual, moral dan sosial, atau biasa disebut sebagai seorang *Junzi* -insan beriman dan berbudiluhur, insan kamil. Seorang *Junzi* adalah orang yang berprinsip, bukan alat (Lunyu, II, 12).

Seorang *Junzi* akan hidup selaras dengan nilai-nilai "Delapan Kebajikan" (*Bade*) dan berperilaku: (1) *Xiao* (Berbakti kepada orangtua, yang meluas pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara), (2) *Ti* (Rendah Hati, yang membuatnya tahu diri, tidak mentang-mentang, menghargai orang lain dan suka belajar), (3) *Zhong* (Satya menjalankan amanat dan atau Firman Tuhan), (4) *Xin* (Dapat Dipercaya secara utuh-menyeluruh, lahir-batin), (5) *Li* (taat dan memegang teguh Kesusilaan, etika, aturan, hukum), (6) *Yi* (menjunjung tinggi Kebenaran, Keadilan, Kejujuran), (7) *Lian* (Suci Hati, Tulus-Ikhlas), dan (8) *Che* (Tahu Malu, sehingga membuatnya hidup dalam Kelurusan).

Orang yang benar-benar menjalankan ajaran agama dengan benar, niscaya akan berjalan lurus hidup selaras nilai-nilai Ketuhanan (*Zhi, Ren, Yong* dan *Bade*), sehingga pada akhirnya ia akan dapat teguh menjunjung Kebenaran, Keadilan, Hidup Baik, Jujur dan Lurus (Suci sesuai Firman Tuhan) dan menentang segala perbuatan yang ingkar darinya, yang penuh dusta, tidak adil semena-mena, culas curang, dan bebal tidak mau belajar atau berusaha sungguh-sungguh memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Bersalah tapi tidak mau memperbaiki, inilah kesalahan fatal (Lunyu, XV, 30).

Dengan menerima sila pertama, sebenarnya negara -secara tidak langsung mengakui keberadaan dan Kebenaran nilai-nilai yang dibawakan agama-agama. Entah itu berasal dari kepercayaan lokal, atau datang dari agama-agama yang datang dari luar, terutama yang banyak dianut penduduk Indonesia -Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Bahkan juga dari agama-agama lainnya, seperti: *Tao, Sikh, Baha'i, Shinto, Yahudi,* dan *Zoroaster*. Sikap positif ini selaras-senafas dengan apa yang disabdakan oleh Kongzi sendiri yang intinya mengatakan seorang *Junzi* hidup rukun meski berbeda, *Xiaoren* (orang yang rendah budi, meski mungkin mengaku beriman) tak pernah bisa rukun meskipun sama (Lunyu, XIII, 23). Bahkan bila berbeda *Dao*, Jalan Suci atau agama pun Kongzi menekankan tak perlu (tak ada manfaatnya) saling berdebat (Lunyu, XV, 40), apalagi berbakuhantam saling berebut (Lunyu, III, 7).

Prinsip "Membenarkan Nama-Nama" (Lunyu, XIII, 3) sangat ditekankan, dianjurkan dan dijunjung tinggi oleh Kongzi sendiri. Ia menekankan, orangtua bertindak sebagaimana layaknya orangtua yang bertanggung jawab dan menyayangi anak-anaknya. Anak bersikap sebagaimana layaknya anak, tulus berbakti dan menghormati orangtuanya. Demikian juga pemimpin atau pemerintah. Ia melindungi dan menyayangi rakyatnya. Sementara rakyat menghormati pemimpinnya. Pemimpin seperti Bintang Utara yang menjadi pedoman arah tujuan (Lunyu, II, 1). Kebajikan seorang pemimpin laksana angin. Kebajikan rakyat laksana rumput. Kemana angin bertiup, kesana rumput akan merebah, selaras tiupan angin yang penuh kearifbijaksanaan (Lunyu, XII, 19.2). Maka dalam konteks sila pertama, seluruh rakyat wajib menjalankan amanah suci yang terkandung di dalamnya, sementara pemerintah wajib menjaga agar amanah suci tersebut aman terlaksana dan setiap Kebijakan pemerintah sesuai selaras dengan sila pertama.

Prinsip semua agama adalah memandang dan menyayangi semua manusia sama dan setara. Tidak ada pembedaan atas dasar suku, etnis, agama, adat, budaya, gender, dsb. Di dalam agama Khonghucu sendiri dikenal adanya 6 nabi perempuan dari deretan 30 nabi yang 'masih' tercatat. Kalau pun ada pembedaan "orang besar' (*Junzi*) atau "orang kecil' (*Xiaoren*), semata karena perbuatan dan karakternya dan itu pun tidak melekat selamanya (stigmatif). Kongzi sendiri bahkan menerima seorang yang pernah dipenjara menjadi

suami bagi putrinya dan bagi keponakannya (Lunyu, V, 1-2). Menurutnya, kesalahan yang disadari dan kemudian sungguh-sungguh diperbaiki, itu belum menjadi sebuah Kesalahan. Apalagi bila yang bersangkutan dihukum atas dasar ketidakadilan. Dalam memberi pendidikan pun, Kongzi yang selama hidupnya mempunyai 3.000 murid, tak pernah membeda-bedakan (Lunyu, VII, 7). Baik bangsawan, orang biasa, kaya miskin, terpelajar dan kasar, semua ia terima. Ia tak melihat dari mana mereka datang dan apa yang telah mereka lalukan. Yang dilihat adalah apa yang akan mereka perbuat setelah berlalu (Lunyu, VII, 29.2). Ada pendidikan tiada perbedaan (Lunyu, XV, 39). Inilah sikap yang selaras-senafas dengan sila pertama, yang memandang manusia sederajat setara dan tidak diskriminatif, karena semuanya diyakini merupakan insan Tuhan.

Karena sikapnya yang egaliter, menghormati kesetaraan maka Sang Nabi tidak membeda-bedakan muridnya berdasar latar belakang maupun ikatan darah. Sikapnya terhadap anak kandung dan muridnya sama. Ia memberikan pendidikan dan perhatian yang sama, namun selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kepada yang lambat ia dorong. Kepada yang tergesa, ia tahan (Lunyu, XI, 22.4). Kepada yang tak mau sungguh-sungguh belajar, ia kecewa (Lunyu, XIV, 43). Kepada yang menyengsarakan rakyat tanpa ada itikad baik untuk memperbaiki, ia marah (Lunyu, XI, 17.2).

Selain egaliter, Kongzi juga bersikap bebas, adaftif dan transparan, dalam arti tidak kaku, kuluh dan

mengharuskan (Lunyu, IX, 3-4). Ia hanya menunjukkan batas toleransi mana yang boleh dan tidak boleh, dengan acuan nilai *Bade*. Ia menganjurkan agar pemimpin atau pemerintah memberikan batasan yang jelas pula. Bila perintah atau hukuman diberikan tanpa penjelasan atau pendidikan lebih dulu, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan (Lunyu, XIII, 30).

Pemerintah yang baik diidiomkan sebagai ayah bunda rakyat. Ia melindungi rakyatnya, termasuk melindungi hak-haknya. Kepada yang mampu, didorong dan didukung sampai batas kemampuannya. Kepada yang tidak mampu dan dalam keadaan kekurangan, dibantu dan dilindungi. Perbedaan tidak menjadi masalah dan dipersoalkan, selama dalam batas kewajaran. Prinsipnya berempati dan tidak melakukan apa yang diri sendiri tiada inginkan (Zhongyong, XII, 3). Bahasa awamnya, "Jangan mencubit, kalau tidak mau dicubit". Peraturan hukum dibuat jelas dan terang, namun dalam praktiknya lebih mengutamakan pendidikan (karakter), sehingga orang tahu, mengerti dan memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dibimbing dengan undang-undang dan hukuman rakyat masih berusaha menghindari dan bisa kehilangan harga diri. Dibimbing dengan Kebajikan rakyat tumbuh harga dirinya dan berusaha hidup benar (Lunyu, II, 3).

Tentang sikap takwa kepada Tuhan, Kongzi menjelaskan banyak cara yang bisa ditempuh. Yang termudah berguru pada orang yang memahami kitab suci atau agama. Tapi kesadaran bisa juga muncul dengan sendirinya, termasuk karena pahit-getirnya perjalanan

hidup (Zhongyong, XX, 1). Di samping itu ada orang yang memang terlahir sudah bijaksana (Zhongyong, XIX, 9). Maka baginya yang terpenting adalah perilaku nyata dalam kehidupan. Orang yang hafal mati kitab suci namun dalam hidupnya jauh dari Kebenaran, ia tegas mengatakan orang yang tak bernilai (Lunyu, XIII, 5).

*Dao*, Jalan Suci dan atau agama, bagi Kongzi ukurannya adalah Cinta Kasih Universal. Ukuran *Dao* sangat sederhana. *Dao* niscaya penuh dengan Cinta Kasih. Bila tidak, ia bukan *Dao*. Jika ada *Dao* atau agama yang menjauhi Kemanusiaan, bagi Kongzi tak layak disebut *Dao* dan agama (Zhongyong, XII, 1). Demikian juga bila ada orang yang mengaku beragama namun perbuatannya jauh dari Kemanusiaan, ia tidak layak mengaku sebagai orang yang benar-benar berjalan lurus selaras agamanya. Ditegaskan bahwa bagi seorang *Junzi*, Cinta Kasih selalu melekat dengan perilakunya (Lunyu, IV, 5.3).

Bagi seorang *Junzi*, di empat penjuru samudera semuanya saudara (Lunyu, XII, 5), tidak tersekat dan terkotak oleh ikatan primordial. Ukurannya Kebajikan. Bukan saja dianjurkan Tepasalira, saling menenggang dan berempati, melainkan juga dianjurkan untuk saling mendukung. Bila kita ingin tegak dan maju, kita perlu membantu orang lain tegak dan maju pula (Lunyu, VI, 30.3). Bila kita untung sendiri, niscaya akan menimbulkan kecemburuan yang justru berpotensi membahayakan.

Dengan saling hormat-menghormati, saling meng-

hargai, tolong-menolong tanpa dibatasi oleh sekat pembeda, akan tumbuh masyarakat yang rukun damai, yang dilandasi kehidupan keluarga-keluarga sejahtera, yang ditamsilkan seperti alat musik yang ditabuh harmonis (Zhongyong XIV, 2). Masyarakat yang Pancasilais, yang utamanya menjunjung sila pertama, yang bermuatan nilai-nilai Ketuhanan, seyogyanya mampu mewujud seperti lukisan indah warna-warni di atas dasar warna putih, warna ketulus-ikhlasan (Lunyu, III, 8).

Sikap seorang *Junzi* seperti pemanah yang bijak. Bila anak panahnya luput mengenai sasaran ia tidak mengeluhkan angin yang bertiup, tali gendewa yang terlalu kendor, gendewa yang tidak stabil, dsb. Ia akan lebih tekun melatih diri, mengambil pelajaran dari kegagalan (Zhongyong, XIII, 5). Jika ia jalan bertiga, niscaya ada yang bisa dijadikan guru. Yang baik akan ditiru, bila ada yang kurang baik seorang *Junzi* akan melakukan introspeksi (Lunyu, VII, 22). Pendeknya seorang *Junzi* tekun membina diri, tidak tertarik dan tidak mau membicarakan aib orang lain (Lunyu, XII, 16). Apalagi menjelekkan agama lain, yang disebut Kongzi sendiri sebagai *Dao* juga (Lunyu, XVII, 24). Sebagai konsekuensi sikap menghormati *Dao* atau agama lain, dan selaras dengan sikap tidak suka melakukan sesuatu yang diri sendiri tidak sukai, tentunya *Junzi* akan menghormati pilihan orang lain, tidak ikut campur (Lunyu, XIV, 26), apalagi memaksakan kehendak.

Dalam berbagai kesempatan Kongzi menganjurkan agar kita tidak mudah percaya begitu saja, gampang dihasut, diadu-domba, melainkan harus meneliti hakikat

setiap perkara, utuh melihat permasalahan, bukan saja dari awal sebuah peristiwa sampai akhir, tetapi bahkan sampai inti persoalan. Melihat sendiri belum dianggap cukup kalau tidak lengkap, apalagi cuma melihat sepotong (Daxue, Bab Utama, 3-4).

Soal pergaulan, persahabatan, yang menjadi tolok ukur bukanlah kesamaan primordial, namun adalah karakter dan watak baik. Bagi generasi muda yang secara usia belum matang dan mudah terpengaruh, Kongzi menganjurkan hati-hati dalam memilih teman. Namun bagi yang sudah matang dan teguh berprinsip, Kongzi tidak membatasi. Baginya agama bukan pembatas. Seorang *Junzi* mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok (Lunyu, II, 14). Pengetahuan kitab justru dimanfaatkan untuk kebaikan, memupuk tali persahabatan dan dengan persahabatan mengembangan Kebajikan (Lunyu, XII, 24).

Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa pandangan Khonghucu tentang sila pertama Pancasila -dan keempat sila lainnya, senada-seirama dengan pandangan Hatta, dan juga “Butir-Butir Pancasila” yang didasarkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978.

## Mana yang Harus Menjadi Pegangan?

Sering orang mencampuradukkan antara kehidupan sebagai pribadi dan sebagai warga negara sehingga acapkali terjadi kebingungan atau kerancuan. Karena merasa yakin bahwa kitab suci berasal dari Tuhan, kadang orang lebih mendahulukan kitab suci ketimbang peraturan perundang-undangan atau konstitusi.

Padahal yang ia hadapi bukan urusan pribadi sebagai manusia dengan Tuhannya tapi terkait hubungannya dengan negara. Contoh, urusan sembahyang caranya bagaimana, kapan, hal itu bergantung pada keyakinan masing-masing. Pegangannya jelas, kitab suci atau tata agama. Tetapi kalau cara itu mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu tetangga, tentu akan berhadapan dengan kepentingan orang lain. Kalau ini terjadi, tentu harus berpegang pada peraturan lingkungan setempat atau bahkan peraturan negara. Kalau pegangannya kitab suci masing-masing, tentu menjadi rumit. Disini orang harus memahami, kapan harus berpegang pada Tata Agama atau Kitab Suci, dan kapan berpegang pada peraturan yang berlaku yang didasarkan konstitusi.

Dalam diri setiap orang mempunyai peran yang cukup banyak. Semakin terkenal dan punya jabatan tinggi, perannya semakin banyak. Multi peran. Contoh, peran sebagai pribadi insan Tuhan, anak dari sebuah keluarga, menantu dari keluarga pasangan, orangtua dari anaknya, warga dari sebuah RT, RW, perkumpulan tertentu, warganegara, dsb. Peran yang banyak itu, mempunyai pegangan dan aturan berbeda. Sebagai insan Tuhan dan umat sebuah agama, pegangannya tentu kitab suci tertentu. Menjadi karyawan sebuah perusahaan tentu terikat dengan peraturan perusahaan. Jadi anggota sebuah organisasi tentu terikat AD-ART. Demikian juga sebagai warga negara, tentu terikat pada konstitusi dan perundangan di bawahnya.

Jadi mana yang seharusnya jadi pegangan? Jawab-

nya tergantung pada peran apa yang saat itu sedang kita jalankan. Jangan terbalik-balik menggunakan kitab suci untuk urusan lingkungan tetangga, atau menerapkan konstitusi untuk mengurus hubungan keluarga, dsb.

### Sosialisasi dan Keteladanan: Mana Dahulu, Mana Kemudian?

Agama-agama telah hadir ratusan bahkan ribuan tahun di bumi manusia. Semuanya mengklaim dan menyatakan bertujuan baik. Namun dalam banyak kesempatan agama-agama seolah tampil bukan sebagai solusi melainkan menjadi sumber masalah baru. Akibatnya banyak yang kecewa dan mulai mempertanyakan kesucian agama itu sendiri.

Apa yang menimpa agama-agama itu juga menimpa Pancasila. Sering orang skeptis dan mulai ragu terhadap Pancasila dan mulai mempertanyakan manfaatnya. Ini tidak bisa disalahkan begitu saja tatkala orang-orang mengalami ketidakadilan, ketimpangan sosial, perilaku pimpinan di semua level yang tidak sepantasnya, resah melihat retaknya persatuan, gundah melihat maraknya tindakan dan perbuatan yang jauh dari nilai-nilai luhur kemanusiaan, sampai maraknya kekerasan dan terorisme dalam berbagai skala yang seakan bernafaskan agama.

Khusus terkait sila pertama masyarakat banyak melihat penyimpangan di lapangan, betapa kehidupan kita masih jauh dari spirit dan semangat yang ditunjukkan sila pertama. Mulai dari penolakan pendirian tempat

ibadah di berbagai tempat, masih adanya perusakan rumah ibadat, kekerasan dan persekusi yang mengatasnamakan agama, orang tidak mau menghormati simbol negara dengan alasan agama, dsb. Pendeknya masih jauh panggang dari api. Orang bijak mengatakan, “Saya baca, saya tahu. Saya menyaksikan, saya percaya”. Kini kalimatnya seakan bergeser menjadi, “Saya baca, saya ragu. Saya menyaksikan, saya makin tidak percaya dengan apa yang saya baca”. Semoga rasa skeptis terhadap Pancasila dan agama akan hilang terobati oleh perubahan perilaku orang-orang yang seharusnya justru menjadi teladan atau panutan.

Jadi kembali pada pertanyaan, “Mana dulu, mana kemudian” yang menjadi judul sub bab ini, jawabnya adalah kita membutuhkan sosialisasi nilai Pancasila yang konsisten, terus-menerus sejak usia dini. Namun sosialisasi tanpa ada keteladanan nyata dari para pimpinan yang karena posisinya harus menjadi teladan, akan sia-sia lenyap tak berbekas. Keduanya harus bisa berjalan seiring berbarengan, konsisten dan terus-menerus pula, sehingga akhirnya akan menjadi kebiasaan dan budaya.

## Kesimpulan

Melintas sejarah perjuangan bangsa dan pergulatan budaya manusia Indonesia, serta menghayati apa yang dipaparkan di muka, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” - untuk tidak mengatakan sebagai sila terpenting, merupakan roh

dari sila-sila lain Pancasila. Tanpa kesepakatan sila pertama, mustahil terwujud "Persatuan Indonesia". Tanpa sila ketiga tak mungkin tercapai apa yang digambarkan sila keempat. Tanpa sila keempat sungguh sulit mencapai cita-cita yang disebutkan dalam sila kelima dan kedua.

2. Pilihan kata "Ketuhanan" dibanding "Tuhan" adalah pilihan yang bijaksana, mempunyai cakupan yang lebih luas dan lentur, sehingga bisa diterima semua unsur agama-agama dan keyakinan yang memang mempunyai pemahaman berbeda mengenai Tuhan.

3. Meski konsep Tuhan masing-masing agama dan keyakinan berbeda-beda, tetapi semua agama sepakat akan nilai-nilai Ketuhanan yang universal terkait kebaikan, kebenaran, kesetaraan, keadilan, kejujuran, dan kelurusan (kesucian). Disini agama-agama seolah menemukan ruang/titik temu, kebersamaan dan kesepemahaman.

4. Perspektif agama Khonghucu tentang sila pertama Pancasila dan bahkan keseluruhan sila-sila Pancasila, tidak saja sepakat atau menyetujui, melainkan lebih dari itu selaras, senafas dan sejiwa dengan Pancasila itu sendiri. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa seorang Khonghucuis sejati pada waktu bersamaan sejatinya akan menjadi seorang Pancasilais murni. Demikian sebaliknya. Mereka yang mampu hidup dalam amalan Pancasila, pada saat yang bersamaan sekaligus bisa disebut seorang *Junzi* atau manusia ideal versi Khonghucu.

5. Ajaran agama - dalam porsi yang pas sangat baik bagi pembangunan karakter pribadi orang per orang. Pancasila dalam formula yang tepat sangat penting bagi penciptaan warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Alangkah idealnya bila sejak pendidikan dasar ada semacam perpaduan penanaman atau pendidikan nilai agama dan Pancasila dalam satu paket. Darinya diharapkan akan melahirkan manusia Indonesia yang patrotik, religius, berbudi pekerti luhur dan tangguh secara mental, moral, spiritual sekaligus.

6. Penanaman ideologi adalah bagian penting dalam kehidupan bernegara, tetapi tidak mudah dan tidak bisa instan. Sebagai Badan yang ditugasi melakukan pembinaan ideologi, alangkah ideal bila BPIP merancang sistem pendidikan warga negara sejak usia dini, bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan formal dan non formal, termasuk tokoh atau majelis agama-agama, masyarakat adat dan budayawan.

7. Urusan ideologi adalah tanggung jawab semua unsur masyarakat, bukan hanya sebatas urusan pemerintah. Ada baiknya sebagai Badan yang diberi tanggung jawab mengelola ideologi negara BPIP mengajak serta seluruh unsur masyarakat yang kehadirannya merefleksikan keterwakilan semua unsur-unsur yang ada.

8. Penanaman ideologi Pancasila, terutama sila pertama perlu dikemas dalam format modern yang sen-

afas selaras dengan jiwa generasi milineal, bukan dalam doktrin kaku, melainkan dalam bentuk cerita kehidupan nyata sehari-hari di lingkup keluarga, ruang sekolah, ruang kerja dan masyarakat luas, Pemerannya adalah mereka sendiri. Lebih baik lagi bila mereka bisa menjumpai contoh nyatanya dalam perilaku tokoh masyarakat.

## III. Penutup

Semua Jalan Suci, agama, menunjukkan, mengajarkan dan meninggikan Cinta Kasih, khususnya kepada umat manusia, tanpa dibatasi oleh suku, etnis, agama dan berbagai bentuk ikatan primordial lainnya. Dengan kata lain, agama, tanpa terkecuali, meninggikan Kemanusiaan. Bila ada agama dan atau perilaku umat beragama yang bertentangan dengan Cinta Kasih, jelas menyimpang dari pesan suci yang dibawakan agama.

## Referensi

------------, SAK TH. XXVIII no. 2/3: Riwayat Hidup Nabi Khongcu. MATAKIN

Himpunan Risalah Sidang BPUPK (29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan PPKI (18 dan 19 Agustus 1945)

Latif, Yudi. 2014. Mata Air Keteladanan –Pancasila dalam Perbuatan-. Jakarta: Mizan.

MATAKIN. 2016. Si Shu (Kitab Yang Empat) Kitab Suci Agama Khonghucu. Jakarta: Kementerian Agama RI.

MATAKIN. 2017. Kitab Suci Li Ji, Catatan Kesusilaan.

Jakarta: Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI,

MATAKIN. 2017. Kitab Suci Su King/Shu Jing. Jakarta: Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.

MATAKIN. 2017. Kitab Suci Yak King. Jakarta: Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.

Setiawan, Boenyamin; Tanuwibowo, Budi S; Nugroho, Edi, dkk. Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1988. Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka.

Tanuwibowo, Budi S. 2009. Bertambah Bijak Setiap Hari, 8x3=23. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tanuwibowo, Budi S. 2010. Bertambah Bijak Setiap Hari, 5 Matahari. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tanuwibowo, Budi S. 2011. Bertambah Bijak Setiap Hari, Tuhan Sudah Pindah Alamat? Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tanuwibowo, Budi S. 2015. Berani tidak Populer. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tjhie Tjay Ing. 2006. Panduan Pengajaran Dasar Agama Khonghucu (edisi ke- 2). Solo: MATAKIN.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (versi amandemen).

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

# KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF AGAMA KHONGHUCU

*Budi Santoso Tanuwibowo*[*]

## I. Pendahuluan

### Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia dijajah oleh Jepang sejak 8 Maret 1942 - saat Belanda menyerah pada Jepang, sampai 15 Agustus 1945 - saat Jepang menyerah pada Sekutu. Sehingga jika dihitung maka masa penjajahan tersebut terjadi sekitar 3 tahun 129 hari atau kurang dari 3,5 tahun. Sedangkan masa penjajahan Belanda di Indonesia terdapat berbagai versi. Versi umum yang sering disebutkan adalah 3,5 abad. Dasar perhitungannya sejak Cornelis de Houtman mendarat di Banten 22 Juni 1596. Padahal waktu itu kehadirannya untuk berdagang dan ditolak oleh penguasa Banten. Baru sekitar Mei 1598 kehadiran pedagang Belanda yang dipimpin Jacob van Neck, van Heemskerck, dan van Waerwjick berhasil mengambil simpati dan diterima penguasa Banten dan diperbolehkan berdagang.

Ketika VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*, Pe-

[*] Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia—MATAKIN.

rusahaan Hindia Timur Belanda) didirikan 20 Maret 1602 sampai kemudian dibubarkan 31 Desember 1799 karena terjerat korupsi, motifnya pun hanya berdagang dengan para Sultan dan Raja di Nusantara, meski mereka diberi otoritas oleh pemerintah Belanda untuk berperang demi menguasai monopoli perdagangan. Namun saat itu wilayah Nusantara masih dalam kekuasaan para Sultan dan Raja di masing-masing wilayah. Jadi dapat dikatakan sampai 1799 'belum' ada penjajahan.

Setelah VOC dibubarkan dan diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda, praktis sejak 1800 'mulai' ada penjajahan. Meski demikian prosesnya tidak serentak mampu menguasai seluruh wilayah Nusantara. Perang demi perang terjadi dimana-mana di seluruh Nusantara, diantaranya Perang: Padri, Pattimura, Diponegoro, Antasari dan Aceh. Melalui perang yang panjang, berat dan menyeluruh di seluruh Nusantara, barulah pada tahun 1912 Belanda bisa berkuasa penuh menjajah seluruh wilayah Nusantara, di luar Timor Timur yang dikuasai Portugis, Kalimantan Utara, Semenanjung Malaya, dan Singapura yang dikuasai Inggris, serta Papua bagian Timur (Papua Nugini).

Dari uraian di atas apakah dapat dikatakan Indonesia dijajah Belanda sejak tahun 1800 atau 1912? Jawabannya tentu tergantung dari perspektif mana yang digunakan. Soal nama Indonesia sendiri saja baru dikenal dan dipopulerkan oleh James Richarson Logan dan George Samuel Windsor Earl tahun 1850 di *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA), kemudian dipopulerkan etnolog Jerman, Adolf Bastian

pada 1884, dan baru digunakan secara nasional pada Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, yang sekaligus merupakan ikrar pengakuan tentang ke-Indonesiaan.

Berapa lama dan sejak kapan Indonesia dijajah dapat diperdebatkan, namun yang jelas awal abad 19 mulai muncul kesadaran tentang perlu dan pentingnya persatuan agar bisa lepas dari belenggu penjajahan. Tanpa persatuan yang kokoh, nasib perjuangan berikutnya diperkirakan akan berakhir tragis mengalami kegagalan, bernasib sama seperti nasib perjuangan-perjuangan terdahulu.

**Mengapa Pancasila?**

Setelah muncul kesadaran untuk bersatu, seperti yang diikrarkan dalam Soempah Pemoeda, yang isinya mengaku bertanah air satu -tanah air Indonesia, berbangsa satu -bangsa Indonesia, serta sepakat untuk menggunakan bahasa persatuan -bahasa Indonesia, persoalannya tentu belum langsung selesai begitu saja. Ada hal-hal mendasar yang harus dipikirkan untuk mengikat kesadaran tersebut menjadi kebersamaan yang kokoh kuat, yang tidak mudah dipisahkan dan digoyahkan.

Sejak Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh -praktis sampai kedatangan Belanda, wilayah Nusantara terpecah- pecah dalam kekuasaan kesultanan atau kerajaan kecil yang tidak terikat dalam satu kesatuan. Ini sebabnya VOC dan kemudian Belanda mudah berkuasa. Para pejuang bangsa menyadari hal ini. Namun hanya berikrar tentu

tidaklah cukup. Menyatukan bangsa yang besar, tinggal di wilayah yang sangat luas, dengan aneka perbedaan kepentingan, suku, etnis, adat, budaya, bahasa, agama, keyakinan, kepentingan eks kerajaan dan kesultanan, dll tentu tidak mudah. Inilah PR besar dari para pejuang bangsa untuk mencari formula yang tepat, yang bisa digunakan sebagai sebuah pegangan dasar yang bisa diterima secara luas bersama-sama.

Beruntung para pejuang leluhur Indonesia pada waktu itu -terutama Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan Soepomo- mempunyai wawasan dan kearifan luar biasa. Mereka semua saling berdebat, berargumen mendiskusikan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita pendirian negara sampai akhirnya lahir kesepakatan dasar bersama dalam wujud Pancasila, bentuk dan wilayah negara, warga negara, bahasa, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mengapa Pancasila? Karena ada 5 (lima) dasar kesepakatan (sila). Dan mengapa harus ada 5 (lima) sila? Karena kelima sila itu telah ada, hidup dan mengakar dalam perilaku kehidupan masyarakat leluhur bangsa. Sesuatu nilai yang hidup, asli, nyata, dan sekaligus telah lama diterima tentunya lebih mudah disepakati. Apalagi nilai tersebut selaras senafas dengan nilai-nilai agama.

Ketika Pancasila diuraikan oleh Bung Karno, Mohammad Yamin dan Soepomo di hadapan Sidang BPUPK yang terdiri atas cendekia dari berbagai etnis dan agama - termasuk para tokoh komunitas Arab dan

Tionghoa, seperti AR Baswedan, Liem Koen Hian, Oey Tjong Houw, Oey Tiang Tjoei dan Tan Eng Hoa, semuanya sepakat menerima Pancasila secara mufakat sebagai alat perekat perjuangan bersama, titik temu, dasar negara, cita-cita, falsafah, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Meski ada sedikit perdebatan serius soal isi sila pertama, terkait tujuh kata yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," akhirnya berkat kebesaran jiwa para tokoh Islam, ketujuh kata tersebut sepakat untuk dihilangkan.

## Mana Yang Menjadi Poin Paling Krusial?

Jika dicermati bersama sila-sila dalam Pancasila, dengan cepat dapat diketahui bahwa sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menjabarkan tujuan bernegara. Sebagian besar orang -untuk tidak mengatakan semua, seluruhnya, pastilah menyetujui terbentuknya sebuah negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Kalau pun ada yang tidak setuju, pastilah datang dari mereka yang menikmati keuntungan atas adanya ketidakadilan. Dengan demikian sila ini merupakan sila penting yang tak banyak diperdebatkan.

Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, selain menjadi nilai dasar yang didambakan sebagian besar umat manusia - kecuali bagi mereka yang hidupnya memang menari di atas penderitaan manusia lain, bisa juga dikatakan sebagai bagian dari tujuan hidup bernegara yang kita dambakan, yaitu: "ikut serta menjaga ketertiban dunia....". Kata dasar "adil" yang dua kali disebut dalam sila kedua dan kelima mene-

gaskan pentingnya keadilan atau adil dalam penyelenggaraan negara, yang tentunya menjadi dambaan wajar bagi setiap orang yang sadar pentingnya kebersamaan, kesetaraan, keadilan, meritokrasi, dan transparansi.

Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menggambarkan sistem pemerintahan yang kita inginkan. Bukan sistem kerajaan atau kesultanan seperti yang dibangun dipraktikkan oleh para leluhur kita, melainkan sistem republik yang diharapkan mampu menyerap dan mendengarkan aspirasi rakyat secara musyawarah. Tidak menisbikan yang kecil, tidak mengagungkan yang besar. Semuanya diapresiasi, diberi tempat dan perhatian selayaknya. Pilihan teks sila keempat ini membuktikan kearifan para tokoh pendiri bangsa. Bayangkan bila sila keempat ini menunjuk sistem kerajaan. Jangan-jangan belum apa-apa cita-cita kemerdekaan kita sudah kandas di tengah jalan karena terbentur kerumitan siapa yang nantinya akan dipilih/diangkat menjadi raja atau sultan, bagaimana mekanismenya, sementara pada masa pra kemerdekaan, Indonesia mempunyai banyak raja atau sultan di seluruh wilayah Nusantara.

Untuk mewujudkan sila kelima dan sila kedua, tentunya membutuhkan negara atau pemerintahan. Namun tidak mungkin akan terbentuk negara bila tak ada wilayah dan rakyat. Banyak pilihan yang dibahas mengenai wilayah negara di sidang BPUPK, termasuk kemungkinan memasukkan wilayah Semenanjung Melayu, Singapura, Sabah, Sawarak dan Timor Timur (Timor Leste sekarang). Namun akhirnya disepakati wilayah

Indonesia sama dengan *eks* wilayah penjajahan Belanda. Dengan demikian orang yang mendiami wilayah tersebut mempunyai hak menjadi warganegara, kecuali menyatakan menolaknya.

Faktor apa yang menyatukan? Persamaan nasib sama-sama mengalami penjajahan yang sama, serta pengalaman sejarah dan kesepakatan akan masa depan. Bukan faktor kesamaan suku, etnis, budaya, agama, dan bahasa yang bhinneka atau berbeda-beda. Pengalaman perjuangan kedaerahan atau kesukuan yang berkali-kali mengalami kegagalan juga memberikan kesadaran tentang pentingnya persatuan. Inilah yang menjadi inti pesan sila ketiga Pancasila.

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah sila penting yang menjadi roh dari Pancasila. Jika dilihat dari uraian di atas menjadi jelas bahwa sebagai bangsa terjajah kita ingin merdeka, agar bisa hidup dalam masyarakat yang adil dan sejahtera, saling menghormati atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Untuk mencapai cita-cita mulia itu kita perlu membangun negara dan pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan hasil musyawarah bersama, artinya membutuhkan persatuan yang kokoh. Persatuan bisa terwujud karena ada kesamaan nasib dan kesamaan tujuan. Namun ke depannya bagaimana? Apa bisa terjamin tetap langgeng abadi? Ini tentu membutuhkan kesepakatan dasar yang menjamin kepentingan dasar semua unsur. Dan harus diakui bahwa faktor perbedaan keyakinan, agama, lebih mudah menjadi faktor pemecah -bila tak terakomodir dengan baik, ketimbang

faktor primordial yang lain. Di sini sila pertama Pancasila berperan menjadi roh pemersatu bangsa Indonesia, terbukti ketika rumusannya pernah mengandung tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sempat akan menimbulkan perpecahan dini, terutama adanya penolakan dari warga Indonesia bagian Timur. Menyimak uraian di atas tak berlebihan bila dikatakan bahwa sila pertama merupakan sila paling krusial yang menjadi roh atau ibu seluruh sila Pancasila.

## II. Pembahasan

### Makna Dasar Sila Pertama Pancasila

Indonesia adalah tanah yang subur bagi tumbuhnya agama-agama dunia. Masyarakat Indonesia hakikatnya sangat adaptif, mudah menerima nilai-nilai yang datang dari luar, termasuk nilai-nilai yang dibawa dan atau menjadi keyakinan dasar agama-agama dunia, meski pada saat yang bersamaan tetap meyakini nilai-nilai yang menjadi dasar keyakinan/kepercayaan lokal sendiri. Jika dikaji secara cermat, agama-agama dan keyakinan mempunyai 3 (tiga) tatanan, yaitu yang terkait hubungan manusia dengan: (1) Sang Maha Pencipta -dengan nama apapun Ia disebut dan dalam pengertian apa pun Ia dipahami, (2) Bumi dan alam semesta, serta (3) Sesama manusia itu sendiri. Jika lebih dicermati, terkait poin (2) dan (3) dapat dikatakan agama-agama memiliki banyak kemiripan pandangan dan bahkan mendekati kesamaan absolut. Namun terkait poin (1) tak bisa dipungkiri bahwa setiap agama

dan keyakinan memiliki pemahaman yang berbeda. Itulah sebabnya sila pertama Pancasila tidak menyebut, "Tuhan" tetapi "Ketuhanan". Artinya bukan pada pengertian "wujud" atau "sosok", melainkan lebih kepada "sifat" dan "keyakinan adanya kekuatan penentu utama di dalam kehidupan". Bila disebut "Tuhan", niscaya setiap agama -meski ada yang sama pemahamannya, mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan kerancuan karena faktanya memang ada banyak perbedaan.

Menurut penjelasan Bung Hatta, dengan dicantumkannya sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila -yang merupakan dasar negara, setiap aspek penyelenggaraan negara -meski Indonesia bukan negara yang berbasis agama, harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, seperti : membela kebenaran dan menentang kedustaan, membela keadilan dan menentang kezaliman, hidup baik dan senantiasa berupaya memperbaiki kesalahan, hidup jujur dan menjauhi kecurangan, serta hidup lurus suci, menentang/menjauhi segala hal yang kotor.

Sebagai konsekuensi logis dari penerimaan sila pertama tersebut, maka negara dan atau penyelenggara pemerintahan harus dan wajib : (1) Percaya akan kebenaran nilai-nilai universal yang dibawakan agama-agama, (2) Menjaga agar setiap kebijakan negara senafas selaras nilai-nilai Ketuhanan, (3) Memandang dan menghormati setiap warga negara setara tanpa pembedaan, karena mereka sama-sama insan ciptaan Tuhan, (4) Menjamin kebebasan beragama dan memberi-

kan layanan yang sama kepada setiap umat beragama, apapun agama yang dianutnya, serta (5) Menjaga kerukunan hidup beragama, melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya.

Konsekuensi penerapan sila pertama bagi pribadi-pribadi warga negara tentunya ada, antara lain : (1) Bertakwa kepada Sang Maha Pencipta menurut agama dan keyakinannya, dengan cara hidup lurus dalam Kebajikan, (2) Meninggikan Cinta Kasih Universal (Kemanusiaan), berlaku adil dan beradab, (3) Saling menghargai dan hormat-menghormati antar sesama warga negara tanpa terjebak oleh sentimen keagamaan yang sempit, (4) Saling tolong-menolong, bantu-membantu membangun kerukunan, kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat, (5) Tidak mencampuri dan atau menghina agama dan keyakinan orang lain, (6) Menghormati pilihan tiap individu untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya, (7) Tidak memaksakan pendapatnya -kebenaran menurut versinya kepada penganut agama lain, (8) Bersikap objektif atas setiap permasalahan yang mungkin terjadi di masyarakat dan tidak serta merta membenarkan atau berposisi membela secara membuta pribadi-pribadi yang berasal dari kelompoknya sendiri, dan (9) Bisa bergaul secara luas, akrab, tanpa tersekat oleh perbedaan agama.

## Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Khonghucu

Bagi umat Khonghucu, rumusan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” ataupun “Tuhan Yang Maha Esa” tidak menjadi masalah karena senafas se-

laras dengan ajaran dan keyakinan Khonghucu. Bahkan bukan hanya sila pertama saja yang senafas-selaras, melainkan juga menyangkut keseluruhan sila dari Pancasila. Seluruh silanya sangat relevan dengan pandangan Khonghucu. Itulah sebabnya ketika Pancasila dibahas di BPUPK tidak ada penolakan dari Liem Koen Hian - dan juga Oey Tjong Hauw, yang memahami benar ajaran Khonghucu.

Umat Khonghucu meyakini bahwa Tuhan -atau dalam terminologi agama Khonghucu disebut *Tian* -Tuhan Yang Maha Esa, atau *Shangdi* -Tuhan Yang Maha Kuasa (Tinggi) atau *Gui Shen* 'Tuhan Yang Maha Roh-, yang mempunyai sifat: Yuan (Maha Sempurna), *Heng* (Maha Meliputi, Maha Menjalin-Menembusi), *Li* (Maha Kasih, Maha Murah), dan *Zhen* (Maha Kokoh dan Abadi Hukumnya), adalah Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Dilihat tidak terlihat, didengar tiada terdengar, namun tak ada satu wujud pun yang tanpa kehadiran Dia (Zhongyong, XV, 2). Sifat-Nya yang halus tak dapat disembunyikan dari iman kita (Zhongyong, XV, 5). Tiada suara, tiada bau (Zhongyong, XXXII, 6). Tidak dapat ditetapkan dan tidak boleh diperkirakan (Zhongyong, XV, 4). Namun tiada yang lebih nampak dari Yang Tersembunyi dan tiada yang lebih jelas dari Yang Terlembut itu (Zhongyong, Bab Utama, 3). Inilah yang membuat umat manusia tunduk sujud, berdoa dan bersembahyang serta berpuasa kepada-Nya (Zhongyong, XV, 3). Bagi orang yang berdosa, ditegaskan tiada pintu lain untuk memohon ampunan selain kepadaNya (Lunyu, III, 13.2). Bersembahyang kepada roh yang tidak seha-

rusnya disembah, itulah menjilat (Lunyu, II, 24).

Apa yang disampaikan Bung Hatta ketika menjelaskan makna yang dimaksud sila pertama selaras dengan tiga ajaran utama agama Khonghucu yang ditekankan Nabi Kongzi, Kongfuzi, Khongcu atau Confucius, yaitu: *Zhi* (Kearifbijaksanaan, berwawasan luas, egaliter), *Ren* (Cintakasih universal), *Yong* (Keberanian di atas landasan Kebenaran, Kejujuran, Keadilan, Etika dan Kesusilaan/Kepatutan) (Zhongyong, XIX,8) - yang bila dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dapat membawa manusia tumbuh menjadi insan yang *Xin* atau Dapat Dipercaya secara spiritual, moral dan sosial, atau biasa disebut sebagai seorang *Junzi* -insan beriman dan berbudiluhur, insan kamil. Seorang *Junzi* adalah orang yang berprinsip, bukan alat (Lunyu, II, 12).

Seorang *Junzi* akan hidup selaras dengan nilai-nilai "Delapan Kebajikan" (*Bade*) dan berperilaku: (1) *Xiao* (Berbakti kepada orangtua, yang meluas pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara), (2) *Ti* (Rendah Hati, yang membuatnya tahu diri, tidak mentang-mentang, menghargai orang lain dan suka belajar), (3) *Zhong* (Satya menjalankan amanat dan atau Firman Tuhan), (4) *Xin* (Dapat Dipercaya secara utuh-menyeluruh, lahir-batin), (5) *Li* (taat dan memegang teguh Kesusilaan, etika, aturan, hukum), (6) *Yi* (menjunjung tinggi Kebenaran, Keadilan, Kejujuran), (7) *Lian* (Suci Hati, Tulus-Ikhlas), dan (8) *Che* (Tahu Malu, sehingga membuatnya hidup dalam Kelurusan).

Orang yang benar-benar menjalankan ajaran agama

dengan benar, niscaya akan berjalan lurus hidup selaras nilai-nilai Ketuhanan (*Zhi, Ren, Yong* dan *Bade*), sehingga pada akhirnya ia akan dapat teguh menjunjung Kebenaran, Keadilan, Hidup Baik, Jujur dan Lurus (Suci sesuai Firman Tuhan) dan menentang segala perbuatan yang ingkar darinya, yang penuh dusta, tidak adil semena-mena, culas curang, dan bebal tidak mau belajar atau berusaha sungguh-sungguh memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Bersalah tapi tidak mau memperbaiki, inilah kesalahan fatal (Lunyu, XV, 30).

Dengan menerima sila pertama, sebenarnya negara -secara tidak langsung mengakui keberadaan dan Kebenaran nilai-nilai yang dibawakan agama-agama. Entah itu berasal dari kepercayaan lokal, atau datang dari agama-agama yang datang dari luar, terutama yang banyak dianut penduduk Indonesia -Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Bahkan juga dari agama-agama lainnya, seperti: *Tao, Sikh, Baha'i, Shinto, Yahudi,* dan *Zoroaster*. Sikap positif ini selaras-senafas dengan apa yang disabdakan oleh Kongzi sendiri yang intinya mengatakan seorang *Junzi* hidup rukun meski berbeda, *Xiaoren* (orang yang rendah budi, meski mungkin mengaku beriman) tak pernah bisa rukun meskipun sama (Lunyu, XIII, 23). Bahkan bila berbeda *Dao*, Jalan Suci atau agama pun Kongzi menekankan tak perlu (tak ada manfaatnya) saling berdebat (Lunyu, XV, 40), apalagi berbakuhantam saling berebut (Lunyu, III, 7).

Prinsip "Membenarkan Nama-Nama" (Lunyu, XIII,

3) sangat ditekankan, dianjurkan dan dijunjung tinggi oleh Kongzi sendiri. Ia menekankan, orangtua bertindak sebagaimana layaknya orangtua yang bertanggung jawab dan menyayangi anak-anaknya. Anak bersikap sebagaimana layaknya anak, tulus berbakti dan menghormati orangtuanya. Demikian juga pemimpin atau pemerintah. Ia melindungi dan menyayangi rakyatnya. Sementara rakyat menghormati pemimpinnya. Pemimpin seperti Bintang Utara yang menjadi pedoman arah tujuan (Lunyu, II, 1). Kebajikan seorang pemimpin laksana angin. Kebajikan rakyat laksana rumput. Kemana angin bertiup, kesana rumput akan merebah, selaras tiupan angin yang penuh kearifbijaksanaan (Lunyu, XII, 19.2). Maka dalam konteks sila pertama, seluruh rakyat wajib menjalankan amanah suci yang terkandung di dalamnya, sementara pemerintah wajib menjaga agar amanah suci tersebut aman terlaksana dan setiap Kebijakan pemerintah sesuai selaras dengan sila pertama.

Prinsip semua agama adalah memandang dan menyayangi semua manusia sama dan setara. Tidak ada pembedaan atas dasar suku, etnis, agama, adat, budaya, gender, dsb. Di dalam agama Khonghucu sendiri dikenal adanya 6 nabi perempuan dari deretan 30 nabi yang 'masih' tercatat. Kalau pun ada pembedaan "orang besar' (*Junzi*) atau "orang kecil' (*Xiaoren*), semata karena perbuatan dan karakternya dan itu pun tidak melekat selamanya (stigmatif). Kongzi sendiri bahkan menerima seorang yang pernah dipenjara menjadi suami bagi putrinya dan bagi keponakannya (Lunyu, V,

1-2). Menurutnya, kesalahan yang disadari dan kemudian sungguh-sungguh diperbaiki, itu belum menjadi sebuah Kesalahan. Apalagi bila yang bersangkutan dihukum atas dasar ketidakadilan. Dalam memberi pendidikan pun, Kongzi yang selama hidupnya mempunyai 3.000 murid, tak pernah membeda-bedakan (Lunyu, VII, 7). Baik bangsawan, orang biasa, kaya miskin, terpelajar dan kasar, semua ia terima. Ia tak melihat dari mana mereka datang dan apa yang telah mereka lalukan. Yang dilihat adalah apa yang akan mereka perbuat setelah berlalu (Lunyu, VII, 29.2). Ada pendidikan tiada perbedaan (Lunyu, XV, 39). Inilah sikap yang selaras-senafas dengan sila pertama, yang memandang manusia sederajat setara dan tidak diskriminatif, karena semuanya diyakini merupakan insan Tuhan.

Karena sikapnya yang egaliter, menghormati kesetaraan maka Sang Nabi tidak membeda-bedakan muridnya berdasar latar belakang maupun ikatan darah. Sikapnya terhadap anak kandung dan muridnya sama. Ia memberikan pendidikan dan perhatian yang sama, namun selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kepada yang lambat ia dorong. Kepada yang tergesa, ia tahan (Lunyu, XI, 22.4). Kepada yang tak mau sungguh-sungguh belajar, ia kecewa (Lunyu, XIV, 43). Kepada yang menyengsarakan rakyat tanpa ada itikad baik untuk memperbaiki, ia marah (Lunyu, XI, 17.2).

Selain egaliter, Kongzi juga bersikap bebas, adaftif dan transparan, dalam arti tidak kaku, kuluh dan mengharuskan (Lunyu, IX, 3-4). Ia hanya menunjuk-

kan batas toleransi mana yang boleh dan tidak boleh, dengan acuan nilai *Bade*. Ia menganjurkan agar pemimpin atau pemerintah memberikan batasan yang jelas pula. Bila perintah atau hukuman diberikan tanpa penjelasan atau pendidikan lebih dulu, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan (Lunyu, XIII, 30).

Pemerintah yang baik diidiomkan sebagai ayah bunda rakyat. Ia melindungi rakyatnya, termasuk melindungi hak-haknya. Kepada yang mampu, didorong dan didukung sampai batas kemampuannya. Kepada yang tidak mampu dan dalam keadaan kekurangan, dibantu dan dilindungi. Perbedaan tidak menjadi masalah dan dipersoalkan, selama dalam batas kewajaran. Prinsipnya berempati dan tidak melakukan apa yang diri sendiri tiada inginkan (Zhongyong, XII, 3). Bahasa awamnya, “Jangan mencubit, kalau tidak mau dicubit”. Peraturan hukum dibuat jelas dan terang, namun dalam praktiknya lebih mengutamakan pendidikan (karakter), sehingga orang tahu, mengerti dan memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dibimbing dengan undang-undang dan hukuman rakyat masih berusaha menghindari dan bisa kehilangan harga diri. Dibimbing dengan Kebajikan rakyat tumbuh harga dirinya dan berusaha hidup benar (Lunyu, II, 3).

Tentang sikap takwa kepada Tuhan, Kongzi menjelaskan banyak cara yang bisa ditempuh. Yang termudah berguru pada orang yang memahami kitab suci atau agama. Tapi kesadaran bisa juga muncul dengan sendirinya, termasuk karena pahit-getirnya perjalanan hidup (Zhongyong, XX, 1). Di samping itu ada orang

yang memang terlahir sudah bijaksana (Zhongyong, XIX, 9). Maka baginya yang terpenting adalah perilaku nyata dalam kehidupan. Orang yang hafal mati kitab suci namun dalam hidupnya jauh dari Kebenaran, ia tegas mengatakan orang yang tak bernilai (Lunyu, XIII, 5).

*Dao*, Jalan Suci dan atau agama, bagi Kongzi ukurannya adalah Cinta Kasih Universal. Ukuran *Dao* sangat sederhana. *Dao* niscaya penuh dengan Cinta Kasih. Bila tidak, ia bukan *Dao*. Jika ada *Dao* atau agama yang menjauhi Kemanusiaan, bagi Kongzi tak layak disebut *Dao* dan agama (Zhongyong, XII, 1). Demikian juga bila ada orang yang mengaku beragama namun perbuatannya jauh dari Kemanusiaan, ia tidak layak mengaku sebagai orang yang benar-benar berjalan lurus selaras agamanya. Ditegaskan bahwa bagi seorang *Junzi*, Cinta Kasih selalu melekat dengan perilakunya (Lunyu, IV, 5.3).

Bagi seorang *Junzi*, di empat penjuru samudera semuanya saudara (Lunyu, XII, 5), tidak tersekat dan terkotak oleh ikatan primordial. Ukurannya Kebajikan. Bukan saja dianjurkan Tepasalira, saling menenggang dan berempati, melainkan juga dianjurkan untuk saling mendukung. Bila kita ingin tegak dan maju, kita perlu membantu orang lain tegak dan maju pula (Lunyu, VI, 30.3). Bila kita untung sendiri, niscaya akan menimbulkan kecemburuan yang justru berpotensi membahayakan.

Dengan saling hormat-menghormati, saling menghargai, tolong-menolong tanpa dibatasi oleh sekat pem-

beda, akan tumbuh masyarakat yang rukun damai, yang dilandasi kehidupan keluarga-keluarga sejahtera, yang ditamsilkan seperti alat musik yang ditabuh harmonis (Zhongyong XIV, 2). Masyarakat yang Pancasilais, yang utamanya menjunjung sila pertama, yang bermuatan nilai-nilai Ketuhanan, seyogyanya mampu mewujud seperti lukisan indah warna-warni di atas dasar warna putih, warna ketulus-ikhlasan (Lunyu, III, 8).

Sikap seorang *Junzi* seperti pemanah yang bijak. Bila anak panahnya luput mengenai sasaran ia tidak mengeluhkan angin yang bertiup, tali gendewa yang terlalu kendor, gendewa yang tidak stabil, dsb. Ia akan lebih tekun melatih diri, mengambil pelajaran dari kegagalan (Zhongyong, XIII, 5). Jika ia jalan bertiga, niscaya ada yang bisa dijadikan guru. Yang baik akan ditiru, bila ada yang kurang baik seorang *Junzi* akan melakukan introspeksi (Lunyu, VII, 22). Pendeknya seorang *Junzi* tekun membina diri, tidak tertarik dan tidak mau membicarakan aib orang lain (Lunyu, XII, 16). Apalagi menjelekkan agama lain, yang disebut Kongzi sendiri sebagai *Dao* juga (Lunyu, XVII, 24). Sebagai konsekuensi sikap menghormati *Dao* atau agama lain, dan selaras dengan sikap tidak suka melakukan sesuatu yang diri sendiri tidak sukai, tentunya *Junzi* akan menghormati pilihan orang lain, tidak ikut campur (Lunyu, XIV, 26), apalagi memaksakan kehendak.

Dalam berbagai kesempatan Kongzi menganjurkan agar kita tidak mudah percaya begitu saja, gampang dihasut, diadu-domba, melainkan harus meneliti hakikat setiap perkara, utuh melihat permasalahan, bukan saja

dari awal sebuah peristiwa sampai akhir, tetapi bahkan sampai inti persoalan. Melihat sendiri belum dianggap cukup kalau tidak lengkap, apalagi cuma melihat sepotong (Daxue, Bab Utama, 3-4).

Soal pergaulan, persahabatan, yang menjadi tolok ukur bukanlah kesamaan primordial, namun adalah karakter dan watak baik. Bagi generasi muda yang secara usia belum matang dan mudah terpengaruh, Kongzi menganjurkan hati-hati dalam memilih teman. Namun bagi yang sudah matang dan teguh berprinsip, Kongzi tidak membatasi. Baginya agama bukan pembatas. Seorang *Junzi* mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok (Lunyu, II, 14). Pengetahuan kitab justru dimanfaatkan untuk kebaikan, memupuk tali persahabatan dan dengan persahabatan mengembangan Kebajikan (Lunyu, XII, 24).

Dari paparan di atas menjadi jelas bahwa pandangan Khonghucu tentang sila pertama Pancasila -dan keempat sila lainnya, senada-seirama dengan pandangan Hatta, dan juga “Butir-Butir Pancasila” yang didasarkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978.

## Mana yang Harus Menjadi Pegangan?

Sering orang mencampuradukkan antara kehidupan sebagai pribadi dan sebagai warga negara sehingga acapkali terjadi kebingungan atau kerancuan. Karena merasa yakin bahwa kitab suci berasal dari Tuhan, kadang orang lebih mendahulukan kitab suci ketimbang peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Padahal yang ia hadapi bukan urusan pribadi sebagai

manusia dengan Tuhannya tapi terkait hubungannya dengan negara. Contoh, urusan sembahyang caranya bagaimana, kapan, hal itu bergantung pada keyakinan masing-masing. Pegangannya jelas, kitab suci atau tata agama. Tetapi kalau cara itu mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu tetangga, tentu akan berhadapan dengan kepentingan orang lain. Kalau ini terjadi, tentu harus berpegang pada peraturan lingkungan setempat atau bahkan peraturan negara. Kalau pegangannya kitab suci masing-masing, tentu menjadi rumit. Disini orang harus memahami, kapan harus berpegang pada Tata Agama atau Kitab Suci, dan kapan berpegang pada peraturan yang berlaku yang didasarkan konstitusi.

Dalam diri setiap orang mempunyai peran yang cukup banyak. Semakin terkenal dan punya jabatan tinggi, perannya semakin banyak. Multi peran. Contoh, peran sebagai pribadi insan Tuhan, anak dari sebuah keluarga, menantu dari keluarga pasangan, orangtua dari anaknya, warga dari sebuah RT, RW, perkumpulan tertentu, warganegara, dsb. Peran yang banyak itu, mempunyai pegangan dan aturan berbeda. Sebagai insan Tuhan dan umat sebuah agama, pegangannya tentu kitab suci tertentu. Menjadi karyawan sebuah perusahaan tentu terikat dengan peraturan perusahaan. Jadi anggota sebuah organisasi tentu terikat AD-ART. Demikian juga sebagai warga negara, tentu terikat pada konstitusi dan perundangan di bawahnya.

Jadi mana yang seharusnya jadi pegangan? Jawabnya tergantung pada peran apa yang saat itu sedang

kita jalankan. Jangan terbalik-balik menggunakan kitab suci untuk urusan lingkungan tetangga, atau menerapkan konstitusi untuk mengurus hubungan keluarga, dsb.

### Sosialisasi dan Keteladanan: Mana Dahulu, Mana Kemudian?

Agama-agama telah hadir ratusan bahkan ribuan tahun di bumi manusia. Semuanya mengklaim dan menyatakan bertujuan baik. Namun dalam banyak kesempatan agama-agama seolah tampil bukan sebagai solusi melainkan menjadi sumber masalah baru. Akibatnya banyak yang kecewa dan mulai mempertanyakan kesucian agama itu sendiri.

Apa yang menimpa agama-agama itu juga menimpa Pancasila. Sering orang skeptis dan mulai ragu terhadap Pancasila dan mulai mempertanyakan manfaatnya. Ini tidak bisa disalahkan begitu saja tatkala orang-orang mengalami ketidakadilan, ketimpangan sosial, perilaku pimpinan di semua level yang tidak sepantasnya, resah melihat retaknya persatuan, gundah melihat maraknya tindakan dan perbuatan yang jauh dari nilai-nilai luhur kemanusiaan, sampai maraknya kekerasan dan terorisme dalam berbagai skala yang seakan bernafaskan agama.

Khusus terkait sila pertama masyarakat banyak melihat penyimpangan di lapangan, betapa kehidupan kita masih jauh dari spirit dan semangat yang ditunjukkan sila pertama. Mulai dari penolakan pendirian tempat ibadah di berbagai tempat, masih adanya perusakan

rumah ibadat, kekerasan dan persekusi yang mengatasnamakan agama, orang tidak mau menghormati simbol negara dengan alasan agama, dsb. Pendeknya masih jauh panggang dari api. Orang bijak mengatakan, “Saya baca, saya tahu. Saya menyaksikan, saya percaya”. Kini kalimatnya seakan bergeser menjadi, “Saya baca, saya ragu. Saya menyaksikan, saya makin tidak percaya dengan apa yang saya baca”. Semoga rasa skeptis terhadap Pancasila dan agama akan hilang terobati oleh perubahan perilaku orang-orang yang seharusnya justru menjadi teladan atau panutan.

Jadi kembali pada pertanyaan, “Mana dulu, mana kemudian” yang menjadi judul sub bab ini, jawabnya adalah kita membutuhkan sosialisasi nilai Pancasila yang konsisten, terus-menerus sejak usia dini. Namun sosialisasi tanpa ada keteladanan nyata dari para pimpinan yang karena posisinya harus menjadi teladan, akan sia-sia lenyap tak berbekas. Keduanya harus bisa berjalan seiring berbarengan, konsisten dan terus-menerus pula, sehingga akhirnya akan menjadi kebiasaan dan budaya.

**Kesimpulan**

Melintas sejarah perjuangan bangsa dan pergulatan budaya manusia Indonesia, serta menghayati apa yang dipaparkan di muka, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” - untuk tidak mengatakan sebagai sila terpenting, merupakan roh dari sila-sila lain Pancasila. Tanpa kesepakatan sila

pertama, mustahil terwujud "Persatuan Indonesia". Tanpa sila ketiga tak mungkin tercapai apa yang digambarkan sila keempat. Tanpa sila keempat sungguh sulit mencapai cita-cita yang disebutkan dalam sila kelima dan kedua.

2. Pilihan kata "Ketuhanan" dibanding "Tuhan" adalah pilihan yang bijaksana, mempunyai cakupan yang lebih luas dan lentur, sehingga bisa diterima semua unsur agama-agama dan keyakinan yang memang mempunyai pemahaman berbeda mengenai Tuhan.

3. Meski konsep Tuhan masing-masing agama dan keyakinan berbeda-beda, tetapi semua agama sepakat akan nilai-nilai Ketuhanan yang universal terkait kebaikan, kebenaran, kesetaraan, keadilan, kejujuran, dan kelurusan (kesucian). Disini agama-agama seolah menemukan ruang/titik temu, kebersamaan dan kesepemahaman.

4. Perspektif agama Khonghucu tentang sila pertama Pancasila dan bahkan keseluruhan sila-sila Pancasila, tidak saja sepakat atau menyetujui, melainkan lebih dari itu selaras, senafas dan sejiwa dengan Pancasila itu sendiri. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa seorang Khonghucuis sejati pada waktu bersamaan sejatinya akan menjadi seorang Pancasilais murni. Demikian sebaliknya. Mereka yang mampu hidup dalam amalan Pancasila, pada saat yang bersamaan sekaligus bisa disebut seorang *Junzi* atau manusia ideal versi Khonghucu.

5. Ajaran agama - dalam porsi yang pas sangat baik

bagi pembangunan karakter pribadi orang per orang. Pancasila dalam formula yang tepat sangat penting bagi penciptaan warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Alangkah idealnya bila sejak pendidikan dasar ada semacam perpaduan penanaman atau pendidikan nilai agama dan Pancasila dalam satu paket. Darinya diharapkan akan melahirkan manusia Indonesia yang patrotik, religius, berbudi pekerti luhur dan tangguh secara mental, moral, spiritual sekaligus.

6. Penanaman ideologi adalah bagian penting dalam kehidupan bernegara, tetapi tidak mudah dan tidak bisa instan. Sebagai Badan yang ditugasi melakukan pembinaan ideologi, alangkah ideal bila BPIP merancang sistem pendidikan warga negara sejak usia dini, bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan formal dan non formal, termasuk tokoh atau majelis agama-agama, masyarakat adat dan budayawan.

7. Urusan ideologi adalah tanggung jawab semua unsur masyarakat, bukan hanya sebatas urusan pemerintah. Ada baiknya sebagai Badan yang diberi tanggung jawab mengelola ideologi negara BPIP mengajak serta seluruh unsur masyarakat yang kehadirannya merefleksikan keterwakilan semua unsur-unsur yang ada.

8. Penanaman ideologi Pancasila, terutama sila pertama perlu dikemas dalam format modern yang senafas selaras dengan jiwa generasi milineal, bukan

dalam doktrin kaku, melainkan dalam bentuk cerita kehidupan nyata sehari-hari di lingkup keluarga, ruang sekolah, ruang kerja dan masyarakat luas, Pemerannya adalah mereka sendiri. Lebih baik lagi bila mereka bisa menjumpai contoh nyatanya dalam perilaku tokoh masyarakat.

## III. Penutup

Semua Jalan Suci, agama, menunjukkan, mengajarkan dan meninggikan Cinta Kasih, khususnya kepada umat manusia, tanpa dibatasi oleh suku, etnis, agama dan berbagai bentuk ikatan primordial lainnya. Dengan kata lain, agama, tanpa terkecuali, meninggikan Kemanusiaan. Bila ada agama dan atau perilaku umat beragama yang bertentangan dengan Cinta Kasih, jelas menyimpang dari pesan suci yang dibawakan agama.

## Referensi

------------, SAK TH. XXVIII no. 2/3: Riwayat Hidup Nabi Khongcu. MATAKIN

Himpunan Risalah Sidang BPUPK (29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan PPKI (18 dan 19 Agustus 1945)

Latif, Yudi. 2014. Mata Air Keteladanan –Pancasila dalam Perbuatan-. Jakarta: Mizan.

MATAKIN. 2016. Si Shu (Kitab Yang Empat) Kitab Suci Agama Khonghucu. Jakarta: Kementerian Agama RI.

MATAKIN. 2017. Kitab Suci Li Ji, Catatan Kesusilaan.

Jakarta: Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI,

MATAKIN. 2017. Kitab Suci Su King/Shu Jing. Jakarta: Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.

MATAKIN. 2017. Kitab Suci Yak King. Jakarta: Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.

Setiawan, Boenyamin; Tanuwibowo, Budi S; Nugroho, Edi, dkk. Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1988. Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka.

Tanuwibowo, Budi S. 2009. Bertambah Bijak Setiap Hari, 8x3=23. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tanuwibowo, Budi S. 2010. Bertambah Bijak Setiap Hari, 5 Matahari. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tanuwibowo, Budi S. 2011. Bertambah Bijak Setiap Hari, Tuhan Sudah Pindah Alamat? Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tanuwibowo, Budi S. 2015. Berani tidak Populer. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tjhie Tjay Ing. 2006. Panduan Pengajaran Dasar Agama Khonghucu (edisi ke- 2). Solo: MATAKIN.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (versi amandemen).

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

# NILAI-NILAI NASIONALISME, KETUHANAN YANG MAHA ESA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF KHONGHUCU

*Kristan*[*]

## I. Pendahuluan

Pada tanggal 1 Juni 1945 yang kini diakui sebagai hari lahirnya pancasila Soekarno berpidato di depan para anggota *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), maka harus diketahui bahwa lima prinsip *groundslag* atau sebagai dasar negara yaitu: nasionalisme, internasionalisme/humanisme, demokrasi, keadilan, dan Ketuhanan yang ditawarkan oleh Soekarno yang disebutnya sebagai Pantjasila itu tidaklah 'sama persis' dengan Pancasila yang kita ketahui sekarang.

"*Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan dr Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari sebuah persatuan*

* Ketua Umum Generasi Muda Khonghucu Indonesia (GEMAKU).

*philosophische grondslag, mencari satu Weltanschau-ung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang sdr. Sanoesi setujui, yang sdr. Abikoesno setujui, yang sdr. Liem Koen Hian setu-jui, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan Kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui*", de-mikianlah kutipan dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu.

Berdasarkan masukan utama dari Soekarno da-lam pidato 1 Juni 1945 tersebut, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil yang dibentuk BPUPK ber-hasil menuntaskan suatu naskah yang dipersiapkan untuk dibacakan sebagai dokumen pernyataan ke-merdekaan Indonesia kelak, yang sekaligus guna dijad-ikan pula sebagai *preambule* konstitusi.

Pada 22 Juni 1945, perumusan tujuan ke-merdekaan dan dasar negara Pancasila berdasarkan masukan utama dari Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 itu, kemudian berhasil selesai dituntaskan dan ditandatangani oleh Panitia kecil yang dibentuk BPUPK.

Pantjasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban men-jalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksa-

naan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Naskah yang juga ditandatangani oleh Mr. Max Maramis selaku wakil golongan Kristen, empat wakil golongan kebangsaan, dan empat wakil golongan Islam ini kelak dikenal sebagai *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta. Adapun perbedaan antara Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dengan Pancasila yang sah diakui sebagai dasar negara yakni Piagam Jakarta memuat sebuah kalimat tambahan (berisi 7 suku kata) pada sila pertama. 7 kata yang dimaksud tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa – ditambah dengan 'dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya'.

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan yang selama ini dinanti-nantikan oleh segenap bangsa Indonesia akhirnya dapat terwujud dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Dwitunggal Proklamator Soekarno-Hatta. Tapi tidak lama setelah itu para wakil Indonesia di kawasan Timur mengancam, bahwa mereka Indonesia Timur akan lebih suka berdiri di luar Negara Republik Indonesia yang memerdekakan diri itu, jika ketujuh anak kata yang berkesan diskriminatif dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tetap dipertahankan dalam mukadimah konstitusi.

Ancaman itu membuat Bung Hatta nyaris menangis. Karena Negara Republik Indonesia yang baru 'setengah hari merdeka itu, belum apa-apa sudah terancam pecah'. Padahal mereka semua telah puluhan

tahun menempuh penjara dan pengasingan oleh penjajah kolonial demi memperjuangkan kemerdekaan Negara Bangsa Republik Indonesia berdasarkan persatuan kesatuan seluruh suku bangsa di Nusantara.

Karena itu Bung Hatta langsung bergegas melobi para tokoh Muslim yang juga menjadi anggota BPUPK dan PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan lainnya. Mereka semua sependapat mengalah, maka lahirlah Pancasila yang 'sedikit berbeda' dengan Piagam Jakarta yang berbunyi:

Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam UUD 1945 juga diatur tentang kebebasan beragama yakni dalam pasal 29 yang dengan tegas sekali menyatakan bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu." Menarik untuk dicatat bahwa UUD ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang lahir sebelum di deklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Bersama-sama dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara, Pasal 29 UUD 1945 membentuk bingkai konsep hubungan negara dan agama dalam negara Indonesia, yaitu bahwa Indonesia bukanlah negara agama tidak ada agama negara dan bukan juga negara sekuler, melainkan negara beragama dan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengejawantahan konsep ini adalah diwajibkannya setiap warga negara untuk memeluk sebuah agama dan keyakinan apapun dan percaya terhadap konsep Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain masalah perbedaan Pancasila dengan Piagam Jakarta, yang menarik untuk dikaji adalah 'perubahan posisi' tentang Ketuhanan dalam Pancasila di mana saat Soekarno berpidato tanggal 1 Juni 1945 sebelum dituntaskan oleh panitia kecil BPUPK asas Ketuhanan ini disebutkan terakhir, tapi dalam Pancasila malah menjadi sila pertama karena dianggap dimensi ini justru telah mendasari ke empat sila yang lainnya.

Walaupun kini agama Khonghucu sudah diakui kembali sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, akan tetapi tidak ada salahnya jika kita mengevaluasi mengapa pada zaman Orde Baru agama Khonghucu sampai didiskriminasi oleh rezim Soeharto. Salah satu alasan keliru yang akhirnya jadi pembenaran adalah mengenai nasionalisme orang-orang Tionghoa di Indonesia. Maka untuk menjawab dan meluruskan tuduhan ini perlu mengambil contoh-contoh dari sejarah agama Khonghucu yang pernah benar-benar terjadi.

Leluhur Nabi Kongzi adalah para kaisar dinasti

Shang (1766 SM s.d. 1122 SM). Setelah dinasti Shang runtuh dan digantikan oleh dinasti Zhou (1122 SM s.d. 256 SM), para keturunan kaisar dinasti Shang ini diangkat menjadi rajamuda negeri Song (sekarang di propinsi Henan). Karena negeri Song mempunyai tradisi unik yakni menyerahkan tahta kepada saudara muda dan bukannya kepada putranya, maka leluhur Kongzi yang bernama Fufu He yang tak lain adalah putra rajamuda Song Xi Gong tidak menjabat sebagai rajamuda negeri Song lagi.

Keturunan Fufu He yang bernama Kong Fujia dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan negeri Song adalah orang pertama yang menggunakan marga Kong. Keturunan Kong Fujia generasi ke 4 yakni Kong Fangshu kemudian pindah ke negeri Lu (sekarang di propinsi Shandong). Kong Fangshu sendiri terhitung kakek buyut dari Nabi Kongzi.

Bandingkan keadaan Kongzi ini dengan para Huaqiao (Keturunan Tionghoa) di Indonesia yang seringkali mendapat tuduhan tidak nasionalis terhadap tanah air baru mereka. Leluhur Kongzi adalah orang Song yang kemudian pindah ke negeri Lu, jadi Kongzi terhitung orang negeri Song perantauan dan ia terang-terangan mengakui asal usulnya sebagai keturunan kaisar dinasti Shang. Tapi saat negeri Lu terancam diserang oleh negeri lain, Kongzi segera mengutus murid-muridnya untuk menyelamatkan negeri Lu. Ran You salah seorang murid Kongzi pernah memimpin pasukan Lu mengalahkan pasukan musuh sedang pada kesempatan lain Zigong murid Kongzi lainnya diutus untuk menye-

lamatkan negeri Lu melalui jalur diplomasi. Jadi jelas disini bahwa Kongzi menganggap negeri Lu ini sebagai tanah airnya dan membelanya mati-matian. (Sebagian tambahan disini, negeri Lu diperintah oleh keturunan kaisar dinasti Zhou yang dulunya meruntuhkan dinasti Shang, leluhur Kongzi sendiri).

Selain kisah sejarah diatas masih ada contoh nasionalisme dalam pandangan agama Khonghucu yang jelas-jelas melampaui batas negara. Kejadian ini terjadi di Jepang dan kini kisah ini telah menjadi legenda nasionalisme ala agama Khonghucu. Yamazaki Ansai (1619 s.d. 1682) adalah penganut agama Khonghucu. Pada suatu hari dia ditanyai oleh muridnya, Guru, jika seandainya Kongzi dan Mengzi memimpin pasukan dari Tiongkok dan menyerang negeri kita. Apa yang engkau lakukan sebagai pengikut mereka?

Yamazaki menjawab dengan tenang, Saya akan mengenakan baju perang dan mengangkat senjata menghadapi mereka. Saya bahkan akan berusaha menangkap mereka berdua hidup-hidup! Seandainya ini benar terjadi, saya yakin Kongzi dan Mengzi pasti akan menghargai tindakan saya untuk menunaikan tugas saya untuk kaisar Jepang dan negeri ini.

Kongzi tidak pernah mengatakan harus berkiblat pada negeri leluhur, tapi mengabdilah pada negara tempat kamu tinggal dan menjadi warga negaranya dan jagalah. Arti kata *guo* yang berarti adalah tembok wilayah, satu orang memegang tombak sudah bermakna harus menjaga keutuhan wilayah atau negara.

## II. Pembahasan

### Korelasi Pancasila dan Ajaran Khonghucu

"Harta yang terdistribusi itu jauh lebih bermakna ketimbang harta yang menumpuk", demikian kata Kongzi yang merupakan pendiri ajaran Khonghucu dalam Kitab Lunyu. Ajaran Khonghucu ternyata memberikan kontribusi nyata bagi konsepsi tatanan sosial ideal yang dicita-citakan dasar negara kita, Pancasila.

Mungkin, banyak orang lupa bahwa Pancasila sejatinya merupakan satu dasar negara yang meramu berbagai budaya, paham, dan agama yang hidup di Indonesia, termasuk ajaran Khonghucu. Apalagi, ajaran Khonghucu sudah dikenal di Indonesia sebelum abad ke-19. Bahkan, pada 1965, Bung Karno menerbitkan sebuah peraturan presiden yang mengakui enam agama di Indonesia: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Hanya saja, eksitensi agama Khonghucu mulai terkikis ketika rezim Soeharto pada akhir 1978 menerbitkan surat edaran menteri dalam negeri yang hanya mengakui lima agama dan mengecualikan Konghucu. Alasan absurdnya kala itu adalah Konghucu dianggap salah satu faktor yang menghambat asimilasi warga keturunan Tionghoa di Indonesia (Suryadinata, 2010).

Untungnya, kondisi mulai berubah seiring datangnya reformasi. Bermula dari pernyataan lisan menteri agama pada masa Presiden BJ Habibie yang mengakui kembali Konghucu sebagai agama, penganut Konghucu kian bergembira setelah Presiden Abdurrahman Wa-

hid pada 31 Maret 2000 melalui Menteri Agama Surjadi menerbitkan satu instruksi (Nomor 477/805/Sj) yang membatalkan surat edaran 1978 tadi. Selain itu, Gus Dur membatalkan Keputusan Presiden Nomor 14/1967 yang melarang orang Tionghoa merayakan hari raya mereka di tempat umum.

## Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Agama Khonghucu

Keyakinan Agama Khonghucu terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang eksistensi zat yang maha tinggi sebagai *The Ultimate Concern* adalah faktor yang sangat penting dalam setiap sistem religi. Faktor transeden ini diyakini sebagai yang menentukan bagi seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga menimbulkan suatu wibawa dan  rasa ketergantungan kepada yang absolut (*absolute dependent*) yakni Allah, Tuhan, *Tian* ataupun Dewa dan sebagainya. Untuk mempresentasikan perasaan tersebut manusia merumuskan suatu tata ibadah berupa doa, pujian, pemuliaan dan penyembahan. Agar terbina keselarasan hidup yang baik antar sesama manusia maupun manusia dengan Zat Yang Maha Tinggi itu dirumuskan dalam suatu kode moral dan etika. Inilah yang dinamakan sistem agama.

Dalam agama Khonghucu konsep ketuhanan Yang Maha Esa dideskripsikan dengan pernyataan sebagai berikut: “Kekuatan daya spiritual *Tian* ada dalam alam semesta. Alangkah aktifnya daya ini dimana-mana! Tidak kelihatan oleh mata, dan tidak tertangkap oleh indera. Daya ini berada dalam segala hal, dan tidak ada apapun yang luput dari operasinya”. (Kitab Yijing)

Dalam agama Khonghucu sedikitnya dikenal dua istilah yang merujuk kepada Zat Yang Maha Tinggi atau *Tian*. Shang Di adalah Tuhan yang Maha Mengatur (*Supreme Ruler*) yakni Tuhan yang Imanen atau Maha Hadir (*Ommni Present*). Sementara *Tian* adalah Tuhan Yang Transeden atau Maha Tidak Terjangkau.

**Sifat Tuhan menurut Agama Khonghucu:**

1. Antropomorfik dan personal

Tuhan diyakini memiliki perasaan sebagaimana halnya manusia, ada kemiripan antara citra Tuhan dengan manusia. "Tuhan itu Maha Kuasa adanya, adakah Dia membenci seseorang? (Kitab Shijing Madah untuk Tuhan (*Ode to God*)."

Tuhan Roh Yang Maha Agung (*The Greatest Spirit*): Dalam agama Khonghucu dinyatakan Tuhan adalah Roh Yang Maha Agung. "Gerakan Tuhan tidak bersuara maupun tercandra" (Shijing).

2. Tuhan Mewahyu kepada manusia

Tuhan merupakan subjek adikodrati (diluar atau melebihi kodrat alam) yang berkomunikasi dengan manusia melalui pilihannya antara lain Raja atau Putra Tuhan (*Tianzi*) dan para Nabi, yang mempunyai hubungan khusus dengan *Tian*. "*Tian* berfirman kepada Raja Wen. Aku puas dengan kebajikanmu, tanpa banyak bicara atau bermegah-megah, tanpa menimbulkan gelora. Secara wajaer, engkau menegakan hukumKu" (Shijing).

3. Tuhan penuh kemuliaan

"Maha Besar Kuasa Thian, JubahMu adalah Kea-

gunganMu” (Kitab Shijing)

4. Tuhan sumber segala kebaikan :

“Kesengsaraan tidaklah berasal dari *Tian*, karena engkaulah yang telah menyimpang dari jalanNya” (Kitab Shijing)

Betapa Maha Besar *Tian* Khalik Semesta Alam Berlaksa benda daripadaNya bermula. Semuanya kepada *Tian* Yang Maha Esa . Awan berlalu, hujan diturunkan Mahkluk dan benda mengalir berubah bentuk. Jalan suci *Tian* merubah dan melebur. Masing masing lurus menepati Watak Sejati *xing* dan firman. Dipelihara berpadu keharmonisan besar. Diturunkan berkah dan keabadian. (Yijing)

Maka dari itu *Tian* Yang maha Rokh itu tidak boleh diperkirakan  Lebih-lebih tidak dapat ditetapkan Sungguh jelas sifatNya yang halus itu Sehingga tidak dapat disembunyikan dari iman kita Demikianlah Dia yang Maha segalanya (Zhongyong)

Sila Pertama dalam Pancasila yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *believe in God* yang secara harfiah berarti Kepercayaan pada Tuhan. Jika dikatakan sila pertama mendasari ke empat sila yang lain, maka sudah sepatutnya setiap warga negara Indonesia dalam menerapkan keempat sila tetap harus berdasarkan pada kepercayaan atau keyakinannya akan adanya Tuhan. Dalam perspektif agama Khonghucu, setiap perilaku umatnya juga harus berdasarkan pada Tuhan yang dalam kitab suci agama Khonghucu paling sering

disebut dengan istilah *Tian*.

Dalam tradisi ajaran Khonghucu, memangku jabatan dan mengabdi di pemerintahan bukanlah suatu cita-cita semata melainkan juga adalah sebuah kewajiban yang sepatutnya dipikul setiap insan manusia di dunia ini demi terciptanya keteraturan negara pada khususnya dan perdamaian di dunia pada umumnya. Ketika diangkat menjadi pejabat di negeri Lu, seluruh perhatian dan tenaga Nabi Kongzi dikerahkan untuk memberikan kebaikan sentosa kepada segenap rakyat. Beliau bersabda, "Membina diri untuk dapat memberi sentosa kepada seluruh rakyat, meskipun kaisar Yao 堯 [2357 SM – 2255 SM] dan Shun 舜 [2255 SM – 2205 SM] masih juga merasa khawatir belum dapat melaksanakan dengan sempurna." (Lunyu XIV.42:3)

Dalam kitab Tengah Sempurna (Zhonyong) dijelaskan cara untuk membina diri adalah sebagai berikut: "Maka seorang Junzi 君子 (Susilawan) tidak boleh tidak, harus senantiasa membina diri. Bila berhasrat membina diri tidak boleh tidak, harus mengabdi dengan setulus hati kepada orang tua. Bila berhasrat mengabdi kepada orang tua tidak boleh tidak, harus dapat mengenal manusia. Dan bila berhasrat untuk mengenal manusia tidak boleh tidak, harus mengenal kepada *Tian* (Tuhan Yang Maha Esa)." (Zhongyong XIX.7)

Maka sesungguhnya sekedar memangku jabatan pemerintahan tapi tidak mengenal *Tian* Tuhan Yang Maha Esa belumlah cukup disebut memahami ajaran Nabi Kongzi. Ini menunjukkan bahwa dalam Ajaran sang Nabi, mengenal *Tian* adalah hal yang mendasari

segenap perilaku para pengikutnya.

Dalam kariernya di negeri Lu, Nabi Kongzi pernah mencapai kedudukan sangat tinggi yakni setingkat dibawah Perdana Menteri Ji Huan-zi 季桓子 (berarti orang nomor tiga setelah rajamuda Lu Ding Gong dan Perdana Menteri Ji Huan-zi). Tapi semua jabatan dan kekuasaan besar itu dianggap tidak ada gunanya jika tidak sesuai kehendak *Tian*. Maka ketika Rajamuda Lu Ding Gong mengabaikan nasehatnya dan tidak mengurusi pemerintahan dengan baik, muridnya yang bernama Zhongyou 仲由 alias Zilu 子路 berkata, "Rajamuda Lu Ding Gong sudah melupakan urusan pemerintahan, mengapa guru tidak mengundurkan diri saja?".

Kongzi menjawab, "Upacara Sembahyang Jiao 郊祭 sudah dekat. Jika upacara sembahyang tidak terselenggara dengan baik, itu berarti aku memang harus pergi." Upacara Sembahyang besar *Jiao* 郊 adalah upacara sembahyang besar kepada *Tian* yang diadakan setiap tanggal 22 Desember yakni saat gerak matahari mencapai titik paling selatan (sekarang dikenal sebagai Upacara Sembahyang *Dong Zhi* 冬至).

Ketika upacara sembahyang tiba waktunya, rajamuda Lu Ding Gong menghadiri upacara itu dan setelah selesai langsung masuk ke istana tanpa menemui para menteri terlebih dahulu. Daging yang dijadikan sesaji sembahyang juga tidak dibagikan kepada para menteri.

Petugas upacara yang membagikan daging itu kemudian mengingatkan rajamuda Lu Ding Gong atas kewajibannya itu. Tapi rajamuda Lu Ding Gong malah

melimpahkan kewajiban itu kepada Perdana Menteri Ji Huan-zi. Ternyata Ji Huan-zi juga malas melakukan kewajiban itu dan menyerahkan tugas itu kepada bawahannya saja.

Kongzi menunggu hingga tengah malam tapi daging bekas sembahyangan itu tidak juga dikirim ke rumahnya. Maka Kongzi lalu berkata kepada Zilu, “Jalan Suciku tidak ada yang mau menjalankan, ini sudah Firman *Tian*!”.

Setelah itu Kongzi segera berkemas-kemas untuk pergi meninggalkan negeri Lŭ. Dari kutipan ayat diatas jelas terlihat bahwa dalam mengambil keputusan besar seperti meletakkan jabatan, Kongzi tidak hanya mengambil pertimbangan praktis melainkan jika perlu meminta petunjuk dari Tuhan dengan cara melalui upacara sembahyang *Jiao*. Jadi sesungguhnya memang Kongzi mempercayai dan meyakini adanya sosok Adi kodrati yang dinamakan *Tian* atau Tuhan Yang Maha Esa.

Sila Pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ mungkin bagi sebagian agama atau kepercayaan boleh jadi akan dipertanyakan mengapa harus dibumbui kalimat ‘Yang Maha Esa’, bukankah cukup ‘Ketuhanan’ atau mungkin kalimat yang ramai diperdebatkan saat ini yakni ‘Ketuhanan Yang Berkebudayaan’? Uniknya agama Khonghucu justru sudah punya jawaban untuk pertanyaan ‘Yang Maha Esa’ ini.

Kongzi dan murid-murid pergi meninggalkan Negeri Lu ke arah barat yakni menuju negeri Wei 衛國. Ketika

mendengar kehadiran Kongzi di negerinya, rajamuda Wei Ling Gong 衛靈公 tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengundang Kongzi datang ke istana.

Rajamuda Wei Ling Gong menanyakan berapa gaji yang diterima Kongzi selama menjabat di negeri Lu 魯國. Ketika Kongzi menjawab enam ribu gantang beras, rajamuda Wei Ling Gong dengan tanpa ragu-ragu memberi gaji yang sama besarnya agar Kongzi mau menjabat di negeri Wei. Karena menghargai niat baik rajamuda Wei Ling Gong, Kongzi bersedia memangku jabatan di negeri Wei 衛國.

Dengan diangkatnya Kongzi sebagai pejabat di negeri Wei, banyak menteri penjilat yang berusaha mendekati Kongzi, sebagian menteri bahkan meminta uang suap (sogokan) dari Kongzi.

Wangsun Jia 王孫賈 bertanya, “Apakah maksud peribahasa ‘Daripada bermuka-muka kepada malaikat Ao 奧 (malaikat ruang barat daya rumah), masih lebih baik bermuka-muka kepada malaikat Zao 灶 (malaikat dapur)’ itu?” .

Kongzi bersabda, “Itu tidak benar! Barang siapa berbuat kesalahan terhadap *Tian* Tuhan Yang Maha Esa, tiada tempat baginya untuk memanjatkan doa.” (Lunyu III.13)

Bentuk huruf mandarin *Tian* sendiri terdiri dari gabungan dua huruf yakni *yi* yang berarti Satu dan *da* yang berarti Besar, Agung. Jadi kata *Tian* dalam terminologi agama Khonghucu bisa dibaca Yang Maha Satu dan Yang Maha Besar.

Nabi Kongzi memang tidak menitikberatkan ajarannya untuk memaksa orang lain meyakini ajarannya tentang *Tian* yang jauh lebih berkuasa daripada malaikat-malaikat yang selama ini banyak dipuja orang-orang dan bahkan pejabat pada masa hidup beliau. Tapi setidaknya satu ayat ini tidak pernah dibantah kebenarannya bahkan oleh aliran-aliran filsafat lain yang muncul setelah wafatnya Nabi Kongzi. Jadi Nabi Kongzi hanya mengingatkan kembali bahwa sejak jaman kaisar Yao dan Shun, seperti yang tercatat dalam kitab *Shujing*, orang-orang di negeri Tiongkok sebenarnya sudah mempunyai satu Tuhan yang disebut *Tian*.

Pertanyaan terakhir yang mungkin muncul dari kalimat 'Ketuhanan Yang Maha Esa' adalah siapakah makhluk adi kodrati yang disebut Tuhan ini? Apakah Tuhan ini berkehendak ataukah tak lain adalah alam semesta itu sendiri? Lalu apa pentingnya hingga dijadikan dasar bagi keempat sila yang lain yang tidak kalah mulianya seperti 'Kemanusiaan', 'Persatuan' dan 'Keadilan'? Pada ayat dibawah ini Kongzi secara tidak langsung menjelaskan pentingnya kepercayaan akan *Tian* Tuhan Yang Maha Esa ini.

Ketika permaisuri Nanzi dari negeri Wei mendengar akan kemasyhuran nama Kongzi, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menemui Kongzi dan segera mengirim utusan untuk mengundang Kongzi.

Kepada Kongzi, utusan permaisuri negeri Wei itu berkata, "Setiap Junzi 君子 dari negeri lain yang datang ke negeri Wei dan melakukan kunjungan persahabatan dengan rajamuda Wei, pasti juga akan mengunjun-

gi permaisuri Nanzi. Maka sekarang permaisuri ingin menemui Guru.” Kongzi sebenarnya enggan untuk menemui permaisuri Nanzi, tetapi mau tak mau Beliau terpaksa harus menerima undangan itu sebagai suatu konsekuensi dari norma kesopanan pada saat itu.

Permaisuri Nanzi menerima kedatangan Kongzi dari belakang tirai. Kongzi naik ke ruang serambi menghadap utara dan membongkokkan diri memberi hormat. Permaisuri Nanzi membalas membongkokkan diri dari balik tirai sehingga terdengar gemerincing perhiasannya yang terbuat dari batu kumala.

Ketika Zilu mendengar gurunya telah mengunjungi permaisuri Nanzi, ia segera menunjukkan sikap tidak senang. Melihat itu Kongzi berkata, “*Saya sebenarnya enggan untuk menemuinya, tetapi semuanya telah kulakukan menurut aturan yang telah diadatkan.*” Zilu tetap menunjukkan sikap tidak senang karena kunjungan itu hanya akan merendahkan martabat Kongzi. Ketika melihat Zilu kurang puas dengan jawabannya, Kongzi bersabda, “*Kalau Aku berbuat tidak pada tempatnya, Tian Tuhan Yang Maha Esa) akan menghukumku*! *Tian akan menghukumku*!” (Lunyu VI.28).

Walaupun bahasa manusia mempunyai keterbatasan sehingga tidak sanggup menggambarkan wujud *Tian* yang dimaksud dengan sempurna, tapi Nabi meyakini bahwa disaat hukum dan undang-undang buatan manusia tidak sanggup memberikan keadilan, karena itulah beliau mengatakan : *Kalau aku berbuat tidak pada tempatnya, Tian Tuhan Yang Maha Esa akan menghukumku*!

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun sudah dilengkapi dengan pelbagai peraturan, undang-undang dan hukum yang bahkan saling bertumpang tindih, ada kalanya seseorang bisa lepas melepaskan diri atau menghindari dari semua itu. Tapi dengan adanya sosok Adi kodrati yang disebut Tuhan ini, masih ada hukum tidak tertulis, tidak kasat mata tapi diyakini oleh segenap warga negara Indonesia yang berazaskan Pancasila ini.

## III. Penutup

Sejak dilahirkan 75 tahun yang lalu, Pancasila masih sangat relevan bagi seluruh dimensi kehidupan bangsa Indonesia untuk menghadapi setiap tantangan jaman yang menerpa perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan ekonomi, budaya dan politik bisa dilewati walaupun tetap harus penuh perjuangan.

Dalam perkembangan terbaru, sudah beberapa bulan ini, Indonesia dan juga seluruh negara di dunia ini dilanda Pandemi Virus Corona atau Covid-19 sehingga muncul tantangan baru yang membutuhkan penanganan serta cara-cara baru untuk menghadapinya.

Kadang dalam keadaan putus asa, tak sedikit saudara kita yang hampir menyerah dan mengatakan bahwa pandemi ini adalah hukuman dari Tuhan atau juga sebagai tanda-tanda dunia sudah akan berakhir. Sebagian yang lain bahkan menyalahkan pandemi ini sebagai konspirasi satu pihak terhadap pihak lain.

Umat Khonghucu sendiri selalu menghindarkan diri membicarakan tentang hak prerogatif *Tian* tentang

kehidupan setelah kematian, akhir jaman dan lain sebagainya, tetapi lebih menekankan diri pada terjun langsung dalam tindakan membereskan kekacauan dan berusaha menciptakan terwujudnya Jalan Suci. Tantangan setiap jaman berbeda sifatnya dan harus ditanggapi dengan cara yang berbeda pula. Tercatat dalam sejarah ketika di awal abad ke 20, pagebluk menimpa Indonesia, pelbagai kelenteng ikut turun mengadakan arak-arakan para *Shenming* dan menenangkan para penduduk. Tapi zaman berubah, penduduk Indonesia juga semakin padat hingga 250 juta lebih. Kirab atau arak-arakan para *shenming* mungkin belum pernah dicoba menghadapi Pandemi virus Covid-19, ini tentu karena sifatnya yang berbeda dimana sifat penyebaran virus ini yang sangat cepat. Ini bukan berarti kepercayaan pada Tuhan tidak bisa menjawab tantangan jaman. Harus diingat bahwa Sila Pertama ini mendasari ke empat sila yang lain. Saat-saat seperti inilah diperlukan Persatuan' seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi para dokter dan ahli kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Para pejabat dan petugas pemerintah hendaknya mufakat dalam menjalankan satu kebijakan yang seragam tidak saling tunjuk kesalahan satu sama lain. Para pelaksana dilapangan haruslah bersikap adil tidak lagi meributkan apakah korban pandemi itu kaya atau miskin, tampan atau jelek dan lain-lain. Sadar bahwa semua perjuangan yang dilakukan adalah demi Kemanusiaan yang dengan sendirinya mempertinggi martabat manusia yang melakukan hal itu. Demikianlah dari semua itu tetap disertai doa dan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa melindungi dan

membimbing rakyat Indonesia dalam menempuh Jalan Suci.

Umat Khonghucu sendiri senantiasa beryakinan: "Demikianlah *Tian* Yang Maha Sempurna menjadikan segenap wujud dengan masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya. Kepada pohon yang tegak akan dibantu tumbuh dan bersemi, sementara kepada pohon yang telah miring dan hendak tumbang akan dibantu roboh" (Zhongyong XVI.3).

Yakin bahwa bangsa Indonesia dengan didasari Pancasila mempunyai sifat yang ingin tegak dan terus maju, yakin *Tian* akan senantiasa meridhoi semua itu dan membimbing bangsa ini melewati pandemi Covid-19 dengan korban sesedikit mungkin.

Huang Yi Shang Di

Wei Tian You De

Shanzai

## Referensi

*Confucian Etchis, Educational Publications Bureau Pte Ltd,* Singapore, 1985.

Nopirin. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila,* Cet. 9. Jakarta: Pancoran Tujuh, 1980.

Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila dengan Kelangsungan Agama,* Cet. 8. Jakarta: Pantjoran Tujuh, 1980.

Salam, H. Burhanuddin, *1998. Filsafat Pancasilaisme.*

*Jakarta: Rineka Cipta Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Agama. Jakarta: PT. Gramedia.*

Sishu, *MATAKIN,* Jakarta 2012.

Suryadinata, Leo. "Agama Konghucu dan Buddha Pasca-Soeharto", dalam *Setelah Air Mata Kering.* Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

*The Doctrine of the Mean, in The Chinese Classics, tr. by lames Legge, second edition,* Oxford University Press 1961.

*The Wisdom of Confucius, tr. Lin Yu-tang, Zhengzhong Shuju,* Taipei 1994.

*Xinzhong Yao: Confucianism and Christianity.* Sussex Academic Press, 1996.

# NILAI-NILAI AJARAN KETUHANAN DALAM BINGKAI PANCASILA DI LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

*Sasmito Gati*[*]

## I. Pendahuluan

Sebelum datangnya agama-agama samawi ke Nusantara, masyarakat telah mengenal Tuhan dengan sebutan yang berbeda-beda. Namun demikian, meski berbeda bahasa penyebutan, tetapi tujuannya adalah sama, Tuhan Sang Maha Pencipta, Maha di atas segala-galanya. Tuhan adalah sumber dari segala sumber kehidupan di dunia. Dialah Sang Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Tuhan yang mengusai alam.

Ketika banyak orang mengaku memiliki Tuhan, maka orang kejawen atau penghayat kepercayaan justru berbeda, "Saya tidak memiliki Tuhan, tetapi saya bertuhan, karena pada dasarnya saya adalah ciptaan Tuhan. Jadi saya milik Tuhan, bukan Tuhan milik saya. Tuhan adalah satu, pencipta semuanya dan semua milik Tuhan yang pada akhimya akan kembali kepada-Nya.

* Penghayat Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) Cabang Kulon Progo.

Banyak sekali orang yang merasa memiliki Tuhan, yang ironisnya. Dia diperebutkan, dan hanya golongannyalah yang memiliki-Nya. Padahal, Tuhan bukan milik siapa-siapa. Tuhan adalah Tuhan berdiri yang sendiri, tanpa ada yang memiliki. Namun semua adalah milik Tuhan sang pencipta alam aemesta, dengan segala keagungannya, maha segalanya.

Siapapun orangnya dan dari suku maupun bahasa apapun, mereka adalah milik Tuhan. Diciptakan untuk menjaga, menggunakan dan merawat alam semesta untuk kelestariannya. Tuhan selalu memberikan rahmatnya kepada semua ciptaan-Nya, tanpa pengecualian, siapapun itu, beragama maupun tidak beragama. Semua yang hidup akan mendapatkan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya luas, terdiri dari ribuan pulau dan juga berbagai suku, bangsa, bahasa, agama dan kepercayaan sebagai budaya kearifan lokal (agama leluhur). Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya telah dijamin oleh pemerintah di dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dan Pancasila Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah juga telah mengakui itu.

Penghayat juga termasuk bagian dari Sila1 Ketuhanan Yang Maha Esa, setara dengan 6 agama yang telah diakui oleh pemerintah. Apalagi diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* perkara No. 97/PUU.XIV/2016 sebagai buk-

ti kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan negara yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Pancasila sebagai dasar negara falsafah bangsa, sekaligus ideologi nasional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi acuan sebagai peraturan dan perundang-undangan kita. Bahwa konsepsi kedaulatan kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Begitu pula dengan Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan bangsa. Bhineka Tunggal lka merupakan semboyan sekaligus prinsip hidup berbangsa yang menegaskan pluralitas bangsa sebagai kesatuan entitas kebangsaan Indonesia. Tentu kita tidak hanya memaknai Bhineka Tunggal Ika sebatas semboyan semata, melainkan karena pandangan kita yang menerima keberagaman budaya, etnis, suku, agama, maupun kepercayaan, sebagai sebuah keniscayaan berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai bangsa yang memiliki nilai peradapan tinggi, maka aspek mental spiritual sangat penting. Pancasila Sila 1 yakni Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara berketuhanan. Bentuknya adalah kebangsaan, bukan negara agama. Negara yang memberi kebebasan dan berkedaulatan kepada seluruh rakyatnya yang sangat beragam, baik dari aspek budaya, suku, bahasa, bahkan agama.

Pemerintah, sesuai amanat konstitusi, berkewajiban memelihara ketentraman dan kerukunan nasion-

al, yang mencakup seluruh komponen rakyat Indonesia, yang kebhinekaannya rentan terhadap unsur yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, Pancasila harus senantiasa direvitalisasi dan diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, pemahaman dengan penguatan rasa, paham dan semangat kebangsaan dapat memberi contoh bagaimana cara pandang atas keberagaman bangsa termasuk perbedaan keyakinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cara pandang dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menerima perbedaan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu terus menerus dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

## II. Pembahasan

### Mengenal Pengertian Ketuhanan

Tuhan adalah Sang Pencipta alam semesta dan penguasa alam semesta beserta isinya. Tuhan juga merupakan sumber dari segala sumber kehidupan semua yang ada di burni maupun di langit adalah ciptaan Tuhan, termasuk juga kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Artinya kita tidak memiliki Tuhan, dan tapi kita bertuhan.

Semua yang ada adalah milik Tuhan dan Tuhan bukan milik siapa-siapa. Tuhan berdiri sendiri dengan ke-Esaan-Nya. Mengenal Tuhan tidaklah harus beragama karena mereka yang tidak beragama pun mengenal dan mengerti adanya Tuhan. Agama adalah aturan tentang tata cara beribadah, bersembahyang untuk menyem-

bah kepada Tuhan. Orang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pun mengenal-Nya, dan mengerti adanya Tuhan, juga bersembahyang sesuai dengan budayanya yang diajarkan secara turun temurun dengan kearifan lokal.

Tuhan menurut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dari Persatuan Eklasing Budi Murka. Tuhan dalam ungkapan bahasa Jawa disebut, *tanpo kontho tanpo kanthi tan keno kinoo opo,* Dzat yang tidak berwujud, tidak laki-laki, tidak perempuan, dan juga bukan banci. Tuhan *adoh tanpo wangenen cedak, nunggal rimbangan*, artinya jauh yang tiada batas dekat menjadi satu—lebih dekat dengan urat nadi. Maka orang Jawa sering menyebutkan dengan *Manunggaling Kawulo Gusti.*

Tuhan itu satu, tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana. Ada di manamana karena Tuhan menguasai seluruh yang ada di alam semesta. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Adanya Tuhan karena adanya hidup. Karena ada yang hidup maka ada yang menyebut nama Tuhan. Apabila tidak ada yang hidup maka tidak ada yang menyebut Tuhan. Hidup karena ada yang menghidupi Hidup (*Urip*) harus bisa menghidupi dan hidup harus punya penghidupan. Penghidupan untuk mencukupi diri sendiri dan untuk orang lain.

Laku penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan dan menjalani budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Manusia belum bisa menjalani budi pekerti luhur sebelum ia bisa menjalankan *jekat* (iman), tirakat, puasa, sabar. Setelah

keempatnya itu bisa dijalani, barulah bisa dikatakan memiliki budi pekerti luhur. *Jekat njejake tekat marang bebener,* iman yang kuat menuju kebaikan kebenaran. Tirakatnya tidak mengeluarkan perbuatan yang membuat orang lain sakit hati (merugikan orang lain). Puasa (*poso*) tidak menerima perbuatan buruk (hasutan) dari orang lain, sabar menerima, apa adanya, apa yang sudah menjadi hak kita dengan ikhlas. Laku penghayat semua dijalankan dengan iklas tanpa adanya paksaan. Bukan karena takut neraka dan bukan karena menginginkan surga. Tetapi sebuah keikhlasan dan kesadaran untuk mencapai kesempurnaan.

Siapa yang mendapatkan rahmat dari Tuhan? Banyak anggapan-anggapan orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang beragama. Rahmat itu apa? Apakah mereka yang tidak beragama tidak mendapatkan rahmat? Ketika orang memandang Tuhan dalam pikiran, maka yang mendapatkan rahmat adalah mereka orang-orang yang beragama bergelimang harta, mempunyai banyak kendaraan, gedung mewah seperti istana, yang itu semua adalah kekayaan yang semu. Karena orang-orang yang mempunyai harta melimpah belum tentu bahagia. Harta melimpah tetapi pikiran tidak tenang juga tidak bisa bahagia.

Berbicara rahmat bukan dengan pikiran, tetapi menggunakan rasa. Orang yang hidup di pedalaman dan belum tersentuh oleh peradaban modern serta belum mengenal agama pun mereka mendaparkan rahmat dari Tuhan. Secara duniawi mereka bergelimang harta tetapi semua bisa bahagia, tertawa bebas menikmati

hidup nyaman dan tentram. Dari kesimpulan di atas, yang mendapatkan rahmat dari Tuhan adalah semua yang hidup, tidak terkecuali, baik beragama maupun tidak beragama.

Agama berasal dari kata “a” dan “gama”. Dalam bahasa Sansekerta, “a” berarti “tidak” dan “gama” berarti “kacau”. Sebuah aturan hidup manusia untuk tidak berbuat kacau. Apabila orang beragama sering melakukan kekacauan maka sebenarnya orang tersebut tidak beragama, karena agama sebagai jalan untuk mencari ketentraman bukan untuk membuat kegaduham atau kekacauan hidup secara pribadi, kelompok ataupun golongan. Negara berasaskan ketuhanan karena untuk mencapai kenyamanan dan ketentraman bersama.

Dalam filosofi Jawa yang diaktualisasikan dalam sebuah sesaji, merupakan sebuah simbol rasa syukur kepada Tuhan. Sesaji dimaknai sebagai sebuah peringatan, simbol dan sebuah doa bisu yang tak terucap karena banyaknya permohonan. Sebagai contoh tumpeng, yang makna simboliknya adalah pribadi yang kokoh, dari bentuknya yang menyerupai gunung berdiri tegak, tidak mudah goyah, dan tidak mudah roboh, simbol iman yang kuat menuju sebuah puncak titik teratas yaitu hanya mengabdi kepada Tuhan.

Tumpeng terbuat dari banyak sekali butiran-butiran nasi yang dibentuk seperti gunung, memiliki makna simbolik sebagai sebuah kesatuan dari banyak orang yang bersatu padu dalam satu tujuan sauatu kelompok ataupun negara. Untuk membentuk sebuah negara yang kuat, tidak mudah dirobohkan oleh benturan-ben-

turan maupun rongrongan baik dari luar maupun dari dalam.

Golong 2, sebuah simbul jagad *alit* (mikrokosmos) dan jagad *ageng* (makrokosmos). Tuhan berada di alam (jagad). Tuhan menguasai seluruh jagad baik itu jagad kecil maupun jagad besar. Tuhan berada di dalamnya menguasai semuanya, memberikan penghidupan kepada semua yang ada. Manusia juga termasuk alam (jagad kecil), di dalam manusia juga terdapat percikan zat Tuhan. Manusia sebagai utusan Tuhan untuk menjaga dan merawat alam semesta. Semua manusia mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan yang tercermin dalam pribadi manusia itu sendiri.

Tuhan berada di dalam dada manusia, menyatu dengan rasa yang paling jujur dan tidak pernah berbohong. Rasa yang akan menuntun manusia untuk berbuat sesuatu, bukn pikiran yang menuntun. Karena pikiran cenderung untuk mencari keuntungan secara pribadi maupun kelompok atau golongan. Rasa akan bekerja secara jujur tanpa mengambil keuntungan secara pribadi maupun kelompok. Rasa berjalan untuk kedamaian dan ketentraman baik pribadi maupun semuanya.

Pisang (*gedang*), berarti *greget marang pepadang* (mencari terang atau pencerahan), sebuah simbol untuk mendapatkan pencerahan/pepadang dari Tuhan. Doa yang tidak terucap yang disimbolkan dalam bentuk *gedang*. Semoga mendapatkan *pepadang* (sinar terang). *Pepadang* bukan dalam arti padang/terangnya sinar matahari, bintang, maupun rembulan. Karena sinar matahari, bintang, dan rembulan masih bisa terhalangi

oleh gunung, gedung dan pepohonan.

Orang yang berada didalam goa pun tidak dapat merasakan sinar matahari, bintang, dan rembulan. Dari simbol *gedang* yang dimohon adalah *pepadang* yang sejati, *pepadang* yang tiada henti yang tidak bisa dihalang-halangi oleh apa pun. *Pepadang* dari Tuhan, sehingga manusia bisa merasakan terang (*padang*) dalam rasa dan pikiran. Manusia ketika sudah mendapatkan pencerahan "*padang*" dalam rasa dan pikiran akan selalu berpikir positif dan akan merasa damai, tentram dalam hati.

**Nilai-nilai Ajaran Budaya Spiritual**

Antara manusia, keluarga, masyarakat dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan sifat manusia, selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam kehidupan sosial ini hubungan manusia berdasarkan aturan-aturan yang berupa kekerabatan, norma, adat, sistem religi atau kepentingan. Dengan adanya interaksi tersebut muncullah sebuah kebudayaan, sehingga ia merupakan usaha manusia sebagai makhluk sosial untuk memahami dan menjalani kehidupan dan menjadikannya sebagai pedoman bagi perilakunya. Dengan demikian, kebudayaan ini merupakan milik individu bersama masyarakat dan bersifat turun-temurun atau dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Menurut ahli kebudayaan, Koentjoroningrat, kebu-

dayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari, misalnya pakaian, perumahan, alat rumah tangga
b. Sistem pencaharian dan sistem ekonomi
c. Sistem kemasyarakatan, misalnya sistem kekerabatan, sistem perkawinan dan warisan
d. Bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa lisan dan tulisan
e. Ilmu pengetahuan dan kesenian, seni suara, rupa dan gerak
f. Sistem religi

Sistem religi yang merupakan salah satu unsur kebudayaan mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hidup masyarakat, moral religi dijadikan dasar falsafah atau pedoman hidup. Pada setiap perilaku manusia selalu melibatkan unsur spiritual dan berusaha untuk menyelaraskan perilaku tersebut dalam hubungannya dengan alam dan sesamanya. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, moral religi (ajaran budaya spiritual) masih memiliki peran yang penting. Terkadang tanpa disadari, manusia atau masyarakat sekarang masih berpedoman pada budaya spiritual, misalnya ketika mengadakan upacara ritual di desa, upacara kelahiran, perkawinan, kematian, sopan santun/tatakrama bersikap dan sebagainya.

Ajaran budaya spiritual (Jawa) banyak dijumpai

pada cerita wayang, ungkapan-ungkapan atau pitutur luhur, bahasa (sebagai alat komunikasi), upacara rirual, dan ajaran budaya spiritual yang berasal dari *wewarah, seserapan* yang telah dilaksanakan oleh para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Eaa pada masa sekarang. Di dalam ajaran budaya spiritual, terkandung pengertian bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap Tuhan, lingkungan, dan sesamanya.

Pagelaran wayang tidak hanya sekedar pertunjukan bayang-bayang tetapi sebagai gambaran/bayangan hidup manusia (*gegambaraning ngaurip*). Wayang bukan hanya pagelaran yang bersifat menghibur, tetapi sarat dengan nilai-nilai falsafah hidup. Tokoh-tokoh dalam wayang merupakan gambaran dari sikap, watak, dan karakter manusia. Dalam suatu pertunjukan wayang, diceritakan perjalanan kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal. Dari cerita tersebut diperoleh pesan-pesan moral luhur yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan manusia baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Sampai sekarang tokoh-tokoh dalam pewayangan sering diidolakan oleh penontonnya dan dijadikan panutan bahkan simbol dalam kehidupan masyarakat, misalnya tokoh-tokoh Pandhawa (Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa), Punokawan (Semar, Gareng, Petruk, Bagong), sehingga tokoh dalam wayang tersebut tidak lagi terbatas pada kerangka pertunjukan, tetapi sudah menjadi simbol pada budaya modern. Tentu saja tokoh yang diidolakan masyarakat adalah

tokoh yang mempunyai perilaku yang baik/positif dalam kehidupannya.

Ungkapan atau pitutur leluhur sampai sekarang masih sering dijumpai bahkan dihayati atau dijadikan panutan bagi masyarakat modern, misalnya:

1. *Elinga marang sangkan paraning dumadi*
2. *Sepi ing pamrih rame ing gawe*
3. *Mikul dhuwur mendhem jero*
4. *Aja dumeh*
5. *Anak polah bapa kepradhah*
6. *Tega larane ora tega patine*
7. *Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan*
8. *Manjing ajur ajer*
9. *Sugih tanpa bandha, sekti tanpa aji-aji, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake*
10. *Eling marang bibit kawit, dan sebagainya*

Pitutur luhur tersebut menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam interaksi sosial, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Perilaku manusia terlihat pada ucap, ulat dan ulah. Ucap, ulat dan ulah merupakan bentuk ekspresi dari apa yang dirasakan dan diinginkan, sehingga antara ucap, ulat dan ulah saling berhubungan bahkan menjadi satu kesatuan sikap. Ucap adalah bentuk ekspresi dari bahasa lisan. Ulat adalah bentuk ekspresi dari raut wajah, sedangkan ulah adalah ekspresi dari gerak tubuh.

Ajaran budaya spiritual yang juga mempunyai peranan penting adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan (huruf). Dengan bahasa manusia berusaha menyampaikan rasa, keinginan atau maksud dari ucapan atau tulisan yang dibuatnya. Hal ini berarti bahasa merupakan sarana komunikasi manusia. Orang Jawa (*wong jawa*) berbicara dengan rasa. Terkadang kita mendengar seseorang mengatakan *"yen tak rasakke"* dan bukan *"yen tak pikir"* dalam komunikasi manusia selalu melibatkan sesuatu yang bersifat spiritual, yaitu rasa, batin dan manah.

Dalam bahasa lisan Jawa (bahasa Jawa) mengandung nilai-nilai ajaran yang berhubungan dengan tata krama, sopan santun dalam berbicara. Hal ini ditunjukan dengan adanya tingkat penggunaan dalam tata bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa *ngoko, krama,* dan *inggil*. Penggunaan masing-masing tingkatan didasarkan pada usia dan fungsi dari siapa yang diajak komunikasi. Ketika akan berkomunikasi dengan teman, saudara, adik, kakak, orang tua, orang yang lebih tua dan sebagainya tentu memakai tingkatan tata bahasa yang berbeda.

Bahasa tulisan (huruf) Jawa juga mempunyai nilai ajaran spiritual. Huruf Jawa bukan sekedar deretan huruf yang mempunyai makna setelah dirangkai menjadi kata atau kalimat, tetapi juga menggambarkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan *sangkan paran* dan sesamanya. Rangkaian huruf Jawa mengandung cerita tentang hidup manusia. Setiap huruf Jawa bersifat hidup dan mempunyai arti.

Membentuk Perilaku Positif di Lingkungan Keluarga

Hubungan terdekat manusia dalam bermasyarakat adalah hubungan dalam keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, para anggotanya dapat berhubungan secara langsung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan bentuk kecil dari masyarakat. Kelompok dari keluarga dibedakan antara keluarga inti dan kekerabatan yang lebih luas (keluarga besar). Keluarga inti yang lengkap mempunyai anggota bapak, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar dapat beranggotakan keluarga inti dan kekerabatan yang lebih luas misalnya saudara dari bapak/ibu, orang tua atau nenek kakek dari bapak/ibu.

Setiap anggota keluarga mempunyai fungsi dan peranan masing-masing sesuai dengan statusnya. Bapak dan ibu mempunyai status sebagai orang tua dari anak. Sesuai dengan statusnya, masing-masing anggota keluarga mempunyai fungsi, misalnya sebagai berikut:

a. Bapak

Pada masyarakat Jawa, istilah bapak mempunyai sebutan lain yaitu *bapa, rama.* Di samping berfungsi sebagai orang tua dari anak, peran seorang bapak adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan sebuah keluarga. Seorang bapak juga mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anaknya.

b. Ibu

Istilah ibu dalam bahasa Jawa mempunyai beberapa sebutan, misalnya *simbok, simak, biyung, biyang.* Hal

ini memungkinkan peranan ibu yang juga banyak dalam keluarga. Di samping sebagai orang tua dari anak, ibu juga mempunyai peran besar dalam keberlangsungan sebuah rumah tangga. Peran seorang ibu terhadap anak sudah dilakukan semenjak anak masih dalam kandungan, yaitu melindungi, merawat dan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan. Peran ini tidak berhenti bahkan sampai anak sudah lahir, tumbuh dan dewasa, dan kemudian membentuk sebuah keluarga sendiri, sebutan ibu tidak berubah, yaitu bahwa ibu adalah seorang ibu bagi anaknya.

c. Anak

Dalam budaya Jawa terdapat ungkapan bahwa anak itu ada karena "*dianakke*". Hal ini berarti keberadaan seorang anak tidak lepas dari peran bapak, ibu, dan Yang Mengadakan (*Sangkan paraning dumadi/Gusti kang Murbeng Dumadi)*, sehingga muncul istilah *anak iku mung saderma momongan* (anak hanya titipan Tuhan). Istilah anak di sini tidak terbatas pada satu orang anak, tetapi bisa anak pertama (*mbarep*), anak kedua, anak ketiga dan seterusnya.

Anak bisa berwujud laki-laki atau anak perempuan. Fungsi anak *mbarep* dirasa lebih besar, karena menjadi contoh bagi adik-adiknya. Bahkan dapat mewakili figur bapak atau ibu ketika figur tersebut tidak ada. Kemudian muncul ungkapan kalau anak laki-laki *pembarep* adalah *sulihing* bapak, sedangkan anak perempuan *pembarep* menjadi *sulihing* ibu.

Untuk kekerabatan yang lebih besar, fungsi dan

peranan antar manusia tidaklah sebesar pada keluarga inti. Meskipun ada sebutan *pakdhe* (bapak *gedhe*), *paklik* (bapak *cilik*), *budhe* (ibu *gedhe*), *bulik* (ibu *cilik*), tetapi fungsi dan peranan mereka tidak sebesar pada sebutan dalam keluarga inti (bapak, ibu). Demikian juga untuk sebutan nenek dalam bahasa Jawa, yang disebut *simbah* putri atau *eyang* putri dan kakek, *simbah kakung* atau *eyang kakung*.

Ajaran budaya spiritual berkaitan erat atau bahkan menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalani hidup baik dalam hubungannya dengan *sangkan paraning dumadi* atau dengan sesama manusia dan lingkungannya. Orang Jawa dikatakan mempunyai perilaku yang baik/positif apabila sudah melaksanakan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ajaran nilai-nilai moral spiritual/budaya spiritual Jawa, sehingga bisa dikatakan bahwa ajaran budaya spiritual (Jawa) menjadi dasar/modal bagi terbentuknya perilaku luhur, baik, dan positif.

Seorang bapak, (*bapa, rama*) mempunyai fungsi dan kewajiban seperti sebutan yang disandangnya, yaitu sebagai kepala keluarga, membuat kebijakan/peraturan dalam keluarga dan mencukupi kebutuhan anggota keluarga (material dan non material). Setiap peraturan dalam keluarga yang dibuat oleh bapak sudah seharusnya dilaksanakan oleh anggota keluarga.

Kebutuhan material suatu keluarga meliputi kebutuhan lahiriah sehari-hari, sedangkan kebutuhan non material meliputi suasana ketentraman, kenyamanan dan keadilan dalam keluarga. Suatu contoh peringa-

tan dalam perilaku yang tidak baik tentang keadilan adalah adanya ungkapan/pitutur *"mban cindhe mban ciladan"*. Arti dari ungkapan ini adalah bahwa seorang bapak sudah berlaku tidak adil terhadap anak-anaknya yaitu dengan membeda-bedakan anak yang lebih disayang, diperhatikan dan yang tidak/kurang disayang/diperhatikan.

Hal tersebut dapat menimbulkan suasana keluarga yang tidak nyaman dan tentram, karena menimbulkan rasa sakit hati dan tersingkirkan dalam keluarga dan lebih jauh dapat menimbulkan permusuhan antar anak. Sebaliknya ungkapan "*anak polah bapa kepradhah*" juga mempunyai maksud peringatan bagi seorang bapak untuk tidak menuruti semua keinginan anak yang justru dapat menyusahkannya karena akan menanggung kesusahan yang diakibatkan oleh perilaku anak yang tidak baik.

Seorang ibu sesuai dengan sebutannya mempunyai fungsi, peran dan kewajiban yang tidak kalah penting dengan peran seorang bapak dalam keluarga. Seorang ibu dikatakan sebagai kepala rumah tangga, yang secara tersirat mempunyai peran mengatur urusan-urusan rumah tangga. Pada masa sekarang peran ibu bukan saja menjalankan "*ma telu*" tetapi juga banyak yang melakukan "*ma lima*" dalam arti positif yaitu *macak, manak, masak, makarya* dan *makarti*, yang mempunyai arti merias dan merawat diri, memberikan keturunan, mencukupi kebutuhan akan makan, berkarya (menghasilkan uang) dan laku spiritual. Oleh karena itu ada ungkapan "*pujine ibu iku mandi tumrap anakke*" (doa

seorang ibu untuk anaknya biasanya dikabulkan oleh Tuhan).

Dalam cerita pewayangan sosok ideal dari seorang ibu sering difigurkan pada tokoh ibu dari Pandhawa, yaitu Kunthi Talibrata. Peran seorang ibu yang berperilaku baik/positif dalam merawat, membesarkan, melindungi, dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya, Yudhistira, Brotoseno, Janaka dan yang dianggap seperti anak kandungnya sendiri yaitu Nakula dan Sadewa.

Nakula dan Sadewa adalah putra dari Dewi Madrim. Di sinilah sikap yang terpuji dari seorang ibu tentang keadilan, yaitu perilakunya sudah menunjukan sikap yang adil terhadap semua anaknya, baik anak kandung atau bukan anak kandung, sehingga ungkapan peringatan "*mban cinde mban ciladan*" tidak dilakukannya.

Seperti telah disebutkan bahwa kehadiran seorang anak adalah berasal dari orang tua yang telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat, membesarkan dan mendidik, sehingga peran orang tua terhadap anak sangatlah besar bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa seberapa pun anak membalas jasa orang tua tidak akan pernah lunas. Oleh karena itu, untuk membentuk perilaku positif seorang anak dalam berinteraksi dengan orang tua adalah dengan cara menghormati, mendengarkan dan menjalankan apa yang menjadi peraturan keluarga.

Penghormatan terhadap orang tua diwujudkan dengan sikap yang mencerminkan sopan santun, unggah-ungguh, dan budi pekerti. Ketiga unsur yaitu ucap,

ulat dan ulah yang diekspresikan seorang anak harus menunjukkan sopan santun/tata karma, sehingga ungkapan *"eling marang bibit kawit"* tidak hanya berlaku untuk eling kepada Sang Yang Wenang atau Tuhan saja, tetapi berarti juga ingat pada yang menjadi lantanran keberadaan seorang anak di dunia, yaitu orang tua (bapak dan ibu).

Ungkapan *"mikul dhuwur mendhem jero"* kiranya juga cocok untuk menuntun perilaku yang baik seorang anak terhadap orang tua. Secara luas ungkapan ini berarti menghormati orang tua setinggi-tingginya dan memendam atau menutupi kekeliruan atau kesalahan dan kekurangan yang telah diperbuat oleh orang tua di lingkungannya sedalam-dalamnya, sehingga *mikul dhuwur mendhem jero* itu tidak hanya berarti memikul jenazah orang tua yang telah meninggal menuju pemakaman dan kemudian menguburkannya saja.

Hubungan antara seorang anak yang satu dengan anak yang lainnya seharusnya juga berdasarkan pada aturan sopan santun. Untuk membentuk perilaku yang baik dalam hubungan antar anak, juga seharusnya berdasarkan sifat saling menghormati. Penghormatan seorang adik terhadap kakaknya sifatnya penting, karena dalam situasi tertentu, seorang kakak dapat menggantikan peran orang tua yaitu *momong* atau membantu orang tuanya dalam merawat adiknya. Istilah *momong* diwujudkan dalam sikap membimbing, menemani bahkan menjadi tempat mencurahkan masalah seorang adik yang tidak dapat diutarakan kepada orang tuanya. Dalam istilah sehari-hari fungsi seorang kakak adalah

sebagai "*sulihing bapa*" untuk kakak laki-laki dan "*sulihing ibu*" untuk kakak perempuan.

Dalam kenyataan sehari-hari kadang hubungan antara kakak beradik tidak selalu harmonis karena masing-masing mempunyai sifat dan cara hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu terdapat ungkapan "*tega larane ora tega patine*". Meskipun terdapat perbedaan sikap antar saudara dan menimbulkan perselisihan, tetapi sampai tidak menimbulkan hal-hal yang drastis. Ungkapan ini juga dapat digunakan untuk mengingatkan kepada manusia supaya dapat mengendalikan diri dalam bersikap ketika terdapat perbedaanp pandangan diantara saudara atau hubungan dalam keluarga. Hal ini dikarenakan seberapapun besarnya perbedaan sifat dan pandangan antara kakak beradik, tetapi keduanya masih mempunyai satu hubungan yang dekat, yaitu sebagai saudara.

Dalam pewayangan perilaku seorang anak terhadap orang tuanya digambarkan dalam cerita yang menunjukan kepatuhan para anggota Pandhawa terhadap ucapan dan berusaha mewujudkan harapan dan keinginan orang tua mereka yaitu ibu Kunthi.

### Membentuk Perilaku Positif di Lingkungan Masyarakat

Selain sebagai anggota keluarga, manusia juga merupakan anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa keluarga adalah bentuk kecil dari masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat terdapat komunitas sejumlah keluarga, sebagai contoh hubun-

gan dalam RT/rukun tetangga atau RW/rukun warga atau hubungan dalam suatu wilayah yang lebih luas, misalnya daerah, atau bahkan negara, sehingga hubungan antar manusia dalam masyarakat sering terjadi secara langsung dengan bertatap muka seperti hubungan dalam keluarga.

Untuk membentuk perilaku yang baik/positif memerlukan sikap-sikap yang berdasarkan norma-norma yang luhur. Ajaran budi luhur dari budaya spiritual memberi pengertian pada manusia untuk tidak bersikap egois, tetapi selalu mengutamakan kepentingan bersama. Perilaku ini terlihat dengan sikap yang berdasarkan prinsip "*sepi ing pamrih rame ing gawe*".

Ajaran tersebut menuntun sikap manusia dalam hidup bermasyarakat, agar mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadinya dan senantiasa lebih mendahulukan kebutuhan bersama. Pada situasi sekarang ungkapan ini masih sering terdengar di ucapan seseorang, meskipun dalam pelaksanaannya tidak benar-benar mencerminkan nilai ajaran itu. Biasanya orang yang sering menggunakan kalimat ini justru patut dicurigai sebagai orang yang mempunyai sifat pamrih, yaitu dengan memaksakan keinginan-keinginannya baik secara terang-terangan atau terselubung., sehingga orang-orang tersebut berbuat baik, tetapi di balik sikapnya tersebut mengandung suatu kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan harapan orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Dalam sikap interaksi antar masyarakat tidak selalu bersifat harmonis, keadaan terkadang tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan. Perbedaan-perbedaan dimungkinkan ketika manusia berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai bermacam-macam sifat dan prinsip yang berbeda. Karena itu, sikap "*manjing ajur ajer*" (menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan) sepantutnya juga dilakukan. Ajaran *manjing ajur ajer* dapat membentuk perilaku manusia untuk selalu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat di sekitarnya, sehingga hubungan yang bersifat harmonis, tentram, dan tenang dapat terus dijaga. Tentu saja prinsip ini juga berdasarkan pada situasi di mana masyarakatnya juga dalam keadaan yang baik, bukan sedang dalam situasi kacau. Dengan kata lain *manjing ajur ajer* dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang positif.

Budaya spiritual juga mengajarkan manusia untuk mempunyai empati terhadap sesamanya, saling tolong menolong dan membantu sesamanya. Perilaku ini sesuai dengan ungkapan "*dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan*", artinya bukan saudara bukan kerabat, kalau meninggal ikut merasa kehilangan. Ketika seseorang yang bukan saudara atau kerabat sedang menderita, manusia semestinya dapat ikut merasakan dengan berusaha memberikan perhatian dan membantu, menolong sesuai dengan kemampuannya.

Nilai ajaran budaya spiritual berketuhanan mempunyai pengertian luhur dan dalam pelaksanaannya tidak semudah membicarakannya, yaitu ajaran "*sugih tanpa bandha, sekti tanpa aji-aji, nglarung tanpa bala, kalah tanpa ngasorake*". Ajaran ini berasal dari seorang

pelaku budaya spiritual yaitu alm. RM. Sosrokartono. Arti dari kalimat tersebut adalah kaya tanpa harta, sakti tanpa jimat, menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa menghina lawan.

*Sugih tanpa bandha* mempunyai pengertian bahwa manusia seyogyanya tidak mementingkan kekayaan materi atau harta benda, tetapi yang lebih penting adalah mengupayakan kekayaan rasa/batin. *Sekti tanpa aji-aji* menuntun manusia untuk tidak mengandalkan ajian kesaktian dalam melaksanakan kewajiban hidupnya, tetapi yang lebih mengutamakan bagaimana membuat agar dirinya mempunyai kepribadian yang baik sehingga dapat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Apa yang diucapkan dapat tepat sasaran (Jawa: mentes). *Nglurug tanpa bala* mengandung ajaran bahwa dalam menyelesaikan suatu tugas jangan bergantung kepada orang lain melainkan berdasarkan pada kemampuan diri sendiri. *Kalah tanpa ngasorke* berarti mengalahkan tanpa membuat lawan merasa malu, tetapi lawan tetap menyadari kekalahannya. Pengertian kalah menang adalah merujuk pada masalah rasa/batin.

Ajaran tersebut di atas terasa berat untuk dilaksanakan pada zaman sekarang ini yang semuanya terlihat sangat berbeda keadaannya dengan nilai ajaran tersebut. Di zaman sekarang masyarakat banyak terpengaruh pada budaya materialistis pragmatis. Banyak yang lebih mementingkan kebutuhan duniawinya dari pada kekayaan rasa. Banyak orang yang tidak mempunyai jiwa yang mandiri, sehingga selalu mengandalkan

pada orang lain untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidupnya.

Pada masyarakat sekarang banyak persoalan yang dalam penyelesaiannya berdasarkan menang dan kalah. Dalam menang dan kalah selalu ada yang merasa menang dan ada yang merasa kalah. Yang merasa menang akan merasakan kepuasan, sedangkan yang kalah akan merasakan kehancuran atau merasa jadi korban. Dengan adanya perasaan menang atau kalah dapat memicu rasa malu, sakit hati dan dendam pada pihak yang kalah.

Sikap atau perilaku manusia seharusnya mencerminkan perilaku yang baik/positif, karena setiap perbuatan itu selalu ada hasilnya. Di sini berlaku hukum sebab akibat. Setiap perbuatan manusia itu mempunyai konsekuensinya, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Pitutur luhur yang mengandung nilai ajaran sebab akibat adalah "*ngundhuh wohing pakarti*". Masyarakat Jawa sangat mengerti dengan ungkapan ini. Apabila seseorang berbuat baik maka dia akan memperoleh imbalan yang baik, tetapi kalau dia berbuat buruk maka akan mendapat balasan yang buruk pula. Balasan yang buruk bagi seseorang belum tentu dilakukan oleh orang yang berkaitan, tetapi mungkin dilakukan oleh orang lain dan dapat terjadi pada waktu yang berlainan.

Contoh dalam cerita Pewayangan adalah pada kisah hidup Pandhawa dan Kurawa. Para Pandhawa mempunyai sikap atau perilaku yang baik, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya para Kurawa

yang bersikap buruk dengan sikapnya yang mencerminkan sikap *adigang, adigung* dan *adiguna* yang mementingkan kebutuhan duniawi dan penuh angkara murka pada akhir hidupnya menemui kesengsaraan dan bahkan kematian.

Bahasa juga mempunyai peran yang penting dalam komunikasi di lingkungan masyarakat. Seperti halnya komunikasi di lingkungan keluarga, komunikasi di lingkungan masyarakat, juga seharusnya berdasarkan pada aturan sopan santun dan tata krama pada keluarga sama dengan pada masyarakat.

Dalam berkomunikasi manusia harus berdasarkan saling menghormati. Bahasa yang digunakan juga harus disesuaikan dengan siapa dan fungsi dari orang yang diajak berkomunikasi, sehingga orang yang diajak berkomunikasi dapat memahami, mengerti maksudnya dan bahkan kalau diperlukan ikut melaksanakan apa yang telah diutarakan oleh penuturnya. Artinya, bahasa yang digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan rasa dan keinginan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

## III. Penutup

Ajaran Persatuan Eklasing Budi Murka (PEBM) adalah mengenal Tuhan dalam diri pribadi, dan untuk mengenal Tuhan dalam diri pribadi harus mengetahui apa yang ada dalam diri pribadi manusia, yang termuat dalam diri pribadi manusia, termuat dalam ajaran 40. Dalam tahapan dasar ilmu keterangan ajaran PEBM dan ajaran yang paling utama adalah laku (perbuatan)

dalam kehidupan sehari-hari sesuai wasiat dari pendiri Eyang Kaki Mangun Wijoyo, *eklasno budi murkamu* (ikhlaskan perbuatan angkara murkamu), agar kita tidak menjalankan perbuatan angkara murka. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila!

## Referensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Sulistyowati, Sri Endang. *Nilai-Nilai Ajaran Budaya Spiritual Sebagai Aset Menuju Revolusi Mental.* Makalah dipresentasikan pada Sarasehan Budaya Spiritual Daerah Istimewa Yogyakarta, 19-20 Agustus 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# Bagian Kedua

## Relasi Agama dan Pancasila: Sebuah Kajian Filosofis

# KAJIAN SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DARI PERSPEKTIF KESETARAAN AGAMA-AGAMA

*Andreas A. Yewangoe*[*]

## I. Pendahuluan

Dalam uraian-uraian berikut kita akan mencoba meninjau sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dari perspektif kesetaraan agama-agama. Saya berasumsi bahwa rumusan sila ini memberi kesempatan yang sama kepada para penganut agama yang berbeda-beda di negeri kita untuk memberikan sumbangan konkritnya bagi kehidupan bersama.

## II. Pembahasan

### Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Dasar dari Dasar

Setelah Bung Karno menguraikan dan mengusulkan 4 (empat) prinsip sebagai dasar negara dalam pidato 1 Juni 1945 itu, ia lalu mengusulkan sebagai prinsip ke-5, tentang prinsip "Ketuhanan". itempatkannya prinsip Ketuhanan ini di bagian akhir, bukan karena tidak penting atau mengecilkan maknanya (sebagaimana pernah disinyalir demikian oleh seorang tokoh di negeri

* Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI).

kita), tetapi justru sebaliknya, sangat penting. 4 (empat) prinsip pertama, yaitu Kebangsaan (Nasionalisme), Kemanusiaan (Internasionalisme), Mufakat (Demokrasi), dan Kesejahteraan (Keadilan) mengatur relasi-relasi antar-manusia (manusia dengan kebangsaannya, manusia dengan sesamanya, manusia di dalam komunitasnya/politik, manusia dalam kaitan dengan perwujudan kesejahteran dan keadilan), dan karena itu bersifat horizontal. Prinsip ke-5 mengatur hubungan antara manusia yang telah sepakat untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara itu dengan Tuhan atau yang diyakini sebagai Tuhan. Maka relasi itu adalah relasi vertikal.

Di dalam setiap agama kedua jenis relasi ini ada. Keyakinan Kristen mengungkapkannya sebagai "mengasihi Allah" dan "mengasihi sesama manusia". Tidak mungkin seseorang mengklaim mengasihi Allah kalau tidak diungkapkan dalam kasih terhadap sesama. Sebaliknya kasih terhadap sesama mesti mempunyai sumber yang darinya terus ditimba yaitu yang melampaui hal-hal yang bersifat insani dan material. Maka prinsip ke-5 adalah "dasar dari dasar". Mari kita cermati pernyataan Bung Karno: "Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya berTuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang

ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan (Sukarno, Pidato 1 Juni 1945)."

Dalam pengamatan Hendragunawan S.Thayf, dkk (2020: 108). Sukarno mendahulukan dasar politik dengan menempatkan keempat sila sebelum sila Ketuhanan. Sukarno, kata mereka tentunya tidak bermaksud mengabaikan pentingnya nilai ketuhanan dalam urutan awal itu. Secara hermeneutik, susunan sila yang diajukan Sukarno dapat dipahami bahwa berketuhanan sebagai suatu pandangan hidup pasti berlandaskan pada dan memerlukan materialitas. Selain itu, manifestasi religiusitas memang seharusnya merupakan konsekuensi logis yang final dari terealisasinya nilai-nilai dari sila-sila yang lebih awal.

Perubahan susunan Pancasila sebagaimana tertera dalam rumusan final 18 Agustus 1945 (setelah mengalami "koreksi" terhadap naskah 22 Juni 1945, Piagam Jakarta) tidak mengubah substansi dari apa yang dikatakan di atas, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar dari dasar. Dalam perubahan susunan itu, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *leitstar* (bintang penuntun) bagi sila-sila lainnya. Di sini kita melihat sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang memimpin sila-sila lainnya merupakan wujud spiritualitas bangsa Indonesia yang menggantungkan harapannya pada "unsur gaib yang memberikan petunjuk dan yang akan mendorong kita ke jalan yang benar", dan landasan bagi akhlak mulia bila "pengertian akan Ketuhanan Yang Maha Esa agar difahamkan benar-benar (S.Thayf, dkk, 2020: 108)."

Dalam terminologi teologi Kristen, iman kepada Tuhan disebut *credenda*; dan bagaimana sikap serta perilaku kita kepada sesama (di dalam lingkungan/komunitasnya) disebut *agenda*. "Credenda" tanpa "Agenda" adalah kosong, sedangkan "Agenda" tanpa "Credenda" adalah tanpa arah. Kalau seseorang hanya berkanjang ada Credenda, maka ia hanya sibuk dengan urusan surga, dan alpa menjadikan dunia ini sebagai surga. Credenda tanpa agenda adalah menghayalkan surga dan cenderung bahkan menjadikan dunia sebagai "naraka", atau mengorbankan dunia demi memperoleh surga.

**Iman dan Agama**

Konon, Gus Dur pernah mengatakan: "Saya dan Pak Harto itu satu agama tetapi berbeda iman, tetapi saya dan Romo Mangun berbeda agama namun sama imannya." Apa persis yang Gus Dur maksudkan tentu dia sendirilah yang mengetahuinya. Kalau ucapan ini benar begitu, ini juga hendak mengatakan bahwa kendati iman itu mempunyai kaitan erat dengan agama, namun keduanya tidak identik.

Iman adalah keyakinan terdalam dari seseorang terhadap sesuatu yang (dianggap) agung, seperti Tuhan atau yang dianggap Tuhan. Iman itu terpateri di dalam hati, tidak kasat mata, tidak diketahui oleh orang lain selain dirinya sendiri dan Tuhan. Tetapi ketika iman itu diungkapkan melalui agama, maka orang lain dapat melihatnya. Hingga pada derajat ini rasanya tidak ada masaalah dalam interaksi dengan sesama. Lain halnya apabila iman telah mengalami pelembagaan. Agama adalah pelembagaan atau institusionalisasi dari iman.

Dalam pelembagaan itu kita dapat melihat organisasinya, ritualnya, rumusan ajaran-ajarannya, kegiatan-kegiatan sosialnya, dan seterusnya. Dalam keadaan seperti itulah, para penganut agama yang berbeda-beda itu dapat berbenturan satu terhadap yang lainnya. Kelompok yang satu dapat saja mengklaim bahwa ajaran agamanya jauh lebih benar dari ajaran kelompok lainnya. Maka karena itu, Bung Karno memberikan tanda awas atau peringatan penting: "Segenap rakyat Indonesia hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tidak egoisme agama" (Pidato 1 Juni 1945).

Sesungguhnya agama mempunyai fungsi sosial, terbuka kepada sesama, bahkan kepada alam semesta. Alhasil, sikap 'egoisme agama' dalam beragama adalah sesuatu yang berlawanan di dalam dirinya sendiri, *contradictio in terminis*. Mestinya tidak boleh ada agama yang seperti itu. Kita memang bertuhan, tetapi juga berkebudayaan. Artinya di dalam kita mengamalkan ajaran-ajaran dan ketentuan-ketentuan Tuhan, kita diajak untuk menginsyafi dan melihat bahwa kita tidak selalu berada dalam lingkup kebudayaan yang homogen. Di dalam pergaulan antar-manusia yang sangat cepat ini, maka heterogenitas masyarakat adalah suatu keniscayaan. Maka tidaklah mungkin kita berlaku tertutup dengan memutlakkan keberagamaan (religiositas) kita sendiri. Kita mestinya menyadari bahwa di samping kita ada juga orang-orang lain yang mempunyai agama yang berbeda. Bahkan di dalam agama yang sama pun kemungkinan adanya perbedaan interpretasi adalah sesuatu yang mungkin.

Kita mendengarkan Bung Karno selanjutnya: "Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, mau pun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta pora, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pidato 1 Juni 1945).

Jelas sekali penjelasan Bung Karno ini. Beragama sebagai ungkapan beriman di atas ranah sejarah ini mestilah dilakukan dengan cara yang berkeadaban. Berkeadaban adalah lawan kata dari kebiadaban. Berkeadaban adalah sikap saling hormat-menghormati di antara para penganut agama-agama yang berbeda-beda itu. Tentu saja saya mempunyai hak untuk tidak setuju dengan isi ajaran dari agama tetangga saya. Tetapi saya sama sekali tidak berhak untuk mencela agama dan sesembahannya itu. Di dalam masyarakat yang berkeadaban, yang berbudipekerti luhur saya bahkan berkewajiban menghormati tetangga saya itu dengan keyakinan dan sesembahannya. Itulah toleransi. Itulah *verdraagzaamheid.*

*Verdraagzaanheid* adalah istilah bahasa Belanda yang dipergunakan Bung Karno untuk mengacu kepada makna toleransi. Secara harafiah, *verdraagzaamheid* berarti "kesabaran". Kata ini dibentuk dari "*verdraagzaam*" yang berarti menahan, menanggung (sakit), menyabarkan. Kata ini juga punya sangkut-paut dengan "*dragen*" yang berarti menggotong, memikul, menatang, menanggung (sengsara) (M.A.Tair, 1957).

Dengan mengacu kepada makna kata-kata ini kita dapat mengatakan, bahwa di dalam bertoleransi dengan orang lain, kita diminta untuk sedikit mengorbankan kebebasan itu. Kita tidak bisa bertindak dan berlaku "mutlak-mutlakan". Saya memang bebas mengungkapkan iman saya di muka umum, namun kebebasan itu dibatasi juga oleh kebebasan orang lain guna melakukan hal yang sama. Pada akhirnya kita semua akan menanggung bersama beban beragama dan kemajemukan di dalam masyarakat kita.

## Bukan Soal "Benar" atau "Salah"

Di dalam mengungkapkan iman melalui agama, kita diminta untuk tidak menghakimi agama-agama lain berdasarkan ukuran yang ada di dalam agama kita sendiri. Tentu saja secara internal, atau di dalam lingkungan dan komunitas saya sendiri saya meyakini kebenaran dari agama yang saya anut itu. Tetapi keyakinan itu tidak pada tempatnya diungkapkan di muka umum dengan memperlihatkan kesalahan agama-agama lain. Janganlah kita memadamkan lilin-lilin orang lain hanya supaya lilin kita sendiri yang kelihatan.

Dalam kaitan ini saya teringat akan sebuah drama atau sandiwara berjudul, *“Nathan der Weise”* (Nathan Si Arif) sebagaimana diceriterakan oleh Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), seorang pemikir era Pencerahan di Jerman. *Setting* dari drama itu adalah Yerusalem sekitar tahun 1192. Para karakternya adalah Saladin, Nathan, Young Templar, Patriach, Biarawan, Recha, Sitta, Al-hafi. Menurut plot cerita itu, Sultan Saladin, penguasa Islam waktu itu bertanya kepada Nathan, dari ketiga agama (Yahudi, Kristen, Islam), manakah yang benar? Tentu Nathan tidak menjawab entah ini atau itu. Ia menjawabnya melalui sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang mempunyai 3 orang putra yang sama-sama disayanginya. Sebelum meninggal ia ingin mewariskan sesuatu yang sangat berharga bagi ketiga putranya itu. Apakah yang paling berharga itu? Sebuah cincin. Tetapi bagaimana caranya memberikan cincin yang hanya satu itu? Tidak mungkin ia hanya memberikannya kepada salah seorang dari putra-putranya, sebab hal itu berarti menimbulkan kecemburuan dua putra lainnya. Karena itu ia mencari akal. Secara sangat rahasia ia meminta seorang jauhari untuk membuat dua tiruan cincin tersebut. Tiruan itu begitu sempurna sehinggga bahkan sang raja sendiri pun tidak tahu lagi mana yang asli dan mana yang tiruan dari ketiga cincin tersebut. Ketika menjelang wafatnya, setiap putra raja menerima cincin yang dianggapnya asli. Mereka pun tidak tahu juga mana yang asli dan yang tiruan.

Rasanya makna dari cerita ini cukup jelas. Tidak ada guna dan tidak relevan lagi untuk bertengkar dan

berbalah-balah anakah dari ketiga cincin itu yang asli dan tiruan. Pembuktiannya akan terlihat dari "buah" yang dihasilkan melalui perbuatan ketiga putra raja itu. Apakah mereka melakukan kebajikan atau tidak? Penghakimannya tidak terletak pada cincin (dalam hal ini, agama), tetapi pada kebajikan yang dilakukan oleh penganut agama-agama tersebut bagi kemaslahatan bersama.

Kalau drama atau sandiwara ini diterapkan di Indonesia kepada 6 agama dan penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita boleh berimajinasi bahwa 6 agama dan penghayat masing-masing memperoleh cincin dari Sang Raja. Bertengkar untuk mempertanyakan manakah yang asli dan yang tiruan, manakah yang lebih benar dan mana yang tidak, bukan saja tidak relevan tetapi juga menghabiskan waktu dan energi. Adalah lebih baik berlomba-lomba melakukan kebajikan di dalam masyarakat.

Saya melihat adanya ruang yang sangat luas bagi terjadinya yang disebut moderasi beragama. Peluang untuk adanya kerja sama lintas agama guna mewujudkan kebajikan di dalam masyarakat sangatlah besar. Misalnya saja bagaimana secara bersama-sama mewujudkan sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang selama ini terlampau dianaktirikan. Dalam masa pandemik Covid-19 ini di mana secara tidak diskriminatif wabah itu menyerang siapa saja adalah isyarat penting bagi penganut agama-agama yang berbeda-beda ini untuk tidak berbantah-bantah mengenai "kebenarannya" masing-masing, tetapi bergandengan

tangan saling membantu membebaskan ras manusia dari ancaman yang mematikan ini. Kita kutip lagi Bung Karno: “Di sinilah, di dalam pengakuan azas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya” (Pidato 1 Juni 1945).

### Bertuhan secara Kebudayaan (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

Inilah ungkapan Bung Karno sebagaimana telah kita kutip di atas. Ini tidak berarti bahwa Tuhan adalah hasil atau produk dari kebudayaan. Dalam pandangan teologi Kristen, Tuhan bukanlah hasil imajinasi manusia yang kemudian dimuarakan di dalam berbagai rumusan kebudayaan. Tuhan menyatakan Dirinya kepada manusia. Ini disebut Penyataan Allah atau *Revelatio Dei*. Manusia merespons atau merefleksikan Penyatan Diri Allah itu melalui imannya. Di dalam ia merefleksikan imannya itu sudah pasti berbagai instrumen yang terdapat di dalam kebudayaan dipergunakan. Bahasa misalnya, adalah instrumen penting guna merespon Penyataan Diri Allah itu.

Memang, menurut Daniel Dhakidae, menggabungkan kedua hal ini, “Ketuhanan” dan “Kebudayaan” adalah tidak tepat, bahkan menggemparkan. Ini disebabkan oleh ketidakmungkinan menggabungkan keduanya. Namun kalau ditelusuri lebih jauh, kata Daniel, ‘kebudayaan’ memang merupakan hasil usaha manusia. Maka tidak mungkin orang berbicara tentang berketuhanan tanpa mendasarkan diri pada ‘hasil usaha manusia’. Alhasil, manusia memang menjadi ‘sen-

tral'. Apakah Bung Karno sedang menyebarkan ajaran yang menghina Tuhan (*blasphemous*)? Menurut Daniel, tidak. Pertama, yang dipersiapkan adalah sebuah dokumen kenegaraan, bukan teologis. Kedua, dasar ontologis sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan atas dasar agama, tetapi kemanusiaan, *Menschlichkeit*, *human-ness*. Artinya, adanya keyakinan bahwa keberadaan manusia adalah 'ada-yang-terbatas' dan karena itu memerlukan 'Yang-Tak-Ada-Batas' (*infinitum*), atau Yang Ilahi, Yang *Numinous*, dan bukan berpijak pada keyakinan, *belief, belief system"* (BPIP, 2019: 143).

Apa yang dikatakan Daniel Dhakidae ini makin menegaskan pernyataan kita sebelumnya bahwa Tuhan bukanlah produk dari kebudayaan. Kebudayaan bisa kita artikan sebagai *habitus*, lingkungan yang di dalamnya manusia hidup dan berkarya, serta mengaktualisasikan dirinya. Maka dapatlah dikatakan, tanpa kebudayaan, Tuhan pun sulit untuk dikenal, dipahami, dan dialami. Dengan kata lain, Tuhan memang bukan produk dari kebudayaan, tetapi tanpa sarana-sarana yang disediakan oleh kebudayaan kita tidak akan pernah "mengenal" Tuhan.

## Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai "*The Real an-sich*".

Istilah *The Real an-sich* berasal dari John Hick, seorang teolog/filsof yang banyak berbicara mengenai pluralisme agama. Di antara karyanya berjudul *An Interpretation of Religion, Human Responses to the Transcendent* (1989). Ia sendiri dipengaruhi atau setidak-tidaknya

diinspirasikan oleh Immanuel Kant (1724-1804), yang menulis buku terkenal, *Kritik der reinen Venunft* (Kritik Akal Murni).

Secara singkat barangkali bisa dikatakan, Kant membedakan antara apa yang disebutnya "*entity as it is in itself*" (entitas di dalam dirinya sendiri) dan "*entity as it appears in perception*" (entitas sebagaimana ia tampil di dalam persepsi). Ketika kita menyadari (adanya) dunia ini, kata Kant, sebagaimna kita secara sadar mempersepsikannya, maka sesungguhnya secara langsung kita diarahkan kepada suatu pembedaan antara "dunia *an-sich*" (dunia di dalam dirinya sendiri) dan "dunia sebagaimana ia menampilkan diri kepada kita", atau dunia sebagaimana kita mempersepsikannya. Pembedaan ini memainkan peranan penting dalam pemikiran Kant. Ia menegaskan bahwa karena sesuatu sebagaimana dialami sangat tergantung pada cara (*mode*) intuisi dari subyek (yang mengalami hal itu), maka obyek yang menampilkan diri (kepada kita) ini dibedakan dari dirinya sebagai "obyek di dalam dirinya". Alhasil, Kant membedakan antara yang disebutnya "*noumenon*" dan "*phenomenon*", atau antara "*das Ding an sich*" dan "*das Ding* yang menampilkan diri pada kesadaran diri kita (sebagai manusia).

Tuhan, dalam pandangan Kant tergolong pada *noumenon*, tidak pada *phenomenon*. Tuhan tidak dikondisikan oleh kategori berpikir "ruang" dan "waktu" sebagaimana halnya obyek-obyek lain yang tergolong dalam *phenomenon*. Karena itu kita tidak dapat berbicara tentang ada atau tidak adanya Tuhan. Kita tidak

dapat mengaksesnya. Kita tidak mempunyai pintu masuk untuk ke sana. Tentu saja Tuhan masih dibutuhkan secara praktis dalam perilaku etis, tetapi bagi Kant, Tuhan hanyalah sekadar postulat.

John Hick, yang dipengaruhi atau diinspirasikan oleh Kant ini membedakan antara "*The Real an sich*" (Yang Ril di dalam dirinya sendiri) dan "*The Real as variously experienced-and-thougt by different human communities*" (Yang Ril sebagaimana dialami dan dipikirkan secara bervariasi oleh komunitas manusia). Hick kemudian memberikan contoh, dalam Hinduisme misalnya membedakan antara Brahman *nirguna*, yaitu Brahman tanpa atribut, yang melampaui  cakupan bahasa manusia, dan Brahman *saguna*, yaitu Brahman dengan atribut-atribut, yang di dalam pengalaman religius manusia dikenal sebagai *Isvara*, yaitu pencipta yang bersifat pribadi dan pemerintah dari alam semesta. Contoh lain lagi diberikan oleh John Hick, yaitu bahwa di dalam Buddhisme Mahayana terdapat perbedaan antara, pada satu pihak, *Dharmakaya* yang bersifat ultimate (terakhir/tertinggi) dan pada pihak lain, yang tertinggi ini memvariasikan diri ke dalam Buddha-Buddha surgawi yang merupakan *Sambhogakaya* dan, lalu dia ini berinkarnasi di dalam *Nirmanakaya*. Itulah dua contoh dikemukakan yang kalau perlu masih bisa ditambahkan.

Rumusan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah rumusan yang bijak. Mungkin saja ini berasal dari agama tertentu, namun di sini mempunyai fungsi yang mengayomi semua agama. Rumusan ini dengan senga-

ja tidak mengacu kepada Tuhan yang berpribadi, atau Tuhan dari suatu agama tertentu. Rumusan sila ini memang abstrak, tetapi justru dengan keabstrakannya ini, setiap agama mempunyai peluang untuk mengalami dan memikirkannya. Dengan memakai pemikiran Hick, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah "Yang Ril Di dalam Dirinya sendiri", yang tidak bisa dimasuki dan diakses. "Ia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri." (1 Tim.6:16). Maka kita tidak dapat mengatakan seperti apa dia. Sesungguhnya pemahaman seperti itu sudah ada juga sebagai warisan nenek moyang kita. Di Jawa misalnya kita kenal adagium: "*Tan Keno Kinoyo Ngopo*" (Dia yang tidak dapat digambarkan seperti apa). Di Sumba dikenal ucapan, "*Pande nyura ngara, pande peku tamu*" (Dia yang namanya haram disebutkan). Di Tanah Batak: "*Ompu Tuan Mula Jadi na Bolon*" (Dia yang merupakan asal-usul segala sesuatu). Saya yakin di tempat-tempat lain juga kita menemukan pemahaman serupa.

Saya juga teringat akan perumpamaan yang disampaikan oleh Bung Karno di dalam sebuah ceramahnya tentang Pancasila guna mnggambarkan hal ini. Ada 4 orang buta yang diminta untuk menceritakan tentang gajah. Tentu saja gajah yang utuh tidak akan pernah mereka alami karena kebutaan mereka. Yang seorang hanya meraba ekornya dan dikiranya gajah itu sebesar ekor itu. Yang lain hanya mampu meraba gadingnya, dan dikiranya gajah itu sekeras gading. Yang lainnya meraba kakinya, dan disangkanya gajah itu laksana tiang, sedangkan yang lainnya lagi hanya mampu mer-

aba belalainya, dan dikiranya gajah itu seperti ular. Tidak ada satu pun yang mampu masuk ke dalam keseluruhan dan kegenapan.

"Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah Yang Ril di dalam dirinya, namun juga telah dialami dan dipikirkan di dalam setiap komunitas agama-agama. Di dalam Kekristenan misalnya, Yang Ril di dalam dirinya sendiri itu dialami dan dipikirkan sebagai Allah Trinitaris. Inkarnasi, atau Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus adalah inti keyakinan Kristiani. Inilah pengalaman spesifik iman Kristen tentang "Yang Ril *an sich*" itu. Di dalam agama-agama lain pasti juga mereka mempunyai pengalaman dan pemikiran spesifik tentang Yang Ril di dalam dirinya sendiri ini. Tetapi dengan demikian kita melihat bahwa agama-agama menjadi setara, bukan saja di depan konstitusi (dan berbagai perundang-undangan lainnya), tetapi juga di hadapan "*The Real an sich*" itu. Tidak boleh suatu pemahaman tentang Allah atau Tuhan di dalam agama A dijadikan ukuran atau patokan untuk mengukur pemahaman agama B. Setiap agama mempunyai hak yang sama untuk merumuskan pemahaman dan pengalamannya tentang Yang Ril *an sich*. Maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa memang tidak boleh diklaim oleh sebuah komunitas agama tertentu sebagai miliknya sendiri. Dia adalah milik bersama kendati kita tidak mampu untuk sepenuhnya masuk ke dalamnya.

Dengan berpegang teguh kepada sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" ini kita juga boleh menegaskan bahwa agama-agama mempunyai kedudukan yang kokoh

di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negeri kita.

## Beragama secara Nusantara

Tentu saja setiap agama mempunyai segi universal. Artinya agama itu diakui, dihayati, dipraktikkan di mana-mana di seluruh dunia. Itu berarti bahwa umat beragama di Indonesia pasti mempunya relasi dalam keyakinan yang sama dengan saudara-saudaranya di seluruh dunia. Tetapi pada saat yang sama, agama yang universal tadi menampakkan diri dalam lokus tertentu. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan yang lainnya menampakkan diri di atas bumi Nusantara. Lokus yang di atasnya agama-agama itu menampakkan dirinya bukan sesuatu yang kosong. Berbagai ungkapan kebudayaan telah ada di dalamnya. Ketika agama-agama itu bersua dengan kebudayaan di Nusantara ini maka proses inkulturasi terjadi.

Apakah yang dimaksud dengan inkulturasi? Dari titik-pandang teologi Kristen, "*inculturation is the on-going dialogue between faith and culture or cultures. More fully, it is the creative and dynamic relationship between the Christian message and a culture or cultures*" (inkulturasi adalah suatu dialog yang terus-menerus berlangsung antara iman dan kebudayaan atau kebudayaan-kebudayaan. Lebih lengkap, ia adalah relasi yang kreatip dan dinamis antara amanat Kristen dengan kebudayaan atau kebudayaan-kebudayaan) (Shorter, 1988).

Kalau kita memperhatikan sejarah dari agama-agama yang memasuki nusantara ini, maka proses inkul-

turasi itu memang terjadi. Dalam proses itu unsur-unsur kebudayaan setempat tidak dibuang begitu saja, namun dihargai dan diadopsi. Tetapi tentu saja terjadi proses seleksi, di mana unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan agama dibuang. Pada pihak lain, unsur-unsur yang diyakini memperkuat agama diadopsi bahkan ikut "mentransformasi" agama-agama.

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada hakekatnya mengacu kepada nilai-nilai religiusitas yang sudah terdapat di dalam kepercayaan nenek-moyang kita jauh sebelum agama-agama "modern" memasuki Nusantara ini. Maka seruan untuk beragama secara Nusantara bukanlah berlebih-lebihan. Saya adalah orang Kristen tetapi saya menghayati keimanan saya di atas bumi Nusantara dengan berbagai nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Demikian juga para penganut agama-agama lainnya. Para penghayat kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang keberadaannya di Nusantara ini tetap diakui adalah pula indikasi jelas bahwa para nenek-moyang kita bukanlah orang-orang yang tidak percaya kepada Yang Ilahi. Mereka sangat percaya. Maka selama mereka yakin akan hal itu, kita semua patut menghormatinya.

Jadi tidak ada pertentangan antara menjadi orang Indonesia dan orang yang beragama. Kardinal Mgr. Darmayuwono, kepada umat Katolik menyerukan agar mereka menjadi 100% Indonesia dan 100% Katolik. Saya kira seruan ini dapat pula disampaikan kepada yang beragama lainnya. Saya 100% Indonesia dan 100% Kristen. Si Polan 100% Indonesia dan 100% Islam. Dan

seterusnya. Ada ketegangan kreatif antara menjadi Indonesia dan menjadi Kristen yang tidak boleh terjerumus ke dalam keberatsebelahan.

Bung Karno pernah menyerukan kepada bangsa Indonesia, "Kalau Anda Islam jangan menjadi Arab, kalau Kristen jangan menjadi Yahudi, kalau Hindu jangan menjadi India. Jadilah Indonesia dengan kebudayaan Nusantara yang kaya raya ini."

## III. Penutup

Rumusan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sebuah rumusan bijak yang memberi ruang kepada setiap penganut agama yang berbeda-beda, berlomba-lomba memperlihatkan kebajikan bagi kemashlahatan bersama. Dengan demikian kesetaraan agama-agama dan para penganutnya diperlihatkan dengan seterang-terangnya.

## Referensi

BPIP, *Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP),* Jakarta, 2019.

BPIP, *Pancasila, Dialektika Dan Masa Depan Bangsa*, Jakarta, 2019.

Bung Karno, *Naskah Pidato Pancasila 1 Juni 1945*, diterbitkan ulang oleh BPIP, Jakarta, 2019.

Drijarkara, *Kumpulan Karangan,* (yang pernah dimuat dalam Majalah *Basis*), Yogyakarta, tt.

Hicck, John, *An Interpretation of Religion, Human Re-*

*sponses to the Transcendent*, London, 1989.

Notonagoro, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia,* Yogyakarta, tt.

Poespowardojo, Soerjanto, *Filsafat Pancasila,* Jakarta, 1989.

*Prisma,* Jurnal Pemikiran Sosal Ekonomi, LP3ES, Volume 39, 2020.

Shorter, Aylward, *Toward a Theology of Inculturation,* London, 1988.

# INDONESIA: NEGARA MODERN YANG BERKETUHANAN DALAM BINGKAI PANCASILA

*Adji Samekto**

## I. Pendahuluan

Pancasila yang digali dari buminya Indonesia merupakan integrasi dari pengalaman hidup secara fakta (yang ditangkap dengan inderawi) dan pengalaman batin akal budi bangsa Indonesia. Dari perpaduan itulah kemudian terbentuk nilai-nilai yang menjadi tuntunan hidup bangsa. Berdasarkan nilai-nilai itu , dalam kajian sosiologi terbukti bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya bersifat terbuka, walaupun tidak ternyatakan secara eksplisit. Selalu ada kompromi-kompromi di dalamnya, sehingga tidak pernah ada nilai nilai asing yang kemudian dominan atau mengungguli nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Kenyataan ini  sungguh merupakan modal sosial yang sangat bernilai untuk memelihara keberlanjutan Negara Indonesia ke depan.

Membicarakan Negara Berketuhanan Yang Maha Esa tidak akan lepas dari pembahasan diskursus neg-

* Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI).

ara berdasarkan agama (teokrasi), negara modern, dan hubungan antara negara dengan agama.

Terminologi Negara Berketuhanan Yang Maha Esa menunjuk pada Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang mempertemukan bangsa Indonesia di alam realitas. Oleh karena Pancasila ditempatkan sebagai *premis major*, sebagai bintang penuntun dan sumber segala sumber hukum negara, maka pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat deduktif.

Dalam kajian ini negara dikonsepsikan sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dari sebuah bangsa modern, yang mengikatkan diri pada sebuah pemerintahan yang *legitimate,* mendapat pengakuan internasional dan berada pada suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya.

Istilah "modern" dalam konteks ini menunjuk pada pengertian suatu fase perkembangan peradaban pemikiran manusia yang telah melepaskan diri dari dominasi agama. Terminologi "modern" juga menunjukkan suatu fase perkembangan peradaban pemikiran manusia yang sadar akan kesederajatan kedudukan manusia, penghormatan hak-hak asasi manusia, sehingga dalam pengertian negara modern terkandung pengertian negara yang diselenggarakan berdasarkan landasan kesepakatan bersama melalui proses-proses yang demokratis.

Menciptakan kerukunan kehidupan antar warga yang berbeda agama merupakan salah satu fungsi negara modern, yang tujuannya adalah mewujudkan

kesejahteraan sosial. Dengan demikian, terciptanya kerukunan antar umat yang berbeda agama di dalam suatu negara adalah modal sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (umum).

## II. Pembahasan

### Diskursus Negara Agama dan Negara Sekuler

Negara agama dapat didefinisikan sebagai negara yang diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Pada negara berdasar agama, terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama (*waliyul amri kalifatullah sayyidin panatagama, caesaro papisme*). Dalam negara agama ini,negara tidak mungkin dijalankan dengan hukum dari sekian banyak agama, melainkan hanya oleh salah satu saja, sehingga akan terjadi peminggiran atau pengucilan terhadap agama-agama lainnya dari penyelenggaraan negara itu.

Dalam terminologi Negara Ketuhanan terkandung makna, negara yang penyelenggaraan tata kelolanya bersifat *subordinated* terhadap dogma-dogma agama. Praktik tata kelola demikian pernah berlangsung dengan jelas di Barat maupun di Timur sejak tahun 500 hingga 1543 Sesudah Masehi yang disebut sebagai Abad Pertengahan.

Suatu implikasi dari negara agama adalah penolakan terhadap tuntutan bahwa negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya secara rasional dan etis. Para penguasa bisa tidak lagi bertindak secara argumentatif, melainkan berdasarkan kekuasaan belaka.

Begitu kuatnya dominasi agama, maka semboyan yang berlaku bagi ilmu pengetahuan pada Abad Pertengahan adalah bahwa ilmu mengabdi untuk agama: *ancilla theologia* (Atkinson, 2013:14, Arifian, 2017: 344-345). Agama menjadi titik tolak kefilsafatan, karena para pemuka agama mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Filsof-filsof terkemuka yang pemikirannya mendasarkan pada agama, halmana sesuai dengan pertumbuhan peradaban Abad Pertengahan : Al-Farabi (870-950M) seorang pemikir Muslim yang mengadopsi filsafat Yunani untuk menjelaskan ajaran Islam. Ia menulis filsafat teologi yang membuktikan keberadaan Tuhan berdasarkan pendekatan logika Aristotelian . Di kemudian hari tulisan itu menjadi sumber rujukan filsuf  Katholik Abad Pertengahan. Ibnu Rushdi (Averroes) menulis mengenai filsafat metafisik Aristoteles, dan dipelajari di universitas-universitas di Barat Atkinson, 2013:14, Arifian, 2017: 57-59).

Filosof dari Barat yang berpengaruh di era ini adalah St.Augustinus dan Thomas Aquinas. Dalam hubungan ini tokoh yang dianggap telah menjembatani filsafat Yunani dengan alam pemikiran Abad Pertengahan adalah St. Augustinus (354-430). Menurut St. Augustinus hukum alam merupakan hukum abadi yang ada pada Tuhan. Prinsip tertinggi hukum alam adalah : *"jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu".* Ajaran St.Augustinus ini mempengaruhi Thomas Aquinas (1225-1275), salah satu tokoh masa skolastik di Abad Pertengahan. Masa

skolastik adalah masa dimana alam pikiran manusia sangat terikat oleh ikatan keagamaan.

Akan tetapi dominasi agama itu menjadi makin surut ketika Eropa Barat memasuki era yang di sebut Era Pencerahan atau *Renaissance* (*Enlightment*),pada abad ke enam belas Masehi, suatu era dimana, manusia mulai sadar untuk mendayagunakan kemampuan rasio nya untuk menjelaskan dan menata dunia, bukan lagi semata-mata didasarkan pada dogma agama. Era *Renaissance* yang berada antara tahun 1453 hingga 1650 an. Era *Renaissance* ditandai dengan tumbuhnya pemikiran filsafat politik yang bersifat sekuler.

Pada masa-masa selanjutnya kemudian lahirlah teori-teori yang sangat siginifikan perannya dalam merubah tatanan sosial di Eropa dan didunia sebagai implikasi dominasi empirisme. Teori-teori itu meliputi teori-teori hubungan individu dengan negara dari John Locke yang dibukukan dalam karyanya *Treatiseof Government* yang diterbitkan pada tahun 1690 kemudian teori ekonomi pasar bebas dari Adam Smith yang ditulis dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776). Pemikiran John Locke telah bersinergi membentuk kesadaran-kesadaran baru, hingga lahirlah pemikiran-pemikiran berikutnya dari J.J. Rousseau (1712-1778) tentang Kontrak Sosial dan Montesquieu (1689-1755) tentang Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*). Pemikiran-pemikiran keduanya mempunyai pengaruh besar dalam merubah tata pola penyelenggaraan negara di kemudian hari. Adam Smith (1723-1790) adalah peletak dasar ekonomi pasar bebas yang dipaparkan dalam karyanya:

*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* pada tahun 1771.

Akhirnya pengaruh kehadiran dan pemikiran John Locke, Adam Smith, Montesquieu, J.J. Rousseau sangat berpengaruh di Eropa Barat dan menjadi pemicu tergulingnya Louis XVI dalam Revolusi Perancis 1789. Pasca Revolusi Perancis selanjutnya muncul *era of rights* yang memfokuskan pada hak-hak sipil dan politik warga negara dan negara demokratik modern.

Tabel. 1
Matrik Perbedaan Karakter Negara Teokrasi Dengan Negara Modern

| **Perbedaan Karakter** | | |
|---|---|---|
| **Karakter** | **Negara Teokrasi** | **Negara Modern** |
| Dari Dimensi Ruang Dan Waktu | Muncul di bangsa-bangsa Barat maupun Timur ( Kawasan Asia) pada Era Abad Pertengahan(500-1543), suatu era ketika agama mulai menggeser pola pikir kefilsafatan termasuk dalam penyelenggaraan negara. Berlangsung dari | Muncul diawali pada bangsa-bangsa Barat pada Era Pencerahan (Enlightment) yaitu era pasca surutnya pemikiran Abad Pertengahan (sejak 1650). Era Pencerahan ditandai dengan pendaya gunaan pikiran dan kemampuan inderawi, dan mulai menyurutnya dominasi agama dalam penyelenggaraan negara. |

| | | |
|---|---|---|
| Kedudukan agama | Ajaran-ajaran agama dan hukum-hukum yang menjabarkan ajaran agama dijadikan pedoman dan peraturan yang mengikat warga;<br>Negara Teokrasi selalu mengacu pada satu agama yang akan diterapkan secara deduktif. Kalaupun dibuat hukum oleh manusia, maka kedudukan hukum itu lebih rendah daripada hukum agama; | Terdapat 2 varian : (1) Negara tidak mengikutsertakan sama sekali dalam pertimbangan-pertimbangan untuk membuat kebijakan negara; (2) negara masih mempertimbangkan keberadaan agama-agama dalam membuat kebijakan dan peraturan di negara tersebut;<br>Negara menjamin agar tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama dan kepercayaan atas diri seseorang; |
| Sifat Kekuasaan | Absolut : Belum mengenal secara tegas sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antara kekuasaan legislative, eksekutif dan judicative; | Demokratis : Sudah mengenal secara tegas sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) sebagaimana diajarkan Montesquieu, yaitu pemisahan antara : kekuasaan legislative,eksekutif dan judicative; |
| Hubungan Negara Dengan Rakyat | Rakyat ada karena (pemimpin) negara;<br>Daulat Tuhan; Sekalipun selalu ada | Negara ada karena rakyat; Daulat Rakyat;<br>Kebebasan berpikir |

| | | |
|---|---|---|
| | upaya untuk menjauhkan rakyat dari penyimpangan ajaran agama, selalu saja lahir pemikiran-pemikiran yang berupaya mengedepankan akal dan pikiran berbasis realitas; | adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin keberlakuannya oleh negara. Fungsi negara dalam hal ini adalah menjaga ketertiban agar pelaksanaan kebebasan berpikir tidak mengancam negara atau merugikan warga negara; |

## Indonesia: Negara Modern yang Berketuhanan

Sila-sila dalam Pancasila, sebagai sistem dalam filsafat merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengalir dari esensi manusia adalah ciptaan Tuhan YME. Sebagai sebuah sistem filsafat, keterikatan antar nilai-nilai Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.

| No | Nilai | Jabaran |
|---|---|---|
| 1 | Ketuhanan | Mengakui bahwa kehidupan manusia sesungguhnya berasal dari Tuhan. Manusia adalah bagian makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bukan dikonsepsikan manusia dalam konteks individual sebagaimana tercermin dalam ajaran pasar bebas; |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Kemanusiaan | Secara keseluruhan, manusia adalah sama-sama bersumber dari Tuhan YME, mempunyai tugas yang sama yaitu mengembangkan dunia untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu sebenarnya manusia tidak dapat sendirian mengembangkan dunia, tetapi bersama-sama dari manusia yang beragam suku,ras dan agamanya itu; |
| 3 | Kebangsaan | Diantara keseluruhan manusia yang ada di dunia, ada sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan tempat hidup, budaya dan cara berkehidupan yang serupa. Di dalam kebersamaan itulah kemudian timbul dorongan untuk menjadi bangsa. Dengan demikian kebangsaan Indonesia adalah sikap aktif karena kebangsaan adalah cara merasakan, berpikir dan mempertahankan keberlanjutan hidup dalam suatu kebersamaan berdasarkan perasaan senasib dan kesamaan tempat hidup. Kebangsaan inilah yang merupakan modal menegara, dengan kata lain,menegara berarti penegaraan dari suatu bangsa; |
| 4 | Kerakyatan | Di dalam negara Indonesia semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan karena ada kesadaran bahwa manusia sesungguhnya berdiri sejajar; |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Kesejahte-raan | Tujuan dari berkehidupan Negara Bangsa Indonesia adalah hidup bersama mewujudkan kesejahteraan umum melalui cara-cara yang mencerminkan keadilan sosial,dimana negara harus hadir. |

Filsafat akan beralih menjadi *weltanschauung* ketika ajaran filsafat itu dijadikan dasar sikap untuk menetapkan pendiriannya dalam realitas kehidupan (Drijarkoro, 1959:45). Pandangan atau pendirian hidup yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa disarikan sebagai berikut:

Tabel 3.

| No | Ketuhanan Yang Maha Esa |
|---|---|
| 1 | Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti Tuhan (atheisme); |
| 2 | Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain; |
| 3 | Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa,berkeadaban dan berkeadilan; |
| 4 | Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. |
| 5 | Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. |

Walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi para pendiri bangsa sebenarnya telah memadukan

cara berpikir filsafat Barat dengan filsafat Timur untuk menata penyelenggaraan negara. Perbedaan filsafat Timur dengan filsafat Barat adalah, filsafat Timur memfokuskan pada persoalan utama tentang bagaimana harus menjalai kehidupan yang baik dan bagaimana hidup dalam masyarakat secara baik. Di dalam filsafat Timur, sangat tipis pemisahan antara filsafat dengan agama halmana tidak terdapat dalam filsafat Barat pasca Abad Pertengahan (Week, 2014:13, Magee, 2016:141-151,Kleinman, 2013: 231-232). Oleh sebab itu dalam filsafat Timur, sangat tidak bisa dipisahkan, antara agama dengan filsafat. Selain itu tujuan filsafat Timur, adalah menerima (*accepting*) kebenaran (*truths*), bukan membuktikan dan menemukan keseimbangan, sedangkan filsafat Barat, bertujuan mencari dan membuktikan kebenaran (*truths*). Filsafat Timur memberi tempat utama pada kesatuan (*unity*) , tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan bahwa seorang manusia adalah bagian dari alam secara keseluruhan (*the interrelation of everything*). Berbeda dengan filsafat Barat, yang sangat menekankan pada hak-hak individual yang menurut filsafat Barat, merupakan *social animal.*

Disebut negara berbentuk *republik*, karena para pendiri bangsa bersepakat bahwa Indonesia bukanlah negara kerajaan, tetapi negara republik yang melayani kepentingan umum (*res publica*), melalui peran pemerintah yang dipilih dan diberi kewenangan oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menegakan peraturan dengan kekuatan memaksa. Selanjutnya disebut sebagai negara *nomokrasi* karena dalam

penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada peraturan hukum (*nomos*) yang disusun melalui proses yang demokratis. Inilah maka disebut Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan diselenggarakan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*) belaka. Dalam konteks hubungan negara dengan warganya tindakan-tindakan pemerintah terhadap warganegaranya semakin didorong untuk didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh penguasa (*rule by men*) tetapi didasarkan pada hukum (*rule of law*) dengan mendudukkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertulis tertinggi.

Selanjutnya Indonesia merupakan negara *demokrasi* karena didasarkan pada kedaulatan rakyat. *Nemo Patriam Quia Populus*: Negara ada karena rakyat. Demikian paradigma hubungan negara dengan rakyat di masa Pasca Revolusi Perancis 1789. Demokrasi yang dibangun di Indonesia (yang disebut juga Demokrasi Pancasila) bukanlah demokrasi Barat (hasil Revolusi Perancis 1789) (Basarah dan Hasanuddin, 2016: 1-39), tetapi demokrasi berlandaskan permusyawaratan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya Demokrasi Pancasila dilandaskan pada pengakuan kesejajaran manusia.

Selain itu, Indonesia juga menganut paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State)*. Dalam pengertian demikian, negara Indonesia mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan umum hal mana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kesejahteraan umum,

merupakan capaian yang harus dapat dirasakan setiap warganegara, melalui kehidupan nyata, maupun melalui pengalaman batinnya. Kebahagiaan merupakan wujud kesejahteraan yang diperoleh melalui pengalaman batin, karena adanya religiusitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, *issue* agama sering menjadi (atau dijadikan) sebagai salah satu potensi pemecah semangat kebangsaan, baik melalui konflik antar umat beragama, maupun inter umat beragama. Keadaan itu sangat terlihat di era Pasca Reformasi, ketika aroma demokrasi liberal menjadi sangat kuat dan dengan dalih demokrasi berdasarkan Konstitusi, elemen masyarakat bisa melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengendurkan semangat kebangsaan. Dengan mendasarkan pada kajian-kajian di atas, sentimen-sentimen primordial yang berbasis keagamaan yang bernada anti pluralitas yang (pernah) marak pasca Reformasi 1998, sungguh merupakan ancaman bagi keberlanjutan hidup negara bangsa Indonesia. Semakin lebih berbahaya lagi ketika sentimen keagamaan menjadi alat kekuatan memaksa atau sebagai *pressure group* yang dijalankan sekelompok *elite*, namun ditanggapi sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh oleh lapisan masyarakat bawah.

## III. Penutup

Dalam konteks ini kita tentu melihat pentingnya pendidikan, yaitu pendidikan yang mempunyai komitmen untuk mencegah tumbuhnya pemikiran radikal (fundamentalis) yang dalam dunia nyata mengklaim

sebagai pihak yang paling benar. Semua agama tentu berkehendak baik mengajarkan kemanusiaan. Ketika sudah ada dalam realitas berkehidupan bersama, maka perlu sekali dirumuskan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjadi bintang penuntun dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama yang selaras dengan makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kurikulum pendidikan agama idealnya memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya rasa saling memahami. Kuncinya adalah kesediaan untuk menerima perubahan sebagai bagian dari *Open Society*. Masyarakat Terbuka (*Open Society*) Indonesia intinya adalah masyarakat Indonesia yang terbuka untuk perubahan berbasis kesadaran, sistem yang bekerja dalam masyarakat tidak pernah final, tidak pernah sempurna dan karenanya selalu terbuka untuk perubahan. Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang selalu beradaptasi terhadap perubahan. Konsep Masyarakat Terbuka (*Open Society*) sangat perlu disadarkan kepada masyarakat Indonesia karena tidak bisa dipungkiri, proses-proses pendidikan agama di Indonesia, masih belum secara penuh membuka studi relasi antar umat beragama.

## Referensi

Arifian, Alfi, 2017, *Sejarah Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M Dari Pemberontakan Odoacer Hingga Runtuhnya Sistesis Thomisme,*Yogyakarta, Sociality;

Asy'ari, Hasyim ,2011, "Politik Hukum Kebebasan Beragama Di Indonesia",*Pandecta,*Volume 6, No.1,-

Januari 2011, Jurnal online : http : //jurnalunnes.ac.id/

Asy'ari, Hasyim,"Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia", dimuat dalam Jurnal online : *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*;

Atkinson, Sam, (Senior Editor),2013, *The Politics Book*, London, Dorling Kindersley Ltd.;

Basarah, Achmad, dan Tb.Hasanuddin, 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila,* Jakarta, MPR-RI;

Denzin, Norman K., Dan Yvonna S.Lincoln,2009, *Handbook of Qualitative Research,* (Penerjemah : Dariyatno, Badrus Samsul Fata,Abi,John Rinaldi),Yogyakarta,Pustaka Pelajar;

Drijarkoro S.J, 1959, "Pantja Sila Dan Agama", Dipresentasikan dalam, *Seminar Pantjasila* Ke: I, 16 Pebruari sampai 20 Pebruari 1959, Jogyakarta, Penerbit: Panitya Seminar Pantjasila;

Kartodirdjo, Sartono ,1991, *Modern Indonesia, Tradition and Transformation*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press;

Kleinman, Paul ,2013, *Philosophy From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics : An Essential Primer on the History of Thought*,Massachussets, Adams Media;

Magee, Bryan, 2016,*The Story of Philosophy*, London, Dorling Kindersley;

Magnis-Suseno, Franz, 1991, *Etika Politik Prinsip-Prinsip*

*Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta,Gramedia Pustaka Utama;

Trijono, Lambang ,1996 "Globalisasi Modernitas Dan Krisis Negara Bangsa : Tantangan Integrasi Nasional Dalam Konteks Global", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV, No.2.Maret-April 1996, Jakarta, CSIS;

Wattimena, Reza A.A. , 2011, *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*, Jogyakarta, Kanisius;

Week, Marcus, 2014, *Heads Up Philosophy*, London, Dorling Kinderley Ltd.

# BERKETUHANAN ESA DAN BERMASYARAKAT BHINNEKA

*Al Makin*[*]

## I. Pendahuluan

Sebelum membahas tentang Tuhan yang Esa dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa menurut keyakinan Islam, tulisan saya ini akan mengaitkan terlebih dahulu tentang sejarah teologi Islam klasik sekilas dan bagaimana praktek keagamaan di Indonesia. Selanjutnya tulisan ini akan mempersembahkan tafsir masyarakat berketuhanan yang esa namun dalam masyarakat beragam dalam berkehidupan.

Secara khusus tulisan ini menghadirkan terjemahan ayat-ayat Kitab Suci juga kitab klasik Nusantara syair Hamzah Fansuri dan Kitab Tajus Salatin Melayu lama (abad 15 dan 16 M). Kemudian kita hadirkan keesaan Tuhan dalam keindonesiaan di masjid dan candi-candi kuno. Tulisan ini mengajak para pembaca untuk merenung keesaan Tuhan dalam konteks keindonesiaan dengan lebih mendalam baik dalam memahami teks klasik dan fenomena yang ada di sekitar kita.

* Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020-2024.

## II. Pembahasan

### Teologi Islam tentang Tuhan

Sekilas mari kita lihat bagaimana teologi Islam memaknai keesaan Tuhan, yang bisa dikatikan dengan pemaknaan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam teologi agama Islam, Tuhan Allah selalu digambarkan yang paling atas diatas semua yang manusia pikirkan. Keesaan artinya keunggulan, ungggul diatas segala makhluk dan ciptaanNya. Tuhan selalu digambarkan diatas segala yang ada di bumi dan di dunia ini. Tentu penggambaran ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi manusia juga. Manusialah yang beragama, dan agama memang untuk manusia, agar hidup teratur, bahagia, dan mengabdi pada Tuhan. Berketuhanan juga berarti bekemanusiaan. Konsep tentang Tuhan juga berarti konsep tentang manusia. Wajar kan dalam Pancasila, sila pertama tentang ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan. Kedua sila itu terkait erat dan hendaknya tidak dipisahkan, relasi manusia dan Tuhan.

Dalam tataran praktis, bertuhan itu sekaligus juga bermasyarakat. Manusia menyembah Tuhan, memuja, dan memohon pertolongan adalah manusia yang hidup dalam masyarakat. Manusia berdoa tidak sendirian dan selalu bersama manusia lainnya. Untuk itulah agama mengatur kehidupan, yaitu kehidupan dalam bertuhan dan sekaligus dalam bermasyarakat. Manusia berdoa dalam shalat setiap hari baik di masjid atau di rumah,

dalam perjalanan atau muqim, dalam kesenangan atau kesusahan, selalu mengalami perjumpaan tidak hanya dengan Tuhan yang dituju, namun berjumpa dan bergaul juga dengan manusia lain dalam masyarakat.

Manusia dasarnya adalah makhluk yang bekumpul (*homo socios*), disamping berfikir (*homo sapiens*). Kumpulan manusia atau masyarakat bisa berupa desa, kecamatan, kabupaten, provinsi juga negara. Kumpulan itu juga bisa berupa jamaah, organisasi, masjid, gereja, wihara, atau pura, atau tempat ibadah lainnya. Di tempat ibadah itulah manusia berkumpul, bergaul, Bersama mengagungkan Tuhan. Manusia meminta Tuhan untuk mengabulkan semua permintaaannya dalam hidup ini, atau sesudah hidup. Manusia berdoa, Tuhan akan mengabulkan. Namun, manusia lebih banyak bedoa bersama. Jarang sekali manusia berdoa sendirian.

Islam sebagai institusi agama dan peradaban, dasar masyarakat Muslim sebagai bangsa, budaya, dan negara telah berusia seribu lima ratus tahun. Islam dibawa Nabi Muhammad SAW pada abad tujuh, sekarang abad dua puluh satu: tepatnya lima belas abad. Ilmu yang menyingung tentang ketuhanan dalam tradisi Islam disebut *kalam*, berarti teologi secara umum. *Kalam* adalah bahasa Arab, teologi dalam bahasa latin yang sudah diinggriskan atau diindonesiakan. Dalam sejarah *kalam*, mulai dari abad tujuh Masehi, atau abad satu Hijriah, yaitu seribu lima ratus tahun yang lalu, ada banyak aliran dan mazhab yang membahas tentang ketuhanan. Singkat kata, Tuhan hadir tidak hanya dalam masjid, tetapi juga dalam buku-buku dan dalam

kitab-kitab yang ditulis manusia.

Awalnya pada abad delapan sampai sembilan Masehi, satu sampai tiga abad setelah Nabi Muhammad SAW, ada doktrin teologi utama dalam Islam, yaitu Jabariyah dan Qadaraiyah. Jabariyah biasanya disebut fatalis, karena menyerahkan semua urusan dan kejadian pada Tuhan. Allah lah yang menentukan segalanya. Manusia tidak mempunyai kuasa atas dirinya. Alam sudah diatur oleh Tuhan. Manusia menerima taqdirnya. Sedangkan Qadaraiyah, sebaliknya, menekankan kebebasan manusia, atau *free will*. Manusia adalah makhluk yang berkuasa atas dirinya. Tuhan tidak berturut serta dalam banyak penentuan. Manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan dirinya dan nasibnya. Manusia sudah mendapatkan mandat untuk berusaha secara bebas. Dua aliran ini hadir dalam banyak pembahasan dalam tradisi keilmuan Islam. Hubungan antara Tuhan dan manusia sudah dibahas sejak awal dalam sejarah Islam.

Kemudian ada perdebatan klasik antara Mu'tazilah (abad 8 sampai abad 10 M) dan sintesisnya Asy'ariyah, dimulai dari Abu Hasan al-Asy'ari (m. 936 M) (al Ašari 1967). Mu'tazilah menekankan kehendak bebas seperti Qadariyah (Amir-Moezzi and Schmidtke, 2009). Namun Mu'tazilah berkembang dengan khazanah klasik ilmu-ilmu logika dan filsafat Yunani. Para filosof dan pemikir Kalam di erah klasik, era kejayaan daulah Abbasiyah (750-1517 M) banyak beraliran Mu'tazilah (Nasution, 1972). Puncak dari perjalanan peradaban Islam dan persinggungan antara filsafat dan Islam ada di ali-

ran Mu'tazilah (Halim 2001). Aliran ini sayangnya sudah ditemui secara jelas saat ini, namun pengaruhnya dalam berfikir umat Islam seluruh dunia sangat jelas. Dalam versi Islam Syiah di Iran misalnya, tradisi filsafat masih hidup. Dalam tradisi sufi atau tasauf Sunni, seperti di Indonesia, filsafat menjadi alat untuk memahami kebijakan-kebijakan dan kedalaman hubungan antara Tuhan dan manusia. Tokoh yang sangat berpengaruh sintesis antara filsafat dan sufi adalah al-Ghazali (1058-111 M.).

Asy'ariyah yang merupakan mazhab sintesis Ahlu Sunnah, yang dijumpai sekarang ini termasuk di Indonesia, mayoritas adalah Ahlu Sunnah baik itu Muhammadiyah (berdiri 1912) atau NU (Nahdlatul Ulama) (berdiri tahun 1926) mengambil jalan tengah (*tawasut*). Jalan tengah adalah jalan moderat, antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia. Jalan tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah. Jalan antara peran agama dan politik dalam bermasyarakat. Banyak sekali kelompok-kelompok keagamaan selain dari kedua organisasi besar di Indonesia itu mengembalikan dirinya pada semangat Ahlu Sunnah (memegang tradisi keislaman berdasar Qur'an dan Sunnah, serta bimbingan para ulama). Ahlu Sunnah menjadi semangat bagaimana Kitab Suci Qur'an dan ucapan dan perilaku Nabi dalam Sunnah hadir dan ditafsirkan oleh para pemuka agama yang berbeda-beda. Sedangkan dalam berhukum, rata-rata masyarakat Indonesia beraliran Syafi'i (m. 855 M). Aliran fiqh yang umum di kalangan Ahlu Sunnah, bisa dijumpai di Asia Tenggara, sebagian Mesir, Afrika

Utara, Afrika Selatan, Sebagian Saudi Arabia, Palestina, Suriah, dan India.

Jadi jelaslah kita berbicara, bahwa jika berbicara antara Tuhan dan manusia tidak sederhana. Tuhan dan manusia hadir dalam sejarah manusia, dalam bergolakan, dinamika, dan interaksi antar tafsir, cara befikir, dan bagaimana Islam ditafsirkan Muslim menjadi laku ibadah, dan laku muamalah. Islam di Indonesia merupakan sejarah Islam yang unik, patut direnungkan dan kita harus bangga berislam dengan cara Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan ratusan Bahasa daerah dan etnis. Tuhan dan manusia dalam Islam Indonesia dibahasakan dan dikontekskan dalam berbagai tradisi, dalam kendurian, peringatan maulid, pengajian, sinetron, rebana, nasyid, dan tentu saja hal-hal yang bersifat manusiawi.

Yang ingin saya tekankan adalah jika kita berbicara tentang Tuhan Allah dalam Islam dan sejarahnya, selalu saja kita berbicara tentang masyarakat. Tuhan dalam doktrin kalam, atau teologi, selalu dibicarakan dalam banyak aliran dalam sejarah Islam: Qadariyah, Jabaraiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta banyak lagi aliran-aliran lain. Dan aliran-aliran itu tidak bisa dilepaskan dari para pemikir, ulama, tokoh dan para pengikutnya. Tuhan dalam Islam yang selalu hadir dalam diri manusia dalam konteks hubungannya dengan manusia. Betul dan itu adalah keyakinan dalam iman, bahwa Tuhan itu satu dan satu-satunya, tetapi bagaimana manusia memahaminya bermacam-macam. Faktanya dalam Islam banyak alian, mazhab dan golon-

gan yang membicarakan tentang Tuhan dan bagaimana manusia bisa mencapainya. Manusia harus berserah diri pada Tuhan, satu-satunya, tetapi manusia mempunyai pemahaman tentang Tuhan. Kemampuan manusia memahami Tuhan juga berbeda-beda, kaena hakekatnya kemampuan manusia tidak sama. Apalagi di Indonesia, semua mengatasnamakan dan berdoa kepada Tuhan, tetapi doanya berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pendoa.

### *Ulil amri* di Indonesia

Di Indonesia, Tuhan hadir dimana-mana. Masjid setiap tahun bertambah jumlahnya di seluruh pulau di Nusantara. Bukan karena semangat keagamaan saja masjid didirikan, tetapi juga berkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang menggembirakan. Umat Islam Indonesia secara ekonomi, Pendidikan, dan politik meningkat dan patut disyukuri. Nama Allah, sebagai Tuhan selalu disebutkan dalam mimbar-mimbar saat azan, memanggil untuk shalat lima kali sehari, hadi di mana-mana. Allah disebut di kampus, kantor, desa, pasar, dan jalan-jalan. Indonesia masyarakat yang agamis, Tuhan menjadi sandaran kita semua. Nama Allah disebut-sebut dalam setiap doa.

Namun harus diingat bahwa manusia Muslim di Indonesia disamping beragama, berdoa, dan berpasrah diri juga bernegara. Negara inilah yang menjadi wadah Muslim Indonesia dalam bermasyarakat. Di situ pemaknaan berketuhanan dan bermasyarakat berjumpa. Posisi Indonesia, sebagai negara dan bangsa, sama seperti pemerintahan Islam terdahulu, yaitu misalnya daulah

Abbasiyah atau Umayyah. Atau anggap saja Indonesia adalah khilafah yang sebenarnya, tanpa harus mendirikan khilafah baru lagi. Indonesia sudah ulil amri, yaitu pemerintahan yang sah dan mengikat. Indonesia sama dengan sahnya pemerintahan Turki Utsmani, Mamluk, atau bahkan empat khalifah (khulafa al-rasyidin) setelah Nabi Muhammad SAW. Indonesia merupakan negara, atau ulil amri yang harus ditaati. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, lalu taat kepada negara:

> Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin (pemerintah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa (4): 59).

*Ulil amri* dalam ayat tersebut biasanya dimaknai sebagai pemimpin. Dalam konteks keindonesia adalah pemerintah yang sah. Baik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, atau pemerintah pusat di Jakarta saat ini adalah ulil amri. Itu mengikat umat Islam, dan juga umat lain.

Dalam konteks sejarah Islam di Nusantara, para raja dan sultan, dari yang paling klasik Majapahit, Demak, Pajang, Bone, Tidore, Pasai, Mataram, Surakarta dan Yogyakarta semua adalah *ulil amri*. Lalu dalam sejarah Indonesia, kerajaan-kerajaan yang menyebar di banyak pulau itu tunduk pada kekuatan Eropa yang semula berdagang lalu berpolitik dan menguasai Nusantara. Belanda lah yang paling lamaberkuasa.

Tidak heran ketika era penjajahan banyak sultan, bupati, demang, dan pemimpin agama yang bekerjasama dengan Belanda, karena menganggap Belanda sebagai ulil Amri. Sayyid Utsman misalnya, adalah pemimpin agama di Batavia yang bekerjasama dengna Snouck Hurgronje (1857-1936) kala itu, dan menganggap ulil amri adalah Belanda. Sayyid Utsman dipercaya Belanda untuk mengorganisr jamaah haji ke Tanah Suci Arab (Makin, 2015). Ini gambaran bahwa bahkan Belanda pun ada yang menganggap ulil amri. Namun, banyak juga, terutama para pimimpin kita yang menginginkan kemerdekaan, melapaskan diri dari Belanda. Para pendiri bangsa kita termasuk yang mengingikan pemerintahan ulil amri secara mandiri. Para pejuang kita akhirnya mendirikan ulil amri yang baru, bernama Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pancasila merupakan kesepakatan, atau *ijma'*, meminjam istilah kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi dalam banyak kesempatan dan beberapa wawancara dengan Penulis. Pancasila merupakan konsensus dari umat Islam dan umat-umat lain untuk menyerahkan urusan negara kepada pemerintah, dan sebagai umat beragama harus mentaatinya. Berketuhanan dan bernegara bertemu pada Pancasila.

Jika kita lihat bagaimana konsep berketuhanan dan bernegara ini bisa dilihat juga dalam gerakan umat Islam yang berkeinginan maju dan setara dengan orang Eropa di Nusantara dalam Pendidikan dan ekonomi. Syarikat Islam (berdiri tahun 1912), sebagai organisasi Islam tertua di Indonesia, dimulai dari sisi ekonomi,

yaitu Syarikat Dagang Islam oleh H. Samanhudi (1868-1956) di Surakarta. Lalu persyarikatan itu mencuat dan jauh berkiprah menjadi Syarikat Islam dalam politik dan sosial lewat kepemimpinan HOS Tjokroaminoto (1882-1934), guru dari Sukarno, sang proklamator (Makin, 2017). Tentu s etelah itu ada banyak perkumpulan, organisasi dan kelompok yang berjuang untuk Indonesia, namun saat ini yang banyak berkiprah dengan jumlah ummat tebanyak tetap NU dan Muhammadiyah. Jadi bernegara dan berketuhan bisa dilihat dalam dua organisasi besar itu. Bertuhan juga bermasyarakat, dan makna bermasyarakat adalah bernegara dalam sekala kecil dalam kehidupan sehari-hari atau skala besar mentaati semua perundang-undangan dan regulasi yang ada di negara ini. Bertuhan tidak hanya beribadah saja, tetapi juga bermuamalah. Faktnya para ulama, pemimpin Indonesia menciptakan ulil amri sendiri, menciptakan system sendiri dan menyepakati bahwa Pancasila merupakan jalan tengah (tawasut).

Negara hadir di Indonesia dalam melindungi umat beragama. Hubungan timbal balik tentunya, negara berfungsi sebagai ulil amri, sedangkan umat Islam mentaatinya dengan bentuk semua kiprah umat dalam bermasyarakat bertumpu pada negara. Begitu tafsir para ulama dari Hamka, Mukti Ali, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Abdurrachman Wachid, dan hampir semua ulama di NU dan Muhammadiyah.  Negara dan agama merupakan kompromi dan jalan tengah dalam bermuamalah, dan akan menopang dalam ibadahnya ummat (Makin, 2018).

Negara Indonesia sejak berdirinya telah memilih Pancasila sebagai dasar bernegara. Tafsir Pancasila sendiri juga berkembang. Di Era Sukarno, di awal-awal kemerdekaan Pancasila sebagai dasar kemerdekaan dan revolusi bisa dirasakan dalam setiap pidato Sukarno, terhimpun dalam *Di Bawah Bendera Revolusi*.

Di Era Orde Baru, Pancasila berfungsi sebagai penjaga stabilitas politik dan juga pengatur relasi antara kepentingan negara dan ummat. Pancasila dimaknai sebagai dasar pembangunan dan pengatur agar umat Islam dan negara tidak bertubrukan. Mukti Ali menyimpulkan tiga sasaran besar kala itu, 1. relasi antara umat dalam satu agama dengan berbagai aliran dan kelompok, 2. Relasi antar umat yang berbeda agama, saat ini ada 6 agama dan penghayat yang berjumlah ratusan, 3. Relasi antara agama dan negara (Fatih, 2017; Makin, 2012). Pandangan ini berlaku di era Orde Baru dan masih relevan untuk ditafsirkan ulang di masa Reformasi kini.

## Berketuhanan Esa

Berketuhanan yang Esa dalam Islam dikenal dengan istilah *tauhid*. *Tauhid* secara harfiyah artinya keesaan Tuhan, satu-satunya, tiada duanya. Meyakini kekuasaan Nya, beriman pada Nya satu-satunya, tiada tempat bergantung selain-Nya. Tauhid merupakan dasar dari keimanan bagi setiap Muslim. Tuhan adalah Allah. Allah dari Bahasa Arab lama. Konon asal katanya adalah *Ilah* (tuhan), kemudian dijadikan spesial, atau *ta'rif al* dalam tata Bahasa Arab (*nahwu* dan *sharaf*) (dalam Bahasa Inggris *the*, *le/la* dalam Bahasa Perancis, *die/*

*der/das* dalam Bahasa Jerman). *Ilah* yang kurang lebih berarti Tuhan, menjadi Allah yang artinya Yang Esa itu. Tuhan maha Tunggal. Tiada duanya. Setiap shalat, doa, ibadah, dan permohonan ditujukan kepada Allah Tuhan yang Satu itu.

Dalam Bahasa Jawa, Allah disebut Gusti, atau kadangkala kita dengar Pengeran. Artinya Allah sebagai Tuan, atau dalam Bahasa sekarang ini umum diucapkan adalah Tuhan. Tuan mungkin sepadan dengan *Lord*, yang mengatur, atau Rabb (Lord). Kita dengar juga Gusti Allah, atau Pengeran ingkang Siji.

Dalam sastra Melayu kita baca juga syair ikan Tunggal, atau kadangkala disebut syair ikan tongkol. Merupakan syair Hamzah Fansuri (m. 1590 M) yang memuji Allah dan relasinya dengan Nur Muhammad, makhluk tinggi memuji Tuhan:

*Bismi Lahi akan namanya*
*Khalqul Lahi akan sakainya*
*Ruhul Lahi akan nyawanya*
*Wajhul Lahi akan mukanya*
*Zahir dan batin daim sertanya*
(Sangidu, 2012: 193–95)

Syair bait ini menggambarkan relasi hamba terttinggi, Nur Muhammad, para wali, ulama, dan manusia tinggi lainnya yang dekat dengan Tuhan. Selalu menyebut nama Allah. Ciptaan Allah yang meniru sifat-sifat Allah. Nyawanya juga diberi tiupan Allah. Wajahnya penuh dengan wajah Allah. Lahir dan batin Allah ada di dalam hamba itu. Tuhan tidak hanya tinggi dan esa, tetapi juga ada dalam diri manusia. Di sini bisa disim-

pulkan bahwa Tuhan hadir dalam kemanusiaan, dan manusia selalu dihadiri oleh Tuhan. Berbicara manusia, berarti juga berbicara Tuha. Berbicara Tuhan juga sekaligus berbicara tentang manusia.

Tentu saja keesaan dan ketinggian Tuhan telah digambarkan dalam Qur'an. Ini termaktub dalam dalam surat singkat yang turun di Makkah termaktub dalam juz 30, surat ke 114 bernama *al-ikhlas* (ketulusan), berisi 4 ayat, sangat sering didaras dalam banyak kesempatan. Mudah dihafal, hampir semua Muslim mengucapkannya di luar kepala. Dalam shalat maghrib, para imam di mushalla atau masjid membacanya setelah al-Fatihah. Dalam banyak tahlilan dan doa juga dilafalkan.

Seperti ini artinya:

> Katakanlah Tuhan itu Esa
> Tuhan tempat bergantung
> Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan
> Tiada yang setara dengan Nya

Tauhid menjadi Sila pertama dalam Pancasila, Berketuhanan Yang Maha Esa. Bagi umat Islam Indonesia ini merupakan anugerah dan berkah. Dasar negara menjadi dasar utama dan ditempatkan pada posisi pertama pula. Muslim Indonesia patut bersyukur dan berkomitmen pada Pancasila.

Berikut ini petikan dari tafsir tentang Tuhan oleh Bukhori Jauhari dalam kitabnya yang terkenal Tajus Salatin (selesei ditulis 1608 M), dikaji di kerajaan Solo dan Yogyakarta dengan berbagai versi tafsir. Kitab itu

ditulis untuk Sultan Aceh Alaudin Riayat Syah (m. 1605 M). Kitab pedoman bagi raja dan rakyat dalam bernegara. Kitab itu berisi tentang etika, aturan, perangai, dan berbagai nasehat dalam peri kehidupan.

Begini sedikit gambaran tentang Tuhan dalam *Tajus Salatin*:

> *Tabaraka Allahu Ta'ala senantiasa*
> *Inilah juga Tuhan yang maha mulia*
> *Yang nyata pada dzatnya*
> *Dan pada shifatnya*
> *Jikalu kamu mau melihat dzat Ia*
> *Segala dengan nyata*
> *Maka bukalah mata*
> *Lihatlah shifatnya dalam perbuatan Ia*
> *Janganlah kamu sesat pada barang masa*
> (Daulay, 2020: 78)

Dalam syair di atas disebutkan tentang Maha Mulia Tuhan, paling tinggi, paling Esa. Namun ini menunjukkan sekaligus akan pemahaman kemanusiaan, bahwa Tuhan difahami secara manusiawi, yaitu tentang sifat dan zatNya. Syair ini menunjukkan diskusi lama antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah, tentang keesaan Tuhan.

Bagi Mu'tazilah Tuhan Esa tiada sifat tiada Zat, ketunggalannya merupakan doktrin utama Mu'tazilah. Wasil b. Atha (m. 748 M) salah satu pemuka Mu'tazilah selalu menekankan keesaan Tuhan, tanpa membedakan sifat dan zat (Wāṣil ibn 'Aṭā' and Daiber 1988). Satu adanya, itulah Tuhan terekam dalam doktrin tauhidnya. Namun, bagi kaum Asy'ariyah Tuhan bisa dikenali dengan sifat dan zatnya. Bahkan nama-namanya se-

banyak 99 merupakan keterangan tentang hakekat Allah itu sendiri. Manusia memerlukan keterangan untuk memahami Allah. Bagi masyarakat Muslim Indonesia sudah biasa belajar tentang 20 sifat Tuhan sejak Pendidikan dini di mushalla-mushalla, pondok pesantren, dan madarasah. Misalnya, *wujud* (ada), *qidam* (abadi), *baqa* (dahulu) dan seterusnya. Sifat yang 20 itu dijadikan lagu dan disyairkan menjelang shalat maghrib, sesudah azan menunggu iqamat di banyak surau di Jawa Timur.

Syair Tajus Salatin menunjukkan pengakuan faham Asyariyah tentang sifat dan zat Tuhan. Manusia dan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Manusia membayangkan Allah yang disembahnya dengan menggunakan logika manusia. Manusia bergaul dengan manusia. Manusia membayangkan Tuhannya dengan sesama dan berdiskusi juga dengan bahasa manusia pula.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menegaskan itu, bahwa bernegara juga berketuhanan. Berketuhanan bisa dimaknai lebih luas lagi, bahwa manusia Indonesia mengakui agama, spiritualitas, jalan pencerahan, dan aspek-aspek rohani lainnya. Manusia Indonesia, sebelum Indonesia itu sendiri dideklarasikan tahun 1945 sudah terekam jejak-jejak spiritualitasnya berabad-abad. Misalnya di Magelang, masih kokoh berdiri dan dijadikan tempat wisata, candi Borobudur yang menampilkan relief pencarian ala Sudana dalam sutra Gandavyuha, yaitu sutra kuno ajaran Budha tentang pencarian kebenaran. Dalam relief yang panjang itu diceritakan Sudana mencari guru sebanyak 53 untuk

mencari ilmu dan pencerahan kepada banyak tokoh. Pencarian guru dan pencerahan juga laku spiritualitas, karena disitu Sudana belajar tentang etika, puja, kebijakan. Laku spiritualitas ini juga akhirnya dijalani oleh wali Islam pada masa selanjutnya, misalnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga setelah bertemu dengan Sunan Bonang, ia menjalani bertapa di sungai. Konon, bamboo dan rumput liar tumbuh di badannya. Berziki dan berkontemplasi di pinggi sungai. Dalam mitosnya, Kalijaga adalah penjaga sungai. Namun dalam kenyataannya, bisa saja berlainan (Makin, 2016: 236–42).

**Bermasyarakat Bhinneka**

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila berkait dengan sila-sila selanjutnya. Sejak awal tulisan ini diterangkan bahwa ketuhanan dan kemanusiaan selalu erat. Kebetulan sila kedua adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Keduanya dalam berbagai agama di Indonesia terkait. Dalam Islam tentu saja. Ini bisa kita mulai dari syair Hamzar Fansuri.

Ikan achmaq bersuku-suku
Mencari air ke dalam batu
Olehmu taqshir mencari guru
Tiada ia tahu akan jalan mutu
(Sangidu, 2012: 194)

Makna dari syair itu bisa beragam. Menurut ahlinya, konon itu menyiratkan pencarian ketuhanan yang tidak tepat. Orang yang keliru (achmaq) berpecah belah. Ia mencari air, berarti ketuhanan, ke batu-batu. Tentu tidak sampai jumpa, di batu tidak bersumber. Karena keterbatasan itu (taqshir) tujuan tidak dicapai.

Lalu orang yang keliru tidak mencapai mutiara (mutu). Hamzah Fansuri memang mengibaratkan manunisa sebagai ikan yang menghirup air laut, sebagai Tuhan. Ikan terbatas, laut tidak terbatas. Tetapi ikan dan laut selalu ada di sana. Laut luas, sebagai Tuhan, ikan terbatas, sebagai manusia.

Makna lain dari syair itu, bisa juga bahwa kenyataannya manusia bersuku-suku, berbagai kelompok, bangsa, dan aliran. Mazhab mencari Tuhan juga banyak. Tuhan bisa didekati dengan berbagai cara, berbagai jalan, dan berbagai doa, puja, mantra, dan himne. Tidak ada cara lain kecuali saling menghormati dan saling memahami cara lain itu. Bersuku-suku dan berbeda-beda tampaknya sesuai dengan semangat Quran surah al-Hujuarat (10): 13:

> Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tuhan memang Esa. Yang Maha Mulia, Yang Maha tinggi adanya. Namun, manusia tidak satu suku, tidak satu bangsa. Indonesia sungguh beruntung, sebagai bangsa muda, berusia 75 tahun, namun mampu menjaga keragaman ini. Ada 6 agama hingga kini yang resmi: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Keesaan Tuhan ditafsirkan menurut ajaran dan iman yang berbeda. Ada lagi ratusan penghayat aliran, yang mempunyai cara berdoa dan mendekati Tu-

han yang Esa itu. Maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa berarti juga memberi hak dan menghormati kewajiban masing-masing orang yang beriman dengan cara masing-masing.

Dalam surat yang pendek, turun di Makkah tentang “tidak beriman/kafirun” surah ke 109, dikatakan pula seperti ini:

> Katakanlah, wahai yang tiada beriman
> Aku tidak akan memuja yang kalian puja
> Dan kalian bukanlah pemuja yang aku puja
> Dan aku tidaklah pemuja yang kamu puja
> Agamamu untukmu dan Agamaku untukku

Umat Islam mempercayai Allah Esa, sedangkan cara percaya, beribadah, dan berdoa agama lain sejumlah 6 dan penghayat aliran lainnya ratusan jumlahnya di Indonesia, berbeda-beda. Maka saling menghormati, saling memahami dan saling memberi tempat dan haknya. Itulah arti dari sila pertama Pancasila. Arti ketuhanan bukan satu versi, bahkan dalam satu agama pun ada banyak versi tafsir. Agama lain tentu punya hak dan kewajiban yang sama kedudukannya. Itu juga sekaligus menjadi tafsir surah ke 109 Kitab Suci Qur’an.

Jumlah masjid dimana-mana di seluruh Indonesia terus bertambah, hinggga kini. Disamping candi Prambanan, yang merupakan candi Hindu abad 8-9 berdiri masjid dengan megahnya. Dahulu kala umat Hindu melakukan puja kepada Syiwa, Wisnu dan Brahma. Sekarang disampingnya azan beralunan di masjid. Dua tempat ibadah yang saling berdekatan, tidak saling bertabrakan dan tidak saling menganggu.

Begitu juga di candi Borobudur Magelang, banyak masjid dan musalla di sekitarnya. Bahkan para penjaganya banyak yang muslim taat. Tidak mengimani Gandvyuha dalam relief Borobudur bukan berarti membenci, tetapi sebaliknya menjaganya sebagai kekayaan keragaman Indonesia.

Lihatlah masjid Menara kudus, di Kudus Jawa Tengah, bentuk bangunannya juga menyerupai pure di Bali. Masjid itu penuh dengan bata merah, dan undakan yang bermotif rumah Bali saat ini.

Begitu juga masjid yang ada di Kota Gedhe Yogyakarta. Pintu masuk masjid itu juga berupa regol menyerupai candi atau pure di Bali. Artinya masjid sudah menyatu, dan tetap menghargai tradisi kuno sebelumnya, seperti Hindu.

Islam adalah agama yang menawarkan akomodasi dan keserasian antar budaya di Indonesia. Indonesai menjadi contoh bagi dunia Muslim yang banyak mengalami pergolakan karena pertikaian dan konflik antar golongan politik dan kepentingan ekonomi. Islam di Indonesia ternyata mampu mendamaikan demokrasi dalam keragaman. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa tetap menunggu tafsir kreatif yang sesuai dengan konteks masyarakat yang beragam.

## III. Penutup

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dimaknai sedara tunggal dan monoton. Tetapi maknanya bisa dilihat dalam sejarah bangsa Indonesia yang sudah panjang. Baik budaya dan tradisi maupu

teks-teks kuno menunjukkan keragaman masyarakat Nusantara. Toleransi, saling memahami, saling menghormati, berkomitmen untuk saling melindungi keragaman merupakan intisari dari ketuhanan, karena faktanya kita bermacam-macam, berbeda-beda, beragam dalam bermasyarakat. Berketuhanan sekaligus juga berkemanusiaan, karena adanya sila pertama dan kedua Pancasila begitu seharusnya.

## Referensi

Al-Makin. 2015. Antara barat dan timur: batasan, dominasi, relasi, dan globalisasi : melampaui jurang masa lalu untuk meniti jembatan penghubung.

Amir-Moezzi, Mohammad Ali, and Sabine Schmidtke. 2009. “Rationalisme et Théologie Dans Le Monde Musulman Médiéval: Bref État Des Lieux.” Revue de l’histoire Des Religions 226 (4): 613–38.

Ašari, Abu “l” Hasan ’Ali ibn Ismail al. 1967. Al-Ibanah ’an Usul Ad-Diyanah: The Elucidation of Islam’s Foundation. Translated by Walter C Klein. New York: Kraus Reprint.

Daulay, Saleh Partaonan. 2020. Filsafat Politik Melayu, Kajian Filologis Dan Refleksi Filosofis Terhadap Kitab Taj al-Salatin Karya Buhkari al-Jauhari. Yogyakarta: Litera.

Fatih, Moh khairul. 2017. “Dialog Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Dalam Pemikiran A. Mukti Ali.” Religi: Jurnal Studi Agama-Agama

13 (01): 38–60. https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1301-03.

Halim, Abdul. 2001. Teologi Islam rasional: apresiasi terhadap wacana dan praksis Harun Nasution. Jakarta: Ciputat Press.

Makin, Al. 2012. “Pluralism in Education, a Study of Mukti Ali’s Thought.” Education in Indonesia Perspectives, Politics and Practices, Ed. by Rommel A. Curaming and Frank Dhont.

———. 2016. Keragaman dan perbedaan: budaya dan agama dalam lintas sejarah manusia. Yogyakarta: Suka Press.

———. 2017. “Haji Omar Said Tjokroaminoto: Islam and Socialism (Indonesia, 1924/1963).” In Religious Dynamics under the Impact of Imperialism and Colonialism, edited by Björn Bentlage. Leiden; New York: Brill. https://brill.com/view/book/edcoll/9789004329003/B9789004329003_021.xml.

———. 2018. “‘Not a Religious State.’” Indonesia and the Malay World 46 (135): 95–116. https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279.

Nasution, Harun. 1972. Teologi Islam. Tjiputat: publisher not identified.

Sangidu. 2012. “Ikan Tunggal Bernama Fadhil Karya Syaikh Hamzah Fansuri: Analisis Semiotik.” Humaniora 15 (2): 191–99. https://doi.org/10.22146/jh.787.

Wāṣil ibn ‘Aṭā’, and Hans Daiber. 1988. Wāṣil ibn ‘Aṭā’

als Prediger und Theologe: ein neuer Text aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. Leiden; New York: E.J. Brill.

# KETUHANAN YANG MAHA ESA: TIMBANGAN NALAR *PHILOSOPHIA PERENNIS*

*Muhammad Sabri*[*]

*Maka dari itu, djikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni djikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sosiale rechtvaardigheid ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjoangan, perjoangan, dan sekali lagi perjoangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu, perjoangan kita telah berakhir: Tidak! Bahkan saya berkata: di dalam Indonesia Merdeka itu, perjoangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjoangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita Bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjoang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila.*

(Ir. Soekarno, 1 Juni 1945)

## I. Pendahuluan

1 Juni 1945, mungkin tidak sekadar momen kelahiran, tetapi lebih merupakan monumen ide paling genial pendiri negara Indonesia yang merengkuh cita-cita luhur Pancasila, yaitu: terwujudnya kehidupan rakyat

* Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI).

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita luhur Pancasila itu, sepenuhnya terhunjam kukuh dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang lestari hingga kini. Mahakarya dari *actus* "penggalian" Soekarno dan memperoleh dukungan penuh tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan bersumber dari denyut-nadi nilai, pesona-haru, religiusitas, adat, kearifan dan keadaban yang tumbuh subur dalam tamansari kebudayaan Nusantara Klasik.

Kutipan di atas, menunjukkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia telah tertuang dalam Pancasila. Ketika mengenalkan Pancasila pada pidato 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Soekarno sejatinya tidak hanya mengusulkan suatu dasar filosofis negara, tetapi juga lompatan besar dan strategis bangsa Indonesia dalam membangun cara pandang diri dan kebudayaannya. Alam pikiran masyarakat Nusantara yang sejauh ini ditekuk oleh mentalitas *inlander*, alam keterjajahan dan inferior, diajak untuk berani merdeka dengan persyaratan minimum, tanpa harus mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang detil, kecil-kecil, *njlimet* dan *zwaarwichtig.*

Soekarno mengajak para pemimpin bangsa tidak ragu menerima dan memperjuangkan kemerdekaan, meski masih terdapat beberapa kekurangan. Karena baginya, kemerdekaan politik merupakan jembatan emas dan di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. "Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di

dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan bangsa kita!"

Usulan Soekarno tentang dasar negara Pancasila tidak hanya menjadi solusi pelbagai perbedaan secara prinsip, tetapi pada urutannya diterima semua pihak secara aklamasi. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dipandang sebagai "inventivitas" yang juga bersifat eklektik. Sebuah sikap pemikiran yang mengandaikan pentingnya pembaruan gagasan tanpa mengabaikan ide lain yang juga relevan. Dengan begitu, pidato Soekarno tentang dasar negara Pancasila hadir tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau menolak pikiran-pikiran yang berkembang pada persidangan BPUPK hari-hari sebelumnya, tetapi berusaha meraih suatu bentuk pembaruan yang menyelamatkan serta menciptakan sesuatu yang bersifat eklektik dan baru, yaitu dasar negara yang mempersatukan seluruh elemen bangsa. Polarisasi pilihan dasar negara yang sekular dengan "memisahkan" dimensi keagamaan dari pemerintahan dan negara agama (Islam) yang berkembang dalam persidangan sebelumnya dapat ditemukan solusinya. Pancasila dirumuskan bukan sekadar sebagai etika bangsa melainkan sebagai pemecahan masalah yang serius, yaitu tentang ideologi pemersatu dan dasar republik yang mau didirikan.

Negara dan agama tidak diletakkan secara diametral dan berhadap-hadapan, tetapi keduanya diposisikan sebagi suatu entitas yang berbeda (*distinction),* sebagai sesuatu yang dapat disinergikan, dan sebagai dualitas yang saling mengisi dan tak dapat dipisahkan

satu sama lain. Negara dan agama menjadi entitas yang saling menghormati, saling mengharmoni sehingga negara Indonesia bukan negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama. Di satu sisi, negara "secara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama", khususnya melalui kementerian agama. Di sisi lain, negara tidak didikte atau mewakili agama tertentu, bahkan tidak pula memberikan keistimewaan kepada salah satu agama (Latif, 2011:95).

Dasar negara Pancasila yang dalam pengandaian Soekarno disebut sebagai "*philosofische grondslag,* fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi," bukan sekadar peristiwa politik dan konsensus agung para pendiri negara, tetapi juga peristiwa budaya yang menyangkut cara pandang dan *mindset* bangsa Indonesia terhadap realitasnya. Jika sebelumnya warga Nusantara sangat terikat partikularitas agama, etnis, dan budaya—sejak Pancasila dijadikan dasar negara (*philosofische grondslag),* ideologi bangsa dan pandangan-dunia (*Weltanschauung*)—bangsa Indonesia berubah dan melebur diri sebagai "sebangsa dan setanah air" sembari tetap menghargai kepelbagaian yang melekat pada masing-masing warga. Di titik ini sesungguhnya tengah berlangsung apa yang diandaikan Clifford Geertz (Geertz, 1973:106) sebagai "revolusi integratif", yakni mengubah identitas berbasis kesukuan, agama, dan sistem budaya menjadi identitas kebangsaan.

Masyarakat Nusantara yang masih terikat pada primordialisme diajak bersatu untuk secara bersama-sama keluar dari kepompong primordial melompat masuk ke dalam suatu wadah kebangsaan yang bersifat inklusif. Dalam wadah kebangsaan yang baru, warga diperlakukan secara adil dan beradab dengan basis kesetaraan yang sederajat. Dalam kondisi yang sederajat, sesama warga dapat saling bermusyawarah untuk menentukan kesejahteraan bersama dengan tetap meyakini dimensi spiritual pada Tuhannya masing-masing secara berkebudayaan (Hariyono, 2018:128).

Dalam pengandaian Soekarno, setiap bangsa yang merdeka dan dapat berdiri kukuh harus memiliki *Weltanschauung* yang digali dan disiapkan sebelumnya. Dalam pidato tanggal 26 Mei 1958 pada kursus Pancasila di hadapan kader-kader Pancasila di Istana Negara, Soekarno (Soekarno, 2015:128-133) menyatakan, ketika menggali Pancasila, dia sampai ke *saf* (lapisan) yang paling dalam, yaitu *saf* pra-Hindu agar Pancasila selain dapat menjadi titik temu yang menyatukan, sebagai alat pemersatu (*common denomination)*, "*meja statis*", juga mampu menjadi "*leitstar dinamis*" yang dapat memberi orientasi dalam meraih tujuan (*telos)* dan cita-cita bangsa ke depan. Pancasila sebagai bintang pemandu cita-cita bangsa, sebab itu, memerlukan strategi. Pancasila sebagai spirit kebudayaan Indonesia tidak bisa dimaknai sekadar sebagai warisan budaya yang biasa ditampilkan dalam aneka festival pagelaran seni dan tradisi popular, melainkan lebih sebagai suatu misi dan masa depan bangsa yang harus diperjuangkan

terus menerus.

Kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam napas kehidupan bangsa Indonesia membutuhkan perjuangan dan suatu strategi kebudayaan. Dengan kata lain, walaupun Pancasila digali dari bumi kearifan paling dalam atau samudera luas tradisi Nusantara, sebagai warisan leluhur nenek moyang dan merupakan identitas dan jati diri bangsa, namun untuk menjadi *realiteit* Pancasila secara kontinum membutuhkan perjuangan.

Dalam konteks itulah Pancasila perlu dipahami secara utuh dengan titik tolak pidato Soekarno 1 Juni 1945 sebagai suatu strategi kebudayaan dan kemungkinan menjadi paradigma ilmu pengetahuan. Di titik kesadaran ini pula, setiap ikhtiar penggalian spirit dan mutiara nilai-nilai Pancasila memungkinkan kita membangun sistem keimanan dan keberagamaan yang inklusif, sistem politik dan etika publik kebangsaan yang sehat dan bermartabat, sistem ekonomi berbasis keadilan sosial, hingga konstruksi paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, seni, serta tradisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat menjadi landasan kebangsaan yang inklusif dengan menautkan gerak sistem budaya, politik, dan ekonomi agar kreativitas, inventisitas, daya cipta, dan kearifan dapat terus diaktualisasikan dalam laku bernegara dan hidup keseharian. Semua itu dilakukan untuk mencapai cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan Makmur.

Perumusan materi sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada intinya menyampaikan pe-

san tegas dan tekad keras akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keabsahan konstitusional Pancasila tidak hanya karena rumusannya tercantum dalam dan menjiwai Pembukaan UUD 1945 (*staat fundamental norm)* tetapi juga karena kenyataan sosial dan kebenaran kultural bahwa Pancasila adalah sumber norma dari seluruh norma (*grund norm)* yang ada di Indonesia. Sila-sila Pancasila sungguh-sungguh merupakan pengalaman dan pergerakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam bentang sejarah yang sangat panjang. Sifat dan sikap ini merupakan gugusan kenyataan dan rangkaian kebenaran atas perjalanan dan perkembangan Indonesia. Hal ini makin meneguhkan Pancasila sebagai sebuah cerminan faktual, aktual, dan kontekstual Indonesia Raya.

Pancasila memiliki kewibawaan moral kolektif dan kekuatan kultural karena secara autentik merupakan "Indonesia yang sesungguhnya dan senyatanya." Pancasila digali Soekarno dari bumi Nusantara klasik, digali dari sifat kepribadian dan sikap kebudayaan nasional, digali dari peradaban Indonsia Raya. Pancasila digali dari kehidupan dan kepribadian nasional Indonesia. Pancasila tidak menjaga jarak, tidak berjarak, dan tidak asing dengan Indonesia. Pancasila justru menyatu secara ontologis dengan keindonesiaan dan sudah bersama dengan keindonesiaan sejak dahulu kala sampai seterusnya.

Pancasila, dengan spirit *Bhinneka Tunggal Ika* yang

dikandungnya, dapat diandaikan sebagai "pola dasar" (*archetype*) keindonesiaan: yaitu pola-pola tersembunyi dalam jantung tradisi dan pikiran terdalam yang membentuk karakter dan memandu bagaimana bangsa Indonesia mengalami dan menafsir realitasnya.

Pola dasar tersebut tumbuh dari akar budaya dan sejarah amat panjang yang dihidupi lewat jejaring *interconnective link*: lintas tradisi, lintas agama, lintas golongan, lintas soial, lintas 'ideologi', dan lintas teritorial dalam pergaulan sesama bangsa Indonesia serta dalam respons bersama terhadap pengaruh dari luar. Pemikiran ideologis, pertimbangan historis, dan hibridasi kultural akibat penyerbukan silang antar budaya ini, pada urutannya mengukuhkan Pancasila sebagai *Weltanschauung*.

Pancasila kian bersinar benderang manakala diaktualisasikan, dijalankan, dan dibumikan secara utuh dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila, sebab itu, mesti dipahami, dihidupi, dan disemangati dalam satu pertautan dan saling menguatkan satu sama lain. Pemaknaan Pancasila kian menemukan ruang kontekstualisasinya terutama ketika diwujudkan dalam penyelenggaraan negara dan laku kehidupan masyarakat dan bangsa. Penyelenggaraan Pancasila secara utuh dan menyeluruh dengan format dan pola seperti ini pada urutannya melahirkan sikap toleran, iklusif sekaligus menguburkan intoleransi dengan segala sesuatu yang beraroma ekstrimisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam aliran tertentu masyarakat—baik dalam pangkuan konstruksi "teologi" maupun "etno-nasiona-

lis” tertentu—yang berpotensi merobek kohesi kebangsaan kita: Persatuan Indonesia.

## II. Pembahasan

### Ketuhanan Yang Maha Esa: Basis Etik Relasi Lintas Iman dan Kepercayaan Autentik

Kehidupan keagamaan (*religiousity*) dan kepercayaan (*beliefe)*—khususnya ide tentang Ketuhanan Yang Maha Esa—memiliki jejak panjang dan kontribusi yang tidak kecil dalam formasi kebangsaan Indonesia. Hal tersebut tidak hanya tampak dalam pandangan para pendiri negara, tetapi juga telah menjadi arus utama dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Nusantara klasik. Hal tersebut mengandaikan betapa sentral kesadaran keagamaan dan ketuhanan dalam ruang kebangsaan Indonesia.

Siapa pun yang coba membaca sejarah politik agama-agama dan kepercayaan autentik di Indonesia, akan tiba pada satu kesimpulan bahwa agama telah menjadi “denyut nadi” dinamika yang terus menerus membayangi pergolakan politik di tanah air, sejak usianya yang paling dini. Agama menjadi pertaruhan mulai dari tatanan ideologis, perumusan konstitusi, sampai pada undang-undang dan peraturan di bawahnya. Dalam pendakuan Daniel Dhakidae, “Agama menjadi perumus identitas, kalau bukan menjadi identitas itu sendiri, atau tidak ada identitas dan mungkin juga tidak boleh ada identitas tanpa agama sebagai sumbangan utama di dalamnya.” Akan tetapi, lanjut Dhakidae dengan ungkapan sangat plastis:

> "Kalau memang agama itu begitu pentingnya, mengapa hanya boleh ada lima agama? Dengan kehadiran kelompok etnik dan bahasa yang langsung berhubungan dengan itu sebanyak kurang lebih 300 di Indonesia, bisa diduga ada kurang lebih 300 agama tersebar di seluruh Nusantara, dan dengan demikian bisa diduga ada 300 Tuhan dan Allah yang disembah. Lantas di mana kurang lebih 295 agama lain itu?" (Dhakidae, 2003:511)

Lima agama yang "diakui negara" yang disebutkan oleh Dhakidae adalah: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Belakangan, sejak Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, menambahkan Konghuchu sebagai agama keenam yang diakui negara.

Pernyataan cukup kritis Dhakidae itu pada urutannya membuka perspektif lain dalam membaca dinamika kehidupan beragama dan berkepercayaan di tanah air. Sebab, penggunaan kosakata "agama" dalam konteks keagamaan di Indonesia dewasa ini, memiliki pemaknaan peyoratif yakni "agama yang diakui negara" (Sutanto, 2011:379), yang dengan sendirinya tidak mencakup segala jenis "kepercayaan" atau "keyakinan" yang telah tumbuh secara historis-endomik di bumi Nusantara klasik. Dalam kajian Niels Mulder (Mulder, 1983:5) menunjukkan bahwa baru pada tahun 1961 Departemen Agama berhasil merumuskan definisi "minimum" tentang agama yang menjadi definisi "resmi" sampai sekarang, setelah upaya sebelumnya (1952) kandas di tengah jalan. Mulder mengingatkan, kebijakan tersebut dilatari oleh suburnya kelompok-kelompok kebatinan pada masa itu. Departemen Agama melaporkan bahwa

pada tahun 1953, tak kurang dari 360 kelompok kebatinan yang hidup di tanah Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peranan menentukan sehingga pada Pemilu 1955 partai-partai Islam gagal memperoleh suara mayoritas dan hanya meraih 42 persen suara. Pada tahun yang sama BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) didirikan di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonegoro. Tahun 1957, BKKI mendesak Presiden Soekarno agar mengakui secara formal bahwa "kebatinan" setara dengan "agama" (Mulder, 5-6).

Konstelasi politik inilah yang mendorong Departemen Agama pada tahun 1961 mengajukan definisi "agama". Suatu "agama" menurut definisi itu, harus memenuhi unsur-unsur penting ini: kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya. Tentu saja, dengan definisi itu, tak sedikit kelompok kepercayaan autentik, kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik religi lokal seperti animisme, dinamisme, dan seterusnya tidak tercakup di dalamnya sehingga mereka digolongkan sebagai orang yang "*belum* Beragama" (Sutanto, 2011).

Dengan pendefinisian seperti itu, kelompok-kelompok kepercayaan autentik, kebatinan, mayarakat adat, penganut religi lokal, dan seterusnya yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara— atau mereka, meminjam ungkapan Dhakidae di atas, yang termasuk dalam "295 agama lain itu"—terpinggirkan, praktik-praktik religi lokal mereka ternafikan, atau bahkan sering dicap

sebagai aliran "sesat dan menyesatkan". Tetapi, pada saat bersamaan mereka, religi-religi lokal itu, sebutlah diantaranya *Parmalim* (Batak), *Patuntung* (Bulukumba), *Alu'tudolo* (Tana Toraja), *Binanga Benteng* (Selayar), *Tolotang* (Sidrap), *Mori Keraéng* (Manggarai), *Opo Wailan* (Minahasa), *Wiwitan* (Sunda), *Kaharingan* (Dayak), *Tengger* (Jawa), *Bissu* (Pangkep) dan seterusnya—yang secara otonom tumbuh dan bukan derivasi agama tertentu—juga diharapkan akan masuk dan memeluk salah satu agama yang "diakui" negara. Di sini tampak jika negara mesti hadir dan mengayomi keanekaan agama dan kepercayaan autentik *historis-endomik* itu, yang keberadaannya dalam sejarah jauh sebelum lahirnya negara Indonesia modern. Di titik ini, agaknya bangsa ini bisa mempertimbangkan perspektif *philosophia perennis,* sebuah doktrin filsafat purba yang mengandaikan *the heart of religions:* bahwa di dalam jantung setiap agama dan tradisi-tradisi kepercayaan autentik merengkuh misi dan pesan kebenaran yang sama. Jika ini menjadi tumpuan kesadaran kolektif—maka Indonesia sebagai bangsa bineka—bisa menjadi rumah besar bersama yang nyaman, hangat, indah, setara, dan damai.

Sejatinya, dalam perspektif *Religious Studies*: titah, isyarat, atau pun hukum yang dikalamkan Tuhan dari "langit," selamanya punya dimensi profan. Di sana—di setiap napas *nubuat* kudus—ada jejak tegas yang tersisa: bahwa Yang Abadi dan "langit" sekekalnya saling membelah dengan "bumi" yang guyah. Dan, kebenaran selalu hadir dalam bentang sejarah yang aneka, di tan-

gan agung seorang utusan yang cemerlang, tetapi unik. Cahaya dan gelap acapkali saling bertukar tangkap dengan semesta-kode langit yang tak selamanya tunai dalam kalam. Sejak itu agama menemukan sangkarnya di bumi.

Jejak agama-agama, karena itu, bukan sepenuhnya petanda langit, tetapi juga geliat peristiwa bumi. Dalam *The Transcendent Unity of Religions*, Fritjhof Schuon mengenalkan kembali *philosophia perennis*—sebuah kearifan antik—yang mengandaikan kaitan seluruh eksistensi yang ada dengan Realitas Mutlak. Wujud kearifan itu dalam *philosophia perennis* disebut sebagai "*Tradition"* yang hanya dapat dicapai melalui *Intellectus*—anggitan yang dipopulerkan Plotinus (3 M)—sebagai ungkapan lain dari *soul* atau *spirit.* Manifestasi "*Tradition*" ("T" Kapital) yang diyakini kaum parennial sebagai berasal dari Tuhan, memiliki paras yang jamak dalam sejarah: agama-agam, filsafat, kearifan, seni, tradisi ("t" kecil), ritus, simbol, doktrin, dan seterusnya.

Pada intinya, dasar-dasar teoretis kearifan *philosophia perennis* tentang "*Tradition"* terdapat dalam jantung setiap agama dan tradisi-tradisi autentik: tradisi Budha menyebutnya *dharma,* Taoisme (*tao),* Hinduisme (*sanathâna),* Islam (*al-dîn),* Dayak (*tuh)* dan Patuntung (*lalang).* Dengan cara—yang dalam *philosophia perennis* diandaikan sebagai "transenden" itu—semua ritus, doktrin dan simbol keagamaan dan kepercayaan autentik, terpaut dalam sebuah *scientia sacra* ("pengetahuan-suci") yang melampaui bentuk formal agama.

Dari arus sejarah yang mengalir, lahir kesaksian

bahwa Indonesia adalah bangsa yang aneka dan penuh warna: Gugus kepulauan yang terbentang luas di hamparan maritim laksana mutiara manikam yang eksotik, semesta tradisi dan cakrawal etnik yang jamak, hingga galaksi agama dan keyakinan tradisional tumbuh bersama dan memintal harmoni *oase* peradaban Nusantara klasik. Perjumpaan agama "*mainstream*"—yang biasanya menjadi agama kerajaan lokal—dengan agama minoritas, tidak tersandera dalam pola relasi "resmi-tak resmi", tetapi saling menjaga dan menghormati. Sejatinya, hal ini dapat  menjadi modal sosial-kultural dan modal historis bagi keutuhan bangsa Indonesia yang pelbagai.

Meski demikian, telah menjadi pengetahuan jamak, tantangan paling serius dalam kehidupan lintas agama dan tradisi kepercayaan autentik di tanah air dewasa ini adalah bagaimana seorang beragama dan berkepercayaan bisa mendefinisikan dan meletakkan dirinya secara tepat di tengah-tengah agama dan kepercayaan orang lain. Sebab, kenyataan menunjukkan bahwa pergaulan antar agama dan kepercayaan tradisional autentik kini kian memperlihatkan intensitasnya. Sehingga tidak mengherankan jika tak sedikit kalangan memandang zaman sekarang sebagai "zaman baru" (*New Age*), yang mencirikan pesatnya perhatian manusia terhadap dunia spiritual. Semboyan yang ditulis John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam *Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990's*, yang menyebut "Spirituality, Yes, Organized Religion, No", menandai besarnya perhatian ini—khususnya  dari manusia Barat—terha-

dap spiritualitas Timur (Naisbitt dan aburdene, 1991: 295).

Bila ditelusuri lebih jauh, semangat di balik semboyan Naisbitt-Aburdene itu, sesungguhnya telah lama dikenal di kalangan masyarakat tertentu, di Barat maupun Timur. Mereka ini menginsafi perlunya spiritualisme dalam hidup manusia, namun mereka amat kritis terhadap agama-agama mapan, jika tidak ditolaknya sama sekali. Sebut saja misalnya Albert Einstein dan Thomas Jefferson. Tokoh yang terakhir ini misalnya, mengaku percaya kepada Tuhan (*Deisme*), kepada Kemaha-Esa-an Tuhan (*Unitarianisme*) dan kepada Kebenaran Universal (*Universalisme*), tanpa perlu mengaitkan kepada salah satu dari agama-agama formal yang ada. Bahkan Jefferson meramalkan bahwa pahamnya itu akan menjadi agama seluruh umat manusia, dan dalam jangka dua ratus tahun akan menggeser agama-agama formal (Madjid, 1995:127).

Memang benar, spiritualisme Jefferson mampu memesonakan masyarakat Amerika saat itu, sementara jargon-jargon yang dikenalkannya pun relatif baru dan sangat tipikal Deisme alami seperti *Laws of Nature* dan *Nature's God*. Tapi ramalan bahwa *Deisme-Unitarianisme-Universalisme*nya akan menggeser agama-agama formal ternyata meleset sama sekali. Justru, berlawanan dengan ramalan Jefferson, agama-agama formal dewasa ini malah bangkit kembali, sehingga tidak kurang dari seorang cendekiawan Indonesia Soedjatmoko, mengandaikan bahwa "abad mendatang ini adalah abad spiritualitas melalui agama-agama formal" (Soed-

jatmoko, 1989: 60-66). Dengan begitu, agaknya, semboyan "Spirituality, Yes, Organized Religion, No" kian kehilangan pijakannya.

Kendati demikian menarik sekali mengkaji uraian Naisbitt-Aburdene (2000:295-296). mengenai kehidupan beragama di bawah semboyan tersebut. Sebab dari *polling* pendapat yang dikumpulkannya memperlihatkan adanya indikasi menaiknya spiritualisme di kalangan masyarakat Amerika, lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. Sejumlah besar dari mereka percaya bila "Tuhan adalah kekuatan spiritual yang positif dan aktif", meskipun gejala itu disertai dengan menurunnya peranan agama-agama formal. Kalangan muda terpelajar di sejumlah perguruan tinggi adalah yang pertama-tama bersikap sangat kritis kepada agama-agama formal. Mereka menilai gereja dan sinagog "sibuk dengan masalah-masalah keorganisasian, dengan meminggirkan isu-isu teologis dan spiritual". Maka, demikian Naisbitt-Aburdene, mereka, kaum muda itu bukannya manusia "beragama" (*religious*) tetapi "berkeruhanian" (*spiritual*).

Sedemikian besar perhatian masyarakat Barat terhadap kehidupan spiritualitas, sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an terbit sebuah ensiklopedi besar berjilid 25, *World Spirituality: An Encyclopedic History of the Religions Quest* yang sangat sarat pengetahuan spiritual di zaman arkaik, agama-agama, esoteris modern, hingga satu jilid berkaitan dengan pertanyaan sekular atas keabsahan spiritualitas itu sendiri.

Sementara itu, satu masalah mendasar adalah

munculnya "kebingungan-kebingungan teologis," khususnya bagaimana seseorang mesti memosisikan dirinya di tengah-tengah agama dan kepercayaan autentik lain yang juga eksis dan punya keabsahan. Padahal, seperti diketahui bila teologi lama di *set-up* dan sejarah pun kemudian mengekstremkannya dalam suatu kondisi non pluralitas: *"Bahwa hanya agama dan kepercayaankulah yang paling benar, sementara agama dan kepercayaan lain menyimpang.*" Belum lagi masalah-masalah sosial-politik yang sering tiba-tiba memunculkan ketegangan dan krisis di kalangan lintas agama dan kepercayaan. Untuk fenomena terakhir dapat disaksikan pada peristiwa-peristiwa lokal belakangan ini, yang juga timbul di pelbagai kawasan di tingkat global (Toffler, 1990:374).

Tak sedikit pemikir mencoba menanggapi fenomena tersebut. Hugh Goddard misalnya seorang Kristiani, dosen Teologi Islam di Nottingham University Inggris menulis sebuah buku yang cukup menantang: *Christians and Muslims, from Double Standards to Mutual Understanding* (1995). Buku ini melukiskan bahwa dalam seluruh sejarah hubungan Kristen-Islam, apa yang sejauh ini telah membuat hubungan itu berkembang menjadi kesalahpahaman—bahkan menimbulkan suasana "saling mengancam" satu sama lain—adalah tak lain dari kondisi "standar ganda" (*double standards*) yang menyelimuti konstruk teologi mereka (Goddard, 1995).

Dengan kata lain, orang Kristen ataupun Islam menetapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya—yang biasanya standar itu bersifat ideal-sakral-tran-

senden—sementara penilaian terhadap agama lain memakai standar lain, yang lebih bersifat empiris-profan-historis. Melalui standar ganda ini muncul prasangka-prasangka sosiologis dan teologis, yang pada urutannya memperkeruh relasi lintas agama.

Dalam perspektif teologi misalnya, ”standar ganda” itu lahir dalam bentuk kesadaran kuat bahwa: agama kita adalah agama yang paling sejati dan asli berasal dari Tuhan, sementara agama lain tak lebih dari konstruksi manusia atau setidaknya berasal dari Tuhan tapi telah direduksi sedemikian rupa oleh pemeluknya sehingga memperlihatkan konstruk agama yang "duniawi". Dalam sejarah pun, mentalitas *double standards* ini memperlihatkan dirinya lebih ekstrem dalam bentuk klaim kebenaran (*truth claim*) antara satu agama tertentu yang menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agama yang menilai. Dalam konteks seperti inilah pelbagai krisis lalu muncul di kalangan lintas agama dan kepercayaan.

Ilmuwan lain yang melihat bahwa munculnya krisis akibat kompleksitas relasi lintas agama adalah Arthur J. D'Adamo. Bagi D'Adamo, penulis *Science Without Bounds, A Synthesis of Science, Religion and Mystics* (1995) ini, bahwa "cara pandang agama" (*Religion's Way of Knowing*) yang eksklusif justru menjadi akar seluruh konflik antar umat beragama yang timbul kemudian. Karakteristik *Religion's Way of Knowing*—demikian D'Adamo—berangkat dari sebuah paradigma bahwa hanya agama dan kitab sucinyalah sumber kebenaran, dan sepenuhnya diyakini sebagai: (1) bersifat konsisten

dan berisi kebenaran-kebenaran yang tanpa kesalahan sama sekali; (2) bersifat lengkap dan final dan karena itu memang tidak diperlukan kebenaran dari agama lain; (3) kebenaran agama sendiri; dianggap merupakan satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan atau pembebasan; dan (4) seluruh kebenaran itu diyakini original dari Tuhan dan bukan konstruksi manusia (Rachman, 1996: 6).

Akar krisis epistemologis yang diungkapkan D'Adamo, jelas bisa mengejutkan banyak pihak, terlebih mereka yang beragama secara taat. Apalagi dalam pandangan D'Adamo ini, *Religion's Way of Knowing* dilihat sebagai sesuatu yang tidak kritis. Padahal—bayangkan saja—agama mana yang tidak mengakui bahwa agama dan kitab sucinya itu bersifat konsisten dan penuh dengan kebenaran tanpa kesalahan sama sekali; bersifat lengkap dan final, karena itu tak ada lagi dan juga tidak diperlukan kebenaran lain, apalagi kebenaran agama baru setelah agamanya sendiri. Juga agama mana yang tidak mengakui bahwa hanya agamanyalah yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan atau jalan pembebasan. Apalagi kitab suci yang merupakan rujukan dasar dari cara beragama dan penyelamatannya itu memang diakui betul-betul berasal dari Tuhan (Rachman, 1995:xxiv). Bahkan di sini dapat ditegaskan bahwa hanya bangunan keimanan yang sakitlah yang meragukan agama dan kitab sucinya sebagai sesuatu yang autentik: *benar* dan *berasal* dari Tuhan.

Dalam perspektif modern—seperti ditunjukkan antara lain oleh D'Adamo—bahwa *Religion's way of know-*

*ing* jelas bisa menimbulkan masalah besar, khususnya jika suatu ikhtiar relasi lintas agama coba dibentangkan. Masalah yang bisa timbul adalah “perang” klaim kebenaran (*truth claim*) dan selanjutnya perang klaim keselamatan (*salvation claim*). Dalam perjalanan sejarah studi lintas agama, ciri studi agama jenis ini mewakili cara pandang ”apologetik” dan mengandung semangat ”intoleransi” sangat kuat.

Sementara, dari sudut pandang sosiologis, *claim of truth* dan *claim of salvation* ini telah melahirkan berbagai konflik sosial-politik yang pada urutannya meletuskan tidak sedikit perang antar agama, yang hingga kini masih tampak geliatnya meski dengan bentuk yang relatif berbeda. “Perang Salib”, misalnya mungkin dapat dipandang sebagai salah satu contoh terburuk tragedi kemanusiaan dalam sejarah yang memperlihatkan konflik antar-agama. Meletusnya peperangan yang dikobarkan oleh semangat “perang suci” masing-masing yang bertikai—antara Kristen dan Islam—belakangan menjelma “arena pembantaian” umat manusia (Ayoub, 1989: 24-45).

Akan tetapi, satu hal yang membingungkan—baik secara teologis maupun epistemologis—adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa agama lain juga memiliki klaim serupa, bahkan dengan tingkat kecanggihan teoretis yang tidak kalah rasionalnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: adakah ruang yang memungkinkan hidup rukun, toleran, dan harmonis terwujud dalam kehidupan antar umat beragama—sementara pluralitas agama, keragaman bangunan te-

ologi, pemikiran, budaya dan historisitas masing-masing agama—secara  ketat dan dinamis ”berinteraksi” langsung satu sama lain dalam kehidupan keseharian mereka? Atau dengan ungkapan sebaliknya: mungkinkah pluralitas keagamaan dan kepercayaan dapat berjumpa dalam sebuah ”titik temu” terutama dalam merumuskan “kebenaran universal” demi terciptanya keharmonisan hidup bersesama di kalangan lintas agama dan kepercayaan di tanah air?

Setidaknya terdapat dua jawab atas pertanyaan itu. *Pertama*, mereka yang bersikap pesimistik. Kalangan ini melihat adanya kesulitan teologis ataupun epistemologis untuk ”mempertemukan” pelbagai keyakinan yang ada. Sebab bagi masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan, tidak semata terletak pada ”rumusan” tapi juga substansi *kebenaran* mereka berbeda secara radikal. Sementara kelompok *kedua*, lebih terbuka, optimistik dan karena itu pula mengapresiasi dialog lintas agama. Kelompok terakhir ini, mengajak pelbagai bentuk agama dan tradisi yang autentik agar memiliki *visun* “universal” dalam merumuskan apa yang dalam filsafat disebut *the meaning and the purpose of life* (makna dan tujuan hidup). Itu sebab, dalam konteks ini perjumpaan pelbagai bentuk keagamaan yang terpenting tidak semata-mata pada tataran ”bentuk” atau formalnya (*eksoteris*), namun lebih ditekankan pada aspek “dalam” dan ”isi” (*esoteris*)nya. Karena menurut keyakinan kelompok ini, *hanya* dengan melepaskan klaim-klaim kebenaran dan keselamatan yang berlebih, mengoreksi diri tentang standar ganda yang sering dipakai

menghakimi agama lain dan selanjutnya memperluas pandangan inklusif teologi, barulah agama-agama akan mempunyai peran penting di masa depan, khususnya dalam upaya membangun dasar spiritualitas peradaban umat manusia.

Berangkat dari kesadaran untuk membangun relasi dan mendialogkan agama dan kepercayaan dari tataran substansinya, di mana agama dan kepercayaan pada dasarnya dipandang sebagai *relatively absolute* (hanya secara relatif absolut), atau jika dibalik *absolutely relative* atas klaim-klaim kebenaran yang secara tradisional memang inheren dalam agama dan kepercayaan, maka agama bisa diharapkan kembali seperti sedianya mengambil peran pembebasan (interior dan eksterior) atas kemanusiaan. Perspektif terakhir inilah yang dikenal sebagai *philosophia perennis*.

Paragraf-paragraf berikut ini akan coba menawarkan perspektif *philosophia perennis*—sebuah wawasan yang secara epistemik tidak saja berpeluang meneguhkan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi sekaligus memberi uraian teoretik apa yang diungkapkan Soekarno pada Pidato 1 Juni 1945 sebagai "Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, dan Ketuhanan yang saling menghormati satu sama lain".

## Kerangka Konseptual *Philosophia Perennis*

Sangat perlu agaknya mempertegas apa yang dimaksud dengan *philosophia perennis* atau terkadang juga disebut *sophia perennis*. Dalam pengandaian S. H. Nasr,

"Kedua kata itu tidak sepenuhnya identik: yang pertama lebih bersifat intelektual, sementara yang kedua lebih merupakan aspek aktualnya" (Nasr, 1981:68).

Dalam sejarah, *perennial philosophy* (Inggris), *philosophia perennis* (Latin) dan *al-hikmah al-khâlidah* (Arab), telah digunakan secara luas oleh aliran-aliran pemikiran, dari kaum neo-Thomis hingga Aldous Huxley. Bahkan nama terakhir ini membuat istilah *perennial philosophy* demikian populernya di kalangan banyak mahasiswa yang bukan spesialis dalam studi agama dan filsafat, karena ia menggunakan istilah tersebut untuk judul bukunya *The Perennial Philosophy*, yang terkenal itu. Karena demikian luasnya istilah itu digunakan sehingga perlu dijernihkan dalam konteks studi ini.

Kata *philosophia perennis*—seperti ditekankan selama ini oleh A.K. Coomaraswamy—dimaksudkan sebagai pengetahuan yang selalu ada dan akan selalu ada, yang bersifat universal. "Ada" dalam pengertian di antara orang-orang yang berbeda ruang dan waktu maupun yang berkaitan dengan prinsip-universal. Di samping itu, pengetahuan yang diperoleh *intellectus* ini diandaikan Schuon terdapat dalam jantung setiap agama dan *tradisi* yang autentik (Schuon, 1975: xviii dan 52).

Sementara itu, Aldous Huxley menyebutkan bahwa *philosophia perennis* adalah: (1) metafisika yang memperlihatkan suatu hakekat kenyataan Ilahi, dalam segala sesuatu: kehidupan dan pemikiran, (2) suatu psikologi yang memperlihatkan adanya suatu jiwa (*soul*) manusia yang identik dengan kenyataan Ilahi itu; dan

(3) etika yang meletakkan tujuan akhir manusia dalam pengetahuan—yang bersifat imanen maupun transenden—mengenai  seluruh keperiadaan (Huxley, 1994:vii).

Sedangkan Frithjof Schuon mengungkapkan bahwa *philosophia perennis* adalah, *"The timeless metaphysical truth underlying the diverse religions, whose written sources are the revealed scriptured as well as the writing of the gread spiritual masters"* (Schuon, 2005:53).

Dengan begitu, *philosophia perennis* memperlihatkan kaitan seluruh eksistensi yang ada di alam semesta ini dengan Realitas Mutlak. Wujud pengetahuan tersebut dari dalam manusia hanya dapat dicapai melalui *Intelek*—istilah yang telah dikenal sejak zaman Plotinus lewat karyanya *The six Enneads*—sebagai ungkapan lain dari *soul* atau *Spirit*. "Jalan" inipun hanya dapat dicapai melalui tradisi-tradisi, ritus-ritus, simbol-simbol dan sarana-sarana yang memang diyakini oleh kalangan perennial sebagai berasal dari Tuhan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa *philosophia perennis* adalah satu perspektif yang mengandaikan adanya "kesatuan transenden" atau "kesatuan spiritual" pada setiap agama dan tradisi autentik. Perspektif ini, tidak semata mengedepankan aspek-aspek "dalam" (*esoteris*) dari setiap bentuk keagamaan, tetapi juga memiliki kemampuan mengeliminir sejumlah perbedaan eksternalitas agama. Meskipun demikian, tidak dengan sendirinya berarti *philosophia perennis* berpandangan bahwa "semua agama adalah sama": Suatu pengandaian yang sama sekali *a-historis* dan tidak menghormati religiusitas yang partikular. Sebaliknya,

*philosophia perennis* justru berpandangan bahwa Kebenaran Mutlak (*The Truth*) hanyalah satu, tidak terbagi. Tetapi dari yang Satu ini memancarkan berbagai "kebenaran" (*truths*) sebagaimana halnya matahari yang secara niscaya memancarkan cahayanya.

Dengan mengembangkan perspektif transendental ini ditemukan kemudian adanya norma-norma abadi yang hidup dalam jantung setiap agama-agama besar maupun tradisi-tradisi spiritual kuno. *The heart of religion* inilah yang bersifat Ilahi dari agama-agama itu serta menjadi kajian serius—dan pada urutannya diyakini lalu disiarkan—oleh kaum perennialis. Dengan kata lain, upaya transenden-metafisis inilah yang diyakini oleh kalangan perennialis sebagai "kunci" agar manusia dapat memahami ajaran agama-agama yang sangat kompleks, aneka, dan penuh misteri yang tak pernah dapat diselami maknanya lewat analisis empiris apalagi historis sebagaimana yang dilakukan oleh para sarjana agama-agama sejauh ini. Karena itulah, kajian tentang *philosophia perennis* tidak saja menawarkan perspektif alternatif bagi studi lintas agama di masa depan yang dekat, tetapi juga mengokohkan wacana dialog intra-religius di kalangan umat beragama yang pada urutannya diharapkan mampu menjadi resolusi konflik antar umat beragama di tanah air.

Meski demikian, tidak berarti *philosophia perennis* sunyi dari kritik. Sebut saja misalnya para ahli agama yang tidak percaya akan adanya "kesatuan transenden", memandang *philosophia perennis* sebagai sesuatu yang tidak ada dan hanya merupakan imajinasi dari

para penganut *philosophia perennis* saja. Apalagi jika secara empiris mereka hanya mampu melihat pertentangan-pertentangan yang terdapat dalam agama-agama sementara mereka tidak mau melihat adanya *the common vision* dari agama-agama dan tradisi yang autentik tersebut.

F. Zaehner umpamanya, sebagai seorang Kristen yang ahli Hindu dan Sufi menyebut, ”*Alih-alih* kesatuan, justru lebih banyak pertentangan dalam agama yang satu dengan yang lain.” Di kalangan tradisional Islam juga tidak sedikit yang menolak gagasan “kesatuan transenden” ini, seperti Seyyed Naquib al-Attas. Pada hal dengan *philosophia perennis* ini—tentu saja bagi penganut kearifan ini—disadari adanya “yang *Infinite*” atau ”Yang Tak Terhingga” di balik kenyataan (*levels of Reality* [alam *terrestrial, intermediate, celestial*]). Juga dalam diri manusia—yang dalam *philosophia perennis* disebut *levels of selfhood*—terdiri dari *body, mind, soul,* atau dalam istilah Islam, *jasad, nafs,* dan ‘*aql* dipercayai adanya apa yang disebut “*Spirit*” (Ruh). Alam semesta (*macrocosmic*) dan manusia (*microcosmic*) pada dasarnya memiliki ikatan “persaudaraan kosmik” dan karena itu tak lebih sebagai *tajalli* atau bentuk perwujudan dari Yang *Infinite/Spirit* ini, yang dalam Islam disebut *al-Haqq (*Rahman, 1995:xxix).

Karena kepercayaan akan adanya *levels of Reality* dan *levels of Selfhood*, maka para penganut filsafat ini memercayai adanya dunia yang bersifat hirarkis. Huston Smith dalam bukunya *The Forgotten Truth* (1992) menyebut tingkat-tingkat ini sebagai *the great chain of*

*being* (”mata rantai agung seluruh keberadaan”). Atau E.F. Schumacher yang menyebutkan dengan istilah *the hierarchy of existence* (”tingkat-tingkat eksistensi”), mulai dari Tuhan pada peringkat tertinggi hingga manusia dan makhluk-makhluk/benda-benda “di bawah” manusia. Atau sebaliknya dari benda-benda mati pada tingkat paling rendah, hingga Tuhan pada tingkat paling tinggi dan Tak Tepermanai.

Dari sudut pandang hirarkis atau tingkat-tingkat eksistensi inilah dibangun sebuah argumen bahwa “Tradisi” adalah jalan yang memberitahu kita bagaimana menempuh *pendakian* dari tingkat eksistensi/realitas yang lebih rendah—yaitu kehidupan sehari-hari ini—sampai ke tingkat/realitas yang paling tinggi; kepada Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kesatuan mistis (*mystical union)*, pengalaman kesatuan transendental atau *wahdat al-Wujud* dan pengalaman-pengalaman spiritual lainnya.

Dalam konsteks ini tampak jelas bahwa salah satu tema terpenting dalam kajian *philosophia perennis* adalah *the transcendent unity of religions* atau “kesatuan transenden agama-agama”. Dari perspektif ini dapat dipahami bahwa *philosophia perennis* menawarkan satu ”ruang perjumpaan” antar pemeluk keagamaan dan keyakinan yang lebih bersifat substansial, sejuk, dialogis dan di atas segalanya berada dalam “tataran” spiritual-transendental.

Dengan kata lain, perspektif *philosophia perennis* terbangun di atas sebuah paradigma bahwa semua agama dan tradisi yang autentik berasal dari Tuhan Yang

Maha Esa. Meskipun dalam perjalanan historisitas umat manusia menjumpai sejumlah bentuk keagamaan dan tradisi, tetapi *philosophia perennis* mengandaikan bahwa semua "jalan kebenaran" berawal dan berakhir pada *Kebenaran Tunggal*, yaitu Tuhan.

Tak sedikit buku dan artikel yang telah ditulis mengenai *philosophia perennis*. Sebut saja di antaranya; Frithjof Schuon, *Islam and the Perennial Philosophy* (1976), *The Transcendent Unity of Religions* (1975), *Echoes of Perennial Wisdom* (1992), *Christianity/Islam: Essays on Esoteric Ecumenicism* (1981); Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Sacred* (1990), *The One and the Many* (1993), *Sufi Essays* (1972) dan artikelnya, "The Philosophia Perennis and Study of Religion" (1984); Howard P. Kainz, *The Philosophy of Man: A New Introduction to Some Perennial Issues* (1977); Aldous Huxley, *The Perennial Philosophy* (1994). Di samping itu, beberapa karya terjemahan dan buku karangan cendekiawan Muslim Indonesia dapat disebutkan di sini, antara lain; Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan*: *Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta, 1995), Ahmad Norma Permata (ed), *Perennialisme: Melacak Jejak Filsafat Abadi* (Yogyakarta, 1996) dan Muhammad Sabri, *Keberagamaan yang Saling Menyapa: Perspektif Filsafat Perennial* (Yogyakarta, 1998). Sebagai sebuah perspektif—tentunya dalam keyakinan para penganut kearifan ini—*philosophia perennis* dapat menjadi salah satu bentuk pendekatan dalam hubungan lintas-agama. Yang ditawarkan di sini ialah "dialog lintas-iman" (*interfaith dialogue*), sebuah dialog yang

lebih substansial dan berlangsung di kalangan para pemeluk keagamaan dan keyakinan untuk melihat masalah kemanusiaan bersama dalam perspektif keimanan masing-masing. Dengan kata lain, perspektif ini mengajak seluruh penganut agama dan tradisi autentik yang ada, agar "pesan kebenaran" agama—khususnya dari "makna-dalam" (*esoteris*nya)—dapat menjadi perspektif dan sumber motivasi dalam melihat serta memecahkan problem kolektif umat beragama dan karena itu juga masalah kemanusiaan secara keseluruhan. Berangkat dari kesadaran seperti itu, diharapkan perspektif ini memiliki relevansi kuat terhadap kondisi obyektif bangsa Indonesia yang plural dan acap kali terancam konflik dan konfrontasi antar umat beragama karena dipicu oleh paham keagamaan tertentu.

Dari sejumlah penelitian menunjukkan, pendekatan studi agama yang bersifat *empiris-historis an sich* menciptakan reduksionisme agama yang begitu hebat dan berakibat pada lahirnya pemahaman keagamaan yang "kering" karena pendekatan ini tak mampu menyelami makna-dalam (*esoteris*) agama yang tengah diteliti. Sementara pendekatan *philosophia perennis* semata yang bersifat *normatif-filisofis-esoterik* cenderung mengalami "kemacetan" dalam menstudi empirikalitas eksternal agama (*eksoterik*nya), sebab lebih menekankan pencarian makna transendensi agama. Karena itu studi agama membutuhkan paradigma ganda: *empiris-historis-eksoterik* dan *normatif-perennialistik-esoterik.* Integrasi dan sintesa kreatif antar kedua bentuk pendekatan inilah yang diharapkan kelak lebih relevan dan diprediksi

menjadi corak dominan studi dan relasi lintas agama kini dan di masa depan yang tidak terlalu jauh.

## Ketuhanan Yang Maha Esa: Akar Kesatuan Transendensi Lintas Agama dan Kepercayaan

Tak sedikit peneliti yang mengandaikan Indonesia sebagai sebuah *melting pot* dan sekaligus ”super market” yang ramai bagi pengaruh agama-agama dunia. Agama-agama dunia datang silih berganti. Satu menggantikan yang lain, tetapi dalam arti tertentu juga ada semacam pola amalgamasi: baik antar sesama agama dari luar maupun antara agama luar dengan tradisi agama lokal. Dari catatan sejarah, tampak bahwa pola hubungan antar agama di masa lalu yang jauh sangat dipengaruhi oleh politik *stelsel* dan politik keagamaan pemerintah kolonialisme Belanda. Masing-masing pihak dibiarkan dalam sebuah hubungan anti-tesis, persaingan dan ketegangan. Syakwasangka dan sikap ignoran sengaja disulut demi kepentingan politik Kolonial. Pemerintah kolonial melakukan politik keagamaan yang hanya bersumbu pada dogma dan bukan pada etika; pada doktrin dan bukan pada perilaku. Akibatnya, kehidupan agama bercorak eksklusif dan kehilangan inspirasi yang segar bagi umat dan masyarakat untuk menuntut perbaikan nasib. Agama boleh menjadi apa saja asal tidak menjadi agama pencerahan atau agama pembebasan. Oleh elit penguasa Kolonial, komunikasi antar-agama dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak berjalan secara bebas dan terbuka. Pada saat itu agama telah kehilangan “daya tohok psikologis” atau *psychological striking force* untuk sebuah perubahan

yang lebih baik.

Sejak abad 19, agama-agama muncul dalam sebuah fase formatif yang ditandai oleh upaya untuk merumuskan ajaran-ajaran dan pendidikan yang dirasa cocok dengan tantangan yang muncul saat itu. Terjalinnya hubungan dengan pusat-pusat keagamaan di luar negeri menyebabkan munculnya gerakan purifikasi agama. Ortodoksi lalu menjadi ciri yang menonjol. Sebut saja misalnya, kekristenan menjadi identik Barat, begitu pula Islam lebih berkiblat ke Tanah Arab, Hindu ke India, dan Budha ke Srilangka atau Thailand. Proses purifikasi ini sering pula dimuati oleh masalah-masalah luar—baik berupa problem historis maupun teologis—ke dalam negeri. Pada gilirannya, problem-problem impor tersebut bisa menjadi problem laten dan sukar dicari jalan keluarnya. Sekadar contoh, stigma sejarah yang pahit tentang ”Perang Salib” turut mengemuka juga di Indonesia. Dendam sejarah, kebencian dan permusuhan bisa muncul kembali ketika cerita tentang perang yang berjalan selama berabad-abad itu dibaca dalam konteks pemahaman yang salah. Begitu pula perang yang terjadi antara golongan Protestan dan Katolik di sejarah Eropa bisa pula menimbulkan trauma yang sama serta menimbulkan kembali prasangka keagamaan yang negatif.

Daftar panjang “perang agama” bisa ditambah dengan konflik-konflik di zaman modern sebagaimana yang terjadi di Irlandia Utara, Libanon, Israel, Bosnia, dll. Bahkan fenomena kerusuhan terkini yang cukup akut dan menebarkan api kebencian antar umat beragama

seperti terjadi di sejumlah kota di tanah air: Luwu, Poso, Maluku, Sampit, Yogyakarta, Tolikara—untuk sekadar menyebut beberapa di antaranya—dapat dipandang sebagai kelanjutan logis dari stigma masa lalu tentang "perang agama" tersebut. Dalam konteks ini, agama-agama bisa berperan sebagai minyak di atas nyala api yang membakar: alangkah panasnya nyala itu menyiksa dan melumatkan sekian banyak manusia di panggung sejarah. Suara-suara pesimistis terhadap fenomena agama bahkan menyimpulkan: sekali agama berperan dalam konflik dan peperangan, sulit orang keluar dari sana tanpa luka-luka sosial dan ruhani yang mendalam. Demikian pula halnya dengan konflik yang dipicu oleh kecemburuan sosial-ekonomi dan dibingkai oleh sentimen etnis, acap kali justru semakin menambah wajah buram bangsa kita. Di sini tampak jelas bahwa pemicu lahirnya sejumlah konflik di atas pentas sejarah kemanusiaan tidaklah berdiri tunggal tetapi dibangun di atas stigma yang demikian kompleks dan menyentuh wilayah sensitifitas kesadaran kolektif manusia.

Dalam konteks ini, kesadaran akan kepelbagaian atau pluralisme lalu menjadi nilai yang sangat penting. Kendati demikian, secara dini kita perlu membedakan dua persitilahan yang memiliki kemiripan: "pluralitas" dan "pluralisme." Sebab tak sedikit kalangan acap kali mengacaukan penggunaan dua persitilahan tersebut. Pluralitas adalah sebuah fakta tentang kepelbagaian yang ada secara alami dan berdasarkan hukum alam: ras, warna kulit, suku, agama, budaya, jenis kelamin dan seterusnya. Pluralitas, karena itu,

bukanlah sebuah pilihan tetapi anugerah Tuhan bagi manusia. Itu sebab, tak ada yang salah dalam pluralitas. Persoalannya kemudian: bagaimana seseorang menyikapi kepelbagaian itu? Rumusan jawab terhadap pertanyaan itulah kelak melahirkan pluralisme. Karena itu, pluralisme di sini tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku, bahasa, tradisi, dan agama—yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi—bukannya pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar sebagai "kebaikan negatif" (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme (*to keep to fanaticism at bay*). Sebaliknya, pluralisme—seperti digambarkan secara amat baik oleh Nurcholish Madjid—mesti dipahami sebagai "pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban" (*geniune engagement of diversities within the bonds of civility*) (Madjid, 1999). Karena itu, pluralisme adalah sebuah sikap yang mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan, bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau kepelbagaian itu. Dalam konteks teologi lintas-agama misalnya, pluralisme membangun sebuah postulat: bahwa dalam jantung setiap agama dan tradisi autentik mempunyai pesan *kebenaran* yang sama yakni kita semua "berasal" dan akan "kembali" kepada satu tujuan yang sama: kepada *Yang Absolut, Yang Awal-Yang Akhir, Yang Hollygious* atau dalam teologi disebut sebagai Tuhan.

Akan tetapi dalam konteks kebangsaan kita, be-

lakangan ini paham kebinekaan atau pluralisme terancam sirna dan keutuhan bangsa sebagai *nation-state* pun terkoyak—menyusul sejumlah fakta kerusuhan sosial yang membara di sejumlah kota di tanah air—ditengarai karena dipicu oleh masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau ”politik identitas” yang sangat kompleks. Terlepas dari berbagai analisis tentang apakah akar-akar konflik sosial itu terletak pada wilayah ekonomi, politik, sosial, budaya, etnis atau agama, namun aspek terakhir diyakini sementara pihak sebagai faktor yang paling sensitif memicu kerusuhan tersebut.

Sejauh ini, kepelbagaian (pluralitas)—yang oleh rezim politik Orde Baru bahkan secara peyoratif telah mempopulerkannya dengan istilah SARA—tampak tidak dikelola secara baik. Perdebatan masalah-masalah penting dari agama-agama misalnya, tidak pernah dikemukakan secara transparan demi mendapatkan “titik-titik pertemuan” bersama. Pendidikan agama pun cenderung diajarkan secara literer, formalistik dan *adhoc* sehingga wawasan pluralisme atau kebinekaan yang menjadi realitas masyarakat justru tidak tampak sama sekali. Pengajaran agama yang mencoba menumbuhkan kritisisme dan apresiasi atas agamanya sendiri atau agama orang lain bahkan bisa dikategorikan menyesatkan. Sebab salah satu masalah mendasar yang selalu menghadang adalah munculnya kebingungan-kebingungan teologis, khususnya menyangkut sikap: bagaimana seseorang harus mendefinisikan dirinya secara tepat di tengah-tengah agama lain yang

juga eksis dan punya keabsahan? Di masa rezim politik Orde Baru, SARA atau ”politik identitas” bukannya diterima sebagai anugerah Tuhan, tetapi bahkan menjadi bingkai pemicu konflik dan penebar kebencian di kalangan masyarakat. Parahnya, dunia pendidikan—terutama bila mencoba menelaah kurikulum dan silabi yang diberlakukannya—sangat tidak kondusif bagi terciptanya suasana dialogis dan mendorong spirit kebinekaan, demokratis dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Sementara dalam kehidupan sosial juga telah terbangun stigma tentang SARA yang cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan negatif. Akibatnya, kendati pun terdapat upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang demikan akut, terutama karena dipicu oleh isu SARA—baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah—terkesan artifisial dan formal, sehingga tidak mampu menyentuh akar konflik yang sesungguhnya. Hal tersebut jelas “ibarat api dalam sekam” yang setiap saat bisa meledak dan membakar hangus bangsa ini.

Hari-hari belakangan ini, kita tengah disuguhi serangkaian peristiwa: betapa sulitnya beragama dan berkeyakinan secara bebas di Indonesia. Para penganut agama tertentu, membangun nalar kekerasan yang seolah muncul dari balik kegelapan, dan membenturkan keyakinannya yang eksklusif kepada publik, bahwa ajaran tertentu sesat, pemeluknya boleh disakiti, dibunuh, properti dan rumah peribadatannya boleh dibakar dan dijarah.

Deskripsi di atas memberi isyarat adanya problem

besar dalam kehidupan beragama yang ditandai oleh kehidupan kebinekaan di tanah air. Terutama sekali karena dipicu oleh sebuah konstruksi teologis dalam tatanan non-pluralitas: bahwa hanya agama kitalah yang paling benar, sementara agama lain salah atau menyimpang—*"other religions are false paths that mislead their followers*" (Fernando, 1995:6)—kata Ajith Fernando. Belum lagi masalah-masalah sosial politik yang sering memunculkan ketegangan dan krisis di kalangan antara pemeluk keagamaan, kian menambah kerunyaman tersebut.

Di balik peristiwa yang mengenaskan itu, pada saat yang sama berkembanglah suatu paham apa yang disebut sebagai *"theologia religionum"* (teologi agama-agama) atau "teologi lintas-agama" yang menekankan semakin pentingnya dewasa ini untuk dapat "berteologi dalam konteks agama-agama" khususnya bangsa Indonesia yang bineka.

Sementara itu, Aldous Huxley, salah seorang pemikir perennialis terpenting mengemukakan, "...*in the soul something similar to, or even identical with, Divine Reality*" (Huxley, 1970:vii)—bahwa dalam jiwa manusia terdapat "sesuatu" yang identik dengan Kenyataan Ilahi. Dalam mengomentari pandangan Huxley itu, Smith mencoba mengulasnya dengan menghadirkan ilustrasi berikut (Smith, 69):
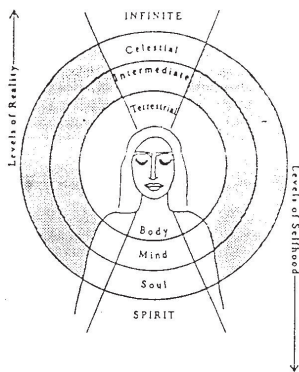
Dari ilustrasi di atas tampak adanya apa yang disebut dengan *Levels of Reality* dan *Levels of Selfhood*. Karena itu, para penganut *philosophia perennis* meyakini adanya dunia yang bersifat hirarkis.

Sementara itu, Smith mengatakan bahwa pada ilustrasi di atas digambarkan, realitas itu muncul dalam tatanan yang "terbalik" (tubuh [*body*] di atas akal [*mind*], dan seterusnya) adalah wajar (Smith, 69), karena memang mikrokosmos itu mencerminkan makrokosmos (manusia mencerminkan jagad raya), demikian pula sebaliknya. Secara eksternal (manusia) yang baik dilambangkan sebagai sesuatu yang "tinggi"; namun saat kita melihat secara internal, maka pemahaman nilai kita akan terbalik: dalam diri manusia yang terbaik adalah justru yang paling "terdalam"; ia adalah basis fundamental dan dasar bagi wujud kita. Jalan bagi tubuh (*body*) dan akal (*mind*) untuk berkorelasi dengan tataran bumi (*terrestrial*) dan "cakrawala" (*intermediate*) adalah jelas: yang awal mengapung, sebagaimana adanya, pada yang akhir. Para penganut Teisme sama sekali tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui bahwa jiwa (*soul*)—lokus final individualitas—terlibat dalam hubungan *I-Thou* dengan Tuhan yang dapat diketahui. Akan tetapi mungkin mereka akan menolak pernyataan yang menyebutkan—seperti dalam rumusan Huxley—bahwa "di dalam diri manusia terdapat 'sesuatu' yang identik dengan Realitas Ilahi", yang dalam ilustrasi di atas disebut *Spirit* (*Rûh*).

## Teologi "Lintas Iman" dan Doktrin Ketuhanan Yang Maha Esa

Tampaklah jika dewasa ini kita kian membutuhkan sebuah teologi yang lebih inklusif-pluralis dan selalu siap menyapa problem empirik manusia. Sebab acapkali tampak dalam sejarah manusia—seperti banyak diulas di awal tulisan ini—lahirnya sejumlah kekerasan dan konflik yang berimplikasi pada luka sosial dan irisan ruhani cukup dalam justru karena dipicu oleh pemahaman teologis tertentu. Karena itu, untuk mendapatkan suatu pemahaman teologi yang pluralis, sejuk dan menolak seluruh bentuk kekerasan terhadap manusia "atas nama" agama, sangatlah penting dimengerti segi-segi konsekuensial dari paham keberagamaan itu. Dalam perspektif *Religious Studies*, setidaknya ada tiga sikap keberagamaan yang sangat dominan: *eksklusivisme, inklusivisme* dan *paralelisme*. Paham pluralis hanya bisa dibangun jika seseorang secara teologis paling tidak inklusif, tapi akan lebih baik jika menganut paham paralelisme. Berikut akan diuraikan secara singkat ketiga bentuk sikap keberagamaan tersebut.

Pertama, *eksklusif*. Pandangan ini sangat dominan dan dianut oleh sebagian besar pemeluk keyakinan dari zaman ke zaman. Dalam ajaran Kristen misalnya, inti pandangan ini terwakili dalam doktrin: Yesus adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan. "*Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku"* (Yohanes 14:6). Dalam perspektif orang yang bersikap eksklusif ayat tersebut sering dibaca secara literer dan

tekstual. Pandangan yang hampir sama juga diketemukan misalnya dalam ajaran Islam: "Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, (hanyalah) *Islam*"—*inna al-dîn 'ind al-Lâh al-islâm*, (QS.3:19).

Kedua, *inklusif*. Paradigma ini membedakan antara kehadiran penyelamatan (*the salvific presence*) dan aktivitas Tuhan dalam tradisi agama-agama lain, dengan penyelamatan dan aktivitas Tuhan dalam Yesus Kristus. Dalam doktrin Kristen misalnya diyakini bahwa "menjadi inklusif berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus…" kata Alan Race dari Universitas Kent. Dalam perspektif ini, pandangan keberagamaan seseorang telah bisa "memahami" jika dalam agama lain pun terdapat keselamatan, sepanjang mereka hidup dalam ketulusan Tuhan, melalui Kristus. Tapi pandangan ini dikritik oleh kaum paralelis sebagai membaca "agama lain" dengan "kacamata agama" sendiri. Karena itu, bagi kaum paralelis perspektif ini jelas bias.

Ketiga *paralelisme*. Paradigma ini percaya bahwa setiap agama (agama-agama lain di luar Kristen), mempunyai keselamatannya sendiri, dan karena itu klaim bahwa kristianitas adalah satu-satunya jalan (sikap *eksklusif*) atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain (sikap *inklusif*), haruslah ditolak, demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis. Yaitu, setiap agama dan keyakinan memiliki jarak yang sama pada Tuhan sebagai pusat Keberadaan dan Kebenaran. Semua agama, melayani dan mengelilingi-Nya. Di sini kesejajaran atau paralelitas antar pemeluk keagamaan, karena

itu, sangat dijunjung tinggi. Meskipun demikian, pluralisme tidaklah bertujuan untuk mencapai "keseragaman bentuk agama." Sebab, gagasan itu tidak saja *absurd* tapi juga a-historis. Jadi yang dibutuhkan sesungguhnya adalah keadaan yang "saling menyapa" dan memberi kontribusi positif bagi penyelesaian problema bersama masyarakat-bangsa dari perspektif keimanan masing-masing (Rachman, 2018:547-549).

Meskipun ide pluralisme itu sangat kompleks, tetapi sikap paralelisme ini sangat mendukung paham pluralisme, walaupun memang tidak mudah memahami segi ini. Karena itu, tak sedikit ahli menggunakan metafor, seperti metafor pelangi, metafor geometris atau metafor bahasa.

Dengan metafor "pelangi" misalnya, dibangun paradigma bahwa pada dasarnya semua agama itu mempunyai warna dasar yang sama, yang tidak terlihat dari warna luarnya. Warna dasar itu adalah warna putih. Setiap warna muncul dari warna putih lewat "pembelokan," atau dilihat dari sisi lain, setiap warna menyimpan warna putih. Begitulah misalnya, agama Islam adalah warna hijau, agama Kristen adalah warna biru dan agama Budha adalah warna kuning. Semua warna-warna itu pada dasarnya berasal dari warna putih. Dan warna putih ini sering disebut sebagai warna dari "agama primordial." Para penganut *philosophia perennis*, biasanya menyebut sebagai "*primordial truth.*"

Sikap paralelisme ini kiranya mengekspresikan adanya fenomena "Satu Tuhan, banyak agama" yang bermakna suatu sikap toleran terhadap adanya "jalan

lain" kepada Tuhan (ingat konsep *al-subul al-salâm* dalam tradisi Islam). Karena itu, yang terpenting dari agama bukanlah bentuk atau kerangkanya (*eksoteris*) tapi substansi dan nilai transendensinya (*esoteris*). Para penganut *philosophia perennis* berkeyakinan, dalam jantung setiap agama dan tradisi yang autentik memiliki "pesan kebenaran" yang sama yang disebutnya *the heart of religions*. Karena itu, setiap agama dan keyakinan autentik memiliki jarak yang sama ke pusat Kesadaran dan Kebenaran yaitu Tuhan. Dengan sikap keberagamaan seperti itu diharapkan mampu melahirkan pemikiran-keagamaan yang lebih pluralis dan sejuk: satu sikap teologis yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita yang kerapkali terancam konflik horizontal karena "dipicu" oleh sebuah paham keagamaan yang belum terdewasakan.

Sementara itu, meningginya intoleransi berbasis agama akhir-akhir ini disinyalir akibat maraknya praktik penyebaran kebencian di tengah masyarakat terhadap kelompok keagamaan tertentu yang berujung pada kekerasan. Ditambah lagi intimidasi dan tindak kekerasan tersebut tidak diiringi dengan proses sungguh-sungguh penegakan hukum bagi para pelakunya. Bagaimana semestinya kita membaca paras buram kebangsaan kita ini?

Dalam pendakuan A.E. Priyono (Priyono, dkk, 1995), setidaknya ada tiga argumen yang coba menjelaskan gejala tersebut. *Pertama, "netralitas dan imparsialitas negara"*. Jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sejatinya merupakan ke-

lanjutan logis dan pengakuan ontologis atas fakta kepelbagaian sosial dan kultural, termasuk pluralitas agama, yang telah hidup dan tumbuh ratusan tahun di Indonesia. NKRI didirikan di atas prinsip kepelbagaian atau kebinekaan seperti itu, dan mengandaikan negara bersikap netral dan imparsial ketika perselisihan internal di antara mereka, atau pun pertikaian lintas agama.

*Kedua, "keniscayaan toleransi dalam masyarakat aneka"*. Keyakinan keagamaan yang bersifat personal-individual, mesti dijamin oleh lembaga-lembaga demokratik demi sebuah kehidupan sosial politik yang stabil. Toleransi, karena itu, diandaikan sebagai norma dalam pergaulan lintas agama dan keyakinan, di atas mana negara meneguhkan perannya melindungi kebebasan masing-masing pemeluk agama, baik di tingkat individual atau pun komunal. Dengan kata lain, toleransi agama dan kehidupan harmoni dalam kepelbagaian lebih merupakan "mandat konstitusional" yang mesti dijaga oleh negara.

*Ketiga, "obyektifikasi agama melalui deliberasi"*. Konstruksi keyakinan keagamaan, tidak dengan serta merta sebagai basis untuk membuat atau melegitimasi keputusan-keputusan publik, kecuali jika ia diterjemahkan terlebih dulu ke dalam nalar politik kebangsaan. Prinsip ini, mengingatkan kita pada pendakuan Kuntowijoyo tentang "obyektifikasi agama" yang mengandaikan agar norma-norma dan nilai-nilai subyektif agama yang bersifat partikular harus ditransformasikan menjadi semacam etika sosial yang bersifat universal, agar akseptabilitasnya berlaku umum dan bisa diteri-

ma semua orang melalui deliberasi publik.

Menyadari wajah kelam kebangsaan kita yang kian hari mengalami gejala dehumanisasi, ada baiknya kita mengkaji ulang ide kepelbagaian, atau apa yang sejauh ini dikenal secara peyoratif sebagai SARA. Sudah saatnya kini, SARA tidak lagi dituding sebagai "kambing hitam" yang bertanggungjawab di balik seluruh bentuk kerusuhan dan benturan horizontal lintas etnik dan agama, tapi sebaliknya diletakkan sebagai anugerah Tuhan dan "ibu kandung" NKRI. SARA, sebab itu, tidak lagi dipandang sebagai hantu menakutkan dan super sensitif, tapi mesti dipercakapkan bersama secara terbuka dan penuh suasana kekeluargaan di atas meja keindonesiaan dan dalam spirit pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Sudah saatnya kita memberi tafsir-ulang terhadap SARA, sebagai sebuah konsep kepelbagaian—yang sejauh ini lebih merupakan "alat politik" rezim penguasa dan nalar dominan negara—ke dalam satu makna yang lebih mencerahkan, inklusif dan komprehensif: SARA adalah "Ibu Kandung" NKRI. Mengabaikan, apalagi "mengkambing hitamkan" SARA, kita akan terancam menjadi bangsa "Malin Kundang" (Sabri, 2018:97).

## Spirit Ketuhanan yang Bekebudayaan: Perspektif *Theologia Negativa*

Merespons gagasan "berteologi dalam lintas-iman," belakangan peminat *Religious Studies* mengembangkan apa yang dikenal sebagai *theologia negativa*. Seperti dipahami, *theology*, adalah ilmu yang berhasrat merengkuh Tuhan. Tapi mungkinkah? Setidaknya Tuhan mewar-

takan Diri-Nya melalui *kalam* yang dipilih-Nya: bermula dari senyap ke bunyi, bunyi ke aksara, aksara yang menyusur pada sebilah arus sungai sejarah literasi yang dingin, lalu menubuh pada Kitab. Sebab itu, Rudolf Otto dalam karyanya, *Das Hellige* menyebut-Nya sebagai *Mysterium, Tremendum et Fascinosum*: Kegaiban yang menautkan antara getir dahsyat dan rindu yang menyengat (Otto, 1963).

St. Thomas Aquinas dalam gagasan mistiknya mendaku: *Quasi ignotus cognoscitur*— "Tuhan dikenal sebagai Dia yang tak dikenal." Kelak inilah yang menjadi landasan *theologia negativa.* Jika teologi *mainstream* sejauh ini "mendekati" Tuhan dengan menampilkan sisi positifnya atau *via affirmativa*—baik melalui nama-nama, sifat, atau pun cipta-Nya—maka teologi ini meresapi Tuhan dari sisi negatif atau *via negativa.* "Teologi negatif" memang wacana yang sedikit ganjil dalam studi agama. Denys Turner, dalam *The Darkness of God* (1995) lebih memilih untuk tidak mendefinisikannya, dan mengisyaratkan satu hal: *not-saying,* "tidak berkata apa-apa tentang Tuhan" (Turner, 1995).

Dalam tradisi Kristiani—penulis *Mystical Theology*—Dionisius Aeropagit, disebut-sebut sebagai tokoh terpenting yang mengonstruk teologi negatif. Kontribusi teoretis Dionisius terletak pertama-tama pada distingsi yang dibuatnya antara dua bentuk teologi: *teologi apofatik* dan *teologi katapatik.* Teologi apofatik mengandaikan cara berteologi yang mendekati Tuhan, berangkat dari kesadaran tentang ketidaktahuan kita tentang-Nya. Itu sebab, teologi ini mendekati Tuhan *via negativa,* dengan

cara dan bentuk pengungkapan yang negatif. Sementara, teologi katapatik adalah cara berteologi mendekati Tuhan dengan ungkapan yang ekspresif tentang Tuhan contohnya, “Yang Maha Agung” atau “Yang Maha Bijaksana”; ungkapan-ungkapan yang ingin melukiskan kemuliaan Tuhan secara hiperbolik dan ekspresif.

Dionisius mengandaikan, pengalaman bersama “yang Ilahi” adalah pengalaman tak terlukiskan dan tak tunai dalam kalam: Tuhan adalah *mysterion,* misteri yang terlampau sulit untuk dijelaskan. Dia adalah *Deus Absconditus,* “Dia Yang Tersembunyi”. Karena itu, untuk mendekatinya, seseorang harus melepaskan segala pengetahuan yang mungkin tentang-Nya.

Bagi Dionisius, setiap uangkapan yang kita pilih tentang Tuhan akan menyisakan paradoks pada intinya. Maka iapun menyebut kondisi itu sebagai, *the briliant darkness of a hidden silence:* “cemerlang kelamnya kesenyapan yang tersembunyi”. Memasuki perjumpaan dengan “yang Ilahi” berarti memasuki “kekelaman yang cemerlang”. Karena paradoks itu, maka Dionisius menasihatkan seseorang untuk menegasikan apa pun tentang Tuhan dan menggunakan negasi dalam mengungkapNya.

Tapi eloknya, bagi Dionisius, negasi itu sendiri tidaklah memadai dan mesti dilampaui. Tuhan, bagi Dionisius, dapat disebut sebagai “Kegelapan dan Cahaya”, namun “Ia bukan kedua-duanya”. Dengan begitu, bukan hanya ungkapan positif tentang Tuhan yang harus dinegasikan, tetapi bahkan negasipun juga harus dinegasikan. Karena itu secara diksi dapat dikatakan, jika

ungkapan positif "Tuhan *adalah...*" dinegasikan menjadi "Tuhan *bukan...*", maka menurut pendakuan Dionisius, "Tuhan *bukan adalah...*" sekaligus "Tuhan *bukan bukanlah...*". Di sini tampak jelas jika pemikiran Dionisius ini memberi landasan penting bagi teologi negatif sekaligus kritik atas teologi negatif.

Tokoh teologi negatif lain yang menonjol adalah seorang penulis anonim buku terkenal dari abad ke-14 M, *The Cloud of Unknowing* ("Awan Ketidaktahuan"), metafor yang digunakan Alkitab dalam melukiskan "perjumpaan" Musa dengan Tuhan. Dalam kondisi ini, seseorang tidak akan pernah dapat mencapai Tuhan dengan pengetahuan yang diperolehnya. Mengulang kembali semangat Dionisius, Tuhan, bagi penulis *The Cloud of Unknowing* adalah *mysterion.* Untuk itu, penulis buku ini menganjurkan satu tahapan penting sebelum seorang masuk pada *state of unknowing* ("kondisi tidak mengetahui") adalah *state of forgetting* ("kondisi melupakan"), yakni melupakan segala gambaran, konsep, dan imajinasi tentang Tuhan yang sejauh ini ia terima dan pikirkan.

Melewati dua kondisi tersebut—yang keduanya merupakan "kondisi pengingkaran", *state of denial*—seseorang, kata sang penulis *The Cloud of Unknowing,* akan sampai pada "cinta", suatu tahap yang menurutnya merupakan fase tak tercakapkan dalam pendakian ketuhanan. Cinta, di sini, adalah suatu negativitas sublim (*sublime negativity*) di mana Tuhan telah terbebas dari apa pun yang diimajinasikan dan anggitan yang dikonstruk manusia tentang-Nya. Mungkin itu sebab,

Al-Quran dalam tradisi Islam, misalnya menyebut Tuhan dalam nafas negasi yang mutlak: *Lam yakun lahu kufuwan ahad* ("Tak satu apapun yang setara Dia"—Qs.112:4) atau *laysa kamistlihi syai'* ("Tak satu apapun yang dapat dimisalkan Dia"—Qs. 42:11).

Tuhan *via negativa*, karena itu, mengandaikan Dia yang tak terjangkau, tak terkonsepkan, tak terimajinasikan, tak tercakapkan: sebuah kesunyian mutlak yang maha senyap, tapi juga Maha Lain Penuh Cinta. Jangan-jangan, Tuhan *via negativa* adalah misterium yang *dialami* kaum mistikus: episentrum yang menyedot setiap rindu yang membuncah untuk "tercelup secara ontologis" dengan-Nya, di setiap napas waktu. Itu sebab, jalan menemui-Nya, membentang sebanyak detak jantung para perindu-Nya.

Karena Tuhan adalah Misteri Agung yang tak terselami, Dia tak dapat didekati hanya dengan sikap *ephoria,* sejenis kesadaran-dangkal yang terbit dari lingkar luar keberadaan manusia. Dia hanya bisa didekati dari ruang autentik sebelah-dalam (*inner space*) manusia. Itulah *Pati Devina:* Tuhan, *yang bisa saya rasakan dan mengalami ketercelupan ontologis dengan-Nya, karena saya berani menderita dikerkah api-kerinduan dalam menemu-kenali akan-Nya.* Justru dengan *Pati Devina,* di mana manusia memuji, mengagungkan dan mengabdi kepada Tuhan dengan segenap pergulatan bahkan penderitaannya, maka terjadilah cinta sublim tak tepermanai.

Tujuan kudus dan tugas hidup manusia adalah memuji, mengagungkan, dan mengabdi kepada Tuhan.

Ketiganya hanya bisa terjadi  dalam tindakan dan dalam "pengalaman langsung" diri manusia sendiri. Manusia adalah ciptaan, yang selalu mengarah kepada Kenyataan Yang Absolut, dan dengan demikian selalu mengatasi apa saja yang terbatas, profan dan tidak autentik pada dirinya. Keberadaannya yang terarah pada Yang Maha Tak Terbatas itu mengimplikasikan bahwa ia mesti mentransendensikan apa yang terbatas, dan membuat ia tak tergantung pada yang terbatas itu. Sikap membebaskan diri dari hal-hal yang terbatas, profan dan tidak autentik itulah yang dalam tradisi *religious studies* disebut sebagai *indifferens.*

Di titik ini, *indifferentia* adalah sesuatu yang kodrati dan adikodrati sekaligus. Kodrati, karena itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Adikodrati, karena itu diletakkan sebagai anugerah Tuhan bagi dirinya, dan karena itu bersifat *yang Ilahi*. Jadi, *indifferentia* adalah anugerah adikodrati bagi manusia, justru karena ia secara kodrati diciptakan untuk mengarah terus-menerus pada Yang Maha Tak Terbatas. Itu sebab, kelepasbebasan itu adalah hakikat dari keberadaannya sendiri. Pertanyaannya: apakah manusia mau mengidentifikasikan "diri"nya dengan hakikat diri atau ego autentiknya itu. Dengan lain perkataan, jika ia tidak mau bertindak dengan *indifferens,* maka ia dengan sendirinya melawan dan merusak ego autentiknya, hakikat keberadaannya sendiri.

Manusia, sebab itu, diandaikan agar dirinya mengalami transendensi terus menerus dan tak berhenti pada wilayah profan, terbatas, dan tidak autentik.

Justru di sinilah letak kesulitannya. Karena manusia ternyata lebih suka berhenti pada yang terbatas, profan dan "bumi" untuk kemudian merengkuhnya dan bahkan mempertuhankannya. Dia enggan pergi meninggalkan zona nyaman. Dia tidak mau mengorbankan apa yang akan berlalu, betapa pun sepelenya hal itu. Dengan kata lain, walau adalah hakikat manusia, *indifferens* tidak terjadi dengan sendirinya.

Tujuan kudus penciptaan manusia tidak hanya untuk dikenang secara primordial, tetapi harus dicari dan diperjuangkan terus menerus. *Indifferens* melalui *Pati Devina,* mengajak manusia untuk selalu menjatuhkan pilihan, jalan mana yang terbaik dalam membimbingnya ke arah tujuan ia diciptakan. Tuhan adalah tujuan hidup yang disaput misteri tak terselami. Karena itu, untuk menemui-Nya, tidak ada jalan yang sekali jadi, enteng, dan pasti untuk selamanya!

Karena itu, Tuhan dalam pendakuan *theologia negativa,* bukan pengertian yang persis tetapi sesuatu yang jauh dan misterium. Sesuatu Yang Maha Lain, yang hadir justru di balik selubung. Itu sebab, dengan menerima semesta lambang dan jagat kode tentang-Nya, kita tahu, bahwa pada asalnya bukanlah Kalam autentik, melainkan tafsir.

Manusia dikerkah kecemasan, jika Yang Abadi, juga jejak-jejak-Nya, tak hadir di antara kita: masa silam akan terasa pandir dan masa depan pun kosong. Tetapi kekeliruan telanjur dirumuskan manusia bahwa jika Yang Abadi mustahil menyentuh yang fana, maka ia sebenarnya "tak-ada."

"Ketak-ada-an" Tuhan atau "*atheis"* dalam ruang sadar-diri seperti ini, persis pekikan Sartre saat mengerang, *"Tuhan telah lepas dan meninggalkan sebentuk lubang pada diriku"*. Di sini Sartre mengandaikan Tuhan yang tak lagi relevan dan menguap dalam napas kehidupan manusia kontemporer. Sebilah pengalaman akan Tuhan yang jauh dan tak terjangkau. Tetapi bahwa sejenis "ateisme-mistik" itu, ternyata bisa merengkuh hidup kita. Tuhan dipercayai dan diakui, tapi Tuhan tidak *dirasa* dan *dialami* dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia, sebab itu, hanya bisa mempercakapkan Tuhan melalui jejak Kalam-Nya, merumuskan-Nya dalam pengertian dan mengeja nama-nama-Nya yang indah (*al-asmâ' al-husnâ*) dalam sebutan. Namun kata-kata, sebutan, dan pengertian tentang-Nya adalah selubung dan sekunder. Yang primer adalah pengalaman autentik akan-Nya, kendati dalam *pengalaman* ini Dia tak dapat dimengerti secara persis, bahkan seakan tak dapat dirasa bahwa Dia ada dalam "pengalaman" itu. Inilah yang diandaikan pentolan *theologia negativa,* Dionisius sebagai pengalaman Ilahi dan tak tercakapkan: *Deus Absconditus*—"Dia Yang Tersembunyi". Dionisius melukiskan kondisi itu dengan, "cemerlang gelapnya kesenyapan yang tersembunyi" (*the brilliant darkness of a hidden).*

Konstruksi Ketuhanan Yang Maha Esa yang berciri *"Theologia Negativa"* juga dijumpai dalam tradisi Budhisme. Dalam Budhisme, Tuhan adalah tak bersosok (*Impersonal*), Yang Maha Esa yakni satu-satunya Tu-

han Akhir, Terbebas Berkondisi, dan karena itu *Nibbana.* Tampak jelas "perbedaan" konstruksi Ketuhanan Yang Maha Esa yang tumbuh dari tradisi agama-agama Semitik atau lazim dikenal sebagai "Abrahamic Religions" dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang lahir dari rahim tradisi Budhisme.

Di sini, Tuhan terasa hadir tanpa nama dan tak tepermanai, serta selalu tak tertangkap dengan pengertian persis tentang-Nya yang telah kita punyai. Betapa pun sulitnya, manusia mesti belajar mengenal Tuhan yang demikian itu. Dengan begitu, ia mengalami religiusitas yang asali dan autentik. Di sini manusia tengah meraba batas yang berdekatan dengan Yang Abadi, walau tentang-Nya, ia seakan bisu dan semua kata menjadi runtuh untuk mempercakapkan-Nya.

Demikianlah, Tuhan dalam ontologi pengalaman mistik adalah Tuhan yang tak bisa dinamai. Apa pun nama, kode, metafora, atau lambang untuk-Nya segera akan dihalau oleh Dia sendiri yang tak dapat disebut dalam nama. Dan apa pun pengertian tentang-Nya segera akan dikaburkan oleh Dia sendiri, yang tinggal sebagai misterium, yang "dialami" namun tak tunai dalam kalam.Pertanyaan yang terbit kemudian: Bilakah Tuhan, Yang *Numinous,* yang *mysterium tremendum fascinosum* dan Yang Mutlak disaput gerhana? Martin Buber, filsuf Jerman dan penulis buku terkenal *Ich und Du* mendaku, "Ketika ketuhanan bukannya ditampik, melainkan terlindung dari pengamatan zaman" (Buber, 1958). Dalam perspektif historis, ketegangan antara "iman" personal dan "agama" komunal memang merupakan kege-

lapan zaman. Di titik ini, Buber mengandaikan situasi itu sebagai “gerhana Tuhan”.

Gerhana Tuhan, juga pernah dihentakkan tiga pemuka pemikir Nietzsche, Marx, dan Freud. Nietzsche dikenal sebagai “pembunuh Tuhan” dan dalam pandangan religiusitas dia diposisikan sebagai penista agama, jika bukannya penghujat Tuhan. Dalam sejarah filsafat, ateisme Nietzsche yang keras karena itu, tidak lagi diletakkan sebatas “permainan bahasa” (*language game*) yang menyangkal Tuhan, melainkan menyelinap ke dalam napas kehidupannya. Nietzsche dengan tegas mewartakan—seakan tampil sebagai “nabi baru”—bahwa zaman baru telah tiba: zaman tanpa Tuhan, niragama, dan ketiadaan yang transenden.

Pesan “ateisme” juga dijumpai dalam benih pikir Marx dan Freud. Bagi Marx, kepercayaan kepada Tuhan adalah akibat kebutuhan dasar manusia-miskin dan lapar, alias masalah ekonomi. Frustrasi dan kegaduhan yang lahir dari suasana miskin dan lapar ditekuk dengan agama. Dalam pendakuan Marx, angan-angan seperti itu bukannya mengubah keadaan, melainkan hanya memberi hiburan palsu laksana “candu”.

Senada dengan Marx, Freud mengandaikan agama sebagai keadaan psikologis-tidak sehat, *neurosis:* jiwa yang menggelepar karena didorong oleh hasrat tak kunjung kesampaian akibat pelbagai larangan dan restriksi dalam kehidupan. Bagi Freud, agama lebih merupakan sublimasi yang tampak dari tekanan yang tak mampu dihadapi. Filsuf Paul Ricouer, sebab itu, menyebut Nietzsche, Marx, dan Freud sebagai “guru-guru pencuri-

ga" (*maitres de soupcon).*

Tampaknya kehidupan beragama pada era modern mengalami krisis-akut yang berujung pada dua paras. *Pertama*, mengantarkan pada "*ateisme*" dan agnos-tik di mana orang-orang terutama generasi muda mi-lineal meninggalkan kehidupan agama tradisional dan menihilkan keberadaan Tuhan. *Kedua,* mengantarkan kepada "*ateisme praktis,*" di mana orang-orang meski mengaku masih beragama tetapi tidak "menghadirkan" Tuhan dalam detak jantung hidupnya sehingga acap-kali dengan alasan agama, mereka justru melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan anti-kemanusiaan, sebagaimana tampak pada fenomena terorisme dan ke-kerasan atas nama agama. Keduanya, jelas melongsor-kan esensi agama.

Bagaimana mesti kita menghalau "gerhana Tu-han"? Tampaknya kita perlu merekonstruksi autentis-itas makna-terdalam hidup beragama. Ada kebutuhan mendasar untuk menautkan antara penghayatan pesan teks-agama dan artikulasi teologis-fenomenologis. Atau seperti diungkap Levinas, "hendaknya mendahulukan pembacaan teologis-fenomenologis atas narasi-narasi Kitab Suci, ketimbang menganyam tafsir historis-semi-otik teks" (Levinas, 2006).

Dari uraian panjang menyusul dialektika sejumlah pemikiran yang dikemukakan sebelumnya, tampaklah bahwa istilah "ketuhanan" yang diandaikan pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mer-upakan istilah yang paling tepat dan dapat mewakili masyarakat Indonesia yang memiliki kepelbagaian ag-

ama dan kepercayaan. Meski istilah ini demikian “abstrak” namun dapat diterima oleh semua penganut agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Sila pertama Pancasila Ketuhana Yang Maha Esa, tidak berbicara mengenai satu tuhan tertentu yang dipercayai satu agama, melainkan berbicara mengenai doktrin “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terhunjam kukuh dalam jantung setiap agama dan tradisi lokal autentik di Indonesia. Setiap agama dan kepercayaan di Indonesia meyakini adanya sesuatu yang transenden, yang *numinous*, yang Ilahi, meskipun dengan konstruksi dan “nama” yang berbeda-beda.

Istilah ketuhanan ini merupakan anggitan yang dapat menyatukan dan diterima oleh penganut agama dan kepercayaan di Indonesia baik yang berciri *theologia positiva* atau *afirmativa* maupun *theologia negative.* Karena itu, memahami ide Ketuhanan Yang Maha Esa dalam realitas masyarakat serba majemuk ini tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan kesadaran atas realitas Tuhan yang dihidupi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali di tanah air. Realitas serba majemuk ini tidak dapat ditampik, melainkan justru dirayakan dengan penuh kegembiraan menyusul pembukaan seluas-luasnya ruang perjumpaan antar-pemeluk agama dan kepercayaan: mendialogkan pengalaman iman dan penghayatan perihal Yang Ilahi masing-masing warga negara untuk kemudian dikontribusikan bagi pembangunan peradaban bangsa Indonesia yang berkemajuan, damai dan sejahtera.

Dalam pengandaian yang lebih epistemik, menarik

menautkan doktrin *Ketuhanan Yang Maha Esa* dengan ide tentang "Ketuhanan yang Berkebudayaan"—seperti diungkapkan Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Menurut pendakuan sejumlah ilmuwan, ide "Ketuhanan yang Berkebudayaan" tidak saja dipandang "menggemparkan" tetapi juga tidak lazim. Sebut saja umpamanya perspektif Daniel Dhakidae yang mengajukan argumen berikut. *Pertama*, Ketuhanan yang berkeadaban dan berkebudayaan, suatu istilah "aneh" karena menggabungkan dua hal yang tidak bisa digabungkan, yaitu "ketuhanan" dan "keadaban"/"kebudayaan". *Kedua*, Ketuhanan ditempatkan pada sila terakhir, yang dalam pandangan umum kalau mengatakan sesuatu dalam urutan dan berhubungan dengan Tuhan, maka harus mendapat kedudukan pertama dan bukan terakhir. Karena itu, apa yang dikemukakan Soekarno menjadi *sacrilegious*, *blasphemous* bagi siapa pun yang beriman (Dhakidae, 2018:24).

Kegemparan itu, menurut Dhakidae, terjadi semata-mata karena salah pengertian sejak pidato itu diucapkan sampai hari ini. Kesalahpahaman bersumber pada satu hal, yaitu orang keliru melihat pidato itu yang dianggap sebagai "dokumen keagamaan". Dari seluruh rencana kerjanya, *Dokuritsu Junbi Chôsa-kai* menyiapkan dasar-dasar negara merdeka dan karena itu tujuannya adalah meyiapkan suatu dokumen kenegaraan. Bila diperhatikan dengan cermat, pidato itu bukan dimaksudkan sebagai sebuah dokumen keagamaan, tetapi "dokumen kenegaraan" untuk suatu negara merdeka yang belum ada.

Setidaknya, ada tiga unsur dalam sila Ketuhanan Pancasila 1 Juni 1945 yang bisa menjadi pertimbangan. *Pertama*, “Tuhannya sendiri”, *one’s own God.* Kalau bangsa ini memiliki ratusan kelompok etnik, maka bisa diduga ada juga ratusan tuhan. *Kedua, keleluasaan,* dalam penertian memberikan kebebasan bertindak, tidak mengekang, dan tidak menghalangi siapa pun yang menjadi warga negara baru nanti dalam mengungkapkan rasa ketuhanannya masing-masing; untuk menghormati unsur pertama maka kebebasan bertindak menjadi tuntutan etis utama. *Ketiga*, baru *berkebudayaan.* Dalam semua ini, Soekarno menawarkan sebuah konsep yang berbeda ketika dia menyebut “ketuhanan yang berperikemanusiaan” dan dengan itu yang sebenarnya ditawarkan di sana adalah sebuah konsep ontologis lain, yaitu “ketuhanan” sebagai tesis dengan “kemanusiaan” sebagai antitesis. Konsekuensinya, tidak ada “ketuhanan” seperti itu tanpa adanya “kemanusiaan” (Dhakidae, 2018:25).

Sekaitan dengan itu, menarik melihat kembali apa yang diungkapkan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945:

> Jangan pun *Weltanschauung* yang diadakan oleh manusia… “*De Mensch*”—manusia!—harus perjoangkan itu. *Zonder* perjoangan itu tidaklah ia akan menjadi *realiteit*!”…Tidak! Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu; *zonder* perjuangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama, yang dapat menjadi realiteit (Soekarno, 1995).

Yang hendak diungkapkan di sini adalah bahwa menakar dasar ontologis sila pertama Pancasila “Ketu-

hanan Yang Maha Esa" bukan atas dasar agama, tetapi kemanusiaan, *Menschlichkeit* atau *human-ness*; "…mey-akini bahwa keberadaan manusia adalah *ada-yang-ter-batas* dan karena itu memerlukan *Yang Tak-Ada-Batas* (*infinitum*) dan bukan berpijak pada keyakinan, *belief, belief system*.

Soekarno dalam konteks ini menambahkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu selain kemanusiaan harus ada yang lain yang menjadi dasar ontologis itu, dan hal ini bisa dicari dalam pidato 1 Juni. Itu terjadi ketika Soekarno mengatakan bahwa "…[p]erdjoangan" adalah *menschlich,* dan dalam *menschlichtkeit* dari "perdjoan-gan" itulah terletak keberhasilan dari *Göttlichkeit* dari sila pertama", yang oleh Soekarno dengan penuh kes-engajaan ditempatkan sebagai sila terakhir.

Mengapa ditempatkan pada sila terkhir, menarik mengutip pendakuan Dhakidae. *Pertama*, dengan cara berpikir dialektik seperti Soekarno, *ketuhanan* tidak bisa dipahami tanpa adanya *kemanusiaan,* malah tan-pa kemanusiaan itu ketuhanan pun sirna. "Perjoangan" adalah tali penghubung ketuhanan dan kemanusiaan, dan "perjoangan" tidak lain dari *kerja, Arbeit, arbeiten, work,* yang menjadi dasar dari seluruh paham *human-ism* (Dhakidae, 2018: 25).

Tanpa kerja tidak ada kebudayaan, tidak ada mas-yarakat, dan tidak ada ketuhanan. Hanya dalam penge-tian itu bisa dipahami mengapa berulang kali Soekarno menekankan "ketuhanan yang berperikemanusiaan" atau "ketuhanan yang berkebudayaan" karena alasann-ya sangat sederhana: "Tuhan tidak berkebudayaan".

Hanya dalam pengertian itu, "gotong royong" harus diartikan, karena gotong royong tidak lain dari *kerja, Arbeit, work.*

*Kedua*, "ketuhanan" di sini harus dipahami dalam konteks kenegaraan, bukan konteks "keagamaan" atau "kepercayaan"/"keyakinan" meski Soekarno pun menghubungkannya dengan agama, yang tentu saja menjadi bagian dari kebudayaan. Dengan demikian anggitan "ketuhanan" berada di atas agama-agama. Di titik ini, sebagaimana diandaikan Mohammad Hatta (1926-1977) bahwa sila pertama Pancasila menjadi "fundamen moral" bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, bisa dipahami bila kemanusiaan diangkat di sampingnya: Setiap ikhtiar manusia dalam arus sejarah yang mencoba "merumuskan" Tuhan Yang Maha Tak Tepermanai, selalu berujung pada *Quasi ignotus cognoscitur*— "Tuhan dikenal sebagai Dia yang tak dikenal", "Dia Yang Terselubung" (*Deus Absconditus*) dan Misteri Yang Tak Terselami. Di titik inilah, relevansi dan signifikansi ide genial pendiri bangsa, khususnya Soekarno ketika merumuskan bahwa inti Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *"Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, dan Ketuhanan yang saling menghormati satu sama lainnya"*, yang mengandaikan bahwa ide dan doktrin *Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kemanusiaan. Di titik ini, Soekarno mengandaikan bahwa kualitas aktual keberagamaan seseorang ketika ia mampu mengonstruksi praktik berketuhanan yang bertumpu tidak hanya kepada

penyembahan, pengagungan, dan pengabdian kepada Yang Ilahi, tetapi sekaligus berujung kepada "pemihakan" dan "kepedualian" terhadap masalah-masalah kemanusiaan universal.

## III. Penutup

Indonesia, yang dikenal dengan julukan negeri "untaian zamrud khatulistiwa" tidak hanya eksotik tapi juga mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa daerah, galaksi agama yang aneka dan multicultural yang demikian kental di sepanjang rangkaian tanah air yang membentang dari 608°' LU hingga 1115°' LS, dan dari 9445°' BT hingga 14105° BB.

Secara geopolitik, Negara Republik Indonesia seperti pernah diungkapkan Soekarno sebagai "negara lautan" yang ditaburi pulau-pulau atau dalam sebutan umum dikenal sebagai "negara kepulauan" (*archipelago state).* Sebagai "negara kepulauan" terbesar di dunia, Indonesia memiliki tak kurang dari 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau)—sekitar 6000 di antaranya berpenduduk (United Nations Environment Program, UNEP, 2003). Lautan, karena itu menjadi dominan. Dari 7,9 juta km2 total luas wilayah Indonesia, 3,2 juta km2 merupakan wilayah laut territorial dan 2,9 juta km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan sisanya 1,8 juta km2 merupakan daratan. Dengan kata lain, luas lautan Indonesia meliputi 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Dengan Panjang pantai 95.180,8 km, sementara Panjang khatulistiwa 40.070 km, maka Panjang garis pantai Indonesia dua kali lipat lebih dari

Panjang khatulistiwa. Jika peta Indonesia ditumpangkan pada peta Amerika Serikat dan Eropa, tampak jelas sifat kemaritiman Indonesia. Di atas peta Amerika Serikat, Indonesia membentang dari Laut Pasifik di barat sampai Laut Antlantik di timur; sementara di atas peta Eropa, Indonesia membentang dari London di barat sampai ke Laut Kaspia di timur. Luas Indonesia dan lautnya kurang lebih sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni Eropa. Bedanya, Indonesia terdiri atas ribuan pulau di sebuah wilayah laut yang sangat luas, sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas benyak negara daratan (Soemarwoto, 2004).

Disamping keluasan teritorialnya, letak strategis Indonesia—di titik persilangan antarbenua dan antarsamudera—membuat kepulauan ini sejak lama menjadi kawasan penyerbukan silang budaya, agama, dan peradaban dunia. Itu sebab, tidak mengherankan jika Indonesia menampilkan senyawa arkeologi peradaban yang berlapis: tempat anasir peradaban purba, tua, modern, dan postmodern bisa hadir secara simultan. Sungguh menakjubkan, bagaimana kebinekaan atau kepelbagaian sosial, budaya, etnik, agama, dan territorial ini bisa menyatu ke dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Di titik inilah, nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia kian relevan untuk ditelaah dan diaktualkan dalam formasi kebangsaan kita.

Pentingnya persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia bukan hanya bertumpu pada

"perangkat keras" seperti kesatuan politik (pemerintahan), kesatuan territorial, dan inklusivitas warga, tetapi juga memerlukan "perangkat lunak" berupa eksistensi kebudayaan nasional. Bahwa persatuan nasional memerlukan  apa yang disebut Soekarno sebagai "identitas nasional", "kepribadian nasional", "berkepribadian dalam kebudayaan". Atau dalam pendakuan Soepomo, "karena kita menghendaki persatuan, maka kita mengajak lahirnya kebudayaan nasional."

Hakikat Indonesia adalah suatu cita-cita politik untuk mempersatukan unsur-unsur tradisi,  dan inovasi serta kepelbagaian etnik, agama, budaya, dan kelas sosial ke dalam wadah baru bernama negara-bangsa (*nation state*) Indonesia. Hasrat persatuan itu memang terdorong secara negatif oleh kehendak menghadapi musuh bersama (penjajah kolonial) dan secara positif, tercipta oleh hasrat untuk mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan bersama.

Relevansi dan daya fungsi bangunan sistem nilai Persatuan menjadi efektif justru ketika ia mengatasi dan memelihara tabiat kepelbagaian (*Bhinneka Tunggal Ika*). Persatuan Indonesia menjadi penjaga dan penguat NKRI serta kedaulatan bangsa Indonesia. Nilai Persatuan memiliki energi yang mendorong dan menguatkan falsafah  dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia. Pesan penegasan Pancasila dari nilai Persatuan Indonesia sebagai ideologis dan dasar ketatanegaraan sesungguhnya berkehendak mengungkapkan dan memastikan bahwa Indonesia tidak mengenal, tidak mengakui, dan tidak menerima konsep dan

model lain di luar sistem dan bentuk NKRI. Indonesia hanya mengakui dan memberlakukan bentuk NKRI yang berideologi Pancasila sebagai satu-satunya sistem final yang “menyatukan” seluruh bangsa Indonesia dan bentuk permanen Indonesia Raya. Dengan demikian, apabila ada niat, agenda, dan langkah-langkah aksi dari siapa pun dan dari kelompok mana pun yang memasarkan dan mempropagandakan aspirasi mengenai sistem dan bentuk negara Indonesia selain NKRI, dan aspirasi tersebut dengan sendirinya menolak Pancasila, maka penyimpangan dan penentangan tersebut mesti segera diantisipasi, diatasi, dan dituntaskan. Inilah yang merupakan tantangan kita bersama, yang hadir di tengah dinamika kebangsaan kita menyusul menggeloranya ideologi transnasional dan “raikalisme” keagamaan tertentu seiring gelombang globalisasi. Hal ini juga dengan sendirinya menjadi tugas, tanggungjawab, dan kewenangan negara dan pemerintah untuk menindak dan menuntaskannya.

Indonesia sungguh-sungguh amat menjunjung tinggi kebebasan—termasuk kebebasan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa—serta hak-hak warga sejauh itu diletakkan dalam kerangka persatuan dan penguatan Pancasila. Kebebasan dan hak-hak tersebut dijalankan berdasarkan dan berorientasi untuk menaati Pancasila dan menguatkan sila-sila Pancasila. Kebebasan yang mengancam persatuan dan mengabaikan Pancasila sebagai ideologi “pemersatu,” dengan begitu, mesti ditolak karena bertentangan dengan tujuan nasional dan cita-cita Kemerdekaan Indo-

nesia. Dengan mempertimbangkan karakter dasar dan tabiat inti keindonesiaan sebagai bangsa yang bineka atau pelbagai, maka setiap ide dan tindakan yang menentang kepelbagaian dan kebinekaan mesti dipandang sebagai tindakan menentang eksistensi Indonesia sebagai negara-bangsa. Di atas spirit inilah, ikhtiar mengonstruk dan menggali “kandungan” esensialis sila Ketuhanan Yang Mahas Esa tidak saja kian relevan, tetapi juga sebagai sebilah langkah penting dalam mengukuhkan Indonesia sebagai negeri yang inklusif, moderat, dan toleran di dunia!

## Referensi


Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays by Clifford Geertz* (New York: Open Books Inc., Publisher,1973).

Hariyono, “Pancasila sebagai Strategi Budaya: Upaya Membangun Jati Diri dan Prestasi” dalam *Prisma,* No. 2, Vol. 37, 2018.

Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2015).

Dhakidae, Daniel *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2003).

Sutanto, Trisno S. “Politik Kesetaraan” dalam Elza Peldi Taher (Ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama:*

*Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: Democracy Project, 2011).

Mulder, Niels *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil* (Jakarta: Gramedia, 1983).

Naisbitt, John dan Patricia Aburdene. *Megatrends 2000, Ten New Directions for the 1990's* (New York: Avon Books, 1991).

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995).

Soedjatmoko, "Tanggung Jawab Agama terhadap Hari Depan Umat Manusia", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. 2, Th. 1989.

Toffler. *The Third Wave*, (New York: Bantam Books, 1990).

Goddard, Hugh. *Christians and Muslims: From Double standards to mutual understanding* (Richmond, Surrey: Curzon Press, 1995).

Rachman, Budhy Munawar. "Berteologi dalam Konteks Agama-agama", dalam *Republika*, Senin, 22 Januari 1996.

Rachman, Budhy Munawar. "Kata Pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Paramadina, 1995).

Mahmoud M. Ayoub dalam *The Muslim World*, No.1, vol. LXXIX, Januari 1989.

Nasr, S.H. *Knowledge and the Sacred*, (New York: 1981).

Schuon, Frithjof. *The Transcendent Unity of Religion*, 1975.

Huxley, Aldous *The Perennial Philosophy* (New York: Harper & Row Publisher, 1994).

Schuon, Frithjof. *The Transcendent Unity of Religion* (Wheton Illinois: Library of Congress, 2005).

Madjid, Nurcholish. "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan," *Republika*, 10 Agustus 1999.

Fernando, Ajith. "Other Religions are False Paths that Mislead Their Followers" dalam John Lyden, *Enduring Issue in Religion* (San Diego: Greenhaven Press Inc., 1995).

Huxley, Aldous. *The Perennial Philosophy* (New York, London: Haper Colophon Books, 1970).

Smith, Huston. *Beyond the Postmodern Mind* (London: The Theosophical Publishing House, [tt.]).

Smith, Huston. *Beyond the Postmodern Mind.*.

Rachman, Budhy Munawar. *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularsime, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Multikultural-The Asia Foundation, 2018).

Priyono, A.E., Azyumardi Azra, dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Dinamika masa Kini. Seri 6* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1995).

Sabri, Muhammad. *Tubuh Jagat Kode dan Matinya Realitas: Perspektif Cultural Studies* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), h. 97.

Otto, Rudolf. *Das Heilige. Uber das Irrationale in der Idee des Gottlichen und sein Verhaltnis zum Rationalen* (Munchen: Verlag C.H Beck oHG, 1963)

Denys Turner. *The Darkness of God: Negativity in Christian Mysticism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

Buber, Martin. *I and thou.* trans. Ronald Gregor Smith. (London-New York: Continuum, 1958).

Levinas, *Levinas Carnets De Captivite et autres inedits. Ouvre 1* (Paris: Grasset & Fasquelle, 2006).

Dhakidae, Daniel "Lima Bulan yang Mengguncang Dunia: Kelahiran Pancasila, Proklamasi, dan Pendirian Negara-Bangsa," dalam *Prisma,* No. 2, Vol. 37, 2018.

Soekarno, "Pidato dalam Rapat Besar Tanggal 1 Juni 1945". *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. Peny. Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, A.B. Kusumah. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995).

Dhakidae, Daniel. "Lima Bulan yang Mengguncang Dunia: Kelahiran Pancasila, Proklamasi, dan Pendirian Negara-Bangsa."

Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 2004).

# Bagian Ketiga

## Pancasila dan Agama dalam Kajian Kontekstual

# ISLAM MODERAT DAN KESELARASANNYA DENGAN SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

*Fahruddin Faiz*[*]

## I. Pendahuluan

Secara ideal konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu, tidak pula beraliran sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia didasarkan kepada Pancasila, yangs secara tegas dalam sila pertama menyatakan bahwa dasar kehidupan kebangsaan Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak mengherankan apabila kemudian Indonesia sering juga disebut *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama. (Fanani, 2008: xi)

Makna dan manifestasi dari Ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia setidaknya adalah hal-hal berikut. Pertama, bangsa Indonesia secara hakiki adalah bangsa yang kerketuhanan. Keimanan kepada Tuhan

* Sekretaris Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dan menjalani hidup dalam kerangka penghayatan dan pengalaman ajaran agama adalah *nomos* (tata aturan, tertib) dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini secara implisit juga menunjukkan bahwa Pancasila dirumuskan tidak sekedar sebagai ideal yang dipaksakan sesuai kedalaman nalar para *founding-father* bangsa, namun juga disarikan dari kenyataan budaya dan jiwa bangsa Indonesia sendiri.

Kedua, jaminan negara terhadap setiap rakyatnya untuk meyakini dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai pilihan masing-masing. Setiap warga negara memiliki kebebasan beragama dan ber-kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Tentu saja dengan *standpoint* semacam ini, kehidupan religius bangsa Indonesia menjadi kaya dengan ekspresi dan model keberagamaan, mengiring keragaman agama dan kepercayaan rakyatnya.  Kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya religius, namun juga multi-religius. Dengan asumsi bahwa setiap agama mengusung ideal kehidupan individual dan sosial yang berciri kebajikan, keamanan, ketentraman dan kasih-sayang, maka dapat disimpulkan bahwa praksis hidup berbangsa dan bernegara Indonesia mencerminkan situasi yang dimaksud.

Ketiga, konsekuensi dari kemerdekaan beragama dan menjalankan perintah agama tersebut, yaitu keniscayaan untuk toleransi, saling menghormati dan saling memahami antar keimanan dan praksis beragama yang beragam. Tanpa lahirnya kesadaran untuk menerima yang lain (toleran) dan 'mau tahu' terhadap keberadaan

yang lain dengan keimanan dan praksis beragama yang berbeda, maka multi-religiusitas yang harusnya menjadi rahmat bagi kehidupan berbangsa Indonesia, bisa menjelma menjadi sumber masalah dan konflik.

Setiap pemeluk agama, secara niscaya pastilah memegang kuat komitmen untuk patuh dan taat terhadap tuntunan agamanya. Kenyataan ini tentunya sesuatu yang berdampak positif terhadap kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa-bernegara, mengingat ideal setiap agama atau kepercayaan secara hakiki sebagai petunjuk bagi umatnya untuk membangun kehidupan yang penuh nilai ketuhanan dan kasih sayang. Namun ada kalanya, pemahaman tertentu pemeluk agama menjadi perintang situasi ideal ini.

Tidak dapat dipungkiri, secara normatif ajaran setiap agama akan membuahkan kebenaran dan kebaikan semata. Namun secara historis, praksis beragama sesuai pemahaman dan tafsir pemeluknya tertentu, kadang menampilkan wajah sebaliknya. Tidak sulit untuk menyebut contoh bagaimana pemeluk agama tertentu, atas nama agama, melakukan tindakan destruktif seperti terorisme, juga menyebarkan gagasan-gagasan *toxic* seperti ekstremisme dan kebencian. Indonesia, sepanjang sejarah berbangsa dan bernegara, beberapa kali menghadapi tragedi kemanusiaan semacam ini.

Fenomena-fenomena memprihatinkan tentang praksis beragama yang melahirkan tragedi kemanusiaan juga muncul di kalangan Umat Islam Indonesia yang nota-bene merupakan mayoritas. Itulah mengapa kemudian beberapa waktu terakhir muncul wacana

'Islam moderat' yang merupakan ikhtiar para Ulama' (bahkan di level Internasional), untuk menunjukkan model keberagamaan Islam yang *rahmatan lil Alamin* (menebar kasih-sayang ke seluruh penjuru alam), sebagai penolakan terhadap model keberagamaan Islam yang destruktif tersebut, sekaligus penegasan bahwa Islam yang berkarakter moderat inilah yang merupakan ideal keberagamaan dalam Islam.

Tulisan berikut akan sedikit mengulas apa dan bagaimana Islam moderat tersebut, sekaligus menemukan relevansinya dengan implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa khususnya dalam aspek kebebasan beragama dan menjalankan tuntunan agama serta dalam aspek saling menghormati dan toleransi terdahap keberagamaan lain yang berbeda.

## II. Pembahasan

### Memahami Istilah Islam Moderat

Istilah Islam moderat tentu saja harus dipahami berawal dari kata moderat itu sendiri. Istilah *moderat (moderate)* berasal dari bahasa Latin moderare yang artinya mengurangi atau mengontrol. Kamus *The American Heritage Dictionary of the English Language* mendefinisikan moderate sebagai: "*not excessive or extreme*" (tidak berlebihan dalam hal tertentu). Dalam KBBI kata moderat diartikan sebagai 1) selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; 2) berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Kesimpulan awal dari makna etimologi ini bahwa moderat mengandung makna tengah-tengah, seimbang dan ti-

dak ekstrim, sehingga secara etimologis Islam Moderat dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan (*I'tidal dan wasath*).

Dalam bahasa Arab, moderat disebut dengan istilah *wasthiyyah.* Kata wasat pada mulanya menunjuk pada sesuatu yang menjadi titik temu semua sisi seperti pusat lingkaran (tengah). Kemudian berkembang maknanya menjadi sifat-sifat terpuji yang dimiliki manusia karena sifat-sifat tersebut merupakan tengah dari sifat-sifat tercela. Raghib al-Asfahani mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrat*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrit*), di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan. (Al-Asfahani, 1981: 513) Hal senada dinyatakan oleh Ibnu Faris, bahwa kata *al-wasatiyyah* berasal dari kata *wasat*, yang memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, tengah dan seimbang. (Ibnu Faris, 1986: 522)

Menurut al-Salabi kata *wasathiyyah* memiliki banyak arti. *Pertama,* dari akar kata *wasth*, berupa *dharaf*, yang berarti *baina* (antara). *Kedua,* dari akar kata *wasatha*, yang mengandung banyak arti, diantaranya: (1) berupa *isim* (kata benda) yang mengandung pengertian antara dua ujung; (2) berupa sifat yang bermakna (*khiyar*) terpilih, terutama, terbaik; (3) *wasath* yang bermakna *al-'adl* atau adil; (4) *wasath* juga bisa bermakna sesuatu yang berada di antara yang baik (*jayyid*) dan yang buruk (*radi'*). (Al-Salabi, 2001: 13-14) Kebalikan dari *wasathiyyah* adalah *tatarruf*, yang menunjukkan makna "kecenderungan ke arah pinggiran" "ekstrem-

isme," "radikalisme," dan "berlebihan".(Kamali, 2015: 9) Sedangkan al-Qaradhawi mengidentifikasi *wasathiyah* ke dalam beberapa makna yang lebih luas, seperti adil, istiqamah, terpilih dan terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan. (al-Qaradhawi, 2011: 14)

Kata *wasath* pada mulanya berarti segala yang baik sesuai objeknya. Orang bijak berkata: "Sebaik-baik segala sesuatu adalah yang di pertengahan". Dengan kata lain, yang baik berada pada posisi antara dua ekstrem. "Keberanian" adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut; "Kedermawanan" adalah pertengahan antara sifat boros dan kikir; "Kesucian" adalah pertengahan antara kedurhakaan yang diakibatkan oleh dorongang nafsu yang menggebu dan impotensi.

Dari makna etimologis ini kiranya dapat digambarkan bahwa secara umum wajah Islam yang moderat adalah Islam yang tidak ekstrem dan berlebihan dalam beragama, tidak berkekurangan, adil dan seimbang. Indikasi untuk tidak berlebihan dalam beragama dan baiknya mengambil jalan tengah, banyak disinggung dalam Al-Qur'an, misalnya:

> Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (QS. Al-Isra ayat 29).
>
> Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu (QS. Al-Isra' ayat 110).

Surat Al-Baqarah ayat 143 merupakan salah satu teks keagamaan yang secara gamblang menunjukkan

moderasi itu. Di sana Allah berfirman: *"Dan demikian Kami telah menjadikan kamu, ummatan wasathan agar kamu menjadi syuhada terhadap/buat manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi syahid terhadap kamu." (Q.S. Al-Baqarah: 143)*

Imam Al-Tabbari menafsirkan kata "*Al-wasath* dalam ayat di atas sebagai *al khiyar* (pilihan). Jadi ummat Islam adalah ummat pilihan, sementara itu Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya terhadap ayat ini menjelaskan bahwa Allah dengan hidayahNya menjadikan kamu ummat Islam sebagai ummat yang pertengahan, dan yang dimaksud *wasatah* itu adalah Adil menghadapi pilihan, sehingga sikap  berlebihan atau berkekurangan merupakan suatu yang tercela.

*Ummatan wasathan* merupakan prototipe umat yang memiliki dan memegang teguh prinsip tidak melampaui batas (*ghuluww)*, baik dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, termasuk beribadah. Dalam hal ini Allah berfirman:

> Katakanlah, hai Ahli kitab janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam beragama. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad SAW) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang benar."(QS. al-Ma'idah: 77).

Wacana tentang moderasi dalam beragama belakangan mengemuka di dunia Islam, termasuk Islam Indonesia. Beragam istilah yang senada dan satu visi ihwal moderasi dalam beragama pun banyak muncul, mis-

alnya Islam Moderat, Islam Rahmatan Lil Alamin atau *ummatan wasatan*. Berbagai kajian dan diskusi, baik lisan maupun tertulis mewarnai tukar pandangan tentang moderasi beragama ini.

Urgensi dari *mainstreaming* gagasan moderasi beragama ini di dunia Islam tampak muncul dari setidaknya dua kegelisahan: *Pertama,* adanya kekhawatiran menguatnya gerakan ekstrimisme, intoleransi, dan radikalisme serta terorisme di dunia Islam. Dalam rangka menghadang gerakan ini, moderasi Islam dianggap perlu menjadi arus utama mengingat coraknya yang inklusif dan toleran. *Kedua,* kekhawatiran lenyapnya mode-mode beragama lama yang sejatinya berkarakter moderat dan tergantikan oleh model-mode baru yang dipandang ekstrem, intoleran dan 'radikal'. Konsep Wasathiyah Islam (islam moderat) diharapkan bisa menjadi jalan tengah bagi berbagai permasalahan umat Islam saat ini.

Secara prinsip ajaran Islam hakikatnya memang moderat, karena karakter *israf* dan *ghuluw* yang berkonotasi berlebihan dalam Islam tergolong sebagai karakter yang *mazmumah* (tercela). Banyak ayat dan hadis yang secara tegas menyatakan bahwa Allah dan juga Rasulullah tidak menyukai apapun yang berlebihan dan menghendaki yang kecukupan, keseimbangan dan kebersahajaan, atau dengan nama lain, moderasi.

Mayoritas umat Islam sebenarnya telah menjalankan agamanya secara moderat, hanya saja aktifitas-aktifitas masif dan militan yang dilakukan oleh kelompok yang dipandang ekstrem, intoleran dan radikal membuat

wajah moderat Islam tidak terlalu terekspose. Menurut Khaleed Abou Fadl, kelompok muslim yang berkarakter moderat ini berkarakter *silent-majority* (mayoritas yang diam), sehingga aktifitas, keberadaan dan pengaruh mereka tidak terlalu kelihatan, tidak sebanding dengan jumlah mereka. (El-fadl, 2006: 17)

Mempertimbangkan situasi semacam ini, kiranya perlu ditegaskan kembali, diingatkan kembali dan diutamakan kembali moderasi dalam beragama ini; atau dalam bahasa lebih ilmiah, perlu dilakukan revitalisasi moderasi dalam beragama atau yang lebih populer dengan istilah Islam Moderat atau *Islam Wasatiyyah*.

## Makna dan Hakikat Moderasi dalam beragama

Hakikat keberagamaan Islam adalah moderasi, wasatiyah, keseimbangan, sehingga mewujudkan Islam yang moderat atau *wasatiyyah* hakikatnya adalah menjalankan Islam itu sendiri, tanpa harus dipahami adanya varian Islam yang baru bernama Islam *wasatiyah*.

Menarik untuk mencermati beberapa peneliti asing terhadap agama Islam yang berposisi *outsider* ternyata mereka dapat menemukan karakter *moderat* Islam ini. John L. Esposito misalnya, ia menyatakan:

> "*Minimally, I would argue that moderate Muslims are those who live and work within society, seek change from below, and reject religious extremism, illegitimate violence, and terrorism. And as in other faiths, in Islam such moderates constitute the majority of the mainstream".* (Esposito, 2011: 147-148)

> (Minimal aku akan menyatakan bahwa muslim moderat adalah mereka yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat, mengupayakan perubahan dari bawah dan menolak ekstremisme beragama, kekerasan dan terorisme. Dan sebagaimana dalam kepercayaan yang lain, dalam Islam, kelompok moderat ini merupakan mainstream dari mayoritas).

Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawy, salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor universal, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap zaman dan tempat adalah konsep *wasatiyyah*-nya. (Al-Qaradhawi, 1983: 131) Secara umum konsep Wasatiyyat Islam ini dipahami merefleksikan prinsip *tawassut* (tengah), *tasamuh*, *tawazun* (seimbang), *i`tidal* (adil), *iqtisad* (sederhana). Dengan demikian, istilah *Ummatan Wasatan* sering juga disebut sebagai '*a just people'* atau '*a just community*'.

Dalam buku Strategi al-Wasatiyyah yang dikeluarkan oleh kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, wasatiyyah didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi. (Hanafi, 2009: 40)

Sebagaimana di Kuwait, di Indonesia juga para Ulama' dan cendekiawan juga berupaya untuk merumuskan prinsip-prinsip wasatiyyah Islam ini untuk dapat

diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Para ulama Indonesia melalui Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015, menegaskan 12 Prinsip Wasatiyyat Islam, yaitu:

1. *Tawassut* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan agama yang tidak *ifrat* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrit* (mengurangi ajaran agama).

2. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi; tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan) dan *ikhtilaf* (perbedaan).

3. *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab secara proporsional, bersikap tegas dan berpegang teguh pada prinsip.

4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya dan oleh karena itu wasatiyyat menuntut sikap *fair* dan berada di atas semua kelompok/golongan.

5. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, status sosial-ekonomi, tradisi, asal usul seseorang, dan atau gender.

6. *Syura* (musyawarah), yaitu menyelesaikan persoa-

lan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.

7. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *almuhafazah 'ala al-qadimi al-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah*.

8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingan lebih rendah.

9. *Tatawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.

10. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khair ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

11. *Wathaniyah wa muwathanah,* yaitu penerimaan eksistensi negarabangsa (*nation-state*) di manapun berada dengan mengedepankan orientasi kewarganegaraan.

12. *Qudwatiyah,* yaitu melakukan kepeloporan dalam

prakarsa-prakarsa kebaikan demi kemaslahatan hidup manusia (*common good and well-being*) dan dengan demikian umat Islam yang mengamalkan Wasatiyat memberikan kesaksian (*syahadah*).

## Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Moderasi Islam

Apabila ditelaah dengan perspektif psikologi, kemampuan seorang muslim mengimplementasikan keberagamaan Islam yang moderat dapat disebut sebagai sebentuk 'kematangan beragama'. Ciri-ciri moderasi sebagaimana dihelaskan di atas dapat dikatakan menunjukkan ciri seorang yang telah matang.

Walter Houton Clark, seorang ahli psikologi agama, menyatakan bahwa ciri-ciri keberagamaan yang matang adalah sebagai berikut: *Pertama,* lebih kritis, kreatif, dan otonom dalam beragama; *Kedua,* memperluas perhatiannya terhadap hal-hal di luar dirinya; *Ketiga,* tidak puas semata-mata dengan rutinitas ritual dan verbalisasinya.(Clark, 1968: 242-243)

Sementara itu William James yang dianggap sebagai bapak psikologi agama memberikan kriteria orang yang beragama matang sebagai berikut; *Pertama,* kesadaran akan eksistensi Tuhan, *Kedua,* kedekatan dengan Tuhan dan penyerahan diri pada-Nya. *Ketiga,* penyerahan diri sebagaimana dalam poin kedua melahirkan rasa bahagia dan kebebasan. *Keempat,* orang yang beragama matang mengalami perubahan dari emosi menjadi cinta dan harmoni.

Lebih jauh dari perspektif Pancasila, keislaman

yang moderat ini hakikatnya membuktikan kebenaran ideal dari pandangan bahwa penerapan keberagamaan secara mendalam justru akan memperkuat kehidupan kebangsaan. Dua belas ciri moderasi tersebut di atas selain selaras dengan nilai ketuhanan yang maha esa, juga membawa implikasi kehidupan berbangsa-bernegara yang tertib-damai penuh kasih secara duniawi dan sekaligus berorientasi religius-spiritual.

Sehubungan dengan sila pertama pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam sebagaimana dijelaskan di atas secara umum menunjukkan kesesuaian dan mewujudkan beberapa penjabaran dari kandungan sila tersebut. Berikut beberapa aspek keselarasan atau kesesuaian yang dimaksud:

a. Kebebasan menjalankan keyakinan keagamaan

Kebebasan menjalankan keyakinan keagamaan yang berarti pula jaminan negara terhadap hak setiap warga negara, termasuk umat Islam, untuk menjalankan keyakinan keagamaannya terwujud dalam prinsip-prinsip moderat seperti tawasuth (jalan tengah), tawazun (berkeseimbangan) dan I'tidal (adil). Ketiga prinsip ini membawa kepada pemahaman bahwa kepatuhan terhadap noema-noema agama itu dijalankan secara tepat, tidak ekstrem, baik ekstrem 'kekurangan' atau 'ekstrem berlehihan". Ketiga prinsip ini sekaligus merupakan rambu bagi seorang muslim di negara Indonesia ini untuk menjalankan agamanya secara proporsional sesuai tuntunan yang ada. Prinsip I'tidal (adil) menguatkan rambu bahwa

dalam menjalankan tuntunan agamanya seorang muslim harus memperhatikan upaya dan hasil yang dilakukan, jangan sampai merugikan orang lain, memakan hak orang lain atau menzalimi orang lain.

b. Menghormati dan menghargai yang lain yang memiliki keimanan atau keyakinan berbeda.

   Keselarasan keberagamaan Islam yang moderat dengan nilai penghormatan dan penghargaan terhadap yang lain ini tampak dalam nilai-nilai moderasi tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), dan syura (musyawarah). Dalam prinsip *tasamuh* seorang muslim dituntut mengakui dan menghormati agama dan kepercayaan yang berbeda, dalam *Musawah* (egaliter), seorang muslim dituntut untuk tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, status sosial-ekonomi, tradisi, asal usul seseorang, dan atau gender, dan dalam *Syura* (musyawarah), seorang muslim dituntut terbuka dan siap bekerja sama menyelesaikan persoalan bersama dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan bersama di atas segalanya.

c. Keberagamaan yang berkontriubsi positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

   Semua prinsip moderasi sebagaimana dijelaskan di atas, hakikaynya memberi kontribusi yang positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, beberapa prinsip moderasi Islam berikut secara eksplisit menampakkan bagaimana ke-

beragamaan Islam itu sangat kontributif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang dimaksud adalah:

1) *Ishlah* (reformasi), yaitu semangat untuk senantiasa maju dan menjadi lebih baik, baik secara individual maupun sosial. Mereka yang berprinsip Islah ini fokus untuk mewujudkan kemanfaatan individual dan kemaslahatan sosial. Tentu saja kebaikan individu dan kebaikan sosial pada akhirnya adalah sumbangan tak terkira dalam kehidupan bangsa dan negara.

2) *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingan lebih rendah. Selain tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang remeh dan tidak esensial dalam kehidupan, kesadaran akan prioritas ini akan membuat seseorang tidak mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, namun fokus kepada ranah yang lebih luas seperti bangsa dan negara, atau bahkan yang paling luas seperti kepentingan kemanusiaan secara umum. Ideal dan kesadaran ini tentu saja akan sangat membantu dalam upaya membangun kemajuan bangsa dan saat bekerja sama dengan bangsa yang lain dalam ranah yang lebih luas.

3) *Tatawwur wa ibtikar* (selalu terbuka melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan ke-

majuan umat manusia), *Tahadhdhur* (menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khair ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban) dan prinsip *Qudwatiyah,* (melakukan kepeloporan dalam prakarsa-prakarsa kebaikan demi kemaslahatan hidup manusia (*common good and well-being*). Ketiga prinsip Islam moderat ini, secara definitif menunjukkan bagaimana keberagamaan Islam secara ideal harusnya mendukung dan menguatkan proses bangsa dan negara menuju kemajuan.

4) *Wathaniyah wa muwathanah,* yaitu penerimaan eksistensi negarabangsa (*nation-state*) di manapun berada dengan mengedepankan orientasi kewarganegaraan. Prinsip ini secara tegas menyebut bahwa hidup beragama dan hidup berbangsa-bernegara bukanlah dua hal yang bertentangan, namun dapay saling menguatkan. Dalam prinsip ini negara tidak hanya diterima, namun juga dihayati sebagai tanah air yang harus dibela, dipertahankan serta dipertanggung-jawabkan pengelolaannya secara baik.

## III. Penutup

Setelah memahami berbagai uraian di atas, maka secara definitif ada beberapa simpulan logis yang dapat diambil. Pertama, hakikat bekeragamaan Islam adalah keberagamaan yang moderat. Umat Islam dituntut untuk berada dalam posisi tengah, bersikap adil, seimbang dan menghindari perilaku berlebihan (ifrath/ghuluw) atau berkekurangan (tafrith) dalam segala sikap dan

aktivitas mereka. Mereka diharapkan berposisi sebagai saksi (syahid) di hadapan umat yang lain, dan itu akan terwujud apabila umat Islam sendiri dapat mewujudkan dirinya sebagai teladan kebenaran, kebaikan dan keadilan.

Kedua, sebagai pemeluk agama Islam, umat Islam Indonesia pun dituntut untuk mampu menjalankan tuntunan agamanya secara tepat dan moderat. Pancasila yang merupakan dasar negara republik Indonesia menjamin hal ini. Di sisi lain, implementasi keberagamaan yang moderat ini juga akan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam aspek religius spiritual, maupun juga dalam ranah pemberdayaan sosial-budaya, juga kontribusi positif-kreatif yang bermula dari semangat beragama yang sungguh-sungguh. Islam sendiri memiliki visi ideal sebagai berkah kasih-sayang bagi alam semesta, "rahmatan lil Alamin".

## Referensi

Al-Asfahani, Ragib. *Mufradat Alfaz al-Qur'an.* Damaskus: Dar al Qalam, 1981.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al Khasa'is al 'Ammah li al Islam.* Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1983

-------. *Al-Kalimat fi al-Wasathiyah al-Islamiyah wa Ma'alimaha.* Cairo: Dar al-Shuruq, 2011

Al-Salabi, Ali Muhammad. *Al-Wasathiyyah fi al-Qur'an al-Karim.* Kairo: Maktabah at-Tabi'în. 2001.

Clark, Walter Houston. *The Psychology of Religion: An Introduction to Religious and Behavior*. New York: The MacMillan Company, 1968.

El-Fadl, Khaled M. Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Esposito, John. L., *What Everyone Needs to Know about Islam: Answers to Frequently Asked Questions, from One of America's Leading Experts*, edisi II. Oxford: Oxford University Press, Inc., 2011.

Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Hanafi, Muchlis M., "Konsep Wasatiyyah dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol VIII, Nomor. 32, Oktober-Desember, 2009.

Ibnu Faris. *Mu'jam Maqayis al Lugah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Kamali, Mohammad Hashim, *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'ānic Principle of Wasaṭhiyyah*. New York: Oxford University Press, 2015.

Kantor urusan Presiden Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan peradaban, *Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi dan Implementasi*.

# KETUHANAN YANG MAHA ESA ESENSI: KETAHANAN NASIONAL INDONESIA DI TENGAH PANDEMI DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA

*Arya Prasetya**

## I. Pendahuluan

Ketahanan Nasional merupakan hal yang wajib diwujudkan oleh setiap penyelenggara negara dalam mempertahankan dan menyelenggarakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi setiap warga negara dan bangsa yang berada di dalamnya (Lemhannas, 2016:81). Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada (Usman, 2003:5). Ketahanan Nasional merupakan perpaduan yang utuh dari delapan aspek/astagatra yang saling menunjang satu sama lain dan tidak bisa terwujud jika salah satu aspeknya belum terwujud dengan baik. Aspek tersebut terdiri dari tiga aspek/trigatra alamiah (bersifat statis/tetap), yaitu geografi, demografi dan sumber kekayaan alam, serta lima aspek/pancagatra sosial (bersifat dinamis), yaitu ideolo-

* Dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Samantabadra - NSI.

gi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Lemhannas, 2016:64). Ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan yang dibina secara dini, terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional (Lemhannas, 2016:81). Oleh karena itu, ketahanan nasional sebuah negara dimulai dari ketahanan-ketahanan yang diwujudkan oleh masing-masing individu yang kemudian berinteraksi sosial dan membangun sebuah kerjasama sosial dalam mewujudkan tujuan bersama.

Aspek sosial sangat menentukan keberlanjutan dari aspek alamiah yang terkandung di dalam astagatra tersebut, karena aspek sosial dijalankan oleh manusia, makhluk yang mampu berpikir, mencipta nilai serta mengelola aspek alamiah tersebut untuk bisa memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup yang terkandung di dalamnya. Dari delapan aspek ketahanan nasional, aspek ideologi (di dalam aspek sosial) menjadi landasan utama dalam membentuk dan mewujudkan aspek lainnya, karena ideologi menjadi dasar dalam setiap pemikiran maupun tindakan individu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalam negara tersebut dan memanfaatkan letak geografis dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan negara. Indonesia memiliki sebuah ideologi yang sangat baik dalam membangun pemikiran dan juga sikap hidup ideal manusia Indonesia seutuhnya,

karena ideologi tersebut merupakan intisari karakteristik manusia Indonesia, yang saat ini dikenal dengan nama Pancasila.

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai ideologi sekaligus dasar negara Indonesia (Chrysna, 2020). Pancasila merupakan kata yang diambil dari Bahasa Sansekerta, panca berarti lima (Sanskritdictionary, 2020) dan sila yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi dasar (KBBI, 2020) serta kebajikan moral (Tesaurus Kemendikbud, 2020). Pancasila yang dihasilkan dari pemikiran, diskusi dan perdebatan bersama para pendiri negara Indonesia ini merupakan lima saripati karakteristik kebajikan moral dasar manusia-manusia Indonesia yang diharapkan dapat menjadi landasan berpikir, merasa, berucap, dan bertindak dari seluruh manusia Indonesia.

Pancasila yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sebuah rangkaian yang saling berkaitan dan saling mewujudkan satu sama lain secara berurutan, sila kedua tidak akan bisa terwujud sebelum sila pertama diwujudkan, sila ketiga tidak akan terwujud sebelum sila kedua diwujudkan, sila keempat sulit untuk diwujudkan sebelum sila ketiga diwujudkan, begit-

upun dengan sila kelima tidak akan terwujud sebelum sila keempat berhasil diwujudkan. Oleh karena itu, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi titik pangkal sekaligus penggerak utama dalam mewujudkan keempat sila lainnya.

Tahun 2020 menjadi salah satu tahun terberat untuk kehidupan masyarakat dunia, karena sejak 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO)/ organisasi kesehatan dunia menyatakan dunia dilanda kembali oleh pandemi, yang saat ini dikenal dengan *Corona Virus Diseases* (Covid)-19 (Steyvani, 2020). Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia (WHO, 2020). Sebelumnya dunia juga pernah dilanda pandemi, dari data yang tercatat di kanal berita dalam jaringan (daring) Kompas, pandemi tersebut di antaranya adalah pandemi Justinian yang terjadi pada abad ke-6, kemudian pandemi *Black Death* pada tahun 1347-1351, pandemi Cacar pada tahun 1492, pandemi Kolera pada tahun 1961, pandemi Flu Spanyol pada tahun 1918, pandemi *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang disebabkan oleh satu dari tujuh jenis virus corona pada tahun 2003, pandemi Flu Babi pada tahun 2009, dan pandemi Ebola pada tahun 2014 (Fadhrotul, 2020).

Pandemi Covid-19 sudah menyebar ke 220 negara di dunia, termasuk Indonesia (KPCPEN, 2020). Di Indonesia berbagai sektor kehidupan turut terdampak sejak terjadi pandemi Covid-19, bukan hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi, politik, pendidikan, maupun keagamaan. Kinerja perekonomian yang melambat sejak pandemi covid-19 berdampak

pada kondisi lapangan kerja. Kegiatan ekonomi yang terhenti membuat banyak perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, salah satunya dengan memangkas jam kerja karyawan atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh media daring Kompas mencatat jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang dibanding Agustus 2019 lalu. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen. Secara keseluruhan ada 29,12 juta penduduk usia kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi. Angka tersebut setara dengan 14,28 persen dari keseluruhan populasi penduduk usia kerja yang mencapai 203,97 juta orang. Selain itu, jumlah orang yang tidak bekerja akibat Covid-19 mencapai 1,77 juta orang. Data BPS pun menyebutkan, jumlah penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang (Fauzia, 2020). Aksi demonstrasi yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 seolah menjadi cermin dari keresahan masyarakat akibat dampak ekonomi ini, padahal aksi-aksi demo tersebut tidak memberikan perbaikan di bidang ekonomi, tapi malah memperlambat pemulihan ekonomi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, "Jika kasus COVID-19 meningkat karena aksi demo yang berlangsung saat ini, maka berpotensi menghambat pemulihan ekonomi nasional" (Sugianto, 2020).

Munculnya individu figur publik yang menyuarakan untuk tidak menaati protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir) di tengah pandemi dan dengan sengaja menentang keberadaan Covid-19, serta munculnya kelompok massa yang dengan sengaja menentang anjuran pemerintah untuk tidak membuat kerumunan, menjadi hal yang mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Sebagai contoh: kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh figur publik *drummer* band *Superman Is Dead*, I Gede Ari Astana alias Jerinx yang sempat berkoar menyatakan tidak percaya dengan keberadaan virus corona di media sosial miliknya. Ia menganggap corona hanyalah konspirasi yang disebar skema bisnis. Jerinx bahkan menilai bahwa informasi yang dibawa dari Gugus Tugas Covid-19 hanya untuk menakut-nakuti, dan menyuarakan serta mengajak untuk menolak memakai masker. Jerinx juga menyampaikan pernyataan agar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dibubarkan dan menyatakan bahwa IDI adalah kacung WHO (Fernanda, 2020). Pernyataan Jerinx menjadi salah satu unsur yang mengganggu stabilitas politik Indonesia, karena kondisi di tengah masyarakat menjadi tidak kondusif dengan adanya orang-orang yang memercayai Jerinx dan menjadi tidak menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, kepulangan salah satu tokoh organisasi massa Front Pembela Islam (FPI), Riziek Shihab pada tanggal 10 November 2020 juga menjadi pengganggu stabilitas politik Indonesia di tengah pan-

demi covid-19 ini, selain memunculkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat, kerumunan massa yang ditimbulkan oleh anggota FPI dapat menjadi potensi penularan dan peningkatan kasus yang sangat besar (Tim Detik, 2020). Bidang Pendidikan di Indonesia pun tidak luput dari dampak pandemi Covid-19, melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19), seluruh aktivitas belajar-mengajar di sekolah dihentikan dan dialihkan menjadi pembelajaran melalui media daring (Kemendikbud, 2020). Begitu pula halnya dengan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah yang sempat ditiadakan dan baru dilakukan penyesuaian kembali sejak Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19 di Masa Pendemi (Portal Informasi Indonesia, 2020).

Berbagai macam pembatasan dan gejolak sosial yang terjadi di tengah masyarakat ini sangat memengaruhi keseimbangan dalam kehidupan, perjumpaan sosial, sentuhan fisik, getaran perasaan yang semula sering dirasakan lumrah, kini menjadi sesuatu yang langka, bahkan sangat dirindukan. Kondisi pandemi ini seyogiyanya menjadi sebuah momentum bagi warga negara Indonesia untuk melakukan refleksi diri dengan kembali kepada ideologi dan dasar negaranya, yaitu Pancasila, sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, yang hakikatnya

terkandung dalam tiap-tiap agama, termasuk agama Buddha untuk bisa mengatasi Pandemi Covid-19. Di tengah kondisi kritis seperti ini yang diperlukan bukan hanya kebersamaan, tetapi kesatuan hati, karena bersama belum tentu bersatu hati, tetapi jika bersatu hati pasti dilakukan bersama-sama. Kesatuan hati bangsa Indonesia terkandung di dalam Pancasila dan ini menjadi sumber energi untuk memunculkan kesadaran kolektif dan menggalang persatuan dalam menaklukan egoisme diri sendiri dan menaklukan Covid-19, karena jika masyarakat Indonesia sudah mampu memunculkan kesadaran dirinya masing-masing untuk menaati protokol kesehatan, menaklukan egoisme diri sendiri, maka Covid-19 pun dapat ditaklukkan dan pandemi dapat diatasi, dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan semakin kokoh untuk menunjang pembangunan negara menuju Indonesia maju.

## II. Pembahasan

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha memiliki makna sifat-sifat Tuhan yang sangat hakiki/mutlak, hal ini disebut sebagai *Dharma*. Dalam agama Buddha, *Dharma* ini bukanlah suatu hal yang bisa dipersonifikasikan, tetapi Ia adalah sebuah hakikat sejati dari irama/hukum alam semesta, kebajikan moral alam semesta, sebuah kebenaran mutlak, sebuah keadilan hakiki yang berlaku secara universal pada setiap aspek kehidupan di alam semesta. *Dharma* ini juga terkandung di dalam jiwa setiap umat manusia. Kehakikian itu ialah hukum sebab-akibat sesaat, hukum karma (hasil perbuatan), dan juga *maitri karuna*

(memberi *suka*/ kegembiraan/ manfaat, dan mencabut *dukkha*/ penderitaan/ kesulitan). Oleh karena itu, tujuan dari agama Buddha adalah membimbing untuk membuat setiap umat manusia mampu memanunggalkan dirinya dengan *Dharma*, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Karena, ketika umat manusia mampu manunggal/ selaras dengan *Dharma,* maka hidup dan lingkungannya pun akan damai, tenteram dan dirinya mampu membawa manfaat serta kegembiraan bagi semua makhluk maupun dirinya sendiri.

Dalam agama Buddha, khususnya Niciren Syosyu, terdapat sebuah prinsip yang disebut *Esyo Funi* (*Eho* adalah lingkungan, *Syoho* adalah Subjek, *Fu* berarti Bukan/Tidak, *Enin* berarti Dua), Subjek dan Lingkungan Bukan Dua/Tak Terpisahkan. Berarti seluruh gejala alam semesta tercakup dalam jiwa manusia, jiwa manusia mencakupi seluruh alam semesta, baik diri sendiri, lingkungan, jasmani, perasaan jiwa, makhluk tak berperasaan seperti rumput dan pohon maupun langit dan bumi, kesemuanya itu tanpa terkecuali satu butir debu pun tercakup dalam sekejap perasaan jiwa manusia. Sekejap perasaan jiwa ini memenuhi seluruh alam semesta. Bahkan sejatinya pada setiap benda, bahkan sebutir debu pun sudah tercakup kesepuluh arah, dan dalam setetes air laut juga sudah terkandung semua unsur lautan. Setetes air yang dijatuhkan ke dalam laut akan tersebar ke seluruh penjuru lautan. Suara terjatuhnya benda, betapa kecil pun, akan menggetarkan gemanya ke seluruh alam semesta (NSI, 2018:20-21). Menurut agama Buddha, bilamana jiwa

manusia menjadi kacau (tidak lagi manunggal dengan *Dharma*/ Ketuhanan Yang Maha Esa), pasti akan timbul bencana dan musibah. Mahasamnipata Sutra menguraikan tentang Tiga Bencana sebagai berikut:

> Bilamana ada suatu masyarakat yang meskipun sudah menjalankan pertapaan Sumbangan (Dana), Pantangan (Sila), dan Prajna, tetapi melihat kemusnahan DharmaKu ini, namun membiarkannya begitu saja tanpa berusaha untuk mencegahnya, maka segala karma baik yang telah ditanamkannya akan musnah dan terjadilah di dalam negeri itu ketiga hal yang tidak diinginkan, yaitu pertama kelaparan, kedua peperangan, dan ketiga wabah penyakit.

Berbagai macam musibah yang akan timbul tertulis di dalam Sutra Bhaisajyaguru, yaitu musibah kematian banyak orang karena wabah penyakit, musibah serangan negeri asing, musibah perang saudara di dalam negeri, musibah kelainan peredaran bintang, musibah gerhana matahari dan bulan, musibah hujan dan angin besar yang tidak pada waktunya (NSI, 2018:177-178). Bencana adalah gejala yang merugikan manusia dan musibah adalah dampak dari gejala itu, maka musibah pada akhirnya dapat dikembalikan pada bencana.

Bencana wabah penyakit Covid-19 yang sedang melanda dunia (pandemi) umumnya dan Indonesia khususnya saat ini merupakan pantulan nyata dari kondisi perasaan jiwa umat manusia. Dalam catatan sejarah dunia, berbagai pandemi yang telah dicantumkan di awal tulisan ini terjadi saat kondisi masyarakat sedang dilanda oleh kemarahan perang, keserakahan (perebutan kekuasaan, ingin memperluas daerah kekuasaan,

tidak pernah merasa puas/cukup dalam meraup keuntungan sebanyak-banyaknya), dan kebodohan (hanya digerakkan oleh naluri, menindas yang lemah, memuja yang kuat, melakukan hal-hal yang sia-sia). Beberapa pandemi yang merenggut nyawa manusia dalam jumlah besar di antaranya, pandemi Justinian pada abad ke-6 yang terjadi saat konstatinopel/kerajaan romawi sedang gencar melakukan perluasan wilayahnya dengan menaklukkan wilayah lain, wabah ini dibawa ke Laut Mediterania dari Mesir, tanah yang baru ditaklukkan sebagai penghormatan kepada Kaisar Justinian, wabah itu menghancurkan Konstantinopel dan menyebar dengan cepat di seluruh Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Arab yang menewaskan sekitar 30 hingga 50 juta orang, sekitar setengah dari populasi dunia saat itu (Roos, 2020). Kemudian pandemi *Black Death* pada tahun 1347-1351yang menewaskan lebih dari 50 juta manusia di Eropa (WHOa, 2020) terjadi saat perang seratus tahun antara Kerajaan Inggris dengan Kerajaan Prancis di Benua Eropa tengah bergolak (Britannica,2020; History,2020). Pandemi Cacar di tahun 1492 terjadi saat negara-negara Eropa yang merasa memiliki kekuatan untuk menkolonisasi negara lain melakukan ekspansi ke berbagai negara (CDC, 2016), di Eropa, cacar diperkirakan telah merenggut 60 juta nyawa pada abad ke-18 dan pada abad ke-20 telah menewaskan sekitar 300 juta orang di seluruh dunia (NatGeo, 2019). Pandemi Flu Spanyol pada tahun 1918 terjadi saat perang dunia pertama sedang berlangsung (Himawan, 2020), diperkirakan sekitar 500 juta orang atau sepertiga dari populasi dunia, yang saat itu berjumlah 1,8 miliar

orang (BBC,2020) terinfeksi virus ini. Jumlah kematian diperkirakan sedikitnya 50 juta di seluruh dunia dengan sekitar 675.000 terjadi di Amerika Serikat (CDC, 2019), flu Spanyol tercatat menewaskan lebih banyak orang daripada perang dunia pertama (BBC,2020).

Jika dilihat dengan prinsip *Esyo Funi* dalam agama Buddha, pandemi merupakan sebuah pantulan nyata dari kondisi perasaan jiwa manusia yang dilanda oleh tiga akar keburukan, yaitu keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Pandemi menjadi sebuah tanda bahwa sedang terjadi ketidakselarasan antara manusia (alam semesta kecil) dengan irama, hakikat alam semesta besar/ Ketuhanan Yang Maha Esa yang sejatinya adalah harmoni, *maitri karuna* (memberi *suka*/ kegembiraan/ manfaat, dan mencabut *dukkha*/ penderitaan/ kesulitan).

Ketika irama manusia sebagai alam semesta kecil hanya ingin mengambil keuntungan dengan menyakiti orang lain, berbahagia di atas penderitaan orang lain, mengeksploitasi sumber daya alam demi egoisme sebagian kelompok manusia saja, maka lingkungan tempat manusia tersebut hidup (hingga partikel terkecilnya, seperti virus dan bakteri, akan persis menggambarkan kondisi perasaan jiwa manusia yang hidup di dalamnya).

Jika kita amati, Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 ini pun merupakan cerminan persis seperti karakter kondisi manusia-manusia yang hidup di dalamnya, karakter virus yang sangat cepat dan mudah menyebar, dirasakan seolah-olah seperti tidak terjadi

apa-apa, menjadi cerminan persis seperti kondisi manusia zaman sekarang yang sangat cepat dan lihai dalam memanipulasi berbagai hal yang bersifat egosentris. Covid-19 yang menyerang ke paru-paru sebagai saluran pernapasan manusia juga menjadi cerminan sekaligus pengingat bahwa alam semesta besar pun sedang mengalami kerusakan paru-paru dunia yang dapat dilihat dari menurunnya jumlah hutan hijau di dunia. Menurut data *Global Forest Watch* dari tahun 2002 hingga 2019, terdapat total 60,5 juta hektar hutan primer lembab yang hilang secara global (Global Forest, 2020), luas hutan dunia pun kian menurun dalam rentang waktu tiga puluh tahun terakhir, di tahun 1990 luas hutan dunia masih 4,24 miliar hektar, di tahun 2020 menurun menjadi 4,06 miliar hektar (Roser, 2020). Dampak dari penurunan jumlah hutan yang merupakan paru-paru dunia ini berpengaruh pada perubahan iklim dunia, menurut *National Aeronautics and Space Administration United States of America* (NASA)/ Badan Penerbangan dan Antarikas Amerika Serikat penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan, dan pembakaran bahan bakar fosil. Perubahan iklim dapat menyebabkan munculnya pola baru hama dan penyakit, mempengaruhi tumbuhan, hewan dan manusia, dan menimbulkan risiko baru bagi keamanan pangan dan kesehatan manusia (NASA, 2014). Dampak dari hal-hal tersebut sedang dirasakan oleh umat manusia saat ini, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan.

Munculnya pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa

alam semesta (besar-kecil) sedang tidak sehat, maka seyogianya membuat orang-orang menjadi semakin sadar untuk segera melakukan penyembuhan diri, oleh karena itu perlu upaya penyembuhan mendasar yang dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Penyembuhan mendasar tersebut harus dilakukan dari dasar hati setiap manusia yang hanya bisa dilakukan melalui jalan agama. Secara spesifik sebagai warga negara Indonesia harus kembali ke Ideologi negaranya, Pancasila, khususnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkaitan erat dengan ajaran-ajaran agama. Mengapa harus kembali ke ajaran agama? Karena Agama benar-benar mengajarkan perubahan hati, pikiran, ucapan dan tindakan manusia ke hakikat sejatinya sebagai seorang manusia. Kata manusia berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti makhluk berpikir. Menurut agama Buddha, ciri khas manusia adalah bijaksana, berperasaan halus, sanggup menilai sesuatu secara tepat, mempunyai *prajna* (pikiran bijaksana tertinggi), dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena pengendalian emosi jiwa yang berlangsung dengan stabil. Ia juga merupakan satu-satunya makhluk yang dapat menjalankan pertapaan untuk memunculkan kesadaran Buddha (NSI, 201:38).

Membimbing seluruh umat manusia agar bisa memunculkan kesadaran Buddha adalah tujuan utama dari kelahiran Sang Buddha di dunia, Beliau senantiasa membimbing agar seluruh umat manusia dapat merasakan kebahagiaan sejati yang sama seperti yang telah

Ia rasakan. Dalam bahasa sansekerta, Buddha berasal dari dua suku kata, yaitu "*Bud*" yang berarti sadar dan *dha* yang berarti utuh/sempurna (Stokes, 2000:1), sehingga Buddha adalah sebuah kondisi perasaan jiwa sekaligus gelar kehormatan bagi manusia yang telah berhasil memunculkan dan menjadikan kesadaran yang utuh/sempurna tersebut sebagai bagian terpadu dalam pikiran, sekejap perasaan jiwa, ucapan, dan tindakannya. Seorang Buddha/ manusia yang sadar seutuhnya/sempurna, adalah manusia yang senantiasa memanunggalkan dirinya dengan *Dharma*, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakannya benar-benar selaras dengan hakikat sejati irama alam semesta/*Dharma* yang *maitri karuna*, selalu ingin harmoni, membahagiakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang-makhluk lain serta lingkungannya, dan senantiasa menyadari bahwa segala hal di alam semesta ini tidak ada satu pun yang luput dari hukum sebab-akibat, hukum karma.

Kesadaran tersebut niscaya menjadi sumber energi konstruktif yang menunjang produktivitas dalam berkarya nyata dan membahagiakan semua makhluk hidup, termasuk dirinya sendiri, karena orang yang sadar seutuhnya akan melakukan sesuatu bukan karena disuruh, diajak, bukan juga karena diberikan imbalan atau hukuman, bukan juga melakukan sesuatu hanya untuk pemuasan kepentingannya sendiri saja, tetapi ia melakukan sesuatu karena memang benar-benar menyadari bahwa apa pun yang ia lakukan akan

langsung menjadi sebab-akibat untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, ia melakukan sesuatu sepenuhnya untuk memberi manfaat dan kebahagiaan kepada semua makhluk hidup. Sehingga dapat disimpulkan, dalam agama Buddha manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa adalah manusia yang sadar seutuhnya. Dengan berubahnya kondisi perasaan jiwa manusia dari yang tadinya dipenuhi oleh tiga akar keburukan: keserakahan, kemarahan, dan kebodohan, menjadi kondisi perasaan jiwa yang sadar seutuhnya, niscaya kondisi lingkungan alam semesta besar berubah menjadi kondisi yang sadar, COVID-19 pun dapat ditaklukkan dan pandemi dapat diatasi. Sesuai dengan prinsip *Esyo Funi* dalam agama Buddha, ketika badan manusia berubah, maka lingkungan pun pasti berubah, ibarat badan dan bayangan, badan adalah manusia, bayangan adalah lingkungan, jika bayangan bengkok, maka yang harus diluruskan adalah badannya, jika badannya lurus, maka bayangannya pun pasti lurus. Dengan perubahan masing-masing individu menjadi manusia Indonesia yang sadar seutuhnya maka ketahanan nasional Indonesia pun akan semakin kokoh untuk menunjang pembangunan negara menuju Indonesia maju.

## III. Penutup

Perubahan besar dalam meningkatkan ketahanan nasional Indonesia yang kuat, wajib dimulai dari perubahan kecil yang fundamental dari masing-masing individu seluruh warga negara Indonesia, perubahan kecil itu adalah menghayati dan mengamalkan kembali

sila ke-1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, karena ketahanan nasional terbentuk dari ketahanan-ketahanan individu, ketahanan individu terbentuk dari kesadaran masing-masing individu dalam menghayati, menginternalisasi, dan mengamalkan seluruh ajaran agamanya secara utuh dan nyata dalam kehidupannya sehari-hari, karena pada hakikatnya seluruh agama mengajarkan kebaikan, meskipun tidak bisa disamakan, tetapi ada keserasian dalam pengamalan sikap kemanusiaan untuk menjadi manusia-manusia yang luhur. Dengan pengamalan ini maka kesatuan dan persatuan hati sebagai manusia Indonesia untuk melakukan pembangunan bersama menuju Indonesia maju yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia niscaya dapat terwujud nyata. Pandemi menjadi hikmah baik dan momentum untuk melakukan refleksi diri kembali kepada hakikat ajaran agama, kembali ke sumber energi Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), esensi sumber kekuatan ketahanan nasional Indonesia.

## Referensi

BBC. (2020). *Virus Corona dan Pandemi Flu Spanyol: Wabah pada 1918 menewaskan 50 juta orang, Bagaimana Perubahan Dunia Saat Itu dan Apa yang Dapat Dipelajari Sekarang?.* [Online]. Tersedia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52458628. [Diakses: 19 November 2020].

Britannica. (2020). *Hundred Years War.* [Online]. Tersedia: https://www.britannica.com/event/Hundred-

Years-War. [Diakses: 19 November 2020].

CDC. (2016). *Smallpox History*. [Online]. Tersedia: https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html. [Diakses: 19 November 2020].

CDC. (2019). *Flu Pandemic 1918*. [Online]. Tersedia: https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html. [Diakses: 19 November 2020].

Chrysna, Mahatma. (2020). *Sejarah dan Peran BPUPKI dan PPKI Bagi Indonesia Merdeka*. [Online]. Tersedia: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-dan-peran-bpupki-dan-ppki-bagi-indonesia-merdeka. [Diakses: 19 November 2020].

Fadhrotul, Vina. (2020). *Kilas Balik 8 Pandemi Penyakit dan Dampaknya Dalam Sejarah*. [Online]. Tersedia: https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/192900965/kilas-balik-8-pandemi-penyakit-dan-dampaknya-dalam-sejarah-?page=all. [Diakses: 19 November 2020].

Fauzia, Mutia. (2020). *Dampak Pandemi Indonesia Resesi Pengangguran Tembus 977 Juta.* [Online]. Tersedia: https://money.kompas.com/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta?page=all. [Diakses: 19 November 2020].

Fernanda, Donatus. (2020). *Jejak Kontroversi Jerinx Soal Covid-19 Hingga Dipolisikan*. [Online].

Tersedia: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200804165544-234-532101/jejak-kontroversi-jerinx-soal-covid-19-hingga-dipolisikan. [Diakses: 19 November 2020].

Global Forest. (2019). *Global Primary Forest Lost*. [Online]. Tersedia: shorturl.at/jnBHY. [Diakses: 19 November 2020].

Himawan, Elsa. (2020). *Ganasnya Pandemi Flu Spanyol yang Mengakhiri Perang Dunia Pertama*. [Online]. Tersedia: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5119206/ganasnya-pandemi-flu-spanyol-yang-mengakhiri-perang-dunia-pertama. [Diakses: 19 November 2020].

History. (2020). *Hundred Years War*. [Online]. Tersedia: https://www.history.com/topics/middle-ages/hundred-years-war. [Diakses: 19 November 2020].

KBBI. (2020). *Sila*. [Online]. Tersedia: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sila. [Diakses: 19 November 2020].

Kemendikbud. (2020). *Mendikbud Terbitkan SE Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19.* [Online]. Tersedia: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19. [Diakses: 19 November 2020].

KPCPEN. (2020). *Data Sebaran Covid-19 Global*. [Online]. Tersedia: https://covid19.go.id/. [Diakses: 19 November 2020].

Lemhannas. (2016). *Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional.* Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

NASA. (2014). *The Causes of Climate Change*. [Online]. Tersedia: https://climate.nasa.gov/causes/. [Diakses: 19 November 2020].

NatGeo. (2019). *Smallpox The disease, Now Eradicated, Was Once One of The World's Deadliest.*[Online]. Tersedia: https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human-diseases/smallpox/. [Diakses: 19 November 2020].

NSI. (2018). *Filsafat Jiwa Icinen Sanzen*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Portal Informasi Indonesia. (2020. *Panduan Kegiatan di Rumah Ibadah Pada Masa Normal Baru*. [Online]. Tersedia: https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/panduan-kegiatan-di-rumah-ibadah-pada-masa-normal-baru. [Diakses: 19 November 2020].

Sanskritdictionary. (2020). *Panca*. [Online]. Tersedia: https://sanskritdictionary.com/?iencoding=iast&q=panca&lang=sans&action=Search/ [Diakses: 19 November 2020].

Steyvani, Gloria. (2020). *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global*. [Online]. Tersedia: https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12sss/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all. [Diakses: 19 November 2020].

Roos, Dave. (2020). *Pandemics End Plague Cholera Black*. [Online]. Tersedia: https://www.history.com/news/pandemics-end-plague-cholera-black-deathsmallpox#:~:text=Plague%20of%20Justinian%E2%80%94No%20One%20Left%20to%20Die&text=Three%20of%20the%20deadliest%20pandemics,Byzantine%20Empire%2C%20in%20541%20CE. [Diakses: 19 November 2020].

Roser, Max. (2020). *All Our Charts On Forest- Forest Area*. [Online]. Tersedia: https://ourworldindata.org/forests. [Diakses: 19 November 2020].

Sugianto, Danang. (2020). *Aksi Demonstrasi Hadang Pemulihan Pandemi dan Ekonomi RI*. [Online]. Tersedia: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5206222/aksi-demonstrasi-hadang-pemulihan-pandemi-dan-ekonomi-ri/2. [Diakses: 19 November 2020].

Tesaurus Kemendikbud. (2020). *Sila*. [Online]. Tersedia: http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/sila. [Diakses: 19 November 2020].

Tim Detik. (2020). *Satgas Minta Kerumunan Penjemput HRS Jadi yang Terakhir Jangan Egois.* [Online] https://news.detik.com/berita/d-5253203/satgas-minta-kerumunan-penjemputan-hrs-jadi-yang-terakhir-jangan-egois/1. [Diakses: 19 November 2020].

Usman, Wan. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Uni-

versitas Indonesia.

WHO. (2020). *What is Pandemic?*. [Online]. Tersedia: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/. [Diakses: 19 November 2020].

WHOa. (2020). *Plague Black Death*. [Online]. Tersedia: https://www.who.int/health-topics/plague#tab=tab_1. [Diakses: 19 November 2020].

# MELACAK NALAR RASA YANG WAJAR UNTUK MENGHADIRKAN WAJAH PANCASILA

*G. Budi Subanar**

## I. Pendahuluan

Penulisan artikel ini terutama ditujukan kepada generasi muda Bangsa Indonesia. Bagian kalangan terpelajar, terkait dengan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam perspektif lintas iman. Kekhasan dari generasi ini, masyarakat konsumtif, sangat melek teknologi informasi. Ada tiga pusaran yang mengelilingi: negara, pasar, dan agama.

Adapun yang akan dijabarkan dalam tulisan ini berangkat dari pendekatan Kajian Budaya, secara garis besar a) berangkat dari *lived experience* (pengalaman hidup) yang dilibati sehari-hari; b) diolah, dipertanggungjawabkan dan diketengahkan dengan kekayaan wacana keilmuan (*diskursus*); c) pada saatnya akan didaratkan, dijelmakan dalam konteks masyarakat Indonesia jaman ini dan masa depan (*kontekstualisasi*).

Sebagai awal, pembahasan ini bertolak dari pengalaman beberapa bulan berselang. Tanggal 1 Juni 2020,

* Dosen Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pascasarjana Universitas Sanata Dharma menyelenggarakan pentas wayangan dalam rangka 75 Tahun Hari Lahir Pancasila  Sebagai warga negara Indonesia, kami tidak ingin kehilangan kesempatan berharga untuk memaknai 75 tahun Hari Lahir Pancasila. Pascasarjana Universitas Sanata Dharma bekerja sama dengan beberapa pihak menyelenggarakan Acara 75 Tahun Hari Lahir Pancasila dengan pertunjukan wayang menghadirkan 3 dalang: wayang suket, wayang purwa, dan wayang garuda dengan lakon *Bima Suci*.

Masa ini merupakan saat khusus, di mana masyarakat seluruh dunia dibuat tidak berdaya oleh pandemi Covid-19, dan harus berjuang keras untuk mengatasi dan keluar dari masalah. Seluruh masyarakat dan umat manusia seluruh dunia, diikat dalam solidaritas kemanusiaan yakni penderitaan bersama akibat dari pandemi Covid-19. Seluruh dunia berpikir dan berusaha untuk dapat survive mengatasi situasi, dan berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini. Ini realitas sejarah yang tengah kita jalani bersama.

Lima nilai dasar dalam Pancasila yakni - ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dalam musyarawah, dan keadilan sosial - bisa menjadi tatapan bersama untuk menggugah partisipasi dan keterlibatan bersama dalam menghadapi pandemi Covid – 19.

Wayang suket mengangkat dan menyuarakan situasi aktual pengalaman sehari-hari masyarakat bawah yang dalam situasi pandemi Covid-19. Warga masyarakat tetap berjuang, tidak menyerah, dan menyiasati hidup keseharian dengan memperhatikan sejumlah

hal termasuk protokol kesehatan. Ada komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup – pribadi, keluarga, sekaligus merupakan sumbangan bagi masyarakat, bangsa dan seluruh umat manusia. Ada usaha, kerja keras, dan kerjasama, saling pengertian dan saling mendukung serta saling melengkapi, dan mengisi. Bukan hanya mengejar keuntungan pribadi atau kelompok. Ada *rules* – taat asas terhadap aturan bersama untuk menjamin kehidupan bersama terselenggara secara optimal. Wayang purwa menyampaikan nilai-nilai pandangan hidup luhur yang diwariskan nenek moyang, untuk berani berusaha, berani menderita dan bermati raga, menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Untuk mencari dan menemukan dan memperjuangkan kebenaran hidup yang tersembunyi di dalam relung-relung kehidupan yang paling dalam. Berani berkorban menghadapi tantangan, demi kebaikan sesama. Dan disinilah letak keluhuran martabat manusia. Dalam perjuangan tersebut sekaligus mencari dan berusaha menjumpai Yang Suci. Itulah yang dihadirkan dalam pencarian Werkudara untuk menemukan dan berhadapan dengan Dewa Ruci.

Wayang garuda (wayang pulau) karya Nanang R Hidayat menyampaikan pesan Pancasila sebagai ideologi negara, dan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia hadir dari waktu ke waktu. Menyediakan pedoman dan tuntunan hidup bersama dalam menghadapi berbagai hal dan tantangan yang dihadapi masyarakat , rakyat, bangsa Indonesia. Dihadirkan bersama dalam masyarakat dipimpin oleh birokrasi pemerintah sebagai

penyelenggara dan penanggung jawab kehidupan bersama. Salah satu yang mendasari kemunculan karya wayang tersebut adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan dua hal. Pertama, kelahiran gambar lambang negara Garuda Pancasila yang dipikirkan oleh sejumlah tokoh sampai ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66/ 1951 tentang Lambang Negara. Kedua, monumen Garuda Pancasila yang banyak terdapat di desa-desa di Indonesia (Hidayat, 2008). Inilah ekspresi estetis yang menjadi bukti bahwa ideologi itu terkait dengan eksistensi material.

Dalam kacamata Kajian Budaya, produksi budaya seperti ini merupakan bagian dari ideologi yang dihidupi dan dijelmakan. Dalam hal ini, ideologi merupakan sistem representasi, memuat abstraksi atau penggambaran atas realitas. Sekaligus ideologi juga memiliki realitas materialnya (Althusser, 1971). Tidak berhenti sampai di situ, sebab keduanya juga perlu berfungsi secara sosial. Oleh karena itu, untuk menjaga, membangun dan mengembangkan ketahanan bangsa, hal semacam ini perlu terus menerus diselenggarakan. Kesenian, pertunjukan bukan sebagai konsumsi hiburan, komersial, tapi mengembangkan ketahanan bangsa. Mengembangkan ketahanan bangsa melalui dan dalam aktivitas budaya. Dikerjakan secara kolaboratif, kerjasama menghadirkan suasana aman, nyaman, menghibur, ekspresif, produktif, reflektif, edukatif, partisipatif. Singkatnya menghibur sekaligus mencerahkan, dan mencerdaskan.

## II. Pembahasan

### Pandangan Ideal yang Terus Dikupas

Dalam membahas Pancasila, memasyarakatkan nilai-nilai ideal, edukatif dan reflektif untuk kehidupan saat ini dan masa mendatang, kita perlu menempatkan dalam kerangka yang disebut di atas. Ada sistem pada tingkat produksi pengetahuan. Sekaligus ada eksistensi (produk) materialnya. Dalam kerangka tersebut, pendidikan ideologi Pancasila dilangsungkan. Pada sisi lain, ada beberapa keprihatinan menyebutkan, terdapat kevakuman pada birokrasi penyelenggara pemerintahan dalam bidang ini. Dengan cara pembahasan ini, berlangsung proses terlibat dengan partisipasi aktif melalui sarana keterlibatan yang nyata, aktual. Hal ini sekaligus menjadi cara untuk mengungkapkan salah satu sumbangan jawaban atas keprihatinan bersama.

Dalam memasuki hal-hal mendasar, supaya tidak ahistoris, ini akan melacak mundur. Mundur untuk maju – *looking back reaching forward* (Villa-Vincencio [ed.], 2000), mundur tidak untuk meratap atau beromantika, tapi memandang jernih, menimba pengetahuan dan praktik berharga yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam pandangan teologi, ada istilah *eskatologi* yang terjelma. Melihat jaman akhir bukan sebagai ketakutan akan hukuman di akhirat, melainkan akhirat sebagai horizon – harapan ideal yang dijelmakan dalam situasi hidup saat ini. Dalam bahasa Perancis ada istilah *futur – anterior*. Pada peristiwa lampau, ada kekuatan untuk mencapai masa depan, dalam keterlibatan yang sekarang. Dalam ilmu sejarah, ada

*historisitas*. Manusia dibentuk oleh masa lalunya, terlibat dalam dunianya yang sekarang, sekaligus terlibat membentuk atau mempersiapkan diri untuk berjalan ke masa depan.

Kendati pun pada tingkat birokrasi ada suasana vakum dalam pembinaan ideologi, pada sejumlah unsur masyarakat, termasuk lembaga pendidikan tinggi, tetap bergiat melibatinya. Sebagaimana diupayakan beberapa pusat studi Pancasila pada lembaga pendidikan tinggi.

Ada beberapa kesempatan terlibat dalam pembicaraan tentang Pancasila:

Pertama, memperingati Hari Pancasila - 1 Juni 2010, di Gedung DPRD DIY bersama tokoh nasional Nusron Wahid dan Maruarar Sirait. Dalam kesempatan inii dibahas Pancasila yang dibicarakan Presiden Sukarno setelah Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, antara 1945 – 1949, saat 'balita' RI berada di Yogyakarta. Dalam masa tersebut, Presiden RI tetap menyebut dan memperjuangkan nilai-nilai dan semangat Pancasila.

Dalam pidato 17 Agustus 1949, Presiden Sukarno menyebutkan*:*

> Pada saat proklamasi itu, ..... kita hanyalah memiliki empat hal yang telah selesai: pertama naskah proklamasi itu sendiri; kedua bendera kebangsaan Sang Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya; ketiga falsafah negara, yaitu Pancasila; keempat, undang-undang dasar yang bersendikan kepada falsafah itu.

Kedua, membahas pemikiran Drijarkara pendiri Perguruan Tinggi Sanata Dharma dalam sosialisasi

Pancasila "Sosialisasi Empat Pilar MPR RI" bersama seorang anggota parlemen di Kampus Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Drijarkara membahas Pancasila dalam tiga fase yang berbeda. 1) Pada masa Dewan Konstituante mengalami *deadlock* sebelum Dekrit Presiden Juli 1959, Drijarkara membahas Pancasila dalam kaitannya dengan religi. 2) Saat memberi kuliah di Regina College, Colorado, Amerika Serikat, 1963-1964, Drijarkara memperkenalkan Pancasila yang diperlukan untuk masyarakat Indonesia yang majemuk, dan praktik Demokrasi Terpimpin yang dianut pemerintah Indonesia saat itu. 3) Awal 1966 dalam tema "*Kembali ke Pancasila*" dan serial tulisannya sampai saat meninggalnya. Di sana dipilah, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi negara, sistem pemikiran dan pengaturan untuk penyelenggaraan negara, dan Pancasila sebagai praktik hidup sehari-hari yang dilakukan masyarakat Indonesia sebagai manusia Pancasila. Ada pembedaan, dan pemilahan secara jernih dengan berbagai konsekuensinya.

Ketiga, Pancasila di dalam pandangan para seniman seni rupa, yang muncul pasca reformasi (Conners et. All, 2010). Para seniman sebagai warga negara anggota masyarakat mengemukakan apresiasi, refleksi, dan catatan kritis atas nilai-nilai ideal Pancasila dihadapkan dengan permasalahan bangsa Indonesia pada kurun waktu tertentu. Beberapa contoh karya adalah sebagai berikut (Buana, 2008: 256-257, Purnomo, 2008: 20-21):

Haris Purnomo,
*Sujud Panjang Anak Bangsa,*
Oil and acrylic on Canvas
(100x150 cm)

Stefan Buana,
*God Today/ Tuhan Sekarang*
Acrylic on Canvas
(120x75 cm)

Dari hal-hal yang disebutkan di atas, setidaknya dapat dibedakan adanya beberapa pokok pembahasan tentang Pancasila; masing-masing dikemukakan dari berbagai sudut pandangannya. Ada pandangan yang dikemukakan oleh negarawan, ada yang dikemukakan oleh pemikir, ada yang dikemukakan oleh warga negara biasa sebagaimana dilakukan oleh para seniman perupa.

Selain hal tersebut di atas, masih banyak ditemukan tulisan-tulisan lain yang dihasilkan oleh sejumlah pemikir, atau pun kajian-kajian yang dilakukan

oleh lembaga khusus dari berbagai perguruan tinggi. Menyebutkan beberapa penulis – dalam lingkup kajian lintas iman- di antaranya:

1. Prof. Al Makin

   Prof Al Makin mengkaji Pancasila dalam tiga pandangan tokoh: Mukti Ali, Munawir Sjadzali, dan Drijarkara.

2. Dr. Yudi Latief

   Dalam berbagai kesempatan seminar dan dalam bukunya, Dr. Yudi Latif memperlihatkan alur pemikiran bagaimana sila-sila Pancasila sebagai ideologi ditempatkan dalam sebuah kompleksitas yang komprehensif. Bertolak dari pemikiran, bergerak dalam proses berkelanjutan. Pancasila bergerak dalam 3 aras yang memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Demikian pun dan sila-silanya memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas dan aktualittas. Pemkiran akan menjadi operasional karena dilanjutkan, didukung diwujudkan dalam institusi pendukung. Berikutnya akan terjelma di dalam praktik dalam ruang lingkup aras mendasar yang termuat dalam sila-sila Pancasila itu.

3. Prof Ahmad Syafii Maarif,

   Salah satu buku yang ditulis adalah *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemannusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (2009). Dalam pembahasannya, Buya Syafii Maarif menempatkan Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi da-

lam masalah besar bangsa dan negara Indonesia. Menempatkan Islam yang bersahabat dan dinamis dengan lingkungan kultur, subkultur, dan agama yang beragam. Islam yang memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan kepada semua orang yang berdiam di Nusantara tanpadiskriminasi agama.

4. Mgr. I Suharyo

   Dalam bukunya *The Catholic Way Kekatolikan dan Keindonesiaan kita* (2009), Mgr. I Suharyo memperlihatkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, dari masalah korupsi, kemiskinan, kesamaan derajat perempuan, sampai krisis lingkungan. Bagaimana permasalahan tersebut perlu didalami untuk dihadapi bersama oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Negara yang salah urus akan menimbulkan berbagai penyelewengan korupsi dan berbagai power abused. Sekaligus mengajak untuk tidak terjebak dalam penyelewengan dalam kelompok mau pun individu.

Para pemikir dan tokoh pemimpin agama tersebut mengupayakan bagaimana nilai-nilai ideal dalam hidup berbangsa dan bernegara mempunyai kaitannya dengan konteks aktual yang diperjuangkan dalam situasi saat ini. Tanpa menjadi eksklusif, tapi dihayati dalam masyarakat majemuk Indonesia.

Beberapa pemikir lain menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif ilmu tertentu (Jusuf, 2018), termasuk mempertemukan dengan jagad pikir dari dunia

pewayangan (Anton, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, berbagai seminar dan kajian Pancasila juga terus diselenggarakan oleh berbagai pusat yang ada di perguruan tinggi.

Agama tidak hanya ajaran yang mengacu pada sumber iman kitab suci dan tafsirnya, mau pun tradisi awali yang membangun komunitas awal jemaah khusus dari berbagai komunitas agama yang ada. Orientasi ortodoksi – memang mengacu kepada pandangan dan sikap yang akan menempatkan pada iman yang mencari pertanggungjawaban rasional. Teologi, tauhid sebagai yang menjaga ortodoksi, akan menempatkan diri di sana. Sebagai salah satu sumber acuan. Membangun dasar *kesetiaan* (beriman) sebagai unsur *fidelity,* kesetiaan kepada akar.

Penghayatan agama juga akan menempatkan pada hal yang terkait dengan praksis. Semua agama, dan kepercayaan akan menempatkan pelaku yang menghayatinya untuk jaman sekarang. Sehingga ortodoksi akan dilengkapi dengan ortopraksis. Fokusnya bukan lagi pada iman yang mencari pertanggung jawaban. Melainkan, memberi penekanan pada bagaimana orang beriman mempertanggung jawabkan tindakannya. Dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, terdapat inisiatif, kreativitas yang dilakukan oleh orang beriman, subyek pemeluk agama. Kedua aspek ortodoksi dan ortopraksis, dalam bahasa popular yang sederhana menjadi *creative-fidelity* (kesetiaan kreatif).

Tidak kurang berbagai lembaga keagamaan mengadakan pengkajian tentang posisi lembaga keagamaan

berhadapan dengan Pancasila. Ini berlangsung di dalam periode sejarah yang berlainan. Dalam masa rejim Orde Lama dan masa rejim Orde Baru masing-masing memiliki dinamika yang berbeda (Picard, 2007). Saat pemerintahan Orde Baru akan mengesahkan azas tunggal dalam berorganisasi merupakan suatu masa intensif di mana berbagai komunitas dan lembaga keagamaan mengadakan perumusan untuk menempatkan Pancasila dalam kehidupan beragama.

Dengan demikian terlihat, konteks masing-masing periode dengan berbagai dinamikanya telah menghasilkan berbagai pembahasan tersendiri sekaligus menghadirkan kontinuitas dan diskontinuitasnya. Tentu akan menghasilkan pembacaan yang beragam maknanya.

### Melacak Nalar Rasa

Sejumlah pelacakan baik yang terkait dengan pengalaman hidup dan sejarahnya telah dikemukakan. Kendati pun demikian, seakan masih belum mengerucut. Memang bukan itu tujuannya, melainkan menghadirkan dinamika yang beragam dengan kontinuitas dan diskontinuitasnya. Untuk membantu memahami uraian yang ada perlu dikemukakan satu hal. Yang dimaksudkan dengan nalar di sini, lebih dikaitkan dengan cara pikir dengan prosesnya, memperhatikan pihak yang berbicara dan perspektifnya. Sebagaimana ditunjukkan komunikasi dan kultur yang terbangun, peradaban telah dibangun dengan cara komunikasi lisan, tulisan dan visual. Pada ketiga cara komunikasi tersebut, kultur yang dihasilkan juga memiliki perbedaan. Tradisi cara komunikasi lisan (*etos*) akan menghasilkan

nalar yang ditempatkan pada etos dan karisma. Pada tradisi cara komunikasi tulisan (*logos*) akan menghasilkan nalar yang memberi penekanan pada klasifikasi obyektif masuk akal, logika dapat dipahami dan dirunut. Pada tradisi cara komunikasi visual (*patos*), akan ditekankan pada unsur ikut serta terlibat merayakan kehidupan dan partisipasinya di dalam kehidupan yang berlangsung.

Dengan memperhatikan cara komunikasi yang disebut di atas, wilayah ekspresi yang hadir di dalam pertunjukan wayang dengan tiga (3) dalang merupakan bagian yang ada di dalam seni pertunjukan sebagai kesatuan kompleks dan kaya. Ekspresinya merupakan bagian tradisi visual (dengan media wayang), tuturannya dengan cara lisan. Bahkan didukung dengan seni musik sebagaimana hadir dalam iringan gamelan. Itulah kekayaan pertunjukan wayang. Sekaligus, di dalamnya ada tradisi sastra tulis yang mendasari cerita yang diacu wayang purwa. Di situlah kekayaan pertunjukan wayang dengan berbagai unsurnya.

Pelacakan lain yang diketengahkan berasal dari wilayah akademik yang menempatkan pada tradisi cara komunikasi tulis. Sebagaimana ditunjuk pada berbagai aktivitas para tokoh yang disebut dengan berbagai rujukan karyanya. Mengingat tradisi cara komunikasinya berada pada wilayah tulis, jejak penalarannya dengan nalar logis dapat ditemukan pada tulisan yang dibuatnya. Cakupan yang berbeda itu, dapat menunjukkan bahwa potensi, produksi dan pendistribusian pengetahuan Pancasila dapat ditempuh dan ditumpukan baik

pada tradisi tulis, tradisi lisan mau pun seni pertunjukan.

## Yang Berakar Sekaligus Tetap Aktual

Wilayah rasa yang disentuh bagi kita mencakup sejumlah hal. Untuk menyebut beberapa tokoh karismatis dalam bidang budaya dan pendidikan, berikut ini ditempatkan tokoh khusus. Ada satu ungkapan yang dinyatakan Sulltan Hamengku Buwana IX ditujukan kepada Ki Hadjar Dewantara karena kiprahnya dalam dunia pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan Indonesia *"Memayu Hayu Salira, Memayu Hayu Bangsa, Memayu Hayu Manungsa"*. Keterlibatan Ki Hadjar Dewantara dimaknai: dalam upaya memperkembangkan pribadi seseorang, atau peserta didik, juga ditujukan untuk mengembangkan pembentukan dan kehidupan bangsa. Sekaligus, mencakup sumbangan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal, berlaku untuk seluruh dunia. Pokok-pokok tersebut juga merupakan pesan luhur berbagai agama dan kepercayaan yang hidup di bumi Nusantara ditujukan kepada orang beriman, pemeluk agama atau kepercayaan apa pun.

Apresiasi yang diketengahkan oleh Sultan Hamengku Buwono, berangkat dari paradigma berpikir dan sekaligus yang dihayatinya. Kita mengenal satu hal mendasar dari raja Mataram adalah filosofi *"memayu hayuning bawana"* (ikut terlibat membangun, merawat keindahan dunia). Paradigma inilah yang kemudian dikenakan kepada Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan dan kebudayaan. Yang semula *"memayu hayuning bawana"* menjadi *"Memayu Hayu Salira, Me-*

*mayu Hayu Bangsa, Memayu Hayu Manungsa"* (terlibat membangun pribadi, bangsa, dan umat manusia/kemanusiaan).

Ada jejak berpikir yang secara konsisten dapat dilacak dari kedua tokoh tersebut. Dan, tentu juga dalam kebijakan yang dibuatnya di dalam tugas-tugas yang diembannya. Tidak terjadi *split personality*, melainkan pribadi yang integral sebagai manusia Indonesia.

Inilah salah satu hal yang dapat ditempatkan di dalam paradigma nalar rasa. Bukan cita rasa. Orang Jawa yang tidak terkungkung dengan kejawaannya, melainkan dapat leluasa menjangkau keluar dari yang ada di dalam dirinya. Memiliki kekokohan karakter. Sekaligus aktual menjawab tantangan jaman. Keberakaran, tapi sekaligus relevan menjawab tantangan situasi. Istilahnya kesetiaan kreatif. Itulah yang dihadirkan dalam kedua tokoh Sultan Hamengku Buwono IX dan Ki Hadjar Dewantara.

**Di Mana Akar Ditempatkan**

Dalam lambang negara Garuda Pancasila, ditempatkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Berbagai kajian Pancasila secara khusus juga mendalami ungkapan tersebut. Asal usulnya ditemukan di dalam kitab *Kakawin Sutasuma* karya Mpu Tantular dari abad XIV. Salah satu kekayaan dari akar sejarah bersumber dari teks sastra yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama bangsa Indonesia.

Satu lacakan lain, dalam buku *Riwayat Indonesia* (1952), Prof Poerbatjaraka menunjuk pada prasasti per-

tama yang ditulis dengan candra sengkala. Yang disebut adalah prasasti di Candi Cemanggal, wilayah Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berangka tahun 654 Saka, 732 Masehi, dihadirkan dengan candra sengkala. *Shruti indriya rasa* menandai angka tahun yang dihadirkan dengan aksara simbolis yang menunjuk sekaligus menyembunyikan.

*Shruti indriya rasa* menjadi rujukan. Di sini dapat ditempatkan sebuah paradigma, suatu kerangka berpikir dan pengungkapannya yang telah sekian lama dimiliki bangsa Indonesia. Seperti halnya ungkapan atau semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang diambil dari *Kakawin Sutasuma*. Ungkapan atau rumusan *Shruti indriya rasa* dipilih dan ditempatkan sebagai tonggak dalam membangun nalar rasa. Inilah yang ditempatkan sebagai kerangka dasar berpikir dengan berbagai unsur yang menjadi pendasarannya dalam membangun nalar rasa. Sebuah skema terkait *shruti indriya rasa* ditempatkan sebagai sebuah paradigma untuk pembacaan teks dan mengolah pengalaman. *Shruti* sebagai tahapan pembacaan teks mempunyai sejumlah metode cara baca. *Indriya* menempatkan berbagai ilmu bantu yang menyertai pembacaan teks tersebut. Keduanya akan mengerucut pada *rasa* (Subangun, 2018).
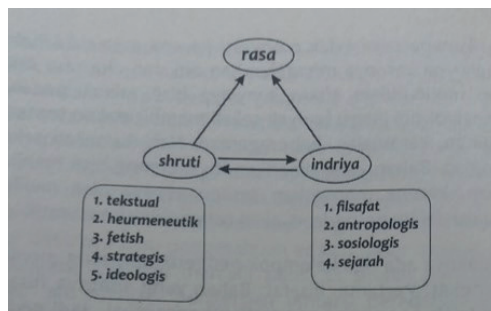
Dari proses berpikir yang menggunakan paradigma itu akan sampai terjelma dalam membangun kebijakan. Pada tahap lebih lanjut akan menjamin dan memberi garis praktik kehidupan sehari-hari. Sekaligus masuk akal. Sekali lagi *shruti indriya rasa* memiliki tempatnya untuk memposisikan berbagai hal yang disebut di atas, dalam sebuah struktur yang dapat dilihat bersama. Hal tersebut dapat diarahkan untuk tidak membuat simplifikasi yang menimbulkan kerancuan dan tidak adanya ideologi yang dapat dipegang. Sebagai bagian dari warga negara, dan warga masyarakat, sebagai warga dunia bersama manusia yang lain.

**Produk Citraan yang Tidak Sesuai**

Era global telah menempatkan semua bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia serba terhubung dengan berbagai pihak lain. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Sarana transportasi telah mempermudah dan mempercepat untuk berpindah tempat. Mobilitas menjadi sangat mudah dan cepat. Sarana teknologi informasi demikian juga. Tempat, jarak dan waktu menjadi mampat. Tidak berjarak (*borderless*), dan waktu kerangkanya ada dalam hitungan *real time*. Semangat untuk membeli untuk mengkomsumsi segala macam produk juga tidak terbatasi. Semua seakan menjadi tanpa batas, tanpa sekat.

Pada saat yang sama, terjadi pengalaman atau perasaan yang sebaliknya. Saat ini, kita menjadi terasing dan berjarak, bahkan kebingunan untuk menempatkan diri karena selalu meminjam. Banyak yang diacu, dan sekaligus tidak mendarat, tidak berakar pada

peradaban yang telah memiliki sejarah, dan berakar mendalam. Harta milik sendiri telah terpendam sedemikian lama.

Ada berbagai kritik tajam hadir melalui banyak cara, dan beragam ungkapan. Dapat dilacak melalui stiker dengan berbagai slogan, dalam nyanyian anak-anak muda, atau.dalam media sosial terungkap dalam *meme*. Ungkapan yang ada beragam isinya termasuk menjadi kritik yang menghunjam. Kritik terhadap budaya barat, Amerika *minded,* atau apa pun yang lain.

Ini juga berlaku pada penggunaan ungkapan "Bhineka Tunggal Ika" yang ditempatkan dalam simbol Garuda Pancasila. Kebhinekaan menjadi tenggelam digantikan multikultur dan sebagainya. Atau kebhinekaan menjadi tenggelam, dan akan menjadi tidak relevan karena akan digusur oleh satu budaya dominan yang dipaksakan dengan aneka ragam pembodohan dan pendangkalan hidup bersama. Seperti halnya dengan syair lagu, slogan, atau yel-yel yang telah dikenalkan pada anak-anak *"Kafir no, Islam yes!"*

Dalam keterombang ambingan, serba ambigu, tidak jelas, atau mendua, dibutuhkan kerangka untuk memahami berbagai hal tersebut. Dalam kaitan dengan hidup berbangsa, dibutuhkan perangkat untuk memahami kembali melalui kejelian dan pencermatan terhadap pengertian ideologi dan praktik hidup dengan berbagai implikasinya.

Ini perkara ideologi yang mulai dikenalkan, ditanamkan, dibatinkan dengan nyanyian dan yel-yel. Hal inilah

yang dipraktikkan pada anak-anak di berbagai tempat dan dilakukan melalui lembaga pendidikan, lembaga gerakan masyarakat seperti Pramuka dan lain-lainnya. Tentu hal demikian sangat berlawanan dengan berbagai nilai dasar, prinsip dasar bertindak sebagaimana diurai oleh para pemimpin dan pemikir yang telah diuraikan di atas. Sebagaimana disebutkan di atas, bagaimana ideologi yang bermula dari sistem gagasan, abstraksi ideal sampai pada citraan-citraan. Karenanya, dalam rangka menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara dan pendangan hidup bangsa, usaha untuk mengajarkan, menanamkan dan menegakkannya, berarti butuh pencermatan, dan pencegahan, bahkan sanksi untuk penegakan nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Demikian pun ramuan yang dilakukan dengan menempatkan ideologi dalam satu keranjang – dimetaforkan sebagai empat (4) pilar sebagaimana disebut dalam catatan kaki di atas. Keprihatinan terhadap kelangkaan pendidikan ideologi, tidak dapat serta mencampur adukkan. Tetap perlu ditata sebagai bagian integral, sekaligus menempatkannya dalam proses bernalar yang dapat dipertanggung jawabkan.

*Tidak hanya berhenti di situ.* Pengalaman yang menjadi landasan partisipasi aktual beserta pengolahannya dengan daya intelektualitas manusia seakan belum tersentuh di dalam pengertian *shruti indriya rasa.* Pelacakan teks yang lain akan menempatkan bagaimana pengalaman hidup yang diolah sampai membentuk pengetahuan menjadi dasar yang tidak terelakkan.

*Sang Hyang Kamahayanikan* (SHK) karya sastra abad X menempatkan di dalam paradigma *panca skanda* yang menunjuk pada kemampuan dasar daya-daya jiwa manusia. Kitab *Sang Hyang Kamahayanikan* (SHK) memuat rahasia (*guhya*). Pada satu sisi ajarannya dituliskan. Pada sisi lain, ada juga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru secara lisan.

Dalam teks kitab suci, *panca skanda* menjadi jalan pengenalan dunia benda. Ini akan terkait dengan laku tapa dan meditasi karena itu merupakan hal pokok. Tata laku tapa dan meditasi merupakan jalan olah rohani sampai penghayatannya. *Winaya* yang memuat aturan pelaksanaan ajaran Buddha akan menuntun bertutur baik dan berperi laku baik (SHK 25). Dengan pokok etisnya *cila* (kebajikan), *sammadhi* (memusatkan pikiran yang baik) dan *prajna* (kebijaksanaan) (SHK 37).

Dalam menyusun pengetahuan, *panca skanda* secara berjenjang merupakan proses mengolah pengalaman yang akhirnya membentuk pengetahuan dan kebijaksanaan hidup. Mulai dari (*nama*) *rupa* yang menunjuk pada pengalaman hidup sebagai hal yang mendasar. Secara berjenjang *panca skanda* akan menunjuk dan menempatkan pada seluruh daya-daya jiwa yang dimiliki setiap orang. Pengalaman yang menjadi dasar pengetahuan pada tingkat pertama diolah oleh kemampuan indrawi (pancaindra) akan membangun sensasi: mendengar, melihat, meraba, mencecap, membaui (*wedana*). Selanjutnya, tahap pembentukan persepsi yang menyusun berbagai agraget dari gejala-gejala yang dialami sebelumnya. Di dalamnya, penyusunan persep-

si disertai unsur pengenalan umum termasuk ingatan, antara lain terkait hukum alam seperti gravitasi untuk memahami benda jatuh yang mengakibatkan suara (benda jatuh) yang ditangkap pendengaran. Tahap ini disebut dengan istilah *samjnana* - persepsi. Persepsi yang terakumulasi akan membangun *samkara* - kesadaran. Kesadaran yang dimiliki yang terus menerus diolah, dan dilatihkan akan sampai pada *vijnana* – pengetahuan, kebijaksanaan. Panca skanda akan bergerak pada sumbu vertikal mengikuti proses dalam aras – pengetahauan, estetika dan kosmik/ waktu.

## III. Penutup

Demikianlah *nalar rasa* memperoleh pendasarannya. Dasar paradigma atau kerangka berpikirnya dapat ditempatkan pada *shruti indriya rasa* dan *panca skanda*. Di dalamnya nilai-nilai luhur dapat disusun untuk membekali dan membentuk pengetahuan, dengan berbagai macam citraan perwujudan praktiknya. Mengajarkan dan membentuk kebenaran, sekaligus dialami karena hadir dalam kebajikan, terungkap dalam ekspresi keindahan. Dalam serba neka kekayaan budaya Indonesia. Inilah perangkat yang digunakan menggambar wajah Pancasila. Wajah manusia Indonesia. Dari dulu, saat sekarang ini. Dan masa yang akan datang. Mengarungi jaman digital dengan implikasinya. Sebagai manusia Indonesia yang hidup dengan dasar Pancasila.

## Referensi

Althusser, Louis. P., *Lenin and Philosophy and other Essays*, New York and London, Monthly Review Press, 1971.

Buana, Stefan Buanadalam *Katalog Jogja Art Fair 01*, 2008.

*Buku Peringatan 60 Tahun Tamansiswa 1922 – 1982.*

Conners, Thomas J., et.al. Eds, *Pancasila's Contemporary Appeal: Re-legitimizing Indonesia's Founding Ethos*, Yale Indonesia Forum Penerbit USD, 2010.

Djuwardi, Anton, *Model Manajemen Indonesia Berdasarkan Konvergensi Budaya Wayang dengan Manajemen Menuju Nilai-nilai Dasar Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2015.

Hidayat, Nanang R., *Mencari Telur Garuda*, Jakarta, Penerbit Nalar, 2008.

Indonesia Forum, Penerbit USD, 2010.

*Kitab Suci Sanghyang Kamahayanikan. Naskah – Terjemahan – Penjelasannya*, Panitya Penyusun Penerjemahan Sanghyang Kamahayanikan, 1973.

Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemannusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah.* Bandung: Mizan Pustaka. 2009.

Mrican, *Pagelaran Kolaborasi Wayang Suket, Wayang Purwa & Wayang Garuda "Bima Suci"* (Video), Youtube, https://youtu.be/oRCRIE9xzPs, 30 Juni 2020.

Picard, Michael "From Agama Hindu Bali to Agama Hin-

du and back: toward a relocalization of the Balinese religion?” dalam Michel Picard, Rémy Madinier i(ed), The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali, London. Routledge. 2011.

Purnomo, Haris dalam *Katalog Ruang dan Waktu*, V Art Gallery Café, 2008.

Seno, Dalang, #*LiveStreaming* Pagelaran Kolaborasi Wayang Suket, Wayang Purwa & Wayang Garuda - Bima Suci (Video). Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=smaSyIukmPQ, 1 Juni 2020.

Subangun, Emmanuel, *Membaca Ulang Serat Centhini Melacak Waringin Sungsang,* Yogyakarta, Penerbit USD, 2018.

Suharyo, Mgr. Ignatius, *The Catholic Way Kekatolikan dan Keindonesiaan kita.* Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Sunardian Wirodono, *Elisha Orcaris Kutbah Corona mbek Bung Karno dalam Wayang Suket* (Video), Youtube, https://m.youtube.com/watch?v=vSvNi-8YLFnk, 6 Juni 2020.

Sutanto, Jusuf, *Pancasila The Science of Relationship*, Jakarta, Idemedia Pustaka Utama, 2018.

Villa, charlec dan Videncio (ed), *Looking Back Reaching Forward* terbitan University Cape Town Press, 2000.

# EPILOG

Pemikiran-pemikiran yang telah dituliskan di dalam buku ini telah merefleksikan bagaimana sesungguhnya agama dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia mengkonsepsikan secara epistemologis, Pancasila sebagai seperangkat nilai dimata agama dan kepercayaan di Indonesia.

Nilai-nilai (*values*) merupakan sesuatu yang abstrak, ada dalam pikiran manusia. Nilai-nilai (*values*) memuat tuntunan tentang bagaimana suatu kehidupan harus dijalankan supaya menjadi baik. Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila sebagai seperangkat nilai-nilai, dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran-pemikiran (*a set of ideas*) yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai yang menuntun bagaimana tata masyarakat adil dan makmur harus dijalankan guna mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melandaskan pada keyakinan bahwa manusia sejatinya diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, karena

secara sama mereka adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan keyakinan itu, maka nilai-nilai: religiusitas, keadilan, gotong royong, musyawarah, dan mengakui keberagaman sebagai kodrat, menjadi utama bagi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup yang menyejarah dan bersumber dari: (1) religiusitas bangsa Indonesia; (2) adat istiadat; (3) kearifan lokal; (4) pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan; (5) budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa; (6) konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia.

Dari pemikiran-pemikiran yang telah dituliskan dalam buku ini, tersimpulkan bahwa dalam cara berpikir Indonesia, realitas tidak dimaknai dengan dominasi logika empiris (faktual), tetapi selalu diseimbangkan dengan melibatkan aspek-aspek keilahian (religiusitas). Humanisme dalam perspektif cara berpikir Indonesia dikonsepsikan sebagai semangat yang mengutamakan kemanusiaan serta dilandasi semangat gotong royong. Keyakinan humanisme bangsa Indonesia berangkat dari cara berpikir bahwa seorang individu adalah makhluk, bagian dari masyarakat secara keseluruhan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Ketika mendirikan Negara Indonesia, para pendiri Negara Indonesia mendasarkan pada cara berpikir dan realitas hubungan sosial dalam masyarakat yang telah ada, tetapi sekaligus terbuka terhadap perkembangan ketatanegaraan yang berkembang pada masa itu.

Hasilnya adalah Negara Indonesia yang bukan negara sekuleristik, tetapi juga bukan negara agama. Indonesia, sebagai sebuah negara, merupakan negara modern, negara berbentuk republik, penyelenggaraannya berdasarkan supremasi hukum (nomokrasi) dan kedaulatannya di tangan rakyat (demokrasi).

Serangkaian deskripsi historis menunjukkan bahwa para pendiri negara bangsa Indonesia telah memilih corak negara-bangsa, dan meninggalkan cita-cita sebagai negara berdasarkan atas agama. Di sisi lain, Indonesia bukan negara sekuler, karena bangsa Indonesia tidak pernah sekalipun meninggalkan tuntunan moralitas yang bersumber dari agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa oleh karena manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jelas bahwa kebijaksaan manusia yang bersumber dari pengalaman inderawi dan akal, tidak akan sempurna atau mendekati kebenaran sejati apabila tidak mengintegrasikan etika dan pengalaman akal budi. Itulah pentingnya kehadiran agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menyeimbangkan rasionalitas dengan akal budi, hingga menghasilkan tuntunan baik untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan konkret.

Pemikiran-pemikiran bernas yang dimuat dalam buku ini telah merefleksikan bagaimana sesungguhnya agama dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indo-

nesia mengkonsepsikan secara epistemologis, Pancasila sebagai seperangkat nilai dimata agama dan kepercayaan di Indonesia. Bertumpu dari perspektif epistemologis itu, ke depan harus dapat dirumuskan prinsip-prinsip dasar hubungan agama, dan kepercayaan yang ada di Indonesia dengan Pancasila. Prinsip-prinsip dasar yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, diharapkan akan menjadi landasan untuk menyusun agenda-agenda konkret yang mewujud dalam kebijakan dan regulasi, studi-studi, pendidikan dan kebudayaan, sebagai landasan untuk mengelola kehidupan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia.

Jakarta, 6 Desember 2020

**Adji Samekto**

# BIODATA SINGKAT PENULIS

**Prof. Dr. H. Machasin, MA.** Lulusan S1 jurusan Sastra Arab, magister dan doktor dalam kajian Keislaman IAIN Sunan Kalijaga. Mengajar ngaji dijalaninya dari kecil, bahkan sebelum masuk Pendidikan Guru Agama, sampai sekarang melalui live streaming di Face Book. Pernah menjadi profesor tamu (jabatan *la chaire sécable*) di École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris tentang Islam di Indonesia, ia menerjemahkan dan mengedit beberapa buku keislaman dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Selain pemerhati kebudayaan dan pemikiran Islam, ia aktif dalam dialog antar agama dan menjadi anggota Executive Committee dari Asian Conference of Religion for Peace yang berpusat di Tokyo. Selain itu, ia memberikan ceramah keislaman dan khutbah Jumat di Yogyakarta. Setelah delapan tahunan bekerja di Kementerian Agama RI dari jabatan Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kepala Badan Litbang dan Diklat sampai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan HAM dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, ia kembali bekerja sebagai profesor Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sejak 2016 sampai sekarang.

**Dr. Phil. Sahiron, M.A.** Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan periode 2016-2020 dan 2020-2024. Menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993). Kemudian melanjutkan studi S2 di McGill University, Kanada (1998) dan meraih Ph.D. di Otto-Friedrich University of Bamberg, Jerman. Tahun 2010 mendapatkan penelitian *postdoctoral* di University of Frankfurt. Banyak menulis buku dan artikel baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

**Dr. Moh Tamtowi, M.Ag**. Dosen Filsafat Hukum Islam pada Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah tentang harmoni syari`ah dan falsafah, Fiqh Minoriras, perda syaria'ah dan gerakan khilafah Islamiyah di kampus. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan antara lain, bersama koleganya, mendirikan lembaga pendidikan dan yayasan Pesantren Peduli Ummat (P2U). Sejak 2020, ia dilantik sebagai ketua Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Dr. Leonard Chrysostomos Epafras.** Dosen dan Peneliti di Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), dan di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada. Bidang penelitian: Agama Daring (Religion Online), Kajian Lintas Agama, dan Agama Yahudi. Penerima beberapa fellowship termasuk di antaranya Fulbright, Endeavour, Henry Luce Founda-

tion, United Boards, dan Sadra Fellowship. Karya akademik dapat diakses di: https://leonardchrysostomosepafras.academia.edu. Dr. Leonard dapat dikontak di: leonard_epafras@staff.ukdw.ac.id.

**Dr. Baskara T. Wardaya,** mendapat gelar Sarjana Muda dari Sekolah Tinggi Filsafat "Driyarkara" (Jakarta) dan Universitas Sanata Dharma (Yogyakarta). Gelar Master dan Doktor dalam bidang Sejarah ia peroleh dari Marquette University di Amerika Serikat. Sejak tahun 2002 ia mengajar Sejarah dan Kajian Budaya di Universitas Sanata Dharma (USD). Tahun 2004-2005 mendapatkan beasiswa *Fulbright* untuk melakukan penelitian *postdoctoral* di Amerika Serikat, dan untuk mengajar di University of California-Riverside, Amerika Serikat, 2011-2012. Tahun 2014 menerima *grant* dari AIFIS (American Institute for Indonesian Studies) untuk melakukan penelitian di Amerika Serikat. Ia juga menjabat sebagai Kepala PUSDEMA (Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia) USD. Email: baskaramu@yahoo.com.

**Dr. I Gede Suwindia, M.A,** adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja Bali. Kelahiran 29 Nopember 1976. Alumni S2 dan S3 Center for Religious and Cross Cultural Sudies (CRCS) Universitas Gadjah Mada. Konsern meneliti, mengajar pada kajian sosial dan agama serta humaniora pada kampus STAHN dan IHDN Denpasar.  Peneliti Relasi Islam dan Hindu Dalam Perspektif Masyarakat Multikultur di Bali, Pluralitas Umat Beragama di Bali, Kajian Naskah-Naskah Kasuwakan, dapat diakses pada igedesuwindia.ihdn-

denpasar.ac.id. Penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan sosial keagamaan dalam KMHDI dan ikut menjadi bagian dalam pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi di Bedugul Bali. Pernah menerima Hibah Penelitian Puslitbang Kementerian Agama RI, *Sandwich* Program ke Universitas Leiden Belanda.

**Dr. Drs. I Wayan Wastawa, M.A.** Dosen dan Peneliti di Fakultas Dharma Duta dan Program Pascasarjana, Program Studi Komunikasi Hindu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Bidang Penelitian Agama dan Sosial Budaya. Karya Akademik dapat diakses di Google Scholar. Dr. Wayan Wastawa dapat dikontak di: baliva65@yahoo.com.

**Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja**, adalah Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI), dan juga Ketua/Rektor Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Samantabadra-NSI. Anggota Tim Perumus PB Menag Dan Mendagri Nomor 9,Nomor 8 Tahun 2006 dari unsur agama Buddha. Penerima Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Aktif di Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI sebagai tokoh agama Buddha. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bogor (sesuai domisili tempat tinggal). Aktif menjadi narasumber di forum-forum keagamaan internasional: World Summit 2020 Universal Peace Federation (UPF), di Seoul, Korea Selatan, Combating Online Religious Hate Speech in Indonesia 2018, oleh National Democratic Institute (NDI) di Jakarta, International Conference on ASEAN Buddhist

Youth 2018, di Yogyakarta oleh Kemenpora RI, Dialog Lintas Agama Mengenai Krisis Kemanusiaan Rohingya oleh KAIICID tahun 2017 di Jakarta, Interreligious Dialogue in South and South East Asia, Mahidol University, Bangkok, Thailand, tahun 2017 oleh KAICIID. Mitra strategis KemenLHK RI sebagai pelopor Gerakan Vihara Ramah Lingkungan di Indonesia pada tahun 2015. Ceramah Dharma beliau dapat dilihat di kanal media YouTube: https://www.youtube.com/user/NicirenSyosyuIndo

Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja dapat dihubungi melalui alamat email: suhadi.sendjaja@gmail.com dan/atau suhadi.sendjaja@nsi.or.id

**Budi S. Tanuwibowo**, Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Wakil Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Pendiri dan Pembina Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Ketua Harian Persatuan Xiangqi Indonesia, penulis buku 8x3=23!, 5 Matahari, Tuhan Sudah Pindah Alamat?, Ada Tiada-Tiada Ada, Berani tidak Populer, dll.

**Kristan**, meraih gelar Magister Studi-studi Agama dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini sebagai pengajar *Character Building* di Universitas Bina Nusantara dan pengajar Confusianisme di Universitas Negeri Jakarta dan IBIK Kesatuan Bogor serta dosen tamu diberbagai universitas di Indonesia. Pada tahun 2009, Kristan mewakili Republik Indonesia sebagai delegasi Indonesia dalam Forum Dialog Lintas Agama Regional ke-5 “Lead-

ing Leaders of the Future. Faith: Regional Challenges and Collaboration ‘di Perth, Australia Barat. Kristan juga merupakan Alumni *Fellowship* King Abdulah Bin Abdul Aziz International Center of Interreligius and Intercultural Dialogue (KAICIID) 2016-2017, Vienna, Austria dan juga almuni Mindanao Peace Building Institute (MPI) 2016, Davao, Filipina. Pada 2019 Kristan menghadiri acara International Conference on Cohesive Societies (ICCS) di Singapura dimana ini menjadi konferensi terbesar bagi para penggiat Dialog Antar Agama dan Aktivis Perdamaian. Saat ini Kristan sebagai Ketua Umum Generasi Muda Khonghucu Indonesia (GEMAKU). Tentang karya-karya Kristan dapat lebih lengkap diakses pada link  www.kristan.me

**Sasmito Gati.** Lahir di Kulon Progo 10 September 1974. Ketua PEBM (Persatuan Eklasing Budi Murko) cabang Kulon Progo periode 2019-2024. Seksi Pemuda Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kulon Progo periode 2020-2025. Ketua Kube Maju Bersama periode 2017-2022. Wakil ketua Persatuan Bengkel Motor Kulon Progo (PBMK) periode 2017-2022.

**Pendeta Dr. Andreas A. Yewangoe**. Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi “Moriah” di Gading Serpong; anggota Dewan Pengarah BPIP; Ketua Pembina Lembaga Alkitab Indonesia. Giat menulis di bidang teologi, keagamaan, dan kemayarakatan. Dr. Yewangoe dapat dikontak di aayewangoe@gmail.com.

**Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H.** Saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pem-

binaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Lahir di Yogyakarta, 18 Januari 1962. Menempuh pendidikan formalnya (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1981-1986. Menekuni dunia pendidikan hukum dengan menjadi dosen di almamaternya sejak tahun 1987 di bidang kajian hukum internasional. Menempuh pendidikan Magister (S-2) di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1991-1995 pada bidang kajian utama hukum internasional. Pengkajian hukum secara komprehensif dengan melibatkan faktor di luar ranah kajian positivistik, diperdalam ketika menempuh pendidikan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro tahun 1999-2004. Aktif dalam penulisan masalah hukum internasional dan hukum lingkungan yang dituangkan, baik dalam buku maupun tulisan di media massa. Mengajar di Program S-1 dan S-2 di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Tengah.

**Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.** Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020-2024. Menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996). Kemudian melanjutkan studi S2 di *The Institute of Islamic Studies, McGill University*, Kanada (1999), dan meraih S3 di Universitas Heidelberg, Jerman (2008). Salah satu pendiri portal jurnal Kementrian Agama Moraref (*Ministry of Religous Affairs Reference*) dan juga tercatat sebagai anggota ALMI (Asosiasi Ilmuwan Muda Indonesia) sejak 2017. Aktif sebagai peneliti dan dosen tamu di beberapa universitas mancanegara, an-

tara lain: *University of Western* Sydney, *Australia, Heidelberg University,* Jerman, *Asia Research Institute*, *National University of Singapore, French Business School ESSEC,* Asia Pacific, Singapore, *Bochum University*, Jerman, dan *McGill University*. Aktif menulis artikel di jurnal internasional dan tulisan populer di koran.

**Dr. Muhammad Sabri, M.Ag.** Dosen tetap Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Saat ini menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Aktif menulis gagasan-gagasan terkait kajian pancasila dan kearifan bangsa Indonesia yang banyak dijumpai di sejumlah media cetak dan online di Makassar sebagai kolumnis tetap.

**Dr. H. Fahruddin Faiz, M.Ag.** Lahir di Mojokerto Jawa Timur pada 16 Agustus 1975. Menempuh pendidikan S1 hingga S3 di UIN Sunan Kalijaga bidang studi Islam. Saat ini merupakan Dosen di program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping aktivitas sebagai dosen, juga menjadi pengasuh forum kajian filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta yang dikenal dengan nama "Ngaji Filsafat". Dalam dunia kepenulisan, Fahruddin Faiz cukup aktif menulis. Selain tulisan-tulisan di berbagai jurnal ilmiah, juga buku-buku dalam genre filsafat dan studi Islam.

**Arya Prasetya, S.M.B., S.Pd.B., M.I.KOM., M.Si.,** adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Samantabadra-NSI, Jakarta. Menyelesaikan studi sarjana manajemen bisnis di Universitas Telkom, Band-

ung dan sarjana pendidikan Buddha di STAB Samantabadra-NSI, Jakarta. Ia menyelesaikan studi magister ilmu komunikasi (studi media) di Universitas Pelita Harapan, Jakarta dan magister sains dalam bidang Pengkajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia, Jakarta dengan predikat *cumlaude*. Alumni Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Selain sebagai dosen beliau juga dipercaya menjadi Kepala Hubungan Eksternal Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI) untuk membangun dan membina hubungan dengan masyarakat lintas agama dan juga pemerintah baik di dalam maupun di luar Indonesia. Aktif dalam mengisi forum kepemudaan lintas agama sebagai narasumber dari unsur agama Buddha.

Arya Prasetya dapat dihubungi melalui alamat email: prasetya.arya0104@gmail.com dan/atau arya.prasetya@nsi.or.id

**Gregorius Budi Subanar.** Staf Pengajar Pascasarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

# Index

## A



## B

**E**

## F



## G



## H



## I



## K

## Q



## R



## S



## T

“...pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sebagai yang kita kenal di dalam agama, agama kita. Dan ***formulering*** Tuhan Yang Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia ini"

*Pidato Soekarno di Istana Negara, 16 Juni 1958*

*Diterbitkan atas kerja sama:*